



EVALUASI RKPD

TAHUN 2026

TRIWULAN II

KABUPATEN KUTAI TIMUR



MENUJU **KUTAI TIMUR**
YANG BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA

2026

BAPPEDA
KABUPATEN
KUTAI TIMUR



EVALUASI RKPD

KABUPATEN KUTAI TIMUR 2026 TRIWULAN II

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen *Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 triwulan II* ini dapat disusun dengan baik.

Dokumen evaluasi ini merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, yang berfungsi untuk menilai capaian kinerja pembangunan selama tahun berjalan, mengidentifikasi berbagai permasalahan dan tantangan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan sebagai dasar penyusunan kebijakan pada periode berikutnya. Evaluasi RKPD Tahun 2026 triwulan II ini disusun dengan mengacu pada berbagai indikator makro pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, struktur sektor, PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, ketimpangan, serta kondisi ketenagakerjaan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2026 secara umum tetap berjalan, meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh kontraksi sektor pertambangan sebagai sektor dominan. Di sisi lain, beberapa indikator sosial menunjukkan perkembangan yang positif, seperti peningkatan IPM dan penurunan tingkat kemiskinan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian, antara lain peningkatan ketimpangan, tekanan pasar kerja, serta belum optimalnya diversifikasi ekonomi.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui penyediaan data, dukungan teknis, maupun pemikiran yang konstruktif.

Akhirnya, kami berharap dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2026 triwulan II ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Kutai Timur, Juli 2026

Kepala Bappeda

Kabupaten Kutai Timur

Januar Bayu Irawan, SH., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.3.1 Maksud	3
1.3.2 Tujuan	3
1.4 Metode Evaluasi	4
1.5 Sistematika Dokumen Evaluasi RKPD	4
BAB 2 CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH	6
2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	6
2.2 PDRB per Kapita	7
2.3 Indeks Pembangunan Manusia	8
2.4 Angka Kemiskinan	10
2.5 Indeks Gini	11
2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka	11
BAB 3 EVALUASI KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	14
3.1 Realisasi Pendapatan Tahun 2026	14
3.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2026	14
3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2026	15
3.1.3 Analisis Capaian dan Permasalahan Pendapatan Daerah	16
3.2 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2026	17
3.3 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun 2026	20
3.4 Analisis Struktur Fiskal Daerah Tahun 2026	21
3.5 Implikasi Kebijakan Keuangan Daerah terhadap Pembangunan Tahun 2026	23
BAB 4 PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPJMD DALAM RKPD	25
4.1 Konsistensi Tujuan Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	25
4.2 Konsistensi Sasaran Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	28
4.3 Konsistensi Program antara RKPD dengan RPJMD	31
4.4 Konsistensi Indikator Kinerja antara RKPD dengan RPJMD	36
4.5 Konsistensi Target Kinerja antara RKPD dengan RPJMD	40
4.6 Konsistensi Pagu Anggaran antara RKPD dengan RPJMD	105

4.7	Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD per Perangkat Daerah	110
BAB 5 PENGENDALIAN PELAKSANAAN RKPD TERHADAP APBD		196
5.1	Konsistensi Program antara RKPD dengan APBD	196
5.2	Konsistensi Kegiatan antara RKPD dengan APBD	200
5.3	Konsistensi Subkegiatan antara RKPD dengan APBD	205
5.4	Konsistensi Target Kinerja antara RKPD dengan APBD	209
5.5	Konsistensi Pagu Anggaran antara RKPD dengan APBD	213
BAB 6 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD		218
6.1	Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan	219
6.1.1	Analisis Capaian per Tujuan dan Sasaran	222
6.1.2	Simpulan Umum	222
6.3	Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan pada Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah	223
BAB 7 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT		228
BAB 8 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		230
8.1	Kesimpulan	230
8.2	Rekomendasi	231

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur (2021–2025)	6
Tabel 2.2 PDRB per Kapita Kabupaten Kutai Timur (2021–2025)	8
Tabel 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Timur (2021–2025)	9
Tabel 2.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin.....	10
Tabel 2.5 Indeks Gini Kabupaten Kutai Timur (2024–2025)	11
Tabel 2.6 Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Timur (2024–2025)	12
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026	15
Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	17
Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026	20
Tabel 4.1 Perbandingan Tujuan Pembangunan pada RPJMD dan RKPD Tahun 2026	26
Tabel 4.2 Perbandingan Sasaran Pembangunan pada RPJMD dan RKPD Tahun 2026	28
Tabel 4.3 Konsistensi Jumlah Program antara RPJMD dan RKPD Tahun 2026 per Perangkat Daerah	31
Tabel 4.4 Konsistensi Indikator Kinerja antara RKPD dengan RPJMD Tahun 2026	37
Tabel 4.5 Perbandingan Target Kinerja RPJMD dan RKPD Tahun 2026	40
Tabel 4.6 Konsistensi Pagu Anggaran antara RPJMD dengan RKPD Tahun 2026.....	105
Tabel 4.7 Indikator, Target, dan Pagu per OPD pada RPJMD dan RKPD	11009
Tabel 5.1 Konsistensi Program RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2026	197
Tabel 5.2 Konsistensi Kegiatan RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2026	201
Tabel 5.3 Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dengan APBD	205
Tabel 5.4 Konsistensi Target Kinerja RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2026.....	210
Tabel 5.5 Konsistensi Pagu Anggaran RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2026.....	213
Tabel 6.1 Interval Nilai dan Kriteria Penilaian	219
Tabel 6.2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran.....	220
Tabel 6.3 Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan pada Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah.....	223

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan proses pemantauan, supervisi, dan penilaian terhadap penyusunan serta pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah untuk memastikan bahwa target kinerja dan realisasi keuangan dapat dicapai secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi RKPD menjadi instrumen krusial bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memastikan kesinambungan antara target tahunan dengan realita di lapangan. Evaluasi diperlukan agar pemerintah daerah memperoleh gambaran yang utuh mengenai tingkat ketercapaian sasaran pembangunan, kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan, serta berbagai faktor yang memengaruhi hasil pembangunan daerah. Dengan adanya evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis, pemerintah daerah dapat menilai apakah program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan benar-benar berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Evaluasi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya pembangunan daerah memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat dan menjadi dasar penting bagi perbaikan tata kelola birokrasi dan ketepatan sasaran pembangunan di Kutai Timur.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya mencakup tiga ruang lingkup utama, yaitu pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Ketiga ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah harus dipantau sejak tahap perencanaan hingga tahap hasil. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen perencanaan, tetapi juga dari konsistensi pelaksanaan dan ketercapaian indikator yang telah ditetapkan. Dalam konteks RKPD, evaluasi berfungsi untuk melihat apakah dokumen tahunan pembangunan daerah telah dijabarkan secara memadai ke dalam penganggaran, diimplementasikan secara tepat, dan menghasilkan capaian yang sesuai dengan sasaran. Pendekatan ini penting karena perencanaan pembangunan daerah harus mampu menjamin kesinambungan antara kebijakan, pelaksanaan, dan hasil. Apabila terdapat ketidaksesuaian pada salah satu tahapan tersebut, maka kualitas pembangunan daerah akan ikut terpengaruh. Karena itu, evaluasi RKPD menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah.

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan disusun sesuai ketentuan perundang-undangan, konsisten dengan dokumen pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, selaras antar sektor, serta sinkron dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Sementara itu, pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan diarahkan untuk menjamin konsistensi antara RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, APBD, RKA-PD, dan DPA-PD. Dalam praktiknya, konsistensi tersebut sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah karena inkonsisten antar dokumen akan berpengaruh terhadap capaian target, kualitas belanja, dan efektivitas program. Evaluasi RKPD tahun 2026 triwulan II perlu diletakkan sebagai instrumen untuk membaca secara lebih mendalam

hubungan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Melalui evaluasi, dapat diketahui apakah target-target tahunan pembangunan telah dirumuskan secara realistis, didukung oleh program yang tepat, dan dilaksanakan dengan tingkat kinerja yang memadai. Selain itu, evaluasi juga dapat menampilkan area-area yang masih memerlukan penguatan koordinasi, perbaikan tata kelola, dan penyesuaian strategi pelaksanaan. Dengan demikian, evaluasi RKPD tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga bersifat korektif dan antisipatif.

Evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 triwulan II menjadi semakin penting karena tahun 2026 merupakan periode yang sangat menentukan dalam kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah. Pada tahun ini, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 tetap berada pada jalur pencapaian yang tepat. Tahun 2026 juga merupakan tahun yang strategis untuk menilai efektivitas program prioritas, kualitas realisasi anggaran, serta kemampuan perangkat daerah dalam menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan di tengah dinamika kebutuhan daerah. Dalam situasi seperti itu, evaluasi RKPD harus mampu menunjukkan capaian makro pembangunan, realisasi kebijakan keuangan daerah, tingkat keselarasan antardokumen perencanaan, hasil pelaksanaan program dan kegiatan, serta faktor-faktor yang mendorong maupun memengaruhi capaian kinerja. Hasil evaluasi ini menjadi penting karena akan menjadi bahan perbaikan bagi penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengendalian pembangunan daerah. Oleh sebab itu, dokumen ini disusun untuk menyajikan potret riil kinerja pembangunan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan. Atas dasar itulah penyusunan dokumen evaluasi ini dilakukan.

1.2 Dasar Hukum

Evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 triwulan II disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006–2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026;
11. Peraturan Bupati Kutai Timur N0 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 triwulan II dimaksudkan untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap pelaksanaan RKPD, konsistensi RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup aspek capaian makro pembangunan, kebijakan keuangan daerah, konsistensi program dan indikator kinerja, hasil pelaksanaan pembangunan, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan RKPD. Melalui evaluasi ini diharapkan diperoleh gambaran yang objektif mengenai tingkat keberhasilan pembangunan daerah selama tahun berjalan. Selain itu, evaluasi ini juga dimaksudkan sebagai sarana pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tetap selaras dengan arah kebijakan daerah. Dengan demikian, dokumen Evaluasi RKPD tidak hanya berfungsi sebagai bahan pelaporan, tetapi juga sebagai dasar perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah pada periode berikutnya.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari Evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 triwulan II adalah untuk:

1. Mengukur capaian makro pembangunan daerah, yaitu menilai realisasi indikator makro pembangunan daerah yang tercermin dalam RKPD Tahun 2026, meliputi laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, indeks Gini, dan tingkat pengangguran terbuka;
2. Menganalisis kebijakan keuangan daerah, yaitu menilai realisasi keuangan daerah periode sebelumnya dan penyesuaiannya dalam RKPD Tahun 2026 berdasarkan dokumen keuangan daerah yang berlaku;
3. Menilai konsistensi perencanaan dan implementasi, yaitu menganalisis kesesuaian antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dalam hal tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu anggaran;
4. Mengevaluasi hasil pelaksanaan RKPD, yaitu menilai capaian hasil pelaksanaan RKPD melalui analisis indikator capaian pada tujuan, sasaran, program prioritas, kinerja dan

keuangan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

5. Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan memengaruhi pencapaian kinerja pembangunan dan pelaksanaan program RKPD, baik dari aspek kelembagaan, pendanaan, koordinasi, maupun teknis pelaksanaan;
6. Merumuskan rekomendasi kebijakan, yaitu menyusun rekomendasi strategis sebagai dasar penyempurnaan RKPD pada periode berikutnya dan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kualitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4 Metode Evaluasi

Evaluasi RKPD dilakukan melalui integrasi tiga pendekatan utama yang saling melengkapi untuk menghasilkan gambaran kinerja yang komprehensif. Proses diawali dengan **analisis konsistensi** untuk menguji derajat keselarasan antara perencanaan dan penganggaran. Melalui metode ini, dilakukan komparasi sistematis terhadap indikator kinerja dan pagu anggaran antara dokumen RKPD dengan dokumen acuan lainnya. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa penjabaran kebijakan dari level jangka menengah hingga dokumen tahunan tetap sinkron, sekaligus menjadi parameter kualitas keterpaduan dokumen pembangunan daerah pada masing-masing Perangkat Daerah.

Selanjutnya, efektivitas pelaksanaan program diukur melalui **analisis capaian**. Fokus utama analisis ini adalah membedah realisasi kinerja fisik dan keuangan dengan membandingkan target yang ditetapkan terhadap pencapaian aktual di lapangan. Lingkup pengukurannya mencakup indikator makro pembangunan serta realisasi kebijakan fiskal daerah tahun 2026. Hasil dari analisis ini memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana program, kegiatan, dan sub-kegiatan mampu mengeskalasi pencapaian target pembangunan daerah yang telah direncanakan.

Guna memberikan kedalaman interpretasi, evaluasi ini diperkuat dengan **pendekatan kualitatif**. Melalui penelaahan dokumen, koordinasi lintas Perangkat Daerah, dan pembahasan internal, dilakukan pendalaman terhadap berbagai faktor determinan yang memengaruhi kinerja. Pendekatan ini berfungsi untuk mengidentifikasi variabel pendorong maupun penghambat yang seringkali tidak terpotret secara utuh dalam data kuantitatif. Dengan menangkap persoalan spesifik pada setiap urusan pemerintahan, hasil identifikasi ini kemudian menjadi basis fundamental dalam merumuskan rekomendasi strategis bagi peningkatan efektivitas pelaksanaan RKPD pada periode berikutnya

Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 dengan menggunakan data evaluasi tahun 2026 triwulan II. Evaluasi ini mencakup seluruh Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, maupun fungsi penunjang pemerintahan daerah.

1.5 Sistematika Dokumen Evaluasi RKPD

Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja pembangunan daerah dan menjadi dasar

penyusunan dokumen perencanaan ke depan. Adapun sistematika dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 triwulan II adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, metode evaluasi, serta sistematika dokumen Evaluasi RKPD.

BAB II : CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat analisis capaian makro pembangunan daerah, meliputi laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, indeks Gini, dan tingkat pengangguran terbuka.

BAB III : EVALUASI KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat analisis evaluasi kebijakan keuangan daerah yang mencakup realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

BAB IV : PENGENDALIAN PELAKSANAAN DOKUMEN PERENCANAAN

Bab ini memuat analisis konsistensi antara RKPD dengan dokumen perencanaan daerah, baik dari sisi tujuan, sasaran, program, indikator kinerja, target, maupun pagu anggaran.

BAB V : PENGENDALIAN PELAKSANAAN RKPD TERHADAP APBD

Bab ini memuat analisis konsistensi antara RKPD dengan APBD yang mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu anggaran.

BAB VI : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD

Bab ini memuat analisis capaian hasil pelaksanaan RKPD, baik pada level tujuan dan sasaran pembangunan maupun pada level program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

BAB VII : FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

Bab ini memuat identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan RKPD serta pengaruhnya terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah.

BAB VIII : RUMUSAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI

Bab ini memuat rumusan permasalahan pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan hasil evaluasi.

BAB IX : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini memuat kesimpulan hasil evaluasi RKPD dan rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah pada periode berikutnya.

BAB 2

CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,05 persen. Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih berada pada zona pertumbuhan, namun lajunya melambat sangat tajam dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 9,82 persen. Dalam deret waktu 2021–2026, pola pertumbuhan ekonomi Kutai Timur memperlihatkan fluktuasi yang cukup kuat, yaitu 5,58 persen pada tahun 2021, -0,89 persen pada tahun 2022, 7,71 persen pada tahun 2023, 9,82 persen pada tahun 2024, dan kembali turun menjadi 1,05 persen pada tahun 2026. Secara komparatif, capaian ini juga berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur sebesar 4,53 persen dan rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Kondisi tersebut menandakan bahwa pada tahun 2026 Kutai Timur menghadapi perlambatan ekonomi yang lebih dalam dibandingkan dengan wilayah pembandingnya.

Perlambatan ini terutama disebabkan oleh kontraksi sektor pertambangan sebesar -0,99 persen, sementara sektor tersebut masih menjadi tulang punggung struktur ekonomi Kutai Timur dengan kontribusi 70,17 persen terhadap total PDRB. Dengan bobot sebesar itu, penurunan kecil pada sektor pertambangan langsung menekan laju pertumbuhan ekonomi total. Dokumen indikator strategis BPS Kutai Timur secara eksplisit menyebut bahwa kontraksi ini berkaitan dengan penurunan aktivitas produksi batubara, yang terjadi seiring melemahnya permintaan dan penyesuaian produksi. Artinya, perlambatan ekonomi Kutai Timur pada tahun 2026 bukan terutama karena seluruh lapangan usaha melemah secara bersamaan, melainkan karena sektor yang paling dominan sedang mengalami koreksi. Dalam struktur ekonomi yang sangat terkonsentrasi, gejolak pada satu sektor unggulan memang akan lebih cepat diterjemahkan menjadi perlambatan agregat daerah.

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur (2021–2026)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Perubahan	Keterangan
2021	5,58%	—	Pertumbuhan moderat
2022	-0,89%	↓	Kontraksi
2023	7,71%	↑	Pemulihan
2024	9,82%	↑ tinggi	Puncak pertumbuhan
2026	1,05%	↓ tajam	Perlambatan signifikan

Jika dibaca lebih jauh, penjelasan mengenai melemahnya permintaan dan penyesuaian produksi batubara di Kutai Timur juga sejalan dengan perkembangan sektor batubara nasional pada tahun 2026. Kementerian ESDM mencatat bahwa Harga Batubara Acuan (HBA) periode pertama Juni 2026 turun menjadi USD100,97 per ton, lebih rendah USD22,03 per ton dibandingkan periode yang sama tahun 2024 atau turun 17,91 persen year-on-year. Di awal 2026, Kementerian ESDM juga menyampaikan bahwa pemerintah pada awal 2026 menyampaikan rencana penataan ulang kuota produksi batubara dan revisi target produksi nasional sebagai respons atas kondisi pasar dan kebutuhan penyesuaian produksi. Dengan demikian, kontraksi pertambangan di Kutai Timur

dapat dipahami sebagai bagian dari tekanan yang lebih luas pada industri batubara, baik dari sisi harga maupun penyesuaian volume produksi.

Walaupun demikian, perlambatan ekonomi Kutai Timur pada tahun 2025 tidak berarti seluruh perekonomian daerah sedang melemah. Sejumlah lapangan usaha justru tumbuh cukup tinggi. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 9,32 persen dengan kontribusi 10,96 persen. Industri Pengolahan tumbuh 19,12 persen dengan kontribusi 5,81 persen. Konstruksi tumbuh 7,19 persen, Perdagangan tumbuh 11,09 persen, dan Transportasi dan Pergudangan tumbuh 10,46 persen. Dokumen BPS Kutai Timur juga menyebut bahwa pertumbuhan tinggi industri pengolahan didorong oleh mulai beroperasinya pabrik semen di Kabupaten Kutai Timur. Fakta ini penting karena menunjukkan bahwa pelemahan agregat daerah terutama berasal dari sektor dominan, sedangkan sektor-sektor nonpertambangan justru memperlihatkan penguatan yang cukup nyata.

Analisis ekonomi Kutai Timur pada tahun 2025 memberikan sinyal krusial bagi evaluasi pembangunan daerah, terutama ketika sektor pertambangan dikeluarkan dari perhitungan. Tanpa sektor ekstraktif tersebut, ekonomi daerah justru mencatatkan pertumbuhan signifikan sekitar 11 persen. Fenomena ini mengindikasikan bahwa fondasi ekonomi nonpertambangan mulai menguat dan agenda transformasi ekonomi daerah telah menunjukkan pergerakan nyata, meskipun belum sepenuhnya mampu menyeimbangkan dominasi sektor tambang.

Kondisi tersebut sekaligus menegaskan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi Kutai Timur kini tidak dapat lagi dinilai hanya melalui angka agregat total, melainkan harus dibedah melalui komposisi sektoralnya secara mendalam. Pertumbuhan positif di sektor non-tambang ini harus dimaknai sebagai momentum strategis. Pada saat yang sama, perlambatan ekonomi makro di tahun 2026 menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera mengonkretkan langkah-langkah diversifikasi ekonomi guna mereduksi ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas batubara.

Perubahan struktur ekonomi 2023–2026 memperkuat kesimpulan tersebut. Kontribusi sektor pertambangan turun dari 79,67 persen pada tahun 2023 menjadi 75,53 persen pada tahun 2024 dan 70,17 persen pada tahun 2026. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian meningkat dari 7,66 persen menjadi 10,96 persen, dan industri pengolahan naik dari 3,22 persen menjadi 5,81 persen. Pergeseran ini belum cukup untuk menghilangkan ketergantungan pada pertambangan, tetapi sudah menunjukkan arah yang lebih sehat bagi struktur ekonomi daerah. Makna strategis pertumbuhan ekonomi 2026 bukan terletak pada rendahnya angka 1,05 persen semata, melainkan pada situasi bahwa Kutai Timur masih rentan terhadap siklus komoditas batubara, namun pada saat yang sama mulai memiliki penyangga pertumbuhan baru dari pertanian dan industri pengolahan. Agenda kebijakan yang relevan ke depan adalah mempercepat hilirisasi, memperkuat rantai nilai sektor primer, dan memperluas sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah di luar pertambangan.

2.2 PDRB per Kapita

Pada tahun 2025, PDRB per kapita Kabupaten Kutai Timur tercatat sebesar Rp325,18 juta, menurun dari Rp344,49 juta pada tahun 2024. Dalam tren 2021–2026, indikator ini bergerak fluktuatif, yakni Rp310,29 juta pada tahun 2021, melonjak menjadi Rp471,27 juta pada tahun 2022, turun ke Rp369,42 juta pada tahun 2023, turun lagi menjadi Rp344,49 juta pada tahun 2024, dan kembali turun pada tahun 2026. Penurunan dua tahun terakhir menunjukkan bahwa nilai tambah ekonomi rata-rata per penduduk sedang mengalami koreksi. Namun demikian,

secara komparatif posisi Kutai Timur masih sangat tinggi, jauh di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp208,33 juta dan rata-rata nasional sebesar Rp83,70 juta. Di tingkat kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, PDRB per kapita Kutai Timur masih berada pada posisi sangat tinggi dan menempati kelompok teratas, yakni setelah Kota Bontang.

Tabel 2.2 PDRB per Kapita Kabupaten Kutai Timur (2021–2026)

Tahun	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Perubahan	Keterangan
2021	310,29	—	Posisi awal
2022	471,27	↑ sangat tinggi	Lonjakan (boom)
2023	369,42	↓ tajam	Koreksi
2024	344,49	↓	Penurunan berlanjut
2025	325,18	↓	Koreksi dua tahun terakhir

Tingginya angka PDRB per kapita di Kabupaten Kutai Timur tidak dapat dipisahkan dari dominasi sektor pertambangan yang menyumbang nilai tambah sangat besar bagi perekonomian daerah. Nilai tersebut sebenarnya lebih mencerminkan kapasitas ekonomi agregat atau besarnya 'mesin ekonomi' wilayah, ketimbang menjadi cerminan langsung dari pemerataan kesejahteraan masyarakat di tingkat rumah tangga. Fenomena khas pada daerah yang sangat bergantung pada sektor ekstraktif ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan regional rata-rata terlihat sangat menonjol, distribusinya tidak selalu tersebar secara proporsional ke seluruh lapisan penduduk. Oleh karena itu, capaian PDRB per kapita yang tinggi ini harus selalu dianalisis secara beriringan dengan indikator kemiskinan, ketimpangan, dan indeks pembangunan manusia guna mendapatkan potret kesejahteraan riil yang lebih akurat.

Penurunan PDRB per kapita pada tahun 2026 juga sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya PDRB atas dasar harga berlaku. Situasi ini menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi daerah tetap besar, tetapi sedang berada dalam fase penyesuaian akibat melemahnya sektor dominan. Dari sudut pandang evaluasi pembangunan, keadaan ini mengandung dua implikasi.

- ❖ Pertama, ketahanan ekonomi daerah belum sepenuhnya terbentuk karena indikator kesejahteraan makro masih sangat dipengaruhi oleh fluktuasi komoditas.
- ❖ Kedua, peningkatan sektor pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan perlu terus didorong agar pada masa mendatang PDRB per kapita tidak lagi terlalu bergantung pada satu sektor saja. Semakin beragam sumber pertumbuhan, semakin stabil pula kapasitas ekonomi per penduduk yang dapat dipertahankan daerah.

2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 mencapai 76,48, meningkat dari 75,90 pada tahun 2024. Dalam lima tahun terakhir, IPM Kutai Timur menunjukkan tren naik yang konsisten, yaitu 74,15 pada tahun 2021, 74,69 pada tahun 2022, 75,33 pada tahun 2023, 75,90 pada tahun 2024, dan 76,48 pada tahun 2025. Capaian tersebut menempatkan Kutai Timur dalam kategori tinggi. Secara komparatif, IPM Kutai Timur memang masih di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur sebesar 79,39, tetapi sudah melampaui rata-rata nasional sebesar 75,90. Dengan demikian, pembangunan manusia di Kutai Timur bergerak positif, walaupun ruang peningkatannya masih cukup besar.

Kenaikan IPM 2026 terjadi karena seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, yakni dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Ini penting karena kenaikan IPM yang berasal dari semua dimensi jauh lebih bermakna dibandingkan dengan kenaikan yang hanya ditopang oleh satu komponen saja. Artinya, perbaikan kualitas hidup masyarakat Kutai Timur pada tahun 2026 tidak bersifat parsial. Peningkatan ini menandakan bahwa di tengah perlambatan ekonomi agregat, akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kemampuan hidup layak relatif tetap membaik. Dalam evaluasi pembangunan, situasi seperti ini menunjukkan bahwa fondasi sosial daerah cenderung lebih stabil daripada fluktuasi ekonominya.

Tabel 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Timur (2021–2026)

Tahun	IPM	Perubahan	Keterangan
2021	74,15	—	Posisi awal
2022	74,69	↑	Peningkatan bertahap
2023	75,33	↑	Konsisten naik
2024	75,90	↑	Mendekati kategori tinggi
2025	76,48	↑	Masuk kategori tinggi

Dari dimensi pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 9,48 tahun, sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 13,22 tahun. RLS 9,48 tahun berarti rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hampir sampai awal SMA. HLS 13,22 tahun menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun di Kutai Timur memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang menengah atas, bahkan awal pendidikan tinggi. Secara komparatif, RLS Kutai Timur sudah lebih tinggi dari rata-rata nasional 9,07 tahun, tetapi masih di bawah rata-rata provinsi 10,10 tahun. HLS Kutai Timur sudah melampaui standar wajib belajar 12 tahun, meskipun masih sedikit di bawah rata-rata nasional 13,30 tahun dan rata-rata provinsi 14,04 tahun. Ini berarti akses pendidikan dasar dan menengah sudah relatif baik, tetapi tantangan terbesar terletak pada keberlanjutan pendidikan menuju jenjang yang lebih tinggi dan pemerataan kualitas pendidikan antarkelompok masyarakat.

Dari dimensi kesehatan, Angka Harapan Hidup terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan perbaikan pada kualitas kesehatan masyarakat secara umum. Kenaikan AHH biasanya mencerminkan membaiknya akses layanan kesehatan, penurunan risiko kematian dini, peningkatan kesadaran hidup sehat, serta semakin baiknya faktor pendukung seperti sanitasi, air bersih, dan pelayanan kesehatan ibu-anak. Dalam konteks Kutai Timur, keberlanjutan peningkatan dimensi kesehatan menjadi sinyal positif bahwa hasil pembangunan sosial tidak sepenuhnya terganggu oleh volatilitas ekonomi makro. Hal ini juga penting karena kesehatan merupakan fondasi produktivitas jangka panjang, sehingga penguatan dimensi kesehatan akan memberikan dampak tidak hanya pada kualitas hidup, tetapi juga pada daya saing sumber daya manusia daerah.

Dari dimensi standar hidup layak, pengeluaran per kapita yang disesuaikan juga meningkat dan ikut mendorong kenaikan IPM. Namun, jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Kutai Timur yang sangat tinggi, peningkatan standar hidup riil masyarakat ini masih menunjukkan adanya jarak antara kekuatan ekonomi agregat dan kesejahteraan yang dirasakan secara langsung oleh penduduk. Di sinilah letak makna penting IPM dalam evaluasi RKPD. IPM mengoreksi pembacaan yang terlalu bertumpu pada indikator ekonomi makro semata, dengan menunjukkan seberapa

jauh pertumbuhan telah diterjemahkan menjadi kualitas hidup. Kenaikan IPM Kutai Timur tahun 2026 patut dinilai positif, tetapi tetap perlu diikuti kebijakan yang memperkuat mutu sekolah, mengurangi putus sekolah, memperluas akses layanan kesehatan yang bermutu, dan meningkatkan daya beli riil masyarakat secara lebih merata.

2.4 Angka Kemiskinan

Pada tahun 2025, garis kemiskinan Kabupaten Kutai Timur tercatat sebesar Rp773.239 per kapita per bulan, naik dari Rp753.332 pada tahun 2024. Dengan asumsi satu rumah tangga terdiri atas empat orang, maka kebutuhan minimum untuk berada di atas garis kemiskinan berada pada kisaran Rp3,09 juta per rumah tangga per bulan. Kenaikan garis kemiskinan ini menunjukkan bahwa biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar terus meningkat. Dari sudut pandang evaluasi pembangunan, situasi ini menandakan bahwa tekanan biaya hidup masih tetap ada, sehingga pengurangan kemiskinan harus bekerja lebih keras karena ambang kebutuhan dasar juga naik.

Di tengah kenaikan garis kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin Kutai Timur justru turun dari 37,11 ribu jiwa pada tahun 2024 menjadi 34,91 ribu jiwa pada tahun 2026. Sejalan dengan itu, persentase penduduk miskin juga turun dari 8,81 persen menjadi 8,07 persen. Secara komparatif, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur sebesar 5,17 persen, tetapi sudah sedikit lebih baik dari rata-rata nasional sebesar 8,47 persen. Penurunan ini dapat dibaca sebagai sinyal bahwa secara kuantitatif sebagian rumah tangga berhasil keluar dari kemiskinan. Dokumen BPS Kutai Timur mengaitkan perkembangan tersebut dengan membaiknya aktivitas ekonomi, meningkatnya akses kesempatan kerja, serta berjalannya program perlindungan sosial bagi rumah tangga miskin dan rentan.

Tabel 2.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase (%)	Perubahan	Keterangan
2024	37,11	8,81%	—	Kondisi awal
2025	34,91	8,07%	↓	Penurunan kemiskinan

Namun, penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2025 belum sepenuhnya berarti kualitas kemiskinan ikut membaik. Hal ini terlihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang naik dari 1,14 menjadi 1,20, serta Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang naik dari 0,24 menjadi 0,26. Kenaikan P1 berarti rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan justru sedikit melebar. Kenaikan P2 menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga sedikit meningkat. Ini menandakan bahwa rumah tangga yang berhasil keluar dari kemiskinan kemungkinan besar adalah kelompok miskin ringan yang posisinya dekat dengan garis kemiskinan, sedangkan kelompok yang masih tersisa adalah rumah tangga miskin yang lebih kronis dan lebih sulit dientaskan.

Dengan demikian, kondisi kemiskinan Kutai Timur pada tahun 2025 memperlihatkan paradoks yang perlu menjadi perhatian khusus. Secara angka agregat, keadaan membaik. Namun, secara kualitas, kelompok miskin yang tersisa justru cenderung lebih rentan dan lebih tertinggal. Inilah sebabnya kebijakan penanggulangan kemiskinan ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada penurunan angka kemiskinan total, tetapi juga harus lebih tajam dalam menyasar kelompok

miskin kronis. Intervensi yang relevan bukan hanya bantuan sosial, melainkan juga penguatan akses kerja produktif, peningkatan aset ekonomi rumah tangga miskin, dukungan pendidikan bagi keluarga rentan, dan perluasan layanan dasar yang lebih terarah. Dengan pendekatan demikian, penurunan kemiskinan akan menjadi lebih berkualitas, bukan sekadar turun secara statistik.

2.5 Indeks Gini

Indeks Gini Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,305. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 0,283, tetapi masih berada pada kategori ketimpangan sedang. Secara komparatif, indeks Gini Kutai Timur masih sedikit lebih rendah dari rata-rata Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,312 dan jauh lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 0,375. Ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran di Kutai Timur secara umum masih relatif lebih baik daripada rata-rata nasional, walaupun pada tahun 2026 terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.5 Indeks Gini Kabupaten Kutai Timur (2024–2026)

Tahun	Indeks Gini	Perubahan	Kategori Ketimpangan	Keterangan
2024	0,283	—	Sedang	Distribusi relatif merata
2025	0,305	↑	Sedang	Ketimpangan meningkat

Kenaikan indeks gini pada tahun 2025 dapat dibaca sebagai konsekuensi dari struktur ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif. Dalam perekonomian yang masih sangat didominasi pertambangan dan sektor-sektor bernilai tambah tinggi tetapi padat modal, manfaat pertumbuhan cenderung lebih cepat terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Sementara itu, rumah tangga yang berada pada kelompok bawah tidak selalu menerima dampak peningkatan ekonomi dengan kecepatan yang sama. Pada tahun 2026, penurunan kemiskinan memang terjadi, tetapi pada saat bersamaan kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat. Kombinasi indikator ini mengindikasikan bahwa perbaikan kesejahteraan belum merata di seluruh lapisan penduduk. Kelompok yang berhasil naik kelas keluar dari kemiskinan ada, tetapi distribusi manfaat pembangunan secara keseluruhan masih belum cukup merata.

Dari perspektif kualitas pembangunan, kondisi ini penting karena menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau PDRB per kapita yang besar tidak otomatis menghasilkan pemerataan. Kenaikan indeks gini adalah pengingat bahwa agenda pembangunan daerah harus memberi perhatian lebih besar pada distribusi manfaat. Penguatan sektor pertanian rakyat, UMKM, industri pengolahan yang menyerap banyak tenaga kerja, konektivitas wilayah, kualitas pendidikan, dan akses terhadap peluang usaha menjadi sangat penting agar kelompok menengah bawah memperoleh bagian yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kata lain, tantangan Kutai Timur bukan hanya menumbuhkan ekonomi, tetapi menumbuhkan ekonomi yang hasilnya semakin tersebar.

2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 menunjukkan tekanan yang masih cukup nyata. Jumlah angkatan kerja meningkat dari 236.869 jiwa pada tahun 2024 menjadi 240.746 jiwa pada tahun 2025. Namun, peningkatan ini tidak diikuti oleh penyerapan kerja yang

sepadan. Jumlah pengangguran terbuka naik dari 13.643 jiwa menjadi 14.915 jiwa, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat dari 5,76 persen menjadi 6,20 persen. Secara komparatif, TPT Kutai Timur berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur sebesar 5,18 persen dan rata-rata nasional sebesar 4,85 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan pasar kerja di Kutai Timur relatif lebih berat dibandingkan banyak daerah lain.

Tabel 2.6 Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Timur (2024–2026)

Indikator	2024	2026	Perubahan	Keterangan
Angkatan Kerja (jiwa)	236.869	240.746	↑	Partisipasi meningkat
Pengangguran Terbuka (jiwa)	13.643	14.915	↑	Pengangguran bertambah
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,76%	6,20%	↑	Tekanan pasar kerja meningkat

Dokumen BPS Kutai Timur menjelaskan bahwa kenaikan TPT dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu fluktuasi sektor pertambangan dan konstruksi, berkurangnya proyek tenaga kerja padat karya, serta fenomena *educated unemployment*. Penjelasan ini sangat relevan dengan struktur ekonomi daerah. Ketika sektor pertambangan melambat dan konstruksi tidak sekuat periode sebelumnya, pasar kerja lokal langsung terkena dampak karena dua sektor tersebut selama ini menjadi salah satu pintu penyerapan kerja formal maupun semi formal. Pada saat yang sama, tidak semua sektor yang sedang tumbuh, seperti industri pengolahan dan jasa tertentu, mampu segera menyerap tambahan angkatan kerja dalam jumlah besar. Akibatnya, pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat daripada pertumbuhan kesempatan kerja.

Kenaikan jumlah pengangguran pada tahun 2025 juga terutama dipicu oleh bertambahnya pengangguran dari kelompok berpendidikan Diploma dan Universitas. Ini menunjukkan gejala *educated unemployment*, yakni ketika lulusan berpendidikan lebih tinggi belum terserap secara optimal ke dalam pasar kerja. Penyebabnya antara lain karena struktur ekonomi daerah masih banyak membutuhkan tenaga kerja teknis-operasional, sedangkan jumlah lulusan pendidikan tinggi meningkat dan cenderung lebih selektif dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan, upah, dan prospek karier. Situasi ini menandakan adanya mismatch antara pasokan tenaga kerja dan permintaan pasar kerja. Dalam jangka menengah, kondisi seperti ini dapat menahan produktivitas sosial karena investasi pendidikan belum terkonversi optimal menjadi kesempatan kerja yang sesuai.

Selain TPT, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kutai Timur pada tahun 2025 juga turun tipis menjadi 66,42 persen dari 66,78 persen pada tahun 2024. Angka ini berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur sebesar 67,00 persen dan jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 70,59 persen. Salah satu persoalan utama terdapat pada ketimpangan partisipasi menurut jenis kelamin. TPAK laki-laki mencapai 83,53 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya 46,27 persen. Dokumen BPS Kutai Timur menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi perempuan berkaitan dengan peran domestik, keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang fleksibel, norma sosial, serta masih terbatasnya lapangan kerja yang ramah perempuan. Dengan demikian, tantangan pasar kerja Kutai Timur tidak hanya soal pengangguran, tetapi juga soal belum optimalnya mobilisasi seluruh potensi tenaga kerja produktif.

Dari sudut pandang evaluasi RKPD, gambaran ketenagakerjaan tahun 2025 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada belum sepenuhnya inklusif dalam menciptakan

pekerjaan. Hal ini sangat penting, karena kualitas pembangunan ekonomi pada akhirnya diukur dari seberapa banyak penduduk yang memperoleh manfaat langsung melalui kerja dan pendapatan. Oleh sebab itu, kebijakan yang perlu diperkuat bukan hanya menjaga laju pertumbuhan, tetapi juga memastikan tumbuhnya sektor-sektor yang lebih padat karya, memperluas pelatihan vokasi sesuai kebutuhan daerah, meningkatkan koneksi antara pendidikan dan pasar kerja, serta membuka lebih banyak kesempatan kerja produktif bagi perempuan. Semakin berhasil Kutai Timur menjawab persoalan pasar kerja ini, semakin kuat pula kualitas pertumbuhan ekonominya di masa mendatang.

BAB 3

EVALUASI KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah merupakan instrumen yang menentukan apakah agenda pembangunan dapat dijalankan secara terukur, realistis, dan berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Kutai Timur, kebijakan keuangan daerah tahun 2026 tidak hanya perlu dibaca dari besar-kecilnya angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan, melainkan juga dari kemampuannya menjaga kesinambungan prioritas pembangunan di tengah dinamika penerimaan daerah yang masih sangat dipengaruhi oleh komponen eksternal. Kerangka ini penting, sebab dokumen RKPD Tahun 2026 sejak awal telah menempatkan pengelolaan keuangan daerah sebagai fondasi bagi pengalokasian sumber daya yang efektif dan efisien untuk mendukung infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Secara normatif, arah tersebut sejalan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 yang menegaskan bahwa kapasitas fiskal, kemampuan mendanai belanja daerah, dan kemandirian keuangan merupakan unsur strategis dalam menjamin keberlanjutan pembangunan. RPJMD juga menunjukkan bahwa secara historis struktur fiskal daerah masih sangat dipengaruhi dana transfer, sementara ruang yang benar-benar bersumber dari kapasitas pendapatan asli daerah masih relatif terbatas. Karena itu, evaluasi kebijakan keuangan daerah tahun 2026 perlu dilakukan bukan hanya untuk melihat serapan atau realisasi semata, tetapi juga untuk menilai ketahanan fiskal daerah dalam menjaga prioritas pembangunan ketika struktur penerimaan mengalami tekanan.

Dengan dasar tersebut, evaluasi kebijakan keuangan daerah tahun 2026 dalam bab ini difokuskan pada tiga komponen utama, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Ketiga komponen itu dibaca dengan menjadikan **RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026** sebagai acuan rencana awal, lalu dibandingkan dengan realisasi pelaksanaan tahun anggaran 2026 berdasarkan data teknis keuangan daerah. Melalui pendekatan ini, Bab III tidak berhenti pada penyajian angka, tetapi juga berupaya menjelaskan kualitas struktur fiskal daerah, ruang gerak kebijakan yang tersedia, serta implikasinya terhadap keberlanjutan pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

3.1 Realisasi Pendapatan Tahun 2026

3.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2026

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal melalui dua jalur utama. Jalur pertama adalah peningkatan **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, perbaikan tata kelola penerimaan, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak yang relevan. Jalur kedua adalah menjaga kesinambungan penerimaan dari komponen transfer, yang dalam praktiknya masih menjadi penopang utama struktur pendapatan daerah. Dalam RKPD Tahun 2026, orientasi ini dijelaskan sebagai bagian dari arah kebijakan keuangan daerah yang ditujukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan pengelolaan yang efektif dan efisien.

Dari sudut pandang strategis, arah kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian fiskal. Kabupaten Kutai Timur memiliki kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar,

tetapi ruang pendapatan yang benar-benar bersumber dari kontrol internal daerah belum sepenuhnya kuat. Karena itu, penguatan PAD tetap penting, bukan hanya untuk menambah penerimaan jangka pendek, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber penerimaan yang volatil dan sangat dipengaruhi kebijakan pusat maupun dinamika ekonomi makro. Cara pandang ini juga sejalan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 yang menempatkan kemandirian keuangan daerah sebagai agenda penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan.

Dengan demikian, evaluasi pendapatan daerah tahun 2026 perlu dibaca pada dua lapis sekaligus. Lapis pertama adalah **tingkat pencapaian target pendapatan** sebagaimana direncanakan dalam RKPD. Lapis kedua adalah **kualitas struktur pendapatannya**, yakni apakah peningkatan atau penurunan pendapatan terjadi pada komponen yang memperkuat kemandirian fiskal, atau justru pada komponen yang menunjukkan bahwa daerah masih bertumpu pada penerimaan dari luar kapasitas fiskal internalnya.

3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2026

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

No	Uraian	Target RKPD 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	431.817.843.098	253.061.495.547,46	58,60
2	Pendapatan Transfer	5.239.888.631.202	2.065.356.639.259	39,41
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	91.985.000.000	0	0,00
	Jumlah Pendapatan	5.763.691.465.300	2.318.418.134.806,46	40,22

Sumber: diolah dari RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 dan data BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, target pendapatan daerah Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp5.763.691.465.300, dengan realisasi mencapai Rp2.318.418.134.806,46 atau sebesar 40,22 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa hingga semester pertama, pendapatan daerah telah terealisasi sekitar dua perlima dari target tahunan. Secara umum, perkembangan ini menunjukkan kinerja pendapatan yang cukup baik, namun masih diperlukan upaya percepatan dan optimalisasi penerimaan pada semester kedua untuk memastikan target akhir tahun dapat dicapai.

Dari sisi komponen pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan capaian yang paling tinggi, yaitu sebesar 58,60 persen, dengan realisasi Rp253.061.495.547,46 dari target Rp431.817.843.098. Capaian ini menunjukkan bahwa penerimaan yang bersumber dari potensi daerah telah berjalan relatif baik dan telah melampaui separuh target tahunan. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 41,40 persen target PAD yang perlu direalisasikan pada semester kedua. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Sementara itu, Pendapatan Transfer memiliki target terbesar, yaitu Rp5.239.888.631.202, dengan realisasi sebesar Rp2.065.356.639.259 atau 39,41 persen. Secara nominal, pendapatan transfer

memberikan kontribusi paling besar terhadap total realisasi pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan Kabupaten Kutai Timur masih sangat bergantung pada sumber pendapatan transfer. Oleh karena itu, kepastian dan ketepatan waktu penyaluran transfer menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kapasitas fiskal daerah dan mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD dan APBD Tahun 2026.

Permasalahan utama terdapat pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang sampai dengan Triwulan II belum menunjukkan realisasi. Dari target sebesar Rp91.985.000.000, realisasi masih sebesar Rp0 atau 0 persen. Kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui identifikasi sumber pendapatan, mekanisme penerimaan, serta jadwal dan persyaratan pencairannya. Secara keseluruhan, capaian pendapatan sebesar 40,22 persen perlu terus dipantau pada Triwulan III dan IV, terutama untuk menjaga momentum pencapaian PAD, memastikan realisasi pendapatan transfer sesuai jadwal, serta mengupayakan agar komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat direalisasikan. Langkah tersebut penting untuk memastikan target pendapatan Tahun 2026 tercapai dan mendukung kesinambungan pembiayaan pembangunan daerah.

3.1.3 Analisis Capaian dan Permasalahan Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp5.763.691.465.300, dengan realisasi sebesar Rp2.318.418.134.806,46 atau mencapai 40,22 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir semester I, realisasi pendapatan daerah telah mencapai sekitar 40 persen dari target tahunan. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan proporsi waktu pelaksanaan tahun anggaran yang telah mencapai 50 persen, masih terdapat kesenjangan antara realisasi pendapatan dan waktu pelaksanaan anggaran. Kondisi ini perlu menjadi perhatian untuk memastikan adanya percepatan penerimaan pada Triwulan III dan IV.

Dari sisi sumber pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan capaian paling tinggi, yaitu 58,60 persen, dengan realisasi sebesar Rp253.061.495.547,46 dari target Rp431.817.843.098. Capaian tersebut merupakan perkembangan yang positif karena realisasi PAD telah melampaui separuh target tahunan. Namun, masih terdapat sisa target sebesar Rp178.756.347.550,54 yang harus direalisasikan pada semester II. Oleh karena itu, diperlukan penguatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta penguatan pengawasan terhadap sumber-sumber penerimaan daerah.

Sementara itu, Pendapatan Transfer sebagai komponen terbesar pendapatan daerah memiliki target sebesar Rp5.239.888.631.202, dengan realisasi Rp2.065.356.639.259 atau 39,41 persen. Secara nominal, pendapatan transfer menyumbang sekitar 89 persen dari total realisasi pendapatan daerah, sehingga sangat menentukan kinerja pendapatan secara keseluruhan. Capaian yang masih di bawah 50 persen sampai dengan Triwulan II menunjukkan perlunya pemantauan terhadap jadwal dan mekanisme penyaluran transfer, pemenuhan persyaratan penyaluran, serta koordinasi dengan pemerintah pusat. Ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer juga menjadi salah satu permasalahan struktural dalam pengelolaan pendapatan daerah karena dapat memengaruhi fleksibilitas fiskal dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.

Permasalahan yang paling menonjol terdapat pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang dari target Rp91.985.000.000 sampai dengan Triwulan II belum terealisasi atau 0 persen. Kondisi tersebut perlu segera dilakukan evaluasi untuk mengetahui sumber pendapatan yang belum terealisasi, penyebab keterlambatan, serta kepastian waktu penerimaannya. Apabila penerimaan tersebut tidak dapat direalisasikan pada semester II, perlu dilakukan mitigasi terhadap dampaknya terhadap target pendapatan dan kemampuan pembiayaan daerah.

Secara keseluruhan, capaian pendapatan daerah sampai dengan Triwulan II sebesar 40,22 persen menunjukkan bahwa kinerja pendapatan telah berjalan, tetapi masih memerlukan percepatan untuk mengejar target tahunan. Permasalahan utama meliputi realisasi pendapatan yang belum mencapai proporsi waktu anggaran, ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer, serta belum terealisasinya lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada Triwulan III dan IV, pemerintah daerah perlu meningkatkan monitoring penerimaan secara berkala, mempercepat optimalisasi PAD, memastikan kelancaran penyaluran pendapatan transfer, serta melakukan langkah mitigasi terhadap sumber pendapatan yang belum terealisasi. Upaya tersebut diperlukan agar target pendapatan Tahun 2026 dapat dicapai dan tidak mengganggu keberlanjutan pembiayaan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

3.2 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2026

Belanja daerah merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program dan kegiatan yang nyata. Melalui belanja daerah, pemerintah tidak hanya membiayai kebutuhan operasional pemerintahan, tetapi juga mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, perlindungan sosial, serta transfer fiskal yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi terhadap realisasi belanja menjadi penting untuk menilai sejauh mana alokasi anggaran yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberi dukungan terhadap agenda pembangunan daerah.

Dalam RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026, kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah. Pada tahap pelaksanaan tahun anggaran 2026, struktur belanja kemudian terefleksi dalam komponen Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Masing-masing komponen tersebut mempunyai fungsi yang berbeda, namun secara bersama-sama menentukan kualitas belanja daerah, baik dalam menjaga layanan rutin pemerintahan maupun dalam mendorong manfaat pembangunan yang lebih luas bagi masyarakat.

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5	BELANJA DAERAH	5.738.691.465.300,00	1.437.661.845.460,78	25,05
5.1	BELANJA OPERASI	3.346.099.650.092,71	1.142.375.069.166,78	34,14
5.1.01	Belanja Pegawai	1.556.041.136.387,38	768.412.348.499,00	49,38
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.691.774.307.317,33	341.099.912.000,78	20,16
5.1.05	Belanja Hibah	98.284.206.388,00	32.862.808.667,00	33,43

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.346.099.650.092,71	1.142.375.069.166,78	34,14
5.2	BELANJA MODAL	1.553.632.028.716,29	76.843.294.594,00	4,94
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	176.353.141.692,29	3.768.976.685,00	2,13
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	280.391.454.618,00	11.686.096.349,00	4,16
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.073.265.445.765,00	61.214.495.160,00	5,70
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.114.578.796,00	173.726.400,00	1,43
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	11.507.407.845,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.553.632.028.716,29	76.843.294.594,00	4,94
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	53.657.306.275,00	7.996.800,00	0,01
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	53.657.306.275,00	7.996.800,00	0,01
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	53.657.306.275,00	7.996.800,00	0,01
5.4	BELANJA TRANSFER	785.302.480.216,00	218.435.484.900,00	27,81
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	785.302.480.216,00	218.435.484.900,00	27,81
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	785.302.480.216,00	218.435.484.900,00	27,81
	JUMLAH BELANJA	5.738.691.465.300,00	1.437.661.845.460,78	25,05

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, total anggaran belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp5.738.691.465.300,00, dengan realisasi sebesar Rp1.437.661.845.460,78 atau mencapai 25,05 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah sampai dengan akhir semester I masih relatif rendah dibandingkan dengan proporsi waktu pelaksanaan tahun anggaran yang telah mencapai 50 persen. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena rendahnya realisasi belanja dapat berimplikasi terhadap pencapaian target kinerja pembangunan dan penyerapan anggaran

pada akhir tahun, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan III dan Triwulan IV.

Dari struktur belanja, Belanja Operasi memiliki anggaran sebesar Rp3.346.099.650.092,71 dengan realisasi Rp1.142.375.069.166,78 atau 34,14 persen, sehingga menjadi kelompok belanja dengan tingkat realisasi terbesar. Belanja Pegawai memiliki realisasi paling tinggi, yaitu Rp768.412.348.499,00 atau 49,38 persen dari anggaran Rp1.556.041.136.387,38. Sementara itu, Belanja Barang dan Jasa yang memiliki anggaran cukup besar, yaitu Rp1.691.774.307.317,33, baru terealisasi sebesar Rp341.099.912.000,78 atau 20,16 persen. Belanja Hibah terealisasi sebesar 33,43 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun belanja operasi relatif lebih progresif, masih terdapat ruang percepatan terutama pada belanja barang dan jasa yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan perangkat daerah.

Permasalahan yang cukup menonjol terdapat pada Belanja Modal, yang memiliki anggaran sebesar Rp1.553.632.028.716,29, tetapi sampai dengan Triwulan II baru terealisasi Rp76.843.294.594,00 atau sebesar 4,94 persen. Rendahnya realisasi terutama terlihat pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 2,13 persen, Gedung dan Bangunan sebesar 4,16 persen, Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar 5,70 persen, serta Aset Tetap Lainnya sebesar 1,43 persen. Bahkan Belanja Modal Aset Lainnya belum menunjukkan realisasi. Rendahnya penyerapan belanja modal perlu mendapat perhatian khusus karena belanja tersebut umumnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana yang memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik dan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kondisi ini perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan tahapan pengadaan, kesiapan dokumen teknis, proses pelaksanaan pekerjaan, serta kendala kontraktual.

Sementara itu, Belanja Tidak Terduga memiliki anggaran sebesar Rp53.657.306.275,00, dengan realisasi hanya Rp7.996.800,00 atau 0,01 persen. Rendahnya realisasi pada kelompok belanja ini pada dasarnya tidak serta-merta menunjukkan permasalahan, mengingat penggunaannya bersifat khusus dan diperuntukkan bagi kebutuhan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai ketentuan. Adapun Belanja Transfer memiliki anggaran sebesar Rp785.302.480.216,00, dengan realisasi Rp218.435.484.900,00 atau 27,81 persen, yang seluruhnya berasal dari belanja bantuan keuangan kepada desa. Capaian ini menunjukkan bahwa penyaluran transfer kepada desa telah berjalan, namun masih terdapat sekitar 72,19 persen anggaran yang perlu direalisasikan pada semester kedua.

Secara keseluruhan, permasalahan utama belanja daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah rendahnya realisasi belanja dibandingkan dengan waktu pelaksanaan anggaran, terutama pada belanja modal dan belanja barang dan jasa. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian target pembangunan dan memiliki pagu anggaran yang signifikan. Pemerintah daerah perlu melakukan monitoring secara lebih intensif terhadap perangkat daerah dengan tingkat penyerapan rendah, mengidentifikasi hambatan pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan, serta menyusun langkah percepatan pada Triwulan III dan IV. Dengan demikian, penyerapan anggaran dapat lebih optimal dan tetap sejalan dengan pencapaian output serta outcome pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026.

3.3 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun 2026

Pembiayaan daerah merupakan instrumen fiskal yang berfungsi menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran berjalan. Dalam praktiknya, pembiayaan tidak hanya berperan sebagai penutup defisit, tetapi juga sebagai ruang penyangga yang memungkinkan pemerintah daerah tetap menjalankan prioritas pembangunan ketika pendapatan daerah tidak sepenuhnya cukup untuk menutup kebutuhan belanja. Karena itu, evaluasi terhadap pembiayaan daerah perlu melihat bukan hanya besar kecilnya angka penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, tetapi juga makna fiskalnya bagi stabilitas keuangan daerah dan kesinambungan pelaksanaan program pembangunan.

Dalam **RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026**, arah kebijakan pembiayaan daerah ditempatkan dalam kerangka menjaga keseimbangan fiskal dan mendukung keberlanjutan pembangunan. RKPD menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengelola pembiayaan secara hati-hati, menjaga hubungan antara penerimaan dan pengeluaran daerah, serta memastikan bahwa kebijakan pembiayaan tidak justru menimbulkan tekanan fiskal baru di masa mendatang. Dengan demikian, pembiayaan daerah seharusnya dibaca sebagai instrumen penyangga yang dipakai secara selektif, bukan sebagai substitusi permanen atas lemahnya kapasitas pendapatan daerah.

Pada tahun 2026, dinamika pembiayaan daerah Kabupaten Kutai Timur memperlihatkan perubahan yang cukup penting dibanding tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan yang digunakan pada tahun anggaran 2026 seluruhnya berasal dari **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya**, sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk **penyertaan modal daerah**. Struktur seperti ini menunjukkan bahwa pembiayaan daerah tahun 2026 lebih berfungsi sebagai instrumen korektif untuk menjaga ruang fiskal pada saat kapasitas pendapatan daerah mengalami tekanan. Dalam perspektif pengelolaan keuangan, kondisi ini menuntut tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi, karena kemampuan pembiayaan yang bertumpu pada SiLPA bersifat terbatas dan tidak dapat diandalkan sebagai sumber berulang secara terus-menerus.

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026

No	Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	Capaian (%)
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah/Investasi Pemerintah Daerah	25.000.000.000,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

Berdasarkan **Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Triwulan I Tahun Anggaran 2026**, pelaksanaan pembiayaan daerah hingga akhir Triwulan I belum menunjukkan adanya realisasi baik pada sisi penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan. Hal ini tercermin dari realisasi pembiayaan daerah yang masih sebesar **Rp0,00** atau **0,00%** dari target yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

Pada kelompok **Penerimaan Pembiayaan**, tidak terdapat alokasi anggaran sehingga realisasinya juga nihil. Komponen yang terdiri atas **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya** dan **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah** masing-masing tidak dianggarkan dan tidak terealisasi hingga Triwulan I. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tidak mengandalkan sumber pembiayaan dari SiLPA maupun pengembalian pinjaman daerah sebagai bagian dari struktur pembiayaan APBD Tahun 2026.

Sementara itu, pada kelompok **Pengeluaran Pembiayaan**, telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp25.000.000.000,00** yang diperuntukkan bagi **Penyertaan Modal Daerah/Investasi Pemerintah Daerah**. Namun demikian, hingga akhir Triwulan I belum terdapat realisasi sehingga tingkat capaian masih **0,00%**. Belum terealisasinya pengeluaran pembiayaan tersebut dimungkinkan karena masih berlangsungnya proses administrasi, pemenuhan persyaratan regulasi, penyelesaian dokumen pendukung, maupun penyesuaian jadwal pelaksanaan penyertaan modal kepada badan usaha atau lembaga penerima investasi daerah.

Secara keseluruhan, belum adanya realisasi pembiayaan daerah pada Triwulan I merupakan kondisi yang masih wajar mengingat pelaksanaan pembiayaan, khususnya penyertaan modal daerah, umumnya dilakukan setelah seluruh persyaratan administratif, teknis, dan regulasi terpenuhi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu memastikan kesiapan dokumen, mempercepat proses koordinasi dengan pihak terkait, serta melakukan pemantauan secara berkala agar pelaksanaan pembiayaan daerah dapat direalisasikan sesuai dengan rencana dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2026.

3.4 Analisis Struktur Fiskal Daerah Tahun 2026

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, kondisi fiskal daerah dapat dilihat dari perkembangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Target pendapatan daerah Tahun 2026 sebesar Rp5.763.691.465.300,00, dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp2.318.418.134.806,46 atau 40,22 persen. Sementara itu, total belanja daerah memiliki anggaran sebesar Rp5.738.691.465.300,00, dengan realisasi sebesar Rp1.437.661.845.460,78 atau 25,05 persen. Dengan demikian, sampai dengan akhir Triwulan II terdapat selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja sebesar Rp880.756.289.345,68, yang menunjukkan posisi fiskal kas daerah secara pelaksanaan masih mencatat surplus antara pendapatan dan belanja pada periode berjalan. Namun, kondisi tersebut perlu dipandang sebagai surplus sementara karena realisasi pendapatan dan belanja masih akan terus berlangsung pada semester kedua.

Dari sisi pendapatan daerah, capaian sebesar 40,22 persen menunjukkan bahwa penerimaan daerah telah berjalan cukup baik, meskipun masih berada di bawah proporsi waktu tahun anggaran yang telah mencapai 50 persen. Kinerja pendapatan terutama didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah mencapai 58,60 persen, sedangkan Pendapatan Transfer terealisasi sebesar 39,41 persen. PAD menunjukkan perkembangan yang relatif positif karena telah melampaui separuh target tahunan. Namun demikian, struktur pendapatan masih didominasi oleh pendapatan transfer, sehingga tingkat kemandirian fiskal daerah masih perlu

diperkuat. Selain itu, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah belum menunjukkan realisasi sampai dengan Triwulan II, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap sumber dan kepastian penerimaannya pada semester berikutnya.

Dari sisi belanja daerah, realisasi sebesar 25,05 persen menunjukkan tingkat penyerapan yang relatif rendah dibandingkan dengan perkembangan waktu pelaksanaan anggaran. Rendahnya realisasi terutama disebabkan oleh Belanja Modal yang baru mencapai 4,94 persen dari anggaran Rp1.553.632.028.716,29. Padahal, belanja modal memiliki peran strategis dalam penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan publik. Belanja Operasi telah terealisasi sebesar 34,14 persen, sedangkan Belanja Transfer mencapai 27,81 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja yang bersifat rutin relatif lebih cepat terealisasi dibandingkan belanja pembangunan/investasi. Rendahnya realisasi belanja modal perlu menjadi perhatian karena keterlambatan pelaksanaan belanja tersebut dapat berpengaruh terhadap pencapaian output pembangunan serta menimbulkan risiko penumpukan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran.

Dari sisi pembiayaan daerah, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 belum terdapat realisasi pembiayaan atau sebesar 0 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan periode evaluasi belum terdapat kontribusi realisasi penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan dalam mendukung posisi fiskal daerah. Dengan belum terealisasinya pembiayaan, posisi fiskal sementara terutama ditopang oleh realisasi pendapatan daerah. Hal ini perlu terus dipantau sejalan dengan perkembangan belanja pada semester kedua, khususnya apabila terjadi percepatan belanja yang menyebabkan kebutuhan pembiayaan meningkat atau apabila realisasi pendapatan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, kondisi fiskal Kabupaten Kutai Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan sebesar 40,22 persen lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja sebesar 25,05 persen, sehingga terdapat selisih positif sementara sebesar Rp880,76 miliar antara pendapatan dan belanja yang telah terealisasi. Kondisi ini memberikan ruang fiskal pada periode berjalan, tetapi belum dapat diartikan sebagai kemampuan fiskal akhir tahun karena masih terdapat target pendapatan dan belanja yang cukup besar yang harus direalisasikan pada Triwulan III dan IV. Oleh karena itu, fokus pengelolaan fiskal pada semester kedua perlu diarahkan pada percepatan belanja yang berkualitas, khususnya belanja modal, optimalisasi PAD, kepastian realisasi pendapatan transfer, serta pengendalian risiko fiskal akibat kemungkinan ketidaksesuaian antara target dan realisasi pendapatan maupun belanja.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, strategi fiskal daerah pada semester kedua Tahun 2026 perlu diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kapasitas pendapatan, kemampuan penyerapan belanja, dan kebutuhan pembiayaan. Perangkat daerah perlu mempercepat pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu melakukan monitoring terhadap perangkat daerah dengan tingkat penyerapan rendah, terutama kegiatan belanja modal dengan pagu besar, serta melakukan evaluasi berkala terhadap proyeksi pendapatan dan belanja sampai dengan akhir tahun. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD Tahun 2026 tetap sehat, kredibel, dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD.

3.5 Implikasi Kebijakan Keuangan Daerah terhadap Pembangunan Tahun 2026

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan, terutama dalam hal kemampuan fiskal daerah dalam membiayai program prioritas, kecepatan pelaksanaan kegiatan, serta pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi pendapatan mencapai Rp2,318 triliun atau 40,22 persen, sedangkan realisasi belanja mencapai Rp1,438 triliun atau 25,05 persen. Selisih antara realisasi pendapatan dan belanja sebesar sekitar Rp880,76 miliar menunjukkan adanya ruang fiskal sementara, namun kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kapasitas fiskal akhir tahun karena sebagian besar anggaran pendapatan maupun belanja masih harus direalisasikan pada semester kedua.

Dari sisi pendapatan, capaian PAD sebesar 58,60 persen memberikan sinyal positif terhadap kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri. Namun demikian, struktur pendapatan masih sangat bergantung pada Pendapatan Transfer, yang sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar 39,41 persen dan menjadi sumber terbesar pendapatan daerah. Ketergantungan tersebut berimplikasi pada fleksibilitas fiskal daerah, khususnya dalam menentukan ruang belanja pembangunan yang dapat dibiayai secara mandiri. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan Tahun 2026 perlu tetap mempertimbangkan kepastian penerimaan transfer sekaligus mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan agar ketahanan fiskal daerah semakin kuat.

Dari sisi belanja, rendahnya realisasi Belanja Modal yang baru mencapai 4,94 persen memiliki implikasi langsung terhadap kecepatan pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana publik. Belanja modal yang belum optimal dapat menyebabkan sebagian output pembangunan belum dapat dirasakan masyarakat sesuai jadwal yang direncanakan. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan penumpukan pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran pada Triwulan III dan IV. Oleh sebab itu, kebijakan keuangan daerah perlu diarahkan pada percepatan belanja modal dan belanja barang/jasa, terutama kegiatan yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan, tanpa mengabaikan kesiapan teknis, kualitas pekerjaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Implikasi lainnya adalah perlunya penajaman prioritas belanja daerah. Dengan keterbatasan sumber daya fiskal dan masih tingginya ketergantungan terhadap transfer, anggaran perlu semakin diarahkan kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan konektivitas, pengembangan sumber daya manusia, serta diversifikasi ekonomi daerah. Belanja yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan perlu dievaluasi tingkat urgensi dan efektivitasnya sehingga ruang fiskal dapat lebih banyak diarahkan untuk belanja yang bersifat produktif dan memiliki multiplier effect terhadap perekonomian daerah.

Sementara itu, realisasi pembiayaan yang masih 0 persen menunjukkan bahwa sampai dengan Triwulan II belum terdapat dukungan pembiayaan yang terealisasi dalam pelaksanaan APBD. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam pengendalian fiskal apabila pada semester kedua terjadi peningkatan kebutuhan belanja atau terdapat perubahan proyeksi pendapatan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan pembiayaan tetap dilakukan secara hati-hati, terukur, dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak menimbulkan tekanan fiskal pada tahun anggaran berikutnya.

Dengan demikian, implikasi utama kebijakan keuangan daerah terhadap pembangunan Tahun 2026 adalah perlunya menjaga kesinambungan fiskal sekaligus mempercepat realisasi belanja yang berkualitas. Pemerintah daerah perlu menjaga momentum peningkatan PAD, memastikan pendapatan transfer terealisasi sesuai jadwal, mempercepat pelaksanaan belanja modal, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja. Kebijakan tersebut harus disertai monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hubungan antara anggaran, realisasi keuangan, output kegiatan, dan capaian sasaran pembangunan, sehingga setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

BAB 4

PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPJMD DALAM RKPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang menjadi acuan utama dalam perumusan tujuan, sasaran, program pembangunan, serta kerangka pendanaan daerah. Dalam sistem perencanaan daerah, RKPD disusun sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD, sehingga tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD menjadi indikator penting untuk menilai kualitas konsistensi perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks tersebut, pengendalian pelaksanaan RPJMD dalam RKPD diperlukan untuk memastikan bahwa arah pembangunan tahunan tetap berada dalam koridor kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Timur. Hal ini sejalan dengan kedudukan RKPD Tahun 2026 sebagai dokumen tahunan yang disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029.

Bab ini memfokuskan analisis pada konsistensi antara RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 dengan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026, yang meliputi tujuan pembangunan, sasaran pembangunan, program, indikator kinerja, target kinerja, pagu indikatif, serta penjabaran pada tingkat perangkat daerah. Adapun RKPD Tahun 2026 digunakan sebagai konteks untuk membaca adanya penyesuaian kebijakan pada tahun berjalan, tanpa mengubah kedudukan RKPD sebagai objek utama pengujian konsistensi dokumen perencanaan. Dengan demikian, analisis pada bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kualitas penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2026, sekaligus menjadi dasar bagi penguatan konsistensi perencanaan pembangunan daerah pada periode berikutnya.

4.1 Konsistensi Tujuan Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD

Tujuan pembangunan pada RKPD Tahun 2026 harus merupakan penjabaran langsung dari tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029. Konsistensi tujuan menjadi unsur mendasar karena tujuan merupakan pengarah utama bagi perumusan sasaran, indikator kinerja, program pembangunan, serta arah alokasi sumber daya daerah. RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 menegaskan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, sedangkan RKPD Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029. Dengan demikian, pengendalian terhadap konsistensi tujuan pembangunan diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan tahunan tetap berada dalam koridor pembangunan jangka menengah daerah.

Dalam struktur perencanaan daerah, satu misi pembangunan dapat dijabarkan ke dalam satu atau lebih tujuan pembangunan. Pada beberapa misi terdapat lebih dari satu tujuan yang dirumuskan untuk menjelaskan arah kebijakan secara lebih spesifik. Pola ini bersifat wajar dalam dokumen perencanaan karena misi merupakan arah besar pembangunan, sedangkan tujuan merupakan penjabaran strategis yang lebih operasional. Dengan struktur tersebut, pengulangan yang tampak pada tabel bukan menunjukkan duplikasi tujuan, melainkan menunjukkan bahwa satu misi memiliki lebih dari satu tujuan yang saling melengkapi. Hal ini terlihat, misalnya, pada misi tata kelola pemerintahan yang dijabarkan ke dalam tujuan penataan tata kelola pemerintahan dan tujuan peningkatan kualitas layanan publik, serta pada misi pengembangan

wilayah berwawasan lingkungan yang dijabarkan ke dalam tujuan integrasi pembangunan wilayah dan tujuan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 dan RKPD Tahun 2026, rumusan tujuan pembangunan pada RKPD tetap mengacu pada 5 misi pembangunan daerah dan dijabarkan ke dalam 8 tujuan pembangunan. Secara umum, seluruh tujuan pembangunan dalam RKPD Tahun 2026 menunjukkan kesesuaian dengan tujuan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026, baik dari sisi substansi maupun rumusan tujuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tingkat tujuan, RKPD Tahun 2026 telah mempertahankan arah pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Konsistensi ini penting karena menjadi prasyarat agar kebijakan, program, dan kegiatan tahunan tidak keluar dari orientasi strategis pembangunan daerah.

Tabel 4.1 Perbandingan Tujuan Pembangunan pada RPJMD dan RKPD Tahun 2026

No	Misi	No Tujuan	RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2026–2029	RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026
1	Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah Melalui Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat, Cerdas, serta Berprestasi	T1	Mewujudkan SDM Yang berkualitas	Mewujudkan SDM Yang berkualitas
2	Transformasi Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Berbasis Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan	T2	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi berbasis potensi lokal	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi berbasis potensi lokal
3	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Mendukung Konektivitas Antar Wilayah dan Pemerintahan yang Berintegritas			
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas	T3	Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif	Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif
5	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu dan Berkesinambungan	T5	Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkelanjutan	Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkelanjutan

Sumber: diolah dari RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 dan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

Perbandingan Tujuan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 dan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa terdapat konsistensi yang kuat antara tujuan pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan pembangunan tahunan. Seluruh tujuan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran langsung dari tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2026 telah mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka menengah, sehingga pelaksanaan pembangunan tahunan tetap berada pada koridor pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Pada **Tujuan 1 (T1)**, baik dalam RPJMD maupun RKPD ditetapkan tujuan "**Mewujudkan SDM yang berkualitas**" sebagai penjabaran dari misi peningkatan dan pemerataan daya saing daerah melalui pengembangan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat, cerdas, dan berprestasi. Keselarasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi prioritas utama pada Tahun 2026 melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, penguatan karakter, serta peningkatan kompetensi masyarakat sebagai modal utama pembangunan daerah.

Selanjutnya, **Tujuan 2 (T2)** yaitu "**Mewujudkan Kemandirian Ekonomi berbasis potensi lokal**" juga menunjukkan konsistensi penuh antara RPJMD dan RKPD. Tujuan ini mendukung misi transformasi ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, peternakan, perikanan, kelautan, serta pembangunan infrastruktur dasar dan digital sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi. Keselarasan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong transformasi ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, **Tujuan 3 (T3)** dalam RPJMD maupun RKPD sama-sama diarahkan untuk "**Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan responsif**". Konsistensi ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tetap menjadi agenda prioritas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, serta memperkuat integritas aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, **Tujuan 5 (T5)** yaitu "**Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan**" juga tetap dipertahankan dalam RKPD Tahun 2026 sebagai implementasi dari misi pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan. Tujuan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan hasil pembangunan, pelestarian lingkungan hidup, mitigasi perubahan iklim, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan antara RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 dan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 menunjukkan **konsistensi penuh (100%)** pada seluruh tujuan pembangunan. Tidak terdapat perubahan substansi tujuan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026, sehingga dapat disimpulkan bahwa dokumen RKPD telah disusun secara selaras dengan dokumen RPJMD sebagai pedoman pembangunan jangka menengah daerah. Konsistensi tersebut menjadi indikator bahwa proses perencanaan pembangunan daerah telah menerapkan prinsip kesinambungan (continuity), sinkronisasi, dan integrasi kebijakan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan tahunan diharapkan mampu

memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan Kabupaten Kutai Timur periode 2026–2029.

Secara keseluruhan, konsistensi tujuan pembangunan antara RKPD Tahun 2026 dan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 berada pada tingkat sangat tinggi. Tidak ditemukan perubahan rumusan tujuan yang bersifat substantif. Seluruh tujuan dalam RKPD tetap berada dalam koridor lima misi dan empat tujuan RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa arah pembangunan tahunan masih terjaga dengan baik, meskipun keselarasannya tetap perlu diuji lebih lanjut pada tingkat sasaran, indikator, target, program, dan pagu anggaran.

4.2 Konsistensi Sasaran Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD

Sasaran pembangunan merupakan penjabaran langsung dari tujuan pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam RPJMD. Konsistensi sasaran antara RKPD Tahun 2026 dan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 menjadi unsur penting dalam menilai kualitas penjabaran perencanaan jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan. Sasaran yang konsisten menunjukkan bahwa arah pembangunan tahunan tetap berada dalam koridor strategis daerah, sedangkan ketidaksesuaian sasaran dapat memengaruhi keterpaduan indikator kinerja, target, program, dan alokasi anggaran. Dalam konteks ini, perbandingan pada subbab ini difokuskan pada kesesuaian sasaran pembangunan antara RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 dan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026, dengan Perubahan RKPD Tahun 2026 digunakan sebagai konteks untuk melihat keterjagaan arah sasaran pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen, sasaran pembangunan yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2026 masih mengikuti struktur sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029. Secara substansial, tidak ditemukan pergeseran sasaran yang bersifat mendasar. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat sasaran, RKPD Tahun 2026 masih menjaga kesinambungan strategi pembangunan jangka menengah daerah dan tetap menjadi penjabaran tahunan yang selaras dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel 4.2 Perbandingan Sasaran Pembangunan pada RPJMD dan RKPD Tahun 2026

No Tujuan	No Sasaran	Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2026–2029	Sasaran RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026
T1	S1	Terwujudnya layanan kesehatan yang prima dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Terwujudnya layanan kesehatan yang prima dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat
T1	S2	Terwujudnya layanan pendidikan berkualitas yang merata	Terwujudnya layanan pendidikan berkualitas yang merata
T1	S3	Meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender
T1	S4	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
T2	S1	Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor non tambang	Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor non tambang
T2	S2	Meningkatkan kinerja dan daya saing industri pengolahan	Meningkatkan kinerja dan daya saing industri pengolahan

No Tujuan	No Sasaran	Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2026–2029	Sasaran RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026
T2	S3	Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatnya ketahanan pangan
T2	S4	Terwujudnya ekosistem sosial dan ekonomi yang ramah investasi	Terwujudnya ekosistem sosial dan ekonomi yang ramah investasi
T2	S5	Terwujudnya integrasi ekonomi Kutai Timur dengan ekonomi domestik, nasional, dan global	Terwujudnya integrasi ekonomi Kutai Timur dengan ekonomi domestik, nasional, dan global
T2	S6	Terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan antara desa dan kota	Terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan antara desa dan kota
T3	S1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, efektif, adaptif, dan visioner	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, efektif, adaptif, dan visioner
T3	S2	Meningkatnya kualitas layanan publik	Meningkatnya kualitas layanan publik
T3	S3	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas
T4	S1	Pembangunan ramah lingkungan dan resiliensi terhadap bencana	Pembangunan ramah lingkungan dan resiliensi terhadap bencana
T4	S2	Terwujudnya kesiapsiagaan daerah terhadap bencana	Terwujudnya kesiapsiagaan daerah terhadap bencana

Sumber: diolah dari RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 dan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

Berdasarkan hasil perbandingan sasaran pembangunan antara RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 dengan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026, dapat diketahui bahwa seluruh sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2026 telah disusun secara konsisten dengan sasaran yang tercantum dalam RPJMD. Tidak terdapat perubahan substansi maupun penambahan atau pengurangan sasaran pada setiap tujuan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa RKPD Tahun 2026 telah berfungsi sebagai penjabaran operasional tahun pertama pelaksanaan RPJMD, sehingga arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tetap selaras dengan target pembangunan jangka menengah daerah.

Pada **Tujuan 1 (Mewujudkan SDM yang Berkualitas)**, seluruh sasaran dalam RPJMD dipertahankan secara utuh dalam RKPD Tahun 2026. Sasaran tersebut meliputi terwujudnya layanan kesehatan yang prima dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terwujudnya layanan pendidikan berkualitas yang merata, meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender, serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Konsistensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah

melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan perlindungan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada **Tujuan 2 (Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal)**, seluruh enam sasaran juga menunjukkan kesesuaian penuh antara RPJMD dan RKPD. Sasaran tersebut meliputi mendorong pertumbuhan ekonomi sektor non tambang, meningkatkan kinerja dan daya saing industri pengolahan, meningkatkan ketahanan pangan, mewujudkan ekosistem sosial dan ekonomi yang ramah investasi, mewujudkan integrasi ekonomi Kutai Timur dengan ekonomi domestik, nasional, dan global, serta mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan antara desa dan kota. Keselarasan tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam memperkuat transformasi ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah produk lokal, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta penguatan konektivitas antarwilayah sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada **Tujuan 3 (Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel, dan Responsif)**, sasaran dalam RKPD Tahun 2026 juga identik dengan sasaran dalam RPJMD, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, adaptif, dan visioner, meningkatnya kualitas layanan publik, serta terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas. Konsistensi tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola keuangan daerah tetap menjadi fokus utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Selanjutnya, pada **Tujuan 4 (Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan)**, RKPD Tahun 2026 juga mempertahankan seluruh sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yaitu pembangunan yang ramah lingkungan dan berketahanan terhadap bencana serta terwujudnya kesiapsiagaan daerah terhadap bencana. Keselarasan ini menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan pembangunan dan pengurangan risiko bencana tetap menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan daerah, sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 memiliki tingkat konsistensi 100 persen terhadap sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029. Tidak terdapat perbedaan substansi pada setiap sasaran yang telah ditetapkan. Konsistensi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan RKPD telah mengacu secara penuh pada dokumen RPJMD sebagai pedoman pembangunan jangka menengah daerah. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026 diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian target pembangunan lima tahunan, sekaligus menjamin kesinambungan, sinkronisasi, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.

Secara keseluruhan, konsistensi sasaran pembangunan antara RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026-2029 berada pada tingkat sangat tinggi. Seluruh sasaran yang termuat dalam RKPD secara substansial masih sama dengan sasaran dalam RPJMD, tanpa adanya perubahan mendasar pada arah pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada level sasaran, RKPD Tahun 2026 telah menjaga kesinambungan strategi pembangunan jangka menengah secara baik. Namun demikian, konsistensi sasaran perlu dibaca lebih lanjut bersama indikator, target, program, dan pagu anggaran, karena kualitas penjabaran RPJMD tidak hanya

ditentukan oleh kesamaan rumusan, tetapi juga oleh keterjagaan hubungan logis antara sasaran dengan instrumen pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil subbab ini menegaskan bahwa dari sisi sasaran, fondasi konsistensi RKPD Tahun 2026 terhadap RPJMD masih kuat dan menjadi dasar yang baik bagi analisis pada subbab berikutnya.

4.3 Konsistensi Program antara RKPD dengan RPJMD

Konsistensi program antara RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 merupakan salah satu ukuran penting untuk menilai kualitas penjabaran dokumen perencanaan jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan. Program merupakan instrumen utama yang menjembatani tujuan dan sasaran pembangunan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Tingkat konsistensi program tidak hanya mencerminkan keselarasan administratif antar dokumen, tetapi juga menunjukkan apakah arah kebijakan pembangunan tahunan tetap berada dalam koridor strategi pembangunan jangka menengah daerah. RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 menegaskan bahwa program pembangunan daerah harus dijabarkan secara tahunan ke dalam RKPD agar tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan terukur.

Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2026 tercatat sebesar **99,73 persen** dari target **100 persen**. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum struktur program pada RKPD Tahun 2026 masih sangat selaras dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029. Pada saat yang sama, penjabaran konsistensi program RPJMD dan RKPD ke dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah tercatat **100 persen**. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, sinkronisasi program pada tingkat perangkat daerah telah berjalan optimal, meskipun pada tahap penjabaran dari RPJMD ke RKPD masih terdapat sebagian kecil inkonsistensi yang perlu dicermati.

Tabel 4.3 Konsistensi Jumlah Program antara RPJMD dan RKPD Tahun 2026 per Perangkat Daerah

No	Nama OPD pada RPJMD	Jumlah Program RPJMD	Nama OPD pada RKPD	Jumlah Program RKPD	Inkonsistensi	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	0	
2	Dinas Kesehatan	73	Dinas Kesehatan	73	0	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21	0	
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4	0	

No	Nama OPD pada RPJMD	Jumlah Program RPJMD	Nama OPD pada RKPD	Jumlah Program RKPD	Inkonsistensi	Keterangan
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2	Satuan Polisi Pamong Praja	2	0	
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	0	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	0	
8	Dinas Sosial	5	Dinas Sosial	5	0	
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	9	0	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	0	
11	Dinas Ketahanan Pangan	5	Dinas Ketahanan Pangan	5	0	
12	Dinas Pertanahan	6	Dinas Pertanahan	6	0	
13	Dinas Lingkungan Hidup	7	Dinas Lingkungan Hidup	7	0	
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4	0	
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	0	
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan	4	Dinas Pengendalian Penduduk dan	4	0	

No	Nama OPD pada RPJMD	Jumlah Program RPJMD	Nama OPD pada RKPD	Jumlah Program RKPD	Inkonsistensi	Keterangan
	Keluarga Berencana		Keluarga Berencana			
17	Dinas Perhubungan	4	Dinas Perhubungan	3	0	Program Pengelolaan Perkeretaapian tidak diakomodir
18	Dinas Komunikasi, Informastika, Persandian dan Statistik	5	Dinas Komunikasi, Informastika, Persandian dan Statistik	5	0	
19	Dinas Koperasi, dan UMKM	7	Dinas Koperasi dan UMKM	7	0	
20	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3	0	
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	0	
22	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	8	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	8	0	
23	Dinas Perikanan	10	Dinas Perikanan	10	0	
24	Dinas Pariwisata	5	Dinas Pariwisata	5	0	
25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	6	0	
26	Dinas Perkebunan	6	Dinas Perkebunan	6	0	
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9	0	
28	Sekretariat Daerah	3	Sekretariat Daerah	3	0	

No	Nama OPD pada RPJMD	Jumlah Program RPJMD	Nama OPD pada RKPD	Jumlah Program RKPD	Inkonsistensi	Keterangan
29	Sekretariat DPRD	2	Sekretariat DPRD	2	0	
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	0	
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3	0	
32	Badan Pendapatan Daerah	2	Badan Pendapatan Daerah	2	0	
33	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	0	
34	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2	0	
35	Inspektorat Daerah	3	Inspektorat	3	0	
36	Kecamatan Sangkulirang	6	Kecamatan Sangkulirang	6	0	
37	Kecamatan Kaliorang	6	Kecamatan Kaliorang	6	0	
38	Kecamatan Sandaran	6	Kecamatan Sandaran	6	0	
39	Kecamatan Bengalon	6	Kecamatan Bengalon	6	0	
40	Kecamatan Muara Wahau	6	Kecamatan Muara Wahau	6	0	
41	Kecamatan Kombeng	6	Kecamatan Kombeng	6	0	
42	Kecamatan Muara Ancalong	6	Kecamatan Muara Ancalong	6	0	

No	Nama OPD pada RPJMD	Jumlah Program RPJMD	Nama OPD pada RKPD	Jumlah Program RKPD	Inkonsistensi	Keterangan
43	Kecamatan Batu Ampar	6	Kecamatan Batu Ampar	6	0	
44	Kecamatan Long Mesangat	6	Kecamatan Long Mesangat	6	0	
45	Kecamatan Busang	6	Kecamatan Busang	6	0	
46	Kecamatan Karangan	6	Kecamatan Karangan	6	0	
47	Kecamatan Kaubun	6	Kecamatan Kaubun	6	0	
48	Kecamatan Rantau Pulung	6	Kecamatan Rantau Pulung	6	0	
49	Kecamatan Teluk Pandan	6	Kecamatan Teluk Pandan	6	0	
50	Kecamatan Muara Bengkal	6	Kecamatan Muara Bengkal	6	0	
51	Kecamatan Sangatta Utara	6	Kecamatan Sangatta Utara	6	0	
52	Kecamatan Sangatta Selatan	6	Kecamatan Sangatta Selatan	6	0	
53	Kecamatan Telen	6	Kecamatan Telen	6	0	
54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	0	

Sumber: diolah dari tabel konsistensi jumlah program RKPD dan RPJMD Tahun 2026.

Berdasarkan hasil perbandingan jumlah program pada **RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029** dengan **RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026**, secara umum terdapat **konsistensi yang sangat tinggi** antara kedua dokumen perencanaan tersebut. Seluruh perangkat daerah telah mengakomodasi program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2026 sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan RKPD telah mengacu pada arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tahunan tetap berada dalam koridor pencapaian target RPJMD.

Sebagian besar perangkat daerah memiliki jumlah program yang sama antara RPJMD dan RKPD. Konsistensi tersebut terlihat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pelayanan

dasar, urusan pemerintahan wajib, maupun urusan pemerintahan pilihan, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, seluruh kecamatan, serta perangkat daerah lainnya. Kesesuaian jumlah program tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan arah kebijakan maupun pengurangan ruang lingkup program dalam RKPD Tahun 2026 dibandingkan dengan yang telah direncanakan dalam RPJMD.

Meskipun demikian, terdapat beberapa perangkat daerah yang mengalami penyesuaian pada tingkat implementasi program tanpa mengubah arah kebijakan pembangunan secara substansial. Pada **Dinas Perhubungan**, jumlah program dalam RKPD menjadi **3 program** dibandingkan **4 program** pada RPJMD karena **Program Pengelolaan Perkeretaapian** belum diakomodasi dalam RKPD Tahun 2026. Penyesuaian ini dapat disebabkan oleh pertimbangan prioritas pembangunan, kesiapan pelaksanaan, maupun belum tersedianya kebutuhan pendanaan pada tahun berjalan. Selain itu, **Dinas Perikanan** melaksanakan **5 program** pada RKPD dari **10 program** yang tercantum dalam RPJMD. Kondisi ini menunjukkan adanya tahapan implementasi program sesuai prioritas pembangunan tahun pertama RPJMD, sehingga sebagian program direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya tanpa mengurangi pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Selain penyesuaian jumlah program, terdapat pula beberapa perubahan nomenklatur perangkat daerah yang tidak memengaruhi substansi program, seperti perubahan penulisan **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** menjadi **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**, **Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan** menjadi **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, serta **Inspektorat Daerah** menjadi **Inspektorat**. Perubahan tersebut merupakan penyesuaian nomenklatur organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi maupun program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat konsistensi program antara RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 dan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 **sangat tinggi**, dengan sebagian besar perangkat daerah mempertahankan jumlah program yang sama sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD. Penyesuaian yang terjadi hanya bersifat terbatas dan lebih disebabkan oleh prioritas pelaksanaan program pada tahun pertama RPJMD, bukan karena perubahan arah kebijakan pembangunan. Dengan demikian, RKPD Tahun 2026 telah mencerminkan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah dan menjadi instrumen yang efektif dalam mengimplementasikan program-program prioritas menuju pencapaian target RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029.

4.4 Konsistensi Indikator Kinerja antara RKPD dengan RPJMD

Konsistensi indikator kinerja antara RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tahunan tetap dapat diukur dengan instrumen yang sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah. Indikator kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan program, tetapi juga sebagai penghubung antara sasaran pembangunan, target tahunan, dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah. Perubahan jumlah indikator perlu dicermati secara teknokratik, karena dapat memengaruhi kesinambungan pengukuran kinerja pembangunan daerah dari dokumen jangka menengah ke dokumen tahunan. RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 menegaskan bahwa indikator kinerja daerah ditetapkan sebagai

alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, dan setiap target tahunan harus disusun secara bertahap agar kesinambungan evaluasinya terjaga.

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen, jumlah indikator kinerja antara RPJMD dan RKPD Tahun 2026 menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi, namun belum sepenuhnya sama pada semua perangkat daerah. Sebagian besar perangkat daerah mempertahankan jumlah indikator yang sama, sedangkan sebagian lainnya mengalami penambahan, pengurangan, atau perubahan akibat penyesuaian nomenklatur, restrukturisasi kelembagaan, dan penajaman fokus pengukuran kinerja. Secara teknokratik, kondisi ini menunjukkan bahwa RKPD Tahun 2026 pada dasarnya masih menjaga arah pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD, meskipun terdapat penyesuaian pada beberapa sektor. Dokumen evaluasi RKPD Tahun 2026 juga menjelaskan bahwa ketidakkonsistenan jumlah indikator terutama dipengaruhi oleh perubahan nomenklatur OPD, penyesuaian terhadap kebijakan nasional dan daerah, serta penyederhanaan atau penyempurnaan metode pengukuran kinerja.

Tabel 4.4 Konsistensi Indikator Kinerja antara RKPD dengan RPJMD Tahun 2026

No.	Persangkat Daerah	Jumlah Indikator Program RPJMD	Jumlah Indikator Program RKPD	Inkonsisten	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21	21	0	
2	Dinas Kesehatan	39	39	0	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	12	0	
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7	7	0	
5	Satuan Polisi Pamong Praja	9	9	0	
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5	5	0	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	5	0	
8	Dinas Sosial	8	8	0	
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	9	9	0	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	9	0	
11	Dinas Ketahanan Pangan	6	6	0	
12	Dinas Pertanahan	7	7	0	
13	Dinas Lingkungan Hidup	12	12	0	
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	9	0	
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	6	0	

No.	Persangkat Daerah	Jumlah Indikator Program RPJMD	Jumlah Indikator Program RKPD	Inkonsisten	Keterangan
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	8	0	
17	Dinas Perhubungan	5	4	1	
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	7	7	0	
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	8	8	0	
20	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	7	7	0	
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7	7	0	
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	7	0	
23	Dinas Perikanan	6	6	0	
24	Dinas Pariwisata	7	7	0	
25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	12	12	0	
26	Dinas Perkebunan	9	9	0	
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11	11	0	
28	Sekretariat Daerah	11	11	0	
29	Sekretariat DPRD	3	3	0	
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	7	0	
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8	8	0	
32	Badan Pendapatan Daerah	6	6	0	
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	7	0	
34	Badan Riset dan Inovasi Daerah	4	4	0	
35	Inspektorat	6	6	0	
36	Kantor Camat Sangatta Selatan	7	7	0	
37	Kantor Lurah Singa Geweh	3	3	0	
38	Kantor Camat Sangatta Utara	7	7	0	
39	Kantor Lurah Teluk Lingga	3	3	0	
40	Kantor Camat Bengalon	7	7	0	
41	Kantor Camat Kaliorang	7	7	0	

No.	Persangkat Daerah	Jumlah Indikator Program RPJMD	Jumlah Indikator Program RKPD	Inkonsisten	Keterangan
42	Kantor Camat Muara Wahau	7	7	0	
43	Kantor Camat Kombeng	7	7	0	
44	Kantor Camat Muara Ancalong	7	7	0	
45	Kantor Camat Batu Ampar	7	7	0	
46	Kantor Camat Telen	7	7	0	
47	Kantor Camat Busang	7	7	0	
48	Kantor Camat Teluk Pandan	7	7	0	
49	Kantor Camat Rantau Pulung	7	7	0	
50	Kantor Camat Kaubun	7	7	0	
51	Kantor Camat Sangkulirang	7	7	0	
52	Kantor Camat Muara Bengkal	7	7	0	
53	Kantor Camat Long Mesangat	7	7	0	
54	Kantor Camat Karangan	7	7	0	
55	Kantor Camat Sandaran	7	7	0	
56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	8	0	
		450	449	1	

Sumber: diolah dari matriks konsistensi indikator kinerja RPJMD dan RKPD Tahun 2026.

Dari hasil rekapitulasi kesesuaian jumlah indikator program RPJMD dan RKPD pada Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Timur, secara umum terdapat tingkat konsistensi yang sangat tinggi. Total keseluruhan indikator program yang direncanakan dalam RPJMD sebanyak 450 indikator, sedangkan pada RKPD tercatat sebanyak 449 indikator, sehingga terdapat selisih 1 indikator. Selisih tersebut menunjukkan tingkat inkonsistensi yang sangat kecil, yaitu hanya terjadi pada 1 Perangkat Daerah dari 56 Perangkat Daerah yang dievaluasi.

Dari 56 Perangkat Daerah, sebanyak 55 Perangkat Daerah (sekitar 98,2%) telah menunjukkan kesesuaian penuh antara jumlah indikator program RPJMD dan RKPD, dengan nilai inkonsistensi 0. Perangkat Daerah tersebut mencerminkan bahwa proses penjabaran perencanaan strategis ke dalam dokumen tahunan telah berjalan dengan baik dan selaras.

Sementara itu, terdapat 1 Perangkat Daerah yang mengalami inkonsistensi, yaitu Dinas Perhubungan, dengan selisih 1 indikator (RPJMD 5 indikator dan RKPD 4 indikator). Kondisi ini menjadi catatan teknis yang perlu dilakukan klarifikasi dan penyesuaian agar konsistensi perencanaan dapat sepenuhnya terjaga.

Secara keseluruhan, konsistensi indikator kinerja antara RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 berada pada kategori tinggi. Sebagian besar perangkat daerah mempertahankan jumlah indikator yang sama, sementara perubahan yang terjadi pada sebagian perangkat daerah terutama disebabkan oleh penyesuaian nomenklatur, penggabungan atau pemisahan urusan, serta penajaman pengukuran kinerja. Hasil evaluasi ini menunjukkan

bahwa secara indikator, RKPD Tahun 2026 masih cukup kuat dalam menjaga kesinambungan sistem pengukuran kinerja pembangunan jangka menengah. Namun demikian, perubahan pada beberapa perangkat daerah tetap perlu menjadi perhatian agar sinkronisasi indikator, target, dan pagu anggaran pada subbab berikutnya tetap terjaga secara utuh.

4.5 Konsistensi Target Kinerja antara RKPD dengan RPJMD

Konsistensi target kinerja antara RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa pencapaian pembangunan tahunan tetap berada pada jalur yang telah dirancang dalam dokumen pembangunan jangka menengah. Target kinerja yang dimuat dalam RKPD seharusnya mencerminkan tahapan pencapaian yang telah ditetapkan dalam RPJMD, sehingga setiap indikator pembangunan dapat diukur secara berkelanjutan dan sejalan dengan arah kebijakan daerah. Pada dokumen evaluasi RKPD Tahun 2026 ditegaskan bahwa sebagian besar target indikator kinerja dalam RKPD telah disusun dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD 2026–2029, sehingga tingkat konsistensinya secara umum tergolong tinggi. Ketidakesesuaian target yang masih muncul terutama dipengaruhi oleh penyesuaian capaian tahun sebelumnya, perubahan nomenklatur OPD, serta kebutuhan penyesuaian terhadap kondisi aktual pembangunan daerah.

Dari sudut pandang teknokratik, konsistensi target kinerja tidak hanya berarti kesamaan angka antara RKPD dan RPJMD, tetapi juga kesesuaian logika tahapan pencapaian. Dalam praktik perencanaan, terdapat target yang memang harus sama karena merupakan milestone tahunan yang sudah ditetapkan secara bertahap dalam RPJMD. Namun terdapat pula target yang disesuaikan di RKPD untuk merespons realisasi tahun sebelumnya, dinamika kebijakan, keterbatasan kapasitas, maupun perubahan kondisi makro pembangunan daerah. Evaluasi pada subbab ini diarahkan untuk menilai apakah perubahan target yang muncul masih berada dalam kerangka pencapaian RPJMD, atau justru berpotensi melemahkan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 4.5 Perbandingan Target Kinerja RPJMD dan RKPD Tahun 2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	82,00	82,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA PARTISIPASI ANAK USIA SEKOLAH	Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun (Angka)	71,72	71,72	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar 7-15 Tahun (Angka)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan 7-18 Tahun (Angka)	42,36	42,36	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI terhadap Penduduk Usia Sekolah per 10.000 (Rasio)	46.55:10000	46.55:10000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (Angka)	104,10	104,10	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) 7-12 Tahun Jenjang SD/MI (Angka)	97,33	97,33	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs terhadap Penduduk Usia Sekolah per 10.000 (Rasio)	43.64:10000	43.64:10000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) 13-15 Tahun Jenjang SMP/MTs (Angka)	86,86	86,86	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS (Angka)	106,00	106,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) 5-6 Tahun Jenjang PAUD (Angka)	79,65	79,65	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal yang Terakreditasi (%)	77,78	77,78	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA KUALITAS KURIKULUM PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
MENINGKATNYA MUTU DAN DISTRIBUSI PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. (Persentase)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	8,00	8,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	48,00	48,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	90,45	90,45	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	109,00	109,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	44,00	44,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,00	12,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	44,00	44,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	45,00	45,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	23,40	23,40	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	10,00	10,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	25,00	25,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,00	84,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)	98,20	98,20	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	68,00	68,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	84,00	84,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	88,00	88,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	86,00	86,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	90,00	90,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	8,90	8,90	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,30	8,30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	24,82	24,82	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95,00	95,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT RSUD KUDUNGA	Peringkat Kelulusan Akreditasi (Nilai Akreditasi)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PUSKESMAS SANDARAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	24,82	24,82	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	8,00	8,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95,00	95,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	48,00	48,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	90,45	90,45	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	109,00	109,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	44,00	44,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,00	12,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	44,00	44,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	45,00	45,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	23,40	23,40	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	10,00	10,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	25,00	25,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,00	84,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)	98,20	98,20	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	68,00	68,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	84,00	84,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	88,00	88,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	86,00	86,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	90,00	90,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	8,90	8,90	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,30	8,30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
MENINGKATNYA MUTU DAN DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi (Rasio)	6,81	6,81	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio Tenaga Medis Terhadap Populasi (Rasio)	0,85	0,85	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar. (%)	67,00	67,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)	76,19	76,19	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
MENINGKATNYA KUALITAS DAN DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT Sesuai standar (%)	20,00	20,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	40,00	40,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase sarana IRT yang memenuhi ketentuan (%)	20,00	20,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DINAS KESEHATAN	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	32,00	32,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	79,00	79,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP BANJIR DAN MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP IRIGASI	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	47,00	47,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Layanan Air Minum Layak Perpipaan (%)	62,28	62,28	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
MENINGKATNYA LAYANAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan (%)	91,59	91,59	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	0,77	0,77	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	Cakupan Wilayah Saluran Drainase Rawan Genangan Air/Banjir (%)	69,00	69,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
MENINGKATNYA KUALITAS BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	64,55	64,55	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
MENINGKATNYA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN YANG TERTATA	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (Rasio)	41,94	41,94	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT YANG NYAMAN DAN AMAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase kondisi mantap jalan (%)	42,57	42,57	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
MENINGKATNYA KOMPETENSI TENAGA KONSTRUKSI	Rasio tenaga terampil yang memiliki sertifikat kompetensi (Rasio)	11,37	11,37	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Wilayah Pemanfaatan sesuai Rencana Tata Ruang (%)	70,00	70,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	76,00	76,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
TERPENUHINYA RUMAHLAYAK HUNI BAGI WARGA NEGARA KORBAN BENCANA DAN YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	49,95	49,95	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	38,73	38,73	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
TERPENUHINYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TANPA KUMUH	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	16.25%	16.25%	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
MENINGKATNYA PENYEDIAAN PSU PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	32,00	32,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
MENINGKATNYA SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI AORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERENCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARAN DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENEGAH	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana ()	20,00	20,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Nilai SAKIP (Nilai)	52,00	52,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
MENINGKATNYA PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	20,00	20,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	4,00	4,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	90,00	90,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase jumlah sarana dan prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat (%)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar (%)	34,00	34,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Indeks Pra Bencana (Indeks)	0,31	0,31	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan (Indeks)	0,13	0,13	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Indeks Pasca Bencana (Indeks)	0,04	0,04	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
MENINGKATNYA LAYANAN PENCEGAHAN KEBAKARAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK) (%)	96,83	96,83	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Desa/Kelurahan yang tersosialisasi atau edukasi dalam Pencegahan Kebakaran (%)	60,28	60,28	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (%)	50,00	50,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	76,00	76,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	76,00	76,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)	22,18	22,18	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				
MEINGKATNYA LAYANAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Penanganan (%)	40,00	40,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
MENINGKATNYA REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Anak-Anak Terlantar yang Ditangani (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Cakupan Fakir Miskin yang Mendapatkan Pelatihan untuk Pengembangan Usaha (%)	35,26	35,26	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial (%)	40,00	40,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	79,33	79,33	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI MANDIRI	Nilai SAKIP (Nilai)	75,90	75,90	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	79,33	79,33	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				
TERKELOLANYA INFORMASI TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	19,97	19,97	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi (%)	90,54	90,54	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja (Juta Rp/Orang) (Juta Rupiah)	571,85	571,85	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI MANDIRI	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi (%)	90,54	90,54	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp Juta/Orang/Bulan)	571,85	571,85	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
MENINGKATNYA PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	26,77	26,77	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
MENINGKATNYA PEKERJA INDONESIA YANG TERLINDUNGI	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	71,73	71,73	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	96,00	96,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
MENINGKATNYA KUALITAS DAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PUG DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	Persentase ARG (%)	35,00	35,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
MENURUNNYA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
MENINGKATNYA KUALITAS KELUARGA DALAM Mendukung Kesejahteraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak	Persentase Keluarga yang Menerima Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender Anak yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
TERJAMINNYA PEMENUHAN HAK SEMUA ANAK SECARA KOMPREHENSIF	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	63,30	63,30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN, EKSPLOITASI, PENELANTARAN, PERKAWINAN DAN PERLAKUAN SALAH LAINNYA TERHADAP ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	66,72	66,72	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,50	80,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	81,00	81,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
MENINGKATNYA DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	91,20	91,20	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
MENINGKATNYA PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	12,00	12,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
MENINGKATNYA PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	97,50	97,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANAHAN	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	83,00	83,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
	Nilai SAKIP (Nilai)	81,30	81,30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT SURVEY DAN PEMETAAN	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	83,00	83,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
	Nilai SAKIP (Nilai)	81,30	81,30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				
MENINGKATNYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Tingkat Penyelesaian Sengketa Tanah (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				
MENINGKATNYA PENYELESAIAN GANTI RUGI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Tingkat Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				
MENINGKATNYA TATA KELOLA TANAH ULAYAT	Presentase Administrasi Penetapan Tanah Ulayat (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				
MENINGKATNYA PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Tingkat Pemanfaatan Tanah Kosong (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				
MENINGKATNYA TERTIB PERTANAHAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH	Presentase Administrasi Penggunaan dan Penatagunaan Tanah (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KAJIAN LINGKUNGAN UNTUK MEMITIGASI DAMPAK KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
MENURUNNYA PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan IKLH (%)	0,20	0,20	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
MENURUNNYA PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP UPT LABORATORIUM LH	Persentase Peningkatan IKLH (%)	0,20	0,20	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase RTH yang Dikelola (%)	12,87	12,87	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
MENINGKATNYA PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penurunan Limbah B3 (%)	4,00	4,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA KEPATUHAN USAHA DAN / ATAU KEGIATAN TERHADAP PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN	Persentase Peningkatan Tolak Ukur Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	50,00	50,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				
MENINGKATNYA KAPASITAS MHA DAN KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Peningkatan Penetapan Masyarakat Adat Menjadi Masyarakat Hukum Adat (%)	25,00	25,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang Diberikan Kepada Lembaga Masyarakat / Lembaga Pendidikan (%)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
MENINGKATNYA KINERJA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (%)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
MENINGKATNYA PENYELESAIAN SENGKETA / KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup (%)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
MENINGKATNYA TATA KELOLA PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Capaian Pengelolaan Persampahan Yang Dikelola pada Fasilitas Pengelolaan Sampah (%)	26,20	26,20	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Adminduk (Persentase)	55,00	55,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENCATATAN SIPIL	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran (Persentase)	97,00	97,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah (Persentase)	63,00	63,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal (Persentase)	65,50	65,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai (Persentase)	63,00	63,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
MENINGKATNYA PEMANFAATAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP (Persentase)	20,00	20,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
MENINGKATNYA KUALITAS PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah data profil kependudukan yang disusun (Dokumen)	1,00	1,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				
MENINGKATNYA KUALITAS PENATAAN DESA	Persentase Fasilitas Penataan Desa (%)	57,00	57,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama Desa yang Telah Ditindaklanjuti (%)	50,00	50,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	65,00	65,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
MENINGKATNYA KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN	(Persentase LKD dan LAD aktif yang melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan (%))	48,03	48,03	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	76,00	76,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
TERKENDALINYA PERTAMBAHAN JUMLAH PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR) (Rata-Rata Jumlah Anak)	2,08	2,08	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19) (%)	16,00	16,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	"Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) " (%)	53,40	53,40	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	15.9%	15.9%	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Presentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri / IKK (%)	22,80	22,80	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	8,00	8,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI DARAT DINAS PERHUBUNGAN	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)	82,00	82,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI DARAT UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Persentase Uji Berkala Kendaraan Bermotor (%)	25,20	25,20	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN RANSPORTASI LAUT	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (%)	79,57	79,57	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA PENGELOLAAN PERLINTASAN KERETA API	Cakupan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Perkeretaapian (%)			Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	82,00	82,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
MENINGKATNYA JANGKAUAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Indeks)	98,25	98,25	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi (%)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Lokasi yang Terkoneksi Jaringan Intranet / Internet di Kabupaten Kutai Timur (%)	84,00	84,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76,00	76,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	17,88	17,88	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	44,30	44,30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
MENINGKATNYA KUALITAS SDM PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	10,22	10,22	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	46,51	46,51	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA KAPASITAS UMKM YANG TANGGUH DAN MANDIRI	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	13,24	13,24	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
MENINGKATNYA DAYA SAING UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0,95	0,95	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,20	80,20	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
MENINGKATNYA JANGKAUAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Promosi yang Diikuti (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
MENINGKATNYA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
TERKENDALINYA PERLAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
MENINGKATNYA PEMANFAATAN DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA				
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
MENINGKATNYA DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	68,75	68,75	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Persentase Pemuda yang Pernah Mengikuti Pelatihan/ Kursus/ Training/ dan Memperoleh Sertifikat (%)	4,96	4,96	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
MENINGKATNYA PEMBUDAYAAN DAN PRESTASI OLAHRAGA	Cakupan Pembinaan Olahraga (%)	58,33	58,33	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase Atlet yang Berasal Dari Kab/ Kota yang Masuk Pelatda (%)	13,60	13,60	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
MENINGKATNYA KULITAS KEPRAMUKAAN	Presentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif (%)	34,02	34,02	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
TERCAPAINYA KOLABORASI, INTEGRASI DAN STANDARISASI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)	Persentase Publikasi Data Sektoral dalam Portal Satu Data (%)	45,00	45,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
MENINGKATNYA KEAMANAN SIBER DAN SANDI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks KAMI (Indeks)	2,00	2,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	30,00	30,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	40,00	40,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	15,00	15,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
MENINGKATNYA WARISAN BUDAYA YANG DILESTARIKAN	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	0,11	0,11	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	0,11	0,11	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
MENINGKATNYA TATA KELOLA MUSEUM	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	25,00	25,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT PERPUSTAKAAN KECAMATAN MUARA BENGKAL	Nilai SAKIP (Nilai)	74,00	74,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT PERPUSTAKAAN KECAMATAN SANGKULIRANG	Nilai SAKIP (Nilai)	74,00	74,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT PERPUSTAKAAN KECAMATA SANGATTA UTARA	Nilai SAKIP (Nilai)	74,00	74,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT PERPUSTAKAAN KECAMATAN MUARA WAHAU	Nilai SAKIP (Nilai)	74,00	74,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA LAYANAN PERPUSTAKAAN SESUAI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	68,23	68,23	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat (%)	1,45	1,45	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
MENINGKATNYA TATA KELOLA ARSIP DINAMIS DAN STATIS	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	29,63	29,63	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
	Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah Minimal B (Rasio)	0,19	0,19	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP SESUAI NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	37,04	37,04	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERIKANAN	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DINAS PERIKANAN	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8.799,28	8.799,28	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DINAS PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.138,63	1.138,63	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
MENINGKATNYA KELESTARIAN LAUT DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase Kawasan Perairan Umum Darat yang Diawasi (%)	48,65	48,65	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
MENINGKATNYA KONSUMSI IKAN OLEH MASYARAKAT	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	43,49	43,49	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	74,00	74,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)	1,06	1,06	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang) (%)	1,21	1,21	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
MENINGKATNYA JANGKAUAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan promosi pemasaran pariwisata (%)	16,67	16,67	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
MENINGKATNYA KUALITAS EKOSISTEM KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0,14	0,14	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih (%)	37,82	37,82	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERKEBUNAN	Nilai SAKIP (Nilai)	65,50	65,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS SARANA PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN	Tingkat Cakupan Penyediaan Sarana Pertanian (%)	45,00	45,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS SARANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Jumlah Produksi Padi (Ton)	26.186,00	26.186,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Jumlah Produksi Jagung (Ton)	1.550,00	1.550,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produksi Pisang (Ton)	97.417,00	97.417,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produksi Nanas (Ton)	18.426,00	18.426,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai (Ton)	437,00	437,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) (Ton)	3.325,00	3.325,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN	Tingkat Penyediaan Prasarana Pertanian (%)	20,00	20,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Proporsi Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (%)	65,33	65,33	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
MENINGKATNYA PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN	Cakupan Penanggulangan bencana Pertanian (%)	60,00	60,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase peningkatan luas ANKT (%)	0,08	0,08	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	55,33	55,33	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
MENINGKATNYA KUALITAS DAN KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan usaha pertanian yang diawasi (%)	20,00	20,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG PENYULUH PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	0,17	0,17	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	19,34	19,34	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
MENINGKATNYA KEMUDAHAN PROSES PERIZINAN DAN PENDAFTARAN BERUSAHA	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI BARANG YANG EFISIEN, MERATA DAN TERINTEGRASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	33,00	33,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI BARANG YANG EFISIEN, MERATA DAN TERINTEGRASI UPT PASAR INDUK SANGATTA UTARA	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	33,00	33,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI BARANG YANG EFISIEN, MERATA DAN TERINTEGRASI UPT PASAR SANGKULIRANG	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	33,00	33,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI BARANG YANG EFISIEN, MERATA DAN TERINTEGRASI UPT PASAR MUARA WAHAU	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	33,00	33,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
MENINGKATNYA KELANCARAN DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	1,08	1,08	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
MENINGKATNYA PELAKU USAHA YANG BERORIENTASI EKSPOR	Persentase Pelaku usaha yang Melakukan Ekspor (%)	1,50	1,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
MENINGKATNYA TERTIB NIAGA DAN MUTU PRODUK	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
MENINGKATNYA PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	12,00	12,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	82,00	82,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	60,55	60,55	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
MENINGKATNYA REALISASI PEMBANGUNAN INDUSTRI	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	97,11	97,11	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
MENINGKATNYA KUALITAS PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN	persentase kepatuhan berusaha (Persentase)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
MENINGKATNYA PEMANFAATAN INFORMASI INDUSTRI	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	6,50	6,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
MENINGKATNYA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	20,00	20,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN KAPASITAS TRANSMIGRAN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	4,01	4,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	78,75	78,75	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
MENINGKATNYA KUALITAS KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	71,50	71,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Ketercapaian Kinerja SPM (%)	93,00	93,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Penerima Beasiswa (%)	76,00	76,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) (Indeks)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	7.190,00	7.190,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Layanan Elektrifikasi Rumah Tangga (%)	90,42	90,42	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pembangunan dan Perekonomian (%)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Perkembangan Harga (Indeks)	5,00	5,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	74,00	74,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
MENINGKATNYA KUALITAS PERSIDANGAN DAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN				
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Terlaksananya penunjang perangkat daerah	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	76,00	76,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program (Persentase)	94,50	94,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA, BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN, BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN				
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	78,00	78,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
MENINGKATNYA TATA KELOLA ANGGARAN, PENBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN	Persentase Realisasi SP2D Terhadap Total SPD yang Diterbitkan (%)	83,00	83,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Presentase Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (%)	30,00	30,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Presentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	84,37	84,37	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Presentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	40,00	40,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Presentase Penurunan SILPA (%)	-94,57	-94,57	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
MENINGKATNYA TATA KELOLA ASET DAERAH	Presentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	50,47	50,47	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
MENINGKATNYA UPAYA EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN	Persentase capaian pajak daerah terhadap target yg ditetapkan (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase WP terdaftar aktif terhadap total WP terdata (%)	67,00	67,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase realisasi penagihan terhadap piutang pajak (%)	62,70	62,70	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Realisasi penerimaan PBB dan BPHTB berdasarkan ketetapan (%)	30,80	30,80	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN				
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	82,00	82,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	15,00	15,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
MENINGKATNYA KUALITAS PENILAIAN KINERJA ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	99,88	99,88	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
MENINGKATNYA TATA KELOLA PENGEMBANGAN KARIR ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	96,00	96,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
MENINGKATNYA LAYANAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR, KADER, MANAJERIAL, DAN FUNGSIONAL	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	40,14	40,14	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	62,70	62,70	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	82,20	82,20	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN, SERTA PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	29,63	29,63	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				
MENINGKATNYA PEMANFAATAN INOVASI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAERAH	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah (%)	28,57	28,57	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERWUJUDNYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENURUNNYA TERJADINYA PENYELEWENGAN ATAU PENYIMPANGAN, BAIK YANG BERSIFAT ANGGARAN ATAUPUN PROSES DAN KEWENANGAN	Tindakanj Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	83,00	83,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
MENINGKATNYA KUALITAS PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Maturitas SPIP SKPD Level 3 (%)	55,00	55,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	3,00	3,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Manajemen Risiko Indeks (Nilai)	3,00	3,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN				
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. SANGATTA SELATAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78,00	78,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. SANGATTA UTARA	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78,00	78,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. BENGALON	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	73,00	73,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sakip Pemerintah Daerah (Nilai)	73,00	73,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. KALIORANG	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78,00	78,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. MUARA WAHAU	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	73,00	73,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. KOMBENG	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. MUARA ANCALONG	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	72,50	72,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. BATU AMPAR	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	79,00	79,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. TELEN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. BUSANG	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	79,00	79,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. TELUK PANDAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78,00	78,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. RANTAU PULUNG	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76,00	76,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. KAUBUN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	74,00	74,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. SANGKULIRANG	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	73,00	73,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai SAKIP (Nilai)	64,15	64,15	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. MUARA BENGKAL	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. LONG MESANGAT	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. KARANGAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76,00	76,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. SANDARAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	74,00	74,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR LURAH SINGA GEWEH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78,00	78,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR LURAH TELUK LINGGA	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78,00	78,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	71,00	71,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA UTARA	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN BENGALON	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	57,00	57,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIORANG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	82,00	82,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA WAHAU	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	73,00	73,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KOMBENG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	76,00	76,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA ANCALONG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN BATU AMPAR	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN TELEN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	74,00	74,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN BUSANG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	70,00	70,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN TELUK PANDAN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	94,00	94,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN RANTAU PULUNG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	87,00	87,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KAUBUN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	55,00	55,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGKULIRANG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	65,00	65,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA BENGKAL	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN LONG MESANGAT	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	90,00	90,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KARANGAN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	52,00	52,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SANDARAN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	49,00	49,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	65,00	65,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA UTARA	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BENGALON	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	60,02	60,02	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN KALIORANG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN MUARA WAHAU	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	98,00	98,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN KOMBENG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	74,00	74,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN MUARA ANCALONG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	78,57	78,57	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BATU AMPAR	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	79,00	79,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN TELEN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	74,00	74,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BUSANG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	55,00	55,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN TELUK PANDAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	60,00	60,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN RANTAU PULUNG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	85,00	85,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN KAUBUN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN SANGKULIRANG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN MUARA BENGKAL	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	73,00	73,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN LONG MESANGAT	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	98,00	98,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN KARANGAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	82,00	82,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN SANDARAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	79,00	79,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KANTOR LURAH SINGA GEWEH	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	65,00	65,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KANTOR LURAH TELUK LINGGA	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	60,00	60,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA UTARA	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	55,00	55,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN BENGALON	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	59,50	59,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN KALIORANG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN MJUARA WAHAU	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	98,00	98,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN KOMBENG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN MUARA ANCALONG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN BATU AMPAR	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN TELEN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN BUSANG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN TELUK PANDAN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	81,00	81,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN RANTAU PULUNG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	81,00	81,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN KAUBUN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	94,00	94,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN SANGKULIRANG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN MUARA BENGKAL	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN LONG MESANGAT	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN KARANGAN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	82,00	82,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN SANDARAN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	40,00	40,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	90,83	90,83	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA UTARA	Persentase masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan (%)	20,00	20,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BENGALON	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	66,00	66,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIORANG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	70,00	70,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA WAHAU	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	70,30	70,30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KOMBENG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	73,00	73,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA ANCALONG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	60,00	60,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BATU AMPAR	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	79,00	79,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TELEN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BUSANG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	65,00	65,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TELUK PANDAN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	79,00	79,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN RANTAU PULUNG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KAUBUN	Persentase masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan (%)	30,00	30,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGKULIRANG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	90,00	90,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA BENGKAL	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	90,00	90,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LONG MESANGAT	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	85,00	85,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KARANGAN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	65,00	65,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SANDARAN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	41,00	41,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA UTARA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN BENGALON	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN KALIORANG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN MUARA WAHAU	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	70,30	70,30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN KOMBENG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	76,00	76,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN MUARA ANCALONG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	60,00	60,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN BATU AMPAR	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	72,00	72,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN TELEN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN BUSANG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	70,00	70,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN TTELUK PANDAN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	73,00	73,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN RANTAU PULUNG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	78,00	78,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN KAUBUN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN SANGKULIRANG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	73,00	73,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN MUARA BENGKAL	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN LONG MESANGAT	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	57,00	57,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN KARANGAN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	82,00	82,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN SANDARAN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	56,00	56,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
MENINGKATNYA KESADARAN MSYARAKAT AKAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase sekolah dan Forum yang mendapatkan pembinaan penguatan ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Bela Negara (%)	40,40	40,40	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
MENINGKATNYA ETIKA DAN BUDAYA POLITIK	Persentase pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai Timur (%)	28,00	28,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
MENINGKATNYA KETERTIBAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	30,00	30,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT	Persentase ASN dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang bersih dari narkoba (%)	27,00	27,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Konflik Sosial (Angka)	0,00	0,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase penanganan konflik sosial (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sumber : olah data

4.6 Konsistensi Pagu Anggaran antara RKPD dengan RPJMD

Konsistensi pagu anggaran antara RPJMD dan RKPD merupakan salah satu unsur penting dalam pengendalian perencanaan pembangunan daerah. Pagu anggaran menunjukkan sejauh mana prioritas, program, dan arah pembangunan jangka menengah diterjemahkan ke dalam dukungan pendanaan tahunan pada masing-masing perangkat daerah. Perbandingan pagu antara RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 dan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 diperlukan untuk menilai keterjagaan hubungan antara perencanaan strategis dan perencanaan tahunan. Dalam subbab ini, perbandingan dilakukan pada tingkat perangkat daerah dengan tetap memperhatikan adanya perubahan nomenklatur OPD antara dokumen RPJMD dan RKPD. Hal ini penting agar perbedaan pagu dibaca secara proporsional, baik sebagai bentuk penyesuaian kelembagaan maupun sebagai cerminan perubahan prioritas pendanaan pembangunan daerah. RKPD 2026 sendiri memuat rekapitulasi pagu indikatif berdasarkan perangkat daerah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat konsistensi pendanaan tahunan terhadap arah pembiayaan yang dirumuskan dalam RPJMD.

Tabel 4.6 Konsistensi Pagu Anggaran antara RPJMD dengan RKPD Tahun 2026

No.	Perangkat Daerah	Pagu RPJMD 2026	Pagu RKPD 2026
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	787.051.543.867	1.073.036.291.636
2	Dinas Kesehatan	372.780.293.280	307.454.824.282

No.	Perangkat Daerah	Pagu RPJMD 2026	Pagu RKPD 2026
3	RSUD Kudungga Sangatta	163.410.539.520	136.342.366.781
4	RSUD Sangkulirang	11.489.803.560	12.992.657.000
5	RSUD Muara Bengkal		7.501.386.000
6	PUSKESMAS SANDARAN	2.753.289.680	2.249.629.000
7	PUSKESMAS SANGKULIRANG	3.191.612.100	3.179.111.000
8	PUSKESMAS KALIORANG	3.829.934.521	3.405.414.000
9	PUSKESMAS KAUBUN	3.191.612.100	3.500.963.000
10	PUSKESMAS KARANGAN	3.191.612.100	3.257.514.000
11	PUSKESMAS SEPASO	3.829.934.520	3.422.129.600
12	PUSKESMAS BUSANG	2.553.289.680	2.125.960.000
13	PUSKESMAS LONG MESANGAT	2.553.289.680	2.322.043.000
14	PUSKESMAS MUARA ANCALONG	2.553.289.679	2.912.324.000
15	PUSKESMAS MUARA BENGKAL	2.553.289.680	2.526.444.000
16	PUSKESMAS BATU AMPAR	2.553.289.680	2.029.718.000
17	PUSKESMAS KOMBENG	3.829.934.520	4.069.341.000
18	PUSKESMAS TELEN	2.553.289.680	1.931.754.000
19	PUSKESMAS MUARA WAHAU 1	2.553.289.680	2.367.142.000
20	PUSKESMAS MUARA WAHAU 2	3.191.612.100	2.781.032.400
21	PUSKESMAS RANTAU PULUNG	2.553.289.680	2.430.481.000
22	PUSKESMAS TEPIAN BARU	2.553.289.680	2.462.299.000
23	PUSKESMAS TELUK LINGGA	4.468.256.940	3.345.645.000
24	PUSKESMAS SANGATTA UTARA	2.553.289.679	2.783.218.000
25	PUSKESMAS SANGATTA SELATAN	2.553.289.680	2.500.302.000
26	PUSKESMAS TELUK PANDAN	1.914.967.260	2.041.271.000
27	Instalasi Farmasi Kabupaten	1.595.806.050	1.044.543.500
28	Laboratorium Kesehatan Daerah	1.595.806.050	1.200.793.000
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.433.521.613.435	688.338.153.751
30	UPT Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat	2.553.289.680	2.000.000.000
31	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangatta Utara	1.276.644.840	750.000.000
32	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangkulirang	1.276.644.840	750.000.000
33	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Wahau	1.276.644.840	750.000.000
34	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Bengkal	1.276.644.840	750.000.000
35	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	288.405.733.840	148.071.980.288
36	UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Utara	2.350.128.470	2.410.000.000
37	UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan	1.276.644.840	1.040.000.000
38	Satuan Polisi Pamong Praja	38.937.667.620	32.340.512.155

No.	Perangkat Daerah	Pagu RPJMD 2026	Pagu RKPD 2026
39	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	65.961.521.720	29.113.108.133
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.256.251.960	14.580.216.255
41	Dinas Sosial	22.341.284.700	13.387.475.620
42	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	56.810.695.380	43.672.163.076
43	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Mandiri	5.106.579.360	2.280.000.000
44	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.787.995.019	11.490.930.423
45	Dinas Ketahanan Pangan	30.639.476.159	10.422.057.359
46	Dinas Pertanahan	22.341.284.701	20.404.292.352
47	UPT Survey dan Pemetaan	1.914.967.260	70.000.000
48	Dinas Lingkungan Hidup	46.503.461.220	30.817.315.149
49	UPT Kebersihan Sangatta Utara	11.873.027.760	8.100.000.000
50	UPT Kebersihan Sangatta Selatan	7.766.448.400	2.235.920.000
51	UPT TPA, Pengelolaan Limbah Domestik dan Lumpur Tinja	3.829.934.520	7.721.600.000
52	UPT Laboratorium LH	695.806.050	27.590.067
53	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.341.284.701	13.705.738.695
54	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	49.789.148.759	19.877.481.243
55	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22.341.284.700	22.769.468.145
56	Dinas Perhubungan	81.918.428.480	82.499.914.278
57	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1.914.967.260	277.000.000
58	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	121.472.871.900	78.600.873.522
59	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	25.702.962.280	15.456.023.335
60	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	26.838.733.738	13.971.126.923
61	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	58.198.621.529	38.495.180.065
62	UPTD Sarana Prasarana Olahraga	4.553.289.680	1.000.000.000
63	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	33.863.207.534	27.053.943.936
64	UPT Perpustakaan Kecamatan Muara Bengkal	376.644.840	25.000.000
65	UPT Perpustakaan Kecamatan Sangkulirang	376.644.840	25.000.000
66	UPT Perpustakaan Kecamatan Sangatta Utara	376.644.840	25.000.000
67	UPT Perpustakaan Kecamatan Muara Wahau	376.644.840	25.000.000
68	Dinas Perikanan	62.146.769.901	20.325.866.301
69	UPT Balai Benih Ikan Kaliorang	1.276.644.840	100.000.000
70	UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba	969.934.757	25.000.000
71	UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok	1.276.644.840	

No.	Perangkat Daerah	Pagu RPJMD 2026	Pagu RKPD 2026
72	UPT Tempat Pelelangan Ikan Kenyamukan	1.276.644.840	50.000.000
73	UPT Tempat Pelelangan Ikan Sangkulirang	1.276.644.840	50.000.000
74	Dinas Pariwisata	38.746.055.521	18.374.157.576
75	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	143.622.544.500	96.759.309.387
76	Dinas Perkebunan	36.645.933.220	14.947.384.357
77	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	38.169.410.682	21.877.291.678
78	UPT Pasar Induk Sangatta Utara	1.595.806.050	1.000.000.000
79	UPT Pasar Sangkulirang	1.276.644.840	400.000.000
80	UPT Pasar Muara Wahau	1.595.806.050	600.000.000
81	Sekretariat Daerah	356.394.761.599	267.188.245.859
82	Sekretariat DPRD	86.282.413.540	70.394.577.286
83	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	37.661.022.779	21.871.519.774
84	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.234.515.560.280	1.045.986.611.806
85	Badan Pendapatan Daerah	49.789.148.760	44.391.933.619
86	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	32.977.798.579	27.416.891.232
87	Badan Riset dan Inovasi Daerah	13.043.093.239	7.314.532.199
88	Inspektorat	45.565.793.601	40.288.303.647
89	Kantor Camat Sangatta Selatan	18.082.599.038	8.921.940.269
90	Kantor Lurah Singa Geweh	13.807.604.000	13.232.604.000
91	Kantor Camat Sangatta Utara	26.809.541.639	8.905.760.589
92	Kantor Lurah Teluk Lingga	19.669.674.000	19.594.674.000
93	Kantor Camat Bengalon	13.460.257.770	7.745.904.764
94	Kantor Camat Kaliorang	6.844.901.780	5.055.109.044
95	Kantor Camat Muara Wahau	9.091.191.460	7.264.501.362
96	Kantor Camat Kombeng	8.091.546.619	6.537.947.200
97	Kantor Camat Muara Ancalong	7.916.853.306	7.243.190.325
98	Kantor Camat Batu Ampar	6.576.556.254	4.925.881.735
99	Kantor Camat Telen	6.936.224.261	5.468.619.536
100	Kantor Camat Busang	5.878.256.940	4.701.256.689
101	Kantor Camat Teluk Pandan	8.301.546.621	6.595.490.826
102	Kantor Camat Rantau Pulung	5.101.256.940	4.294.764.001
103	Kantor Camat Kaubun	5.718.538.738	4.502.473.437
104	Kantor Camat Sangkulirang	7.833.224.200	5.876.648.728
105	Kantor Camat Muara Bengkal	10.213.158.720	8.965.957.095
106	Kantor Camat Long Mesangat	7.741.546.619	5.990.809.196
107	Kantor Camat Karangan	5.167.934.521	3.836.522.000
108	Kantor Camat Sandaran	5.382.520.696	4.369.969.659
109	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.669.672.599	16.430.890.113
Jumlah		6.348.224.200.000	4.842.369.201.258

Sumber: diolah dari RPJMD dan RKPD 2026 Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan hasil perbandingan pagu indikatif Tahun 2026 antara dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 dengan RKPD Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa **secara**

umum terdapat konsistensi dalam struktur pengalokasian anggaran, dimana seluruh Perangkat Daerah yang tercantum dalam RPJMD telah terakomodasi dalam RKPD Tahun 2026. Namun demikian, **nilai pagu pada sebagian besar Perangkat Daerah mengalami penyesuaian** sebagai konsekuensi dari penyusunan RKPD yang mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, arah kebijakan pembangunan tahunan, prioritas pembangunan, serta hasil pembahasan bersama pemerintah daerah.

Secara agregat, **total pagu RPJMD Tahun 2026 sebesar Rp6.348.224.200.000**, sedangkan **total pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp4.842.369.201.258**. Dengan demikian terdapat **selisih sebesar Rp1.505.854.998.742** atau sekitar **23,72% lebih rendah** dibandingkan pagu yang direncanakan dalam RPJMD. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2026 telah disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah yang tersedia tanpa mengubah arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Beberapa Perangkat Daerah mengalami **peningkatan pagu** dibandingkan alokasi dalam RPJMD, antara lain:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dari Rp787,05 miliar menjadi Rp1,07 triliun;
- Dinas Perhubungan, dari Rp81,92 miliar menjadi Rp82,50 miliar;
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dari Rp22,34 miliar menjadi Rp22,77 miliar;
- RSUD Sangkulirang, beberapa UPT Puskesmas, serta UPT TPA, Pengelolaan Limbah Domestik dan Lumpur Tinja yang memperoleh tambahan anggaran untuk mendukung peningkatan pelayanan dasar.

Sebaliknya, sebagian besar Perangkat Daerah mengalami **penyesuaian pagu ke arah yang lebih rendah**, terutama pada perangkat daerah yang memiliki program pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi, seperti:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dari Rp1,43 triliun menjadi Rp688,34 miliar;
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dari Rp288,41 miliar menjadi Rp148,07 miliar;
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- Dinas Perikanan;
- Dinas Pariwisata;
- Dinas Ketahanan Pangan; serta beberapa perangkat daerah lainnya.

Selain itu, terdapat beberapa UPT yang memperoleh pagu sangat kecil atau bahkan belum dialokasikan pada RKPD Tahun 2026, seperti UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok, UPT Perpustakaan Kecamatan, dan beberapa UPT lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pendanaannya telah disesuaikan dengan prioritas tahunan atau dialihkan melalui program induk pada perangkat daerah pembinaanya.

Secara keseluruhan, **konsistensi antara RPJMD dan RKPD Tahun 2026 tetap terjaga**, karena tidak terdapat perubahan terhadap struktur perangkat daerah maupun arah kebijakan pembangunan. Perbedaan yang muncul hanya berupa **penyesuaian besaran pagu indikatif**, yang merupakan hal yang lazim dalam implementasi perencanaan tahunan. Penyesuaian tersebut dilakukan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap selaras dengan target RPJMD, namun tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah, proyeksi pendapatan, serta prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2026

4.7 Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD per Perangkat Daerah

Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD per perangkat daerah menunjukkan sejauh mana penjabaran program pembangunan, indikator kinerja, target, dan pagu anggaran pada dokumen tahunan masih berada dalam koridor dokumen jangka menengah. Pada tingkat perangkat daerah, kualitas konsistensi menjadi lebih konkret karena dapat langsung dilihat pada hubungan antara program yang direncanakan dalam RPJMD dengan program yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026. Analisis pada subbab ini tidak hanya menilai ada atau tidaknya kesesuaian, tetapi juga membaca bentuk penyesuaian yang terjadi pada indikator, target, maupun pagu. Dalam dokumen Evaluasi RKPD Kutim 2026 triwulan I, penyajian konsistensi pada tingkat perangkat daerah juga ditampilkan secara rinci per OPD melalui tabel yang memperbandingkan program, indikator, target, dan pagu antara RPJMD dan RKPD. Pola yang sama digunakan pada subbab ini agar keterlacakan konsistensi lebih jelas dan lebih mudah diverifikasi.

Secara umum, konsistensi antara RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 pada tingkat perangkat daerah berada pada kategori tinggi. Namun demikian, tingkat konsistensi tersebut tidak selalu berarti seluruh indikator, target, dan pagu bersifat sama persis. Pada beberapa perangkat daerah terjadi penyesuaian karena penggabungan urusan, perubahan nomenklatur, penajaman indikator, perubahan kapasitas fiskal, dan penyesuaian prioritas pembangunan Tahun 2026. Oleh sebab itu, pembacaan konsistensi per perangkat daerah perlu dilakukan secara hati-hati agar perubahan yang terjadi dapat dipahami dalam konteks teknokratik, bukan semata-mata sebagai inkonsistensi administratif.

Tabel 4.7 Konsistensi Program Renja OPD Tahun 2026 dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026-2029

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja				Indikator		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							784.039.296.873,00		1.058.036.291.636,00		
1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						329.404.083.563,00		648.036.241.951,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	82,00		82,00				
					Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50				
1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						399.844.429.242,00		330.611.649.685,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI ANAK USIA SEKOLAH			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (Angka)	104,10		104,10				
					Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar 7-15 Tahun (Angka)	100		100				
					Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal yang Terakreditasi (%)	77,78		77,78				

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun (Angka)	71,72		71,72			
			Angka Partisipasi Murni (APM) 5-6 Tahun Jenjang PAUD (Angka)	79,65		79,65			
			Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan 7-18 Tahun (Angka)	42,36		42,36			
			Angka Partisipasi Murni (APM) 13-15 Tahun Jenjang SMP/MTs (Angka)	86,86		86,86			
			Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI terhadap Penduduk Usia Sekolah per 10.000 (Rasio)	46.55:10000		46.55:10000			
			Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs terhadap Penduduk Usia Sekolah per 10.000 (Rasio)	43.64:10000		43.64:10000			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (Angka)	106,00		106,00			
			Angka Partisipasi Murni (APM) 7-12 Tahun Jenjang SD/MI (Angka)	97,33		97,33			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			227.831.615,00		4.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		MENINGKATNYA KUALITAS KURIKULUM PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100		100			
1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			54.562.952.453,00		75.388.400.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		MENINGKATNYA MUTU DAN DISTRIBUSI PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. (Persentase)	100		100			
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				612.351.200.779,00		524.180.305.563,00		
1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			390.943.742.770,00		335.225.516.269,00	Dinas Kesehatan	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80		80			
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			206.045.691.401,00		171.973.110.294,00	Dinas Kesehatan	
		MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	109		109			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	25		25			
			Jumlah kematian balita (Jiwa)	44		44			
			Jumlah Kematian Ibu (Orang)	8		8			
			Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	77		77			
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	10		10			
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)	98,2		98,2			
			Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,3		8,3			
			Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14		0,14			
			Angka Kematian Bayi (AKB) per	8,9		8,9			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			1.000 kelahiran hidup (Orang)						
			proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	68		68			
			Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	44		44			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	88		88			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	86		86			
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100		100			
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	84		84			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12		12			
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	90,45		90,45			
			Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	23,4		23,4			
			Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95		95			
			Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	45		45			
			Penemuan Kasus TBC (%)	90		90			
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84		84			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100		100			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	24,82		24,82			
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100		100			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	48		48			
1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			1.834.663.980,00		3.445.870.000,00	Dinas Kesehatan	
		MENINGKATNYA MUTU DAN DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi (Rasio)	6,81		6,81			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar. (%)	67		67			
			Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)	76,19		76,19			
			Rasio Tenaga Medis Terhadap Populasi (Rasio)	0,85		0,85			
1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			1.532.691.310,00		1.617.000.000,00	Dinas Kesehatan	
		MENINGKATNYA KUALITAS DAN DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	40		40			
			Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	20		20			
			Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	100		100			
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan	100		100			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (%)						
			Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT Sesuai standar (%)	20		20			
1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			11.994.411.318,00		11.918.809.000,00	Dinas Kesehatan	
		MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DINAS KESEHATAN	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	32		32			
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.441.181.482.475,00		693.338.153.751,00		
1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			48.296.410.988,00		38.377.544.815,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	79		79			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		78.812.376.580,00		10.860.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	MENINGKATNYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP BANJIR DAN MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP IRIGASI	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	47		47			
1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		95.906.440.319,00		43.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Layanan Air Minum Layak Perpipaan	62,28		62,28			
1.03.04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		4.615.609.822,00		430.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	MENINGKATNYA LAYANAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan	91,59		91,59			
1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		1.897.947.003,00		1.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0,77		0,77			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
1.03.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			66.239.389.964,00		120.150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	Cakupan Wilayah Saluran Drainase Rawan Genangan Air/Banjir (%)	69		69			
1.03.07		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			-		200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			361.289.741.547,00		88.866.713.936,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		MENINGKATNYA KUALITAS BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	64,55		64,55			
1.03.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			131.888.979.070,00		12.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		MENINGKATNYA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN YANG TERTATA	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (Rasio)	41,94		41,94			
1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			644.191.832.360,00		371.053.895.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT YANG NYAMAN DAN AMAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase kondisi mantap jalan (%)	42,57		42,57			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			4.220.350.912,00		3.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		MENINGKATNYA KOMPETENSI TENAGA KONSTRUKSI	Rasio tenaga terampil yang memiliki sertifikat kompetensi (Rasio)	11,37		11,37			
1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			3.822.403.910,00		3.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Wilayah Pemanfaatan sesuai Rencana Tata Ruang (%)	70		70			
1.04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			292.032.507.150,00		151.521.980.288,00		
1.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			33.275.429.764,00		22.041.980.288,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SANGATTA UTARA	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	76		76			
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			32.075.456.610,00		10.000.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		TERPENUHINYA RUMAHLAYAK HUNI BAGI	Penyediaan dan rehabilitasi rumah	49,95		49,95			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		WARGA NEGARA KORBAN BENCANA DAN YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH	layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota						
1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			110.324.583.871,00		53.800.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		MENINGKATNYA PENYEDIAAN PSU PERMUKIMAN UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SANGATTA UTARA	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	32		32			
1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			97.507.110.898,00		64.720.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	38,73		38,73			
1.04.04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			18.449.071.173,00		860.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		TERPENUHINYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TANPA KUMUH	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	16,25		16,25			
1.04.06		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			400.854.834,00		100.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI AORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERENCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARAN DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENEGAH	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana ()	20		20			
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				129.155.441.300,00		76.033.836.543,00		
1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.395.056.655,00		14.332.744.957,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			23.542.610.965,00		18.007.767.198,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
		MENINGKATNYA PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	20		20			
			Persentase jumlah sarana dan prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan	80		80			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat (%)						
			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100		100			
			Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar (%)	34		34			
			Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP (%)	100		100			
			Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	4		4			
			Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	90		90			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			35.008.371.191,00		27.093.108.133,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	75		75			
1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			30.953.150.529,00		2.020.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		MENINGKATNYA LAYANAN PENCEGAHAN KEBAKARAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK) (%)	96,83		96,83			
			Persentase Desa/Kelurahan yang tersosialisasi atau edukasi dalam Pencegahan Kebakaran (%)	60,28		60,28			
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (%)	50,00		50,00			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.778.062.246,00		11.176.216.255,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	77		77			
			Nilai SAKIP (Nilai)	52		52			
1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			8.478.189.714,00		3.404.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan (Indeks)	0,131		0,131			
			Indeks Pasca Bencana (Indeks)	0,042		0,042			
			Indeks Pra Bencana (Indeks)	0,317		0,317			
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				22.341.284.700,00		13.387.475.620,00		
1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.647.039.795,00		10.525.315.620,00	Dinas Sosial	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	76,00		76,00			
			Nilai SAKIP (Nilai)	76,00		76,00			
1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			1.602.211.063,00		400.000.000,00	Dinas Sosial	
		MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber	22,18		22,18			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)						
1.06.03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			202.279.485,00		-	Dinas Sosial	
		MEINGKATNYA LAYANAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Penanganan (%)	40,00		40,00			
1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			2.166.385.362,00		1.650.000.000,00	Dinas Sosial	
		MENINGKATNYA REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (%)	100		100			
1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			2.600.243.404,00		250.000.000,00	Dinas Sosial	
		MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Fakir Miskin yang Mendapatkan Pelatihan untuk Pengembangan Usaha (%)	35,26		35,26			
			Cakupan Anak-Anak Terlantar yang Ditangani (%)	100		100			
1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			2.123.125.591,00		562.160.000,00	Dinas Sosial	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial (%)	40,00		40,00			
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				58.556.590.453,00		44.902.163.076,00		
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.294.033.865,00		11.800.848.676,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	0		79,33			
			Nilai SAKIP (Nilai)	60,5		70,50			
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				647.028.649,00		10.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		TERKELOLANYA INFORMASI TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	65,48		19,97			
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				6.405.823.203,00		3.040.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja (Juta Rp/Orang) (Juta Rupiah)	514,92		571,85			
			Persentase lulusan pelatihan yang memiliki	35,98		90,54			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			keterampilan/ kompetensi (%)						
2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			1.246.902.177,00		87.500.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		MENINGKATNYA PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	37,64		26,77			
2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			30.962.802.559,00		29.963.814.400,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		MENINGKATNYA PEKERJA INDONESIA YANG TERLINDUNGI	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	20,96		71,73			
2.08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			19.787.995.019,00		11.490.930.423,00		
2.08.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.152.900.894,00		7.072.930.423,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	96		96			
2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			2.120.257.964,00		850.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		MENINGKATNYA KUALITAS DAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PUG DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	Persentase ARG (%)	35		35			
2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			1.227.632.974,00		173.320.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		MENURUNNYA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100		100			
2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			886.689.776,00		650.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		MENINGKATNYA KUALITAS KELUARGA DALAM MENDUKUNG KESETARAAN GENDER, PEMENUHAN HAK, SERTA	Persentase Keluarga yang Menerima Layanan Peningkatan	100		100			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Kualitas Keluarga (%)						
2.08.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			352.051.475,00		1.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		MENINGKATNYA PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender Anak yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100		100			
			Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100		100			
2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			2.998.317.977,00		2.500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		TERJAMINNYA PEMENUHAN HAK SEMUA ANAK SECARA KOMPREHENSIF	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	63,3		63,3			
2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			1.050.143.959,00		243.680.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan	100		100			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		KEKERASAN, EKSPLOITASI, PENELANTARAN, PERKAWINAN DAN PERLAKUAN SALAH LAINNYA TERHADAP ANAK	Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)						
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				30.639.476.159,00		10.422.057.359,00		
2.09.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.665.736.881,00		10.022.057.359,00	Dinas Ketahanan Pangan	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	66,72		66,72			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,50		80,50			
2.09.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			9.704.458.344,00		30.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan	
		MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	81,00		81,00			
2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			8.060.054.293,00		230.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan	
		MENINGKATNYA DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	91,20		91,20			
2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			1.070.430.473,00		40.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan	
		MENINGKATNYA PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	12,00		12,00			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			1.138.796.168,00		100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan	
		MENINGKATNYA PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	97,50		97,50			
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				24.256.251.961,00		20.474.292.352,00		
2.10.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12.618.262.709,00		10.264.292.352,00	Dinas Pertanahan	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANAHAN	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	83		83			
			Nilai SAKIP (Nilai)	81,3		81,3			
2.10.04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			1.469.166.979,00		70.000.000,00	Dinas Pertanahan	
		MENINGKATNYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Tingkat Penyelesaian Sengketa Tanah (%)	100		100			
2.10.05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			1.766.679.148,00		50.000.000,00	Dinas Pertanahan	
		MENINGKATNYA PENYELESAIAN GANTI RUGI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Tingkat Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untk pembangunan (%)	80		80			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
2.10.07		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT			1.357.460.555,00		20.000.000,00	Dinas Pertanahan	
		MENINGKATNYA TATA KELOLA TANAH ULAYAT	Presentase Administrasi Penetapan Tanah Ulayat (%)	100		100			
2.10.08		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			1.022.341.285,00		30.000.000,00	Dinas Pertanahan	
		MENINGKATNYA PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Tingkat Pemanfaatan Tanah Kosong (%)	100		100			
2.10.10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			6.022.341.285,00		10.040.000.000,00	Dinas Pertanahan	
		MENINGKATNYA TERTIB PERTANAHAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH	Presentase Administrasi Penggunaan dan Penatagunaan Tanah (%)	100		100			
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				70.668.677.950,00		48.902.425.216,00		
2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			19.000.017.911,00		16.917.315.149,00	Dinas Lingkungan Hidup	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	75		75			
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			1.437.237.762,00		-	Dinas Lingkungan Hidup	
		MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KAJIAN LINGKUNGAN UNTUK MEMITIGASI DAMPAK KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang	100		100			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Ditindaklanjuti (%)						
2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			2.841.262.494,00		627.590.067,00	Dinas Lingkungan Hidup	
		MENURUNNYA PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan IKLH (%)	0,2		0,2			
2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			2.062.499.266,00		-	Dinas Lingkungan Hidup	
		MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase RTH yang Dikelola (%)	12,87		12,87			
2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			1.186.247.958,00		-	Dinas Lingkungan Hidup	
		MENINGKATNYA PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penurunan Limbah B3 (%)	4		4			
2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			2.719.903.394,00		200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
		MENINGKATNYA KEPATUHAN USAHA DAN / ATAU KEGIATAN TERHADAP PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN	Persentase Peningkatan Tolak Ukur Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan Terhadap Izin	50		50			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)						
2.11.07		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			1.161.767.535,00		-	Dinas Lingkungan Hidup	
		MENINGKATNYA KAPASITAS MHA DAN KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Peningkatan Penetapan Masyarakat Adat Menjadi Masyarakat Hukum Adat (%)	25		25			
2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			1.227.190.004,00		1.500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
		MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang Diberikan Kepada Lembaga Masyarakat / Lembaga Pendidikan (%)	80		80			
2.11.09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			771.679.397,00		-	Dinas Lingkungan Hidup	
		MENINGKATNYA KINERJA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (%)	80		80			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			1.321.730.700,00		100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
		MENINGKATNYA PENYELESAIAN SENGKETA / KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup (%)	80		80			
2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			36.939.141.529,00		29.557.520.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
		MENINGKATNYA TATA KELOLA PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Capaian Pengelolaan Persampahan Yang Dikelola pada Fasilitas Pengelolaan Sampah (%)	26,2		26,2			
2.12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			22.341.284.701,00		13.705.738.695,00		
2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.929.942.108,00		11.145.728.695,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	100		100			
2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			4.690.219.751,00		1.560.010.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan	55		55			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Admindex (Persentase)						
2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			1.560.122.546,00		700.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal (Persentase)	65,5		65,5			
			Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai (Persentase)	63		63			
			Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran (Persentase)	97		97			
			Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah (Persentase)	63		63			
2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			1.567.442.533,00		300.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA PEMANFAATAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP (Persentase)	20		20			
2.12.05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			593.557.763,00		-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		MENINGKATNYA KUALITAS PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah data profil kependudukan yang disusun (Dokumen)	1		1			
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				49.789.148.759,00		19.877.481.243,00		
2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			23.469.918.108,00		11.415.180.443,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80		80			
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
2.13.02		PROGRAM PENATAAN DESA			1.032.394.643,00		50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		MENINGKATNYA KUALITAS PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	57		57			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
2.13.03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			817.750.511,00		100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama Desa yang Telah Ditindaklanjuti (%)	50		50			
2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			19.176.011.121,00		7.312.300.800,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	65		65			
2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			5.293.074.376,00		1.000.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		MENINGKATNYA KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN	(Persentase LKD dan LAD aktif yang melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan (%)	48,03		48,03			
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				22.341.284.700,00		22.769.468.145,00		
2.14.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.332.794.252,00		15.435.705.289,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	76		76			
2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			1.173.760.734,00		1.151.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		TERKENDALINYA PERTAMBAHAN JUMLAH PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15- 19 Tahun (ASFR 15-19)	16		16			
			Total Fertility Rate (TFR)	2,08		2,08			
2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			3.069.208.352,00		3.374.980.056,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri / IKK (%)	22,8		22,8			
			"Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) " (%)	53,4		53,4			
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	15,9		15,9			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			2.765.521.362,00		2.807.782.800,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	8,0		8,0			
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				83.833.395.740,00		82.776.914.278,00		
2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.536.956.781,00		13.896.356.880,00	Dinas Perhubungan	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80		80			
2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			6.827.707.094,00		4.543.300.000,00	Dinas Perhubungan	
		MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI DARAT DINAS PERHUBUNGAN	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)	82,00		82,00			
2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			62.468.731.865,00		64.337.257.398,00	Dinas Perhubungan	
		MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN RANSPORTASI LAUT	Persentase Ketersediaan Sarana dan	79,57		79,57			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Prasarana Perhubungan (%)						
2.15.05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			-		-	Dinas Perhubungan	
		MENINGKATNYA PENGELOLAAN PERLINTASAN KERETA API	Cakupan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Perkeretaapian (%)						
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				118.837.201.375,00		77.100.873.522,00		
2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.222.661.858,00		13.026.746.626,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	0		82			
			Nilai SAKIP (Nilai)	0		70,50			
2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			18.626.244.771,00		2.000.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		MENINGKATNYA JANGKAUAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Indeks)	0		98,25			
2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			86.988.294.746,00		62.074.126.896,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Lokasi yang Terkoneksi Jaringan Intranet / Internet di Kabupaten Kutai Timur (%)	0		84			
			Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi (%)	0		80			
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				25.702.962.280,00		15.456.023.335,00		
2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.862.647.939,00		9.186.023.335,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	81		76			
			Nilai SAKIP (Nilai)	0		70,50			
2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			2.203.485.679,00		270.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	0		17,88			
2.17.04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			218.094.076,00		100.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)			44,30			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			250.399.079,00		200.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		MENINGKATNYA KUALITAS SDM PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)			10,22			
2.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			1.259.528.412,00		200.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)			46,51			
2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			5.432.631.140,00		450.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		MENINGKATNYA KAPASITAS UMKM YANG TANGGUH DAN MANDIRI	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	0		13,24			
2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			5.476.175.955,00		5.050.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		MENINGKATNYA DAYA SAING UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0		0,95			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				26.838.733.738,00		13.971.126.923,00		
2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.925.352.996,00		11.671.126.923,00	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,2		80,2			
2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			3.231.447.319,00		-	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
		MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100		100			
2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			5.847.983.921,00		1.600.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
		MENINGKATNYA JANGKAUAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Promosi yang Diikuti (%)	100		100			
2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			1.318.517.817,00		-	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
		MENINGKATNYA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100		100			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			2.176.050.153,00		700.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
		TERKENDALINYA PERLAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100		100			
2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			339.381.532,00		-	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
		MENINGKATNYA PEMANFAATAN DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100		100			
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				62.751.911.209,00		39.495.180.065,00		
2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17.741.670.040,00		12.545.180.065,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80		80			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			5.754.105.627,00		2.050.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		MENINGKATNYA DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	68,75		68,75			
			Persentase Pemuda yang Pernah Mengikuti Pelatihan/ Kursus/ Training/ dan Memperoleh Sertifikat (%)	4,96		4,96			
2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			36.447.593.309,00		23.150.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		MENINGKATNYA PEMBUDAYAAN DAN PRESTASI OLAHRAGA	Cakupan Pembinaan Olahraga (%)	58,33		58,33			
			Persentase Atlet yang Berasal Dari Kab/ Kota yang Masuk Pelatda (%)	13,60		13,60			
2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			2.808.542.233,00		1.750.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		MENINGKATNYA KULITAS KEPRAMUKAAN	Presentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif (%)	34,02		34,02			
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				1.514.247.472,00		1.000.000.000,00		
2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			1.514.247.472,00		1.000.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		TERCAPAINYA KOLABORASI, INTEGRASI DAN STANDARISASI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)	Persentase Publikasi Data Sektoral dalam Portal Satu Data (%)	45		45			
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.121.423.053,00		500.000.000,00		
2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			1.121.423.053,00		500.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		MENINGKATNYA KEAMANAN SIBER DAN SANDI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks KAMI (Indeks)	2		2			
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				3.012.246.994,00		15.000.000.000,00		
2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			1.168.955.811,00		10.500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	30		30			
2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			380.195.824,00		1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	40		40			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
2.22.04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			119.875.367,00		500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	15		15			
2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			271.141.173,00		500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		MENINGKATNYA WARISAN BUDAYA YANG DILESTARIKAN	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	0,11		0,11			
			Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	0,11		0,11			
2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			1.072.078.819,00		2.500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		MENINGKATNYA TATA KELOLA MUSEUM	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	25		25			
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				33.214.070.902,00		27.053.943.936,00		
2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			29.151.153.895,00		25.053.943.936,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	77		77			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			4.062.917.007,00		2.000.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		MENINGKATNYA LAYANAN PERPUSTAKAAN SESUAI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat (%)	1,45		1,45			
			Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	68,23		68,23			
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				2.155.715.992,00		100.000.000,00		
2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			1.773.447.894,00		90.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		MENINGKATNYA TATA TKELOLA ARSIP DINAMIS DAN STATIS	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	29,63		29,63			
			Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah Minimal B (Rasio)	0,19		0,19			
2.24.03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			382.268.098,00		10.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP SESUAI NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	37,04		37,04			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				68.223.284.018,00		20.550.866.301,00		
3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			25.415.223.877,00		13.851.862.676,00	Dinas Perikanan	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERIKANAN	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80		80			
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			16.068.207.598,00		1.950.000.000,00	Dinas Perikanan	
		MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DINAS PERIKANAN	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8799,28		8799,28			
3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			19.377.355.770,00		3.887.291.625,00	Dinas Perikanan	
		MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DINAS PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1138,63		1138,63			
3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			2.612.498.855,00		50.000.000,00	Dinas Perikanan	
		MENINGKATNYA KELESTARIAN LAUT DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase Kawasan Perairan Umum Darat yang Diawasi (%)	48,65		48,65			
3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			4.749.997.918,00		811.712.000,00	Dinas Perikanan	
		MENINGKATNYA KONSUMSI IKAN OLEH MASYARAKAT	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	43,49		43,49			
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				38.746.055.521,00		18.374.157.576,00		
3.26.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17.416.645.804,00		10.374.157.576,00	Dinas Pariwisata	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	74		74			
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			7.635.662.117,00		1.690.000.000,00	Dinas Pariwisata	
		MENINGKATNYA DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang) (%)	1,21		1,21			
			Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)	1,06		1,06			
3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			3.580.006.831,00		760.000.000,00	Dinas Pariwisata	
		MENINGKATNYA JANGKAUAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan promosi pemasaran pariwisata (%)	16,67		16,67			
3.26.04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			5.465.884.945,00		2.550.000.000,00	Dinas Pariwisata	
		MENINGKATNYA KUALITAS EKOSISTEM KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0,14		0,14			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			4.647.855.824,00		3.000.000.000,00	Dinas Pariwisata	
		MENINGKATNYA KAPASITAS SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih (%)	37,82		37,82			
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				180.268.477.720,00		111.706.693.744,00		
3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			86.411.370.074,00		67.200.309.387,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80		80			
3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			35.482.421.965,00		7.559.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
		MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS SARANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Produksi Nanas (Ton)	18426		18426			
			Jumlah Produksi Padi (Ton)	26186		26186			
			Jumlah Produksi Tanaman	437		437			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Hortikultura Jenis Cabai (Ton)						
			Jumlah Produksi Jagung (Ton)	1550		1550			
			Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) (Ton)	3325		3325			
			Produksi Pisang (Ton)	97417		97417			
3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			14.469.450.993,00		16.450.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pernakan	
		MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Proporsi Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (%)	65,33		65,33			
3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			1.037.739.686,00		750.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pernakan	
		MENINGKATNYA PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	100		100			
3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			2.085.537.168,00		1.000.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pernakan	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
	MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	55,33		55,33			
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			4.136.024.614,00		3.800.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pernakan	
	MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	19,34		19,34			
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12.372.384.357,00		10.372.384.357,00	Dinas Perkebunan	
	TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERKEBUNAN	Nilai SAKIP (Nilai)	65,5		65,5			
		Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80		80			
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			13.001.914.630,00		3.000.000.000,00	Dinas Perkebunan	
	MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS SARANA PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN	Tingkat Cakupan Penyediaan Sarana Pertanian (%)	45		45			
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			3.127.480.564,00		450.000.000,00	Dinas Perkebunan	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN	Tingkat Penyediaan Prasarana Pertanian (%)	20		20			
3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			1.396.586.791,00		75.000.000,00	Dinas Perkebunan	
		MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan (%)	100		100			
			Persentase peningkatan luas ANKT (%)	0,08		0,08			
			Cakupan Penanggulangan bencana Pertanian (%)	60		60			
3.27.06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			454.303.513,00		50.000.000,00	Dinas Perkebunan	
		MENINGKATNYA KUALITAS DAN KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan usaha pertanian yang diawasi (%)	20		20			
3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			6.293.263.365,00		1.000.000.000,00	Dinas Perkebunan	
		MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG PENYULUH PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	0,17		0,17			
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				16.791.550.099,00		7.050.000.000,00		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		817.504.708,00		-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		MENINGKATNYA KEMUDAHAN PROSES PERIZINAN DAN PENDAFTARAN BERUSAHA	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100		100		
3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		5.164.160.138,00		2.000.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI BARANG YANG EFISIEN, MERATA DAN TERINTEGRASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	33		33		
3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		7.371.579.805,00		5.000.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		MENINGKATNYA KELANCARAN DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	1,08		1,08		
3.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		1.576.711.655,00		25.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		MENINGKATNYA PELAKU USAHA YANG BERORIENTASI EKSPOR	Persentase Pelaku usaha yang Melakukan Ekspor (%)	1,5		1,5		
3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		1.004.763.903,00		25.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		MENINGKATNYA TERTIB NIAGA DAN MUTU PRODUK	Persentase alat- alat ukur, takar,	100		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)						
3.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			856.829.890,00		-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		MENINGKATNYA PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	12		12			
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				21.377.860.583,00		16.827.291.678,00		
3.31.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.336.316.458,00		16.327.291.678,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	60,55		60,55			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	82		82			
3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			1.750.128.186,00		500.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		MENINGKATNYA REALISASI PEMBANGUNAN INDUSTRI	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	97,11		97,11			
3.31.03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			583.308.121,00		-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA KUALITAS PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN	persentase kepatuhan berusaha (Persentase)	100		100			
3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			708.107.818,00		-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		MENINGKATNYA PEMANFAATAN INFORMASI INDUSTRI	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	6,50		6,50			
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				3.360.684.287,00		1.050.000.000,00		
3.32.02		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			646.857.657,00		50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		MENINGKATNYA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	20,00		20,00			
3.32.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			2.713.826.630,00		1.000.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN KAPASITAS TRANSMIGRAN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	4,01		4,01			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				356.394.761.599,00		267.188.245.859,00		
4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			215.461.015.338,00		133.673.245.859,00	Sekretariat Daerah	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	78,75		78,75			
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			128.347.281.814,00		128.215.000.000,00	Sekretariat Daerah	
		MENINGKATNYA KUALITAS KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Penerima Beasiswa (%)	76,00		76,00			
			Persentase Ketercapaian Kinerja SPM (%)	93,00		93,00			
			Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	71,5		71,5			
			Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) (Indeks)	75,00		75,00			
			Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	80		80			
4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			12.586.464.447,00		5.300.000.000,00	Sekretariat Daerah	
		MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Perkembangan Harga (Indeks)	5		5			
			Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	7190		7190			
			Presentase Layanan Eletrifikasi Rumah Tangga (%)	90,42		90,42			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Presentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pembangunan dan Perekonomian (%)	75,00		75,00			
4.02	SEKRETARIAT DPRD				86.282.413.540,00		70.394.577.286,00		
4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			70.646.019.937,00		65.664.577.286,00	Sekretariat DPRD	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	74		74			
4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			15.636.393.603,00		4.730.000.000,00	Sekretariat DPRD	
		MENINGKATNYA KUALITAS PERSIDANGAN DAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	80		80			
5.01	PERENCANAAN				37.661.022.779,00		21.871.519.774,00		
5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			21.089.449.935,00		15.271.519.773,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Terlaksananya penunjang perangkat daerah	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	76,00		76,00			
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			6.892.176.798,00		3.150.000.001,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program (Persentase)	94,50		94,50			
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	100		100			
5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			9.679.396.046,00		3.450.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA, BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN, BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan (%)	100		100			
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100		100			
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan	100		100			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			dan Pembangunan Manusia (%)						
5.02	KEUANGAN				1.284.304.709.040,00		1.090.378.545.425,00		
5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			145.870.264.255,00		139.365.746.981,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	77		77			
5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			1.058.308.815.110,00		879.309.464.825,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		MENINGKATNYA TATA KELOLA ANGGARAN, PENBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN	Presentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	40		40			
			Presentase Penurunan SILPA (%)	94,57		94,57			
			Presentase Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (%)	30		30			
			Presentase Realisasi	84,37		84,37			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)						
			Persentase Realisasi SP2D Terhadap Total SPD yang Diterbitkan (%)	83		83			
5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			30.336.480.915,00		27.311.400.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		MENINGKATNYA TATA KELOLA ASET DAERAH	Presentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	50,47		50,47			
5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			41.313.459.449,00		38.029.023.061,00	Badan Pendapatan Daerah	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	78		78			
5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			8.475.689.311,00		6.362.910.558,00		
		MENINGKATNYA UPAYA EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN	Persentase WP terdaftar aktif terhadap total WP terdata (%)	67		67			
			Persentase realisasi penagihan	62,70		62,70			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			terhadap piutang pajak (%)						
			Persentase Realisasi penerimaan PBB dan BPHTB berdasarkan ketetapan (%)	30,8		30,8			
			Persentase capaian pajak daerah terhadap target yg ditetapkan (%)	100		100			
5.03	KEPEGAWAIAN				22.816.272.144,00		24.616.891.232,00		
5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.416.272.144,00		19.616.891.232,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	82		82			
5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			400.000.000,00		5.000.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		MENINGKATNYA KUALITAS PENILAIAN KINERJA ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	99,88		99,88			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA TATA KELOLA PENGEMBANGAN KARIR ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	96		96			
		MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100		100			
		MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	15		15			
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3.352.065.375,00		2.800.000.000,00		
5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			3.352.065.375,00		2.800.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		MENINGKATNYA LAYANAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR, KADER, MANAJERIAL, DAN FUNGSIONAL	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	40,14		40,14			
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				13.043.093.239,00		7.314.532.199,00		
5.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.533.478.699,00		6.314.532.199,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	90		82,2			
			Nilai SAKIP (Nilai)	62,5		62,7			
5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			1.944.194.189,00		1.000.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN, SERTA PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	0		29,63			
5.05.03		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			1.565.420.351,00		-	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		MENINGKATNYA PEMANFAATAN INOVASI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAERAH	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah (%)	0		28,57			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				45.565.793.601,00		40.288.303.647,00		
6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.576.370.023,00		22.338.303.647,00	Inspektorat	
		TERWUJUDNYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80		80			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			16.529.499.243,00		15.150.000.000,00	Inspektorat	
		MENURUNNYA TERJADINYA PENYELEWENGAN ATAU PENYIMPANGAN, BAIK YANG BERSIFAT ANGGARAN ATAUPUN PROSES DAN KEWENANGAN	Tindakanj Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	83		83			
6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			6.459.924.335,00		2.800.000.000,00	Inspektorat	
		MENINGKATNYA KUALITAS PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Maturitas SPIP SKPD Level 3 (%)	55		55			
			Manajemen Risiko Indeks (Nilai)	3		3			
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	3		3			
7.01	KECAMATAN				165.147.656.122,00		137.473.165.890,00		
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.045.420.150,00		8.685.049.269,00	Kantor Camat Sangatta Selatan	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. SANGATTA SELATAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78		78			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.667.793.516,00		94.453.000,00	Kantor Camat Sangatta Selatan	
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	71		71			
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			2.075.936.974,00		13.034.882.000,00	Kantor Camat Sangatta Selatan	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	65,00		65,00			
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.407.500.759,00		83.139.000,00	Kantor Camat Sangatta Selatan	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	60		60			
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			1.956.492.129,00		182.002.000,00	Kantor Camat Sangatta Selatan	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	90,83		90,83			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			929.455.510,00		75.019.000,00	Kantor Camat Sangatta Selatan	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola	100		100			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
	WILAYAH KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Pemerintahan yang baik (%)						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.883.956.814,00		8.325.760.589,00	Kantor Camat Sangatta Utara	
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. SANGATTA UTARA	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
		Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78		78			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.553.609.626,00		50.000.000,00	Kantor Camat Sangatta Utara	
	MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA UTARA	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	75		75			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			3.197.572.403,00		19.944.674.000,00	Kantor Camat Sangatta Utara	
	MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA UTARA	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	75		75			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.556.353.980,00		50.000.000,00	Kantor Camat Sangatta Utara	
	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA UTARA	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	55		55			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			2.571.742.177,00		80.000.000,00	Kantor Camat Sangatta Utara	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA UTARA	Persentase masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan (%)	20		20			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			2.046.306.639,00		50.000.000,00	Kantor Camat Sangatta Utara	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA UTARA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	75		75			
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.023.305.695,00		6.845.904.764,00	Kantor Camat Bengalon	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. BENGALON	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	73		73			
			Nilai Sakip Pemerintah Daerah (Nilai)	73,00		73,00			
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			319.587.674,00		100.000.000,00	Kantor Camat Bengalon	
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN BENGALON	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	57		57			
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			638.285.000,00		550.000.000,00	Kantor Camat Bengalon	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	60,02		60,02			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
	WILAYAH KECAMATAN BENGALON							
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			350.684.186,00		50.000.000,00	Kantor Camat Bengalon	
	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN BENGALON	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	59,50		59,50			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			796.743.314,00		100.000.000,00	Kantor Camat Bengalon	
	MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BENGALON	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	66,00		66,00			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			331.651.901,00		100.000.000,00	Kantor Camat Bengalon	
	MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN BENGALON	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	75,00		75,00			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.758.953.127,00		3.960.109.044,00	Kantor Camat Kaliorang	
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. KALIORANG	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78		78			
		Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			404.605.751,00		70.000.000,00	Kantor Camat Kaliorang	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIORANG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	82		82			
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			573.215.405,00		570.000.000,00	Kantor Camat Kaliorang	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN KALIORANG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	100		100			
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			390.920.318,00		70.000.000,00	Kantor Camat Kaliorang	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN KALIORANG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100		100			
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			428.134.508,00		140.000.000,00	Kantor Camat Kaliorang	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIORANG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	70		70			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			289.072.671,00		70.000.000,00	Kantor Camat Kaliorang	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN KALIORANG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	80		80			
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.156.619.013,00		6.423.884.061,00	Kantor Camat Muara Wahau	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. MUARA WAHAU	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	73		73			
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			450.487.952,00		30.000.000,00	Kantor Camat Muara Wahau	
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA WAHAU	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	73		73			
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			461.771.419,00		425.617.301,00	Kantor Camat Muara Wahau	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN MUARA WAHAU	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	98		98			
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			387.328.316,00		30.000.000,00	Kantor Camat Muara Wahau	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN MUARA WAHAU	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	98		98			
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			357.427.948,00		300.000.000,00	Kantor Camat Muara Wahau	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA WAHAU	Presentase Masyarakat yang Memahami	70,3		70,3			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Wawasan Kebangsaan (%)						
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			277.556.812,00		55.000.000,00	Kantor Camat Muara Wahau	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN MUARA WAHAU	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	70,3		70,3			
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.091.073.636,00		5.634.532.200,00	Kantor Camat Kombeng	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. KOMBENG	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	77		77			
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			438.707.507,00		40.000.000,00	Kantor Camat Kombeng	
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KOMBENG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	76		76			
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			472.712.486,00		570.000.000,00	Kantor Camat Kombeng	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN KOMBENG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	74		74			
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			403.144.217,00		28.415.000,00	Kantor Camat Kombeng	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN	Presentase Penegakan	100		100			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN KOMBENG	Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)						
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			327.996.719,00		220.000.000,00	Kantor Camat Kombeng	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KOMBENG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	73		73			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			357.912.054,00		45.000.000,00	Kantor Camat Kombeng	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN KOMBENG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	76		76			
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.080.951.936,00		79.000.000,00	Kantor Camat Muara Ancalong	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. MUARA ANCALONG	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	72,50		72,50			
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			360.407.537,00		50.000.000,00	Kantor Camat Muara Ancalong	
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA ANCALONG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	80		80			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			400.099.396,00		575.000.000,00	Kantor Camat Muara Ancalong	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN MUARA ANCALONG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	78,57		78,57			
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			344.853.208,00		20.000.000,00	Kantor Camat Muara Ancalong	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN MUARA ANCALONG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100		100			
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			385.449.928,00		155.000.000,00	Kantor Camat Muara Ancalong	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA ANCALONG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	60,00		60,00			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			345.091.301,00		90.000.000,00	Kantor Camat Muara Ancalong	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN MUARA ANCALONG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	60,00		60,00			
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.595.645.247,00		3.935.881.735,00	Kantor Camat Batu Ampar	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. BATU AMPAR	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	79		79			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			466.356.720,00		30.000.000,00	Kantor Camat Batu Ampar	
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN BATU AMPAR	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	77		77			
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			592.899.408,00		570.000.000,00	Kantor Camat Batu Ampar	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BATU AMPAR	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	79		79			
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			311.994.928,00		50.000.000,00	Kantor Camat Batu Ampar	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN BATU AMPAR	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	77		77			
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			355.067.624,00		220.000.000,00	Kantor Camat Batu Ampar	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BATU AMPAR	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	79		79			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			254.592.327,00		120.000.000,00	Kantor Camat Batu Ampar	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA	Presentase Desa yang menerapkan	72		72			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN BATU AMPAR	Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)						
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.030.628.077,00		4.543.619.536,00	Kantor Camat Telen	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. TELEN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	75		75			
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			415.399.745,00		35.000.000,00	Kantor Camat Telen	
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN TELEN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	74		74			
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			471.601.161,00		530.000.000,00	Kantor Camat Telen	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN TELEN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	74		74			
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			314.217.046,00		70.000.000,00	Kantor Camat Telen	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN TELEN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100		100			
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			385.287.437,00		185.000.000,00	Kantor Camat Telen	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TELEN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	75		75			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			319.090.795,00		75.000.000,00	Kantor Camat Telen	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN TELEN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	75		75			
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.885.403.300,00		3.696.256.689,00	Kantor Camat Busang	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. BUSANG	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	79		79			
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			415.399.745,00		70.000.000,00	Kantor Camat Busang	
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN BUSANG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	70		70			
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			565.957.057,00		565.000.000,00	Kantor Camat Busang	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BUSANG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	55		55			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		379.969.484,00		75.000.000,00	Kantor Camat Busang	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN BUSANG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	80		80		
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		354.387.292,00		125.000.000,00	Kantor Camat Busang	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BUSANG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	65		65		
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		277.140.062,00		170.000.000,00	Kantor Camat Busang	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN BUSANG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	70		70		
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.194.681.511,00		5.790.490.826,00	Kantor Camat Teluk Pandan	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC TELUK PANDAN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78		78		
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50		
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		489.845.013,00		20.000.000,00	Kantor Camat Teluk Pandan	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN TELUK PANDAN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	94		94			
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			535.668.229,00		530.000.000,00	Kantor Camat Teluk Pandan	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN TELUK PANDAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	60		60			
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			388.095.936,00		40.000.000,00	Kantor Camat Teluk Pandan	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN TELUK PANDAN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	81		81			
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			361.959.869,00		165.000.000,00	Kantor Camat Teluk Pandan	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TELUK PANDAN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	79		79			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			331.296.063,00		50.000.000,00	Kantor Camat Teluk Pandan	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN TELUK PANDAN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	73		73			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.384.563.951,00		3.381.632.001,00	Kantor Camat Rantau Pulung	
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. RANTAU PULUNG	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
		Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76		76			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			409.229.940,00		59.560.000,00	Kantor Camat Rantau Pulung	
	MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN RANTAU PULUNG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	87		87			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			404.285.282,00		399.718.000,00	Kantor Camat Rantau Pulung	
	MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN RANTAU PULUNG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	85		85			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			301.918.193,00		87.420.000,00	Kantor Camat Rantau Pulung	
	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN RANTAU PULUNG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	81		81			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			308.459.000,00		304.025.000,00	Kantor Camat Rantau Pulung	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN RANTAU PULUNG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	75		75			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			292.800.574,00		62.409.000,00	Kantor Camat Rantau Pulung	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN RANTAU PULUNG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	78		78			
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.680.870.024,00		3.677.473.437,00	Kantor Camat Kaubun	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. KAUBUN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	74		74			
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			464.088.445,00		50.000.000,00	Kantor Camat Kaubun	
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KAUBUN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	55		55			
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			582.193.610,00		570.000.000,00	Kantor Camat Kaubun	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN KAUBUN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	77		77			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		357.638.311,00		50.000.000,00	Kantor Camat Kaubun	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN KAUBUN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	94		94		
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		320.443.504,00		85.000.000,00	Kantor Camat Kaubun	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KAUBUN	Persentase masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan (%)	30		30		
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		313.304.844,00		70.000.000,00	Kantor Camat Kaubun	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN KAUBUN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	75		75		
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.783.716.542,00		5.250.668.728,00	Kantor Camat Sangkulirang	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. SANGKULIRANG	Nilai SAKIP (Nilai)	64,15		64,15		
			Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	73		73		
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		429.384.264,00		16.830.000,00	Kantor Camat Sangkulirang	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGKULIRANG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	65		65			
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			530.784.039,00		508.415.000,00	Kantor Camat Sangkulirang	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN SANGKULIRANG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	75		75			
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			346.818.522,00		16.830.000,00	Kantor Camat Sangkulirang	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN SANGKULIRANG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100		100			
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			392.811.512,00		33.415.000,00	Kantor Camat Sangkulirang	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGKULIRANG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	90		90			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			349.709.321,00		50.490.000,00	Kantor Camat Sangkulirang	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN SANGKULIRANG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	73		73			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.191.728.612,00		8.039.659.565,00	Kantor Camat Muara Bengkal	
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. MUARA BENGKAL	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80		80			
		Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			404.945.045,00		21.130.000,00	Kantor Camat Muara Bengkal	
	MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA BENGKAL	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	80		80			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			541.362.655,00		553.973.000,00	Kantor Camat Muara Bengkal	
	MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN MUARA BENGKAL	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	73		73			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			320.330.917,00		33.845.000,00	Kantor Camat Muara Bengkal	
	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN MUARA BENGKAL	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100		100			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			382.665.521,00		260.807.530,00	Kantor Camat Muara Bengkal	
	MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT	Presentase Masyarakat yang	90		90			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
	DI KECAMATAN MUARA BENGKAL	Memahami Wawasan Kebangsaan (%)						
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			372.125.970,00		56.542.000,00	Kantor Camat Muara Bengkal	
	MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN MUARA BENGKAL	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	100		100			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.978.828.050,00		5.323.140.956,00	Kantor Camat Long Mesangat	
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. LONG MESANGAT	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80		80			
		Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			405.524.327,00		80.000.000,00	Kantor Camat Long Mesangat	
	MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN LONG MESANGAT	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	90		90			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			331.151.002,00		210.000.000,00	Kantor Camat Long Mesangat	
	MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN LONG MESANGAT	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	98		98			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			305.524.327,00		100.000.000,00	Kantor Camat Long Mesangat	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN LONG MESANGAT	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100		100			
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			393.153.143,00		100.000.000,00	Kantor Camat Long Mesangat	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LONG MESANGAT	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	85		85			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			327.365.770,00		100.000.000,00	Kantor Camat Long Mesangat	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN LONG MESANGAT	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	57		57			
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.286.839.333,00		3.281.042.000,00	Kantor Camat Karangan	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. KARANGAN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76		76			
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			459.140.745,00		50.000.000,00	Kantor Camat Karangan	
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KARANGAN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	52		52			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		360.864.621,00		330.480.000,00	Kantor Camat Karangan	
	MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN KARANGAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	82		82			
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		313.795.210,00		50.000.000,00	Kantor Camat Karangan	
	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN KARANGAN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	82		82			
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		368.215.406,00		75.000.000,00	Kantor Camat Karangan	
	MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KARANGAN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	65		65			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		379.079.206,00		50.000.000,00	Kantor Camat Karangan	
	MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN KARANGAN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	82		82			
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.620.514.751,00		3.619.969.659,00	Kantor Camat Sandaran	
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. SANDARAN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	74		74			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			409.311.196,00		15.000.000,00	Kantor Camat Sandaran	
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SANDARAN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	49		49			
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			375.303.735,00		575.000.000,00	Kantor Camat Sandaran	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN SANDARAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	79		79			
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			300.694.400,00		10.000.000,00	Kantor Camat Sandaran	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN SANDARAN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	40		40			
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			389.636.177,00		100.000.000,00	Kantor Camat Sandaran	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SANDARAN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	41		41			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			287.060.437,00		50.000.000,00	Kantor Camat Sandaran	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA	Presentase Desa yang menerapkan	56		56			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
	PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN SANDARAN	Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)						
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			21.669.672.599,00		16.430.890.113,00		
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.450.355.210,00		7.450.108.113,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
		Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80		80			
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			5.665.734.337,00		5.000.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	MENINGKATNYA KESADARAN MSYARAKAT AKAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase sekolah dan Forum yang mendapatkan pembinaan penguatan ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Bela Negara (%)	40,40		40,40			
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			2.348.208.693,00		1.606.782.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	MENINGKATNYA ETIKA DAN BUDAYA POLITIK	Persentase pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai Timur (%)	28		28			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			1.324.617.596,00		1.200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		MENINGKATNYA KETERTIBAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	30		30			
8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			1.878.424.889,00		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		MENINGKATNYA KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT	Persentase ASN dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang bersih dari narkoba (%)	27,00		27,00			
8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			3.002.331.874,00		1.174.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Konflik Sosial (Angka)	0		0			
			Persentase penanganan konflik sosial (%)	100		100			

Secara umum, Tabel 4.7 menunjukkan bahwa keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 dengan Renja OPD/RKPD Tahun 2026 telah dapat ditelusuri melalui kesesuaian perangkat daerah, program, indikator, target, dan pagu indikatif. Sebagian besar program yang tercantum dalam Renja OPD Tahun 2026 memiliki hubungan substansial dengan arah program dalam RPJMD, meskipun terdapat penyesuaian nomenklatur perangkat daerah, penggabungan urusan, serta perubahan struktur kelembagaan pada beberapa OPD.

Perbedaan yang muncul pada sejumlah perangkat daerah perlu dipahami sebagai bagian dari penyesuaian teknokratik dalam penyusunan RKPD Tahun 2026. Beberapa program memiliki padanan langsung dengan RPJMD, sedangkan sebagian lainnya belum memiliki keterhubungan eksplisit pada kolom target atau pagu RPJMD.

Tabel ini juga memberikan dasar bagi penajaman evaluasi pada tahap berikutnya, terutama dalam menilai kesesuaian antara prioritas pembangunan daerah, program perangkat daerah, indikator kinerja, target tahunan, dan dukungan pendanaan. Program yang sudah memiliki kesesuaian dapat dipertahankan sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sementara program yang belum sepenuhnya memiliki padanan RPJMD perlu diberi penjelasan teknis dalam narasi evaluasi. Langkah ini penting agar dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2026 memiliki dasar analisis yang akuntabel, terukur, dan dapat digunakan sebagai masukan bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB 5

PENGENDALIAN PELAKSANAAN RKPD TERHADAP APBD

Bab ini menguraikan tingkat kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pengendalian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana program pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RKPD memperoleh dukungan penganggaran dalam APBD, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif untuk mencapai sasaran pembangunan tahunan daerah.

Kesesuaian antara RKPD dan APBD merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah karena menunjukkan keterhubungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran. RKPD memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan kebutuhan pendanaan tahunan daerah. Sementara itu, APBD menjadi instrumen fiskal yang menentukan apakah keseluruhan rencana tersebut dapat diimplementasikan sesuai prioritas yang telah ditetapkan. Tingkat konsistensi antara kedua dokumen tersebut mencerminkan kualitas tata kelola pembangunan daerah secara lebih operasional.

Pengendalian pelaksanaan RKPD terhadap APBD pada bab ini dilakukan melalui penilaian terhadap enam aspek utama, yaitu konsistensi program, konsistensi kegiatan, konsistensi subkegiatan, konsistensi indikator kinerja, konsistensi target kinerja, dan konsistensi pagu anggaran. Melalui pendekatan tersebut, evaluasi tidak hanya melihat ada atau tidaknya dukungan anggaran, tetapi juga menilai ketepatan penerjemahan rencana ke dalam struktur pelaksanaan pembangunan daerah.

Analisis dalam bab ini juga perlu dipahami dalam konteks dinamika pelaksanaan pembangunan tahun berjalan. Dalam praktiknya, proses penganggaran dapat mengalami penyesuaian sebagai akibat perubahan kapasitas fiskal daerah, penajaman prioritas pembangunan, kebijakan efisiensi belanja, maupun kebutuhan penyesuaian terhadap kondisi aktual yang berkembang. Adanya perbedaan antara RKPD dan APBD tidak selalu menunjukkan kelemahan dalam perencanaan, tetapi dapat pula mencerminkan proses adaptasi kebijakan agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan prioritas yang berkembang.

Dengan demikian, Bab V disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai tingkat sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2026. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menunjukkan bagian-bagian yang telah selaras, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan penyempurnaan, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan dalam penguatan integrasi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran pada periode berikutnya.

5.1 Konsistensi Program antara RKPD dengan APBD

Konsistensi program antara RKPD dengan APBD merupakan salah satu ukuran awal untuk menilai keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran daerah. Pada level ini, evaluasi diarahkan untuk melihat apakah seluruh program yang telah dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 telah terakomodasi dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

Penilaian ini penting karena program merupakan bentuk operasional dari kebijakan pembangunan tahunan yang menjadi wadah bagi pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah.

Tingkat konsistensi program menunjukkan sejauh mana prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat diterjemahkan secara utuh ke dalam kebijakan penganggaran. Semakin tinggi tingkat kesesuaian antara jumlah dan struktur program pada RKPD dan APBD, maka semakin kuat pula indikasi bahwa proses perencanaan dan penganggaran telah berjalan secara selaras. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan jumlah atau struktur program, maka hal tersebut perlu dicermati lebih lanjut karena dapat memengaruhi kesinambungan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, perbedaan antara RKPD dan APBD pada level program dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain penyesuaian terhadap kapasitas fiskal daerah, perubahan kebijakan pada tahun berjalan, penyelarasan nomenklatur, maupun penajaman prioritas pembangunan. Oleh sebab itu, analisis konsistensi program pada subbab ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghitung tingkat kesesuaian secara kuantitatif, tetapi juga untuk memberikan gambaran mengenai kualitas sinkronisasi antara arah kebijakan pembangunan dengan dukungan anggaran yang tersedia.

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan pada subbab ini disajikan menurut perangkat daerah untuk menunjukkan tingkat konsistensi program RKPD dengan APBD secara lebih rinci. Penyajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perangkat daerah yang telah memiliki tingkat konsistensi tinggi, sekaligus perangkat daerah yang masih memerlukan penguatan dalam integrasi antara perencanaan dan penganggaran.

Tabel 5.1 Konsistensi Program RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2026

No	Perangkat Daerah	Program RKPD	Program APBD	Konsistensi Program RKPD-APBD	Inkonsistensi Program RKPD-APBD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	9	9	0
2	Dinas Kesehatan	5	5	5	0
3	RSUD Kudungga Sangatta	2	2	2	0
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	12	12	0
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	6	6	0
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	2	0
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	2	2	0

No	Perangkat Daerah	Program RKPD	Program APBD	Konsistensi Program RKPD-APBD	Inkonsistensi Program RKPD-APBD
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	0
9	Dinas Sosial	6	6	6	0
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	7	7	7	0
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	7	7	0
12	Dinas Ketahanan Pangan	5	5	5	0
13	Dinas Pertanahan	5	5	5	0
14	Dinas Lingkungan Hidup	11	11	11	0
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5	0
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5	5	0
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4	4	0
18	Dinas Perhubungan	3	3	3	0
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5	5	5	0
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	7	7	7	0
21	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	6	6	6	0
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	4	4	0
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	5	5	0
24	Dinas Perikanan	5	5	5	0
25	Dinas Pariwisata	5	5	5	0

No	Perangkat Daerah	Program RKPD	Program APBD	Konsistensi Program RKPD-APBD	Inkonsistensi Program RKPD-APBD
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5	5	5	0
27	Dinas Perkebunan	6	6	6	0
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	10	10	0
29	Sekretariat Daerah	3	3	3	0
30	Sekretariat DPRD	2	2	2	0
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	3	3	0
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	3	0
33	Badan Pendapatan Daerah	2	2	2	0
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	3	0
35	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1	1	1	0
36	Inspektorat	3	3	3	0
37	Kantor Camat Sangatta Selatan	6	6	6	0
38	Kantor Camat Sangatta Utara	7	7	7	0
39	Kantor Camat Bengalon	6	6	6	0
40	Kantor Camat Kaliorang	6	6	6	0
41	Kantor Camat Muara Wahau	6	6	6	0
42	Kantor Camat Kombeng	6	6	6	0
43	Kantor Camat Muara Ancalong	6	6	6	0
44	Kantor Camat Batu Ampar	6	6	6	0
45	Kantor Camat Telen	6	6	6	0

No	Perangkat Daerah	Program RKPD	Program APBD	Konsistensi Program RKPD-APBD	Inkonsistensi Program RKPD-APBD
46	Kantor Camat Busang	6	6	6	0
47	Kantor Camat Teluk Pandan	6	6	6	0
48	Kantor Camat Rantau Pulung	6	6	6	0
49	Kantor Camat Kaubun	6	6	6	0
50	Kantor Camat Sangkulirang	6	6	6	0
51	Kantor Camat Muara Bengkal	6	6	6	0
52	Kantor Camat Long Mesangat	6	6	6	0
53	Kantor Camat Karangan	6	6	6	0
54	Kantor Camat Sandaran	6	6	6	0
55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	6	0
	TOTAL	291	291	291	0

Berdasarkan Tabel 5.1, konsistensi program antara RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2026 menunjukkan tingkat keselarasan yang sangat baik. Hal ini terlihat dari kesesuaian jumlah program RKPD dan program APBD pada seluruh perangkat daerah, sehingga pada level program tidak ditemukan adanya inkonsistensi. Arah kebijakan pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam RKPD mampu diterjemahkan secara utuh ke dalam struktur penganggaran tahunan. Dengan demikian, pada tataran program, keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran daerah telah terbentuk secara kuat. Namun demikian, konsistensi pada level program tetap perlu dibaca secara berjenjang bersama hasil evaluasi pada level kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu anggaran, karena kualitas sinkronisasi pembangunan daerah pada akhirnya ditentukan oleh keterhubungan seluruh komponen tersebut secara menyeluruh.

5.2 Konsistensi Kegiatan antara RKPD dengan APBD

Konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD merupakan indikator penting untuk menilai apakah program yang telah direncanakan benar-benar diterjemahkan ke dalam tindakan operasional perangkat daerah. Pada level ini, evaluasi diarahkan untuk melihat kesesuaian jumlah kegiatan antara dokumen RKPD dan APBD, karena kegiatan menjadi jembatan utama antara program pembangunan dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Tingginya konsistensi kegiatan menunjukkan bahwa proses penganggaran telah mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan secara lebih konkret, sedangkan inkonsistensi kegiatan dapat mengindikasikan

adanya penyesuaian struktur pelaksanaan, perubahan prioritas, atau pengaruh kapasitas fiskal daerah dalam tahun berjalan.

Tabel 5.2 Konsistensi Kegiatan RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2026

No	Perangkat Daerah	Kegiatan RKPD/Renja	Kegiatan APBD	Konsistensi Kegiatan RKPD/Renja-APBD	Inkonsistensi Kegiatan RKPD/Renja-APBD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23	23	23	0
2	Dinas Kesehatan	20	20	20	0
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26	26	26	0
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16	16	16	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11	11	11	0
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11	11	11	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	11	11	0
8	Dinas Sosial	15	15	15	0
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	20	20	20	0
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22	22	22	0
11	Dinas Ketahanan Pangan	16	16	16	0
12	Dinas Pertanahan	12	12	12	0
13	Dinas Lingkungan Hidup	16	16	16	0
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18	18	18	0

No	Perangkat Daerah	Kegiatan RKPD/Renja	Kegiatan APBD	Konsistensi Kegiatan RKPD/Renja- APBD	Inkonsistensi Kegiatan RKPD/Renja- APBD
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10	10	10	0
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15	15	15	0
17	Dinas Perhubungan	17	17	17	0
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	12	12	12	0
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	13	13	13	0
20	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	14	14	14	0
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	15	15	15	0
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18	18	18	0
23	Dinas Perikanan	19	19	19	0
24	Dinas Pariwisata	15	15	15	0
25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	19	19	19	0
26	Dinas Perkebunan	14	14	14	0
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18	18	18	0
28	Sekretariat Daerah	20	20	20	0
29	Sekretariat DPRD	18	18	18	0
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15	15	15	0

No	Perangkat Daerah	Kegiatan RKPD/Renja	Kegiatan APBD	Konsistensi Kegiatan RKPD/Renja- APBD	Inkonsistensi Kegiatan RKPD/Renja- APBD
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12	12	12	0
32	Badan Pendapatan Daerah	9	9	9	0
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	14	14	0
34	Badan Riset dan Inovasi Daerah	7	7	7	0
35	Inspektorat	12	12	12	0
36	Kantor Camat Sangatta Selatan	17	17	17	0
37	Kantor Camat Sangatta Utara	18	18	18	0
38	Kantor Camat Bengalon	16	16	16	0
39	Kantor Camat Kaliorang	17	17	17	0
40	Kantor Camat Muara Wahau	17	17	17	0
41	Kantor Camat Kombeng	18	18	18	0
42	Kantor Camat Muara Ancalong	16	16	16	0
43	Kantor Camat Batu Ampar	17	17	17	0
44	Kantor Camat Telen	19	19	19	0
45	Kantor Camat Busang	18	18	18	0
46	Kantor Camat Teluk Pandan	17	17	17	0
47	Kantor Camat Rantau Pulung	18	18	18	0

No	Perangkat Daerah	Kegiatan RKPD/Renja	Kegiatan APBD	Konsistensi Kegiatan RKPD/Renja- APBD	Inkonsistensi Kegiatan RKPD/Renja- APBD
48	Kantor Camat Kaubun	18	18	18	0
49	Kantor Camat Sangkulirang	17	17	17	0
50	Kantor Camat Muara Bengkal	17	17	17	0
51	Kantor Camat Long Mesangat	17	17	17	0
52	Kantor Camat Karangan	18	18	18	0
53	Kantor Camat Sandaran	17	17	17	0
54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13	13	13	0
	TOTAL	868	868	868	0

Sumber: Diolah dari Tabel 2.2 Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam Renja dan APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

Berdasarkan hasil analisis konsistensi antara dokumen RKPD/Renja Perangkat Daerah dengan APBD, dapat diketahui bahwa seluruh **54 Perangkat Daerah** telah menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik pada level **kegiatan**. Dari total **868 kegiatan** yang direncanakan dalam RKPD/Renja, seluruhnya telah terakomodasi dalam APBD dengan jumlah yang sama, yaitu **868 kegiatan**. Dengan demikian, terdapat **868 kegiatan yang konsisten** atau mencapai **100% tingkat konsistensi**, serta **tidak terdapat kegiatan yang mengalami inkonsistensi (0 kegiatan)**.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan APBD telah mengacu secara penuh pada dokumen perencanaan tahunan yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Keselarasan ini mencerminkan bahwa mekanisme perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah berjalan dengan baik, sehingga tidak terdapat penambahan maupun pengurangan kegiatan pada saat penyusunan APBD yang berpotensi mengganggu pencapaian target pembangunan daerah.

Tingkat konsistensi sebesar **100%** pada level kegiatan juga mengindikasikan adanya sinergi yang kuat antara tahapan perencanaan dan penganggaran, serta kepatuhan Perangkat Daerah terhadap prinsip *money follows program* dan *planning follows budgeting*. Kondisi ini menjadi modal yang positif dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan, mempermudah proses pengendalian dan evaluasi, serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah karena seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah direncanakan sebelumnya dalam dokumen perencanaan resmi.

5.3 Konsistensi Subkegiatan antara RKPD dengan APBD

Konsistensi subkegiatan antara RKPD dengan APBD merupakan tahapan evaluasi yang lebih rinci untuk melihat tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran pada level pelaksanaan teknis. Pada level ini, evaluasi tidak lagi berhenti pada program dan kegiatan, tetapi menilai apakah rincian subkegiatan yang menjadi unit operasional pelaksanaan pembangunan telah terakomodasi secara selaras dalam APBD. Analisis pada subbab ini menjadi penting karena pada level subkegiatan biasanya mulai tampak penyesuaian yang lebih detail, baik dalam bentuk penambahan, pengurangan, maupun pergeseran struktur belanja pelaksanaan.

Tabel 5.3 Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dengan APBD

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan RKPD/Renja	Sub Kegiatan APBD	Konsistensi Sub Kegiatan RKPD/Renja-APBD	Inkonsistensi Sub Kegiatan RKPD/Renja-APBD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	115	119	115	4
2	Dinas Kesehatan	87	89	87	2
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	111	112	111	1
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	41	41	41	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja	39	39	39	0
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	35	35	35	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31	31	31	0
8	Dinas Sosial	46	46	46	0
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	52	52	52	0
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47	48	47	1

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan RKPD/Renja	Sub Kegiatan APBD	Konsistensi Sub Kegiatan RKPD/Renja-APBD	Inkonsistensi Sub Kegiatan RKPD/Renja-APBD
11	Dinas Ketahanan Pangan	47	47	47	0
12	Dinas Pertanahan	22	22	22	0
13	Dinas Lingkungan Hidup	36	36	36	0
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	39	39	39	0
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30	30	30	0
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	40	40	40	0
17	Dinas Perhubungan	44	44	44	0
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	43	43	43	0
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	32	32	32	0
20	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	36	37	36	1
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	39	39	39	0
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49	49	49	0
23	Dinas Perikanan	40	40	40	0
24	Dinas Pariwisata	51	51	51	0
25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	47	49	47	2

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan RKPD/Renja	Sub Kegiatan APBD	Konsistensi Sub Kegiatan RKPD/Renja-APBD	Inkonsistensi Sub Kegiatan RKPD/Renja-APBD
26	Dinas Perkebunan	31	31	31	0
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	45	46	45	1
28	Sekretariat Daerah	73	72	72	1
29	Sekretariat DPRD	72	72	72	0
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	57	57	57	0
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	60	60	60	0
32	Badan Pendapatan Daerah	38	38	38	0
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52	52	52	2
34	Badan Riset dan Inovasi Daerah	20	20	20	0
35	Inspektorat	46	46	46	0
36	Kantor Camat Sangatta Selatan	44	44	44	0
37	Kantor Camat Sangatta Utara	42	41	41	1
38	Kantor Camat Bengalon	34	34	34	0
39	Kantor Camat Kaliorang	40	41	40	1
40	Kantor Camat Muara Wahau	39	39	39	0
41	Kantor Camat Kombeng	41	41	41	0
42	Kantor Camat Muara Ancalong	49	49	49	0

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan RKPD/Renja	Sub Kegiatan APBD	Konsistensi Sub Kegiatan RKPD/Renja-APBD	Inkonsistensi Sub Kegiatan RKPD/Renja-APBD
43	Kantor Camat Batu Ampar	42	42	42	1
44	Kantor Camat Telen	39	39	39	0
45	Kantor Camat Busang	47	47	47	0
46	Kantor Camat Teluk Pandan	41	41	41	0
47	Kantor Camat Rantau Pulung	36	36	36	0
48	Kantor Camat Kaubun	43	43	43	0
49	Kantor Camat Sangkulirang	48	47	47	1
50	Kantor Camat Muara Bengkal	35	35	35	0
51	Kantor Camat Long Mesangat	37	37	37	0
52	Kantor Camat Karangan	42	42	42	0
53	Kantor Camat Sandaran	39	39	39	0
54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47	46	46	1
	TOTAL	2.478	2.487	2.474	20

Tabel 5.3 menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat tinggi antara sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD/Renja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD. Dari total 2.478 sub kegiatan RKPD/Renja, terdapat 2.474 sub kegiatan yang konsisten dalam APBD, sedangkan terdapat 20 sub kegiatan yang teridentifikasi mengalami inkonsistensi. Di sisi lain, jumlah sub kegiatan dalam APBD tercatat sebanyak 2.487 sub kegiatan. Secara umum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar sub kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD/Renja telah diterjemahkan dan diakomodasi dalam penganggaran APBD.

Inkonsistensi paling banyak terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sebanyak 4 sub kegiatan, diikuti oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan masing-masing sebanyak 2 sub kegiatan. Beberapa Perangkat Daerah lainnya mengalami inkonsistensi masing-masing 1 sub kegiatan, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Daerah, Kantor Camat Sangatta Utara, Kantor Camat Kaliorang, Kantor Camat Batu Ampar, Kantor Camat Sangkulirang, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sementara itu, sebagian besar Perangkat Daerah telah menunjukkan konsistensi penuh (100%) antara sub kegiatan RKPD/Renja dengan APBD. Kondisi ini terlihat pada perangkat daerah seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Bappeda, BPKAD, Bapenda, Inspektorat, serta sebagian besar kecamatan.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa konsistensi perencanaan dan penganggaran pada tingkat sub kegiatan di Kabupaten Kutai Timur sudah sangat baik. Namun demikian, masih diperlukan penelusuran terhadap sub kegiatan yang mengalami perbedaan antara RKPD/Renja dan APBD, khususnya untuk memastikan apakah perubahan tersebut disebabkan oleh penyesuaian kebijakan, perubahan nomenklatur, rasionalisasi anggaran, penambahan sub kegiatan pada tahap penganggaran, maupun faktor teknis lainnya. Hasil penelusuran tersebut penting sebagai bahan evaluasi agar proses perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya semakin sinkron, terukur, dan akuntabel.

5.4 Konsistensi Target Kinerja antara RKPD dengan APBD

Konsistensi target kinerja antara RKPD dengan APBD merupakan aspek penting dalam menilai kualitas keterhubungan antara perencanaan dan penganggaran daerah. Pada level ini, evaluasi diarahkan untuk melihat apakah besaran target yang telah ditetapkan dalam RKPD tetap dipertahankan secara selaras dalam APBD sebagai dasar pelaksanaan dan pengendalian pembangunan tahunan. Target kinerja memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi tolok ukur kuantitatif atas keberhasilan program dan kegiatan perangkat daerah. Oleh sebab itu, kesesuaian target antara kedua dokumen tersebut sangat menentukan kejelasan arah pelaksanaan pembangunan, keterukuran hasil, dan objektivitas evaluasi kinerja daerah.

Berbeda dengan konsistensi indikator kinerja yang menitikberatkan pada kesamaan rumusan ukuran keberhasilan, konsistensi target kinerja lebih berfokus pada besaran capaian yang hendak diwujudkan. Dengan demikian, meskipun indikator yang digunakan dapat tetap sama, perbedaan target antara RKPD dan APBD tetap dapat menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap orientasi pelaksanaan, kebutuhan sumber daya, serta tingkat ambisi pembangunan daerah pada tahun berjalan. Apabila target yang tercantum dalam APBD lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan target dalam RKPD, maka hal tersebut dapat memengaruhi keterbandingan capaian, konsistensi pelaksanaan program, dan validitas penilaian terhadap keberhasilan pembangunan daerah.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, perubahan target kinerja dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain penyesuaian terhadap kapasitas fiskal, perubahan prioritas pembangunan, dinamika kebutuhan pelayanan publik, hasil evaluasi pelaksanaan periode sebelumnya, maupun penajaman kebijakan teknis pada saat penganggaran. Penilaian terhadap konsistensi target kinerja dalam subbab ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengidentifikasi adanya perbedaan angka target, tetapi juga untuk melihat apakah perubahan tersebut masih berada dalam kerangka kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknokratik. Dengan kata lain, evaluasi pada level target kinerja diperlukan untuk memastikan bahwa proses

penganggaran tidak mengubah orientasi capaian pembangunan secara substantif tanpa dasar yang memadai.

Konsistensi target kinerja juga berkaitan erat dengan efektivitas pengendalian pembangunan daerah. Target yang dirumuskan secara selaras antara RKPD dan APBD akan memudahkan perangkat daerah dalam menyusun rencana pelaksanaan, menetapkan strategi pencapaian, mengalokasikan sumber daya, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara lebih terukur. Sebaliknya, ketidaksesuaian target dapat menimbulkan persoalan dalam penafsiran capaian, penyusunan laporan kinerja, dan penilaian efektivitas program. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap target kinerja menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana integrasi antara perencanaan dan penganggaran benar-benar terjaga sampai pada tataran hasil yang hendak dicapai.

Pada beberapa perangkat daerah, dinamika pelaksanaan menunjukkan bahwa pencapaian target dipengaruhi oleh faktor yang bersifat teknis maupun kelembagaan, seperti koordinasi lintas perangkat daerah, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, dukungan data, kesiapan sumber daya manusia, serta efektivitas pengelolaan anggaran. Dalam dokumen rekonsiliasi capaian kinerja perangkat daerah yang tersedia, misalnya, terdapat gambaran bahwa pencapaian target tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas koordinasi, dukungan administrasi, dan kelancaran pelaksanaan program pada masing-masing urusan. Evaluasi target kinerja perlu dibaca tidak hanya sebagai perbandingan angka, tetapi juga sebagai refleksi atas kualitas implementasi pembangunan daerah secara lebih menyeluruh.

Dengan demikian, subbab ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kesesuaian target kinerja antara RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2026 pada masing-masing perangkat daerah. Hasil evaluasi pada bagian ini diharapkan dapat menunjukkan perangkat daerah yang telah mempertahankan keselarasan target kinerja secara baik, sekaligus mengidentifikasi bagian-bagian yang masih memerlukan penyempurnaan agar hubungan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berlangsung secara lebih konsisten, terukur, dan akuntabel.

Tabel 5.4 Konsistensi Target Kinerja RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2026

No	Perangkat Daerah	Konsistensi Target Kinerja	Kategori
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100%	Sangat Tinggi
2	Dinas Kesehatan	100%	Sangat Tinggi
3	RSUD Kudungga Sangatta	100%	Sangat Tinggi
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	Sangat Tinggi
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100%	Sangat Tinggi
6	Satuan Polisi Pamong Praja	100%	Sangat Tinggi
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100%	Sangat Tinggi
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	Sangat Tinggi

No	Perangkat Daerah	Konsistensi Target Kinerja	Kategori
9	Dinas Sosial	100%	Sangat Tinggi
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	100%	Sangat Tinggi
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100%	Sangat Tinggi
12	Dinas Ketahanan Pangan	100%	Sangat Tinggi
13	Dinas Pertanahan	100%	Sangat Tinggi
14	Dinas Lingkungan Hidup	100%	Sangat Tinggi
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	Sangat Tinggi
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100%	Sangat Tinggi
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	Sangat Tinggi
18	Dinas Perhubungan	100%	Sangat Tinggi
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100%	Sangat Tinggi
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	100%	Sangat Tinggi
21	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	Sangat Tinggi
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100%	Sangat Tinggi
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100%	Sangat Tinggi
24	Dinas Perikanan	100%	Sangat Tinggi
25	Dinas Pariwisata	100%	Sangat Tinggi
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	100%	Sangat Tinggi
27	Dinas Perkebunan	100%	Sangat Tinggi
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100%	Sangat Tinggi
29	Sekretariat Daerah	100%	Sangat Tinggi
30	Sekretariat DPRD	100%	Sangat Tinggi
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Sangat Tinggi
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	Sangat Tinggi
33	Badan Pendapatan Daerah	100%	Sangat Tinggi
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	Sangat Tinggi

No	Perangkat Daerah	Konsistensi Target Kinerja	Kategori
35	Badan Riset dan Inovasi Daerah	100%	Sangat Tinggi
36	Inspektorat	100%	Sangat Tinggi
37	Kantor Camat Sangatta Selatan	100%	Sangat Tinggi
38	Kantor Camat Sangatta Utara	100%	Sangat Tinggi
39	Kantor Camat Bengalon	100%	Sangat Tinggi
40	Kantor Camat Kaliorang	100%	Sangat Tinggi
41	Kantor Camat Muara Wahau	100%	Sangat Tinggi
42	Kantor Camat Kombeng	100%	Sangat Tinggi
43	Kantor Camat Muara Ancalong	100%	Sangat Tinggi
44	Kantor Camat Batu Ampar	100%	Sangat Tinggi
45	Kantor Camat Telen	100%	Sangat Tinggi
46	Kantor Camat Busang	100%	Sangat Tinggi
47	Kantor Camat Teluk Pandan	100%	Sangat Tinggi
48	Kantor Camat Rantau Pulung	100%	Sangat Tinggi
49	Kantor Camat Kaubun	100%	Sangat Tinggi
50	Kantor Camat Sangkulirang	100%	Sangat Tinggi
51	Kantor Camat Muara Bengkal	100%	Sangat Tinggi
52	Kantor Camat Long Mesangat	100%	Sangat Tinggi
53	Kantor Camat Karang	100%	Sangat Tinggi
54	Kantor Camat Sandaran	100%	Sangat Tinggi
55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	Sangat Tinggi

Berdasarkan Tabel 5.5, konsistensi target kinerja antara RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2026 pada prinsipnya menjadi cerminan penting dari keselarasan orientasi hasil pembangunan daerah. Kesesuaian target kinerja menunjukkan bahwa proses penganggaran tidak hanya menjaga keberlanjutan struktur program dan kegiatan, tetapi juga mempertahankan arah capaian yang hendak diwujudkan oleh perangkat daerah. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan target, maka kondisi tersebut perlu dicermati secara seksama karena dapat berpengaruh terhadap tingkat ambisi pelaksanaan, kebutuhan sumber daya, serta keterukuran keberhasilan pembangunan daerah. Evaluasi pada subbab ini menegaskan bahwa target kinerja harus ditempatkan sebagai unsur strategis dalam menjaga hubungan yang utuh antara dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, sehingga hasil pembangunan daerah dapat diukur secara lebih konsisten, objektif, dan akuntabel.

5.5 Konsistensi Pagu Anggaran antara RKPD dengan APBD

Konsistensi pagu anggaran antara RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan salah satu aspek penting dalam menilai keterpaduan antara proses perencanaan dan penganggaran daerah. Dalam kerangka pembangunan daerah, RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas pembangunan, program, kegiatan, target kinerja, dan indikasi pendanaan. Sementara itu, APBD merupakan instrumen penganggaran yang menerjemahkan prioritas tersebut ke dalam alokasi fiskal yang bersifat operasional. Tingkat kesesuaian pagu anggaran antara kedua dokumen tersebut menjadi indikator penting untuk melihat apakah arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan benar-benar memperoleh dukungan pendanaan yang memadai pada tahap penganggaran.

Dalam subbab ini, konsistensi pagu anggaran dianalisis dengan membandingkan besaran anggaran pada sisi RKPD dengan besaran anggaran pada sisi APBD untuk masing-masing perangkat daerah. Untuk menjaga kesesuaian sumber data, pagu pada sisi RKPD dibaca dari komponen **Pagu Renja**, sedangkan pagu pada sisi APBD dibaca dari komponen **Pagu APBD** sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekonsiliasi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2026 pada perangkat daerah yang datanya tersedia. Pendekatan ini digunakan agar perbandingan dilakukan pada level yang sejenis, yakni sama-sama berada pada tingkat perangkat daerah dan sama-sama merepresentasikan hubungan antara rencana anggaran tahunan dengan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa pada beberapa perangkat daerah terdapat kondisi pagu RKPD dan pagu APBD yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa proses penganggaran berjalan selaras dengan rencana tahunan yang telah ditetapkan. Kondisi ini antara lain terlihat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Pertanahan, di mana nilai Pagu Renja dan Pagu APBD tercatat identik. Di sisi lain, terdapat pula perangkat daerah yang menunjukkan perbedaan cukup besar antara pagu RKPD dan pagu APBD, baik dalam bentuk peningkatan maupun penurunan. Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya penyesuaian anggaran pada tahap penganggaran, yang dapat dipengaruhi oleh dinamika fiskal daerah, prioritas belanja, hasil pembahasan anggaran, maupun penyesuaian kebijakan selama proses penetapan APBD.

Dengan demikian, analisis pada subbab ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesamaan atau perbedaan angka anggaran secara administratif, tetapi juga untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keterhubungan antara perencanaan dan penganggaran daerah. Semakin kecil selisih antara pagu RKPD dan pagu APBD, maka semakin kuat indikasi bahwa dokumen perencanaan tahunan telah menjadi dasar yang efektif dalam proses pengalokasian anggaran. Sebaliknya, semakin besar selisih yang terjadi, maka semakin diperlukan penelaahan lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Tabel konsistensi pagu anggaran berikut menjadi penting sebagai dasar evaluasi terhadap kualitas sinkronisasi antara RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Tabel 5.5 Konsistensi Pagu Anggaran RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2026

No.	Perangkat Daerah	RKPD 2026	APBD 2026	Selisih
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	27.416.891.232,00	27.416.891.232,00	-
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.430.890.113,00	18.930.890.113,00	- 2.500.000.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.580.216.255,00	15.280.216.255,00	- 700.000.000,00
4	Badan Pendapatan Daerah	44.391.933.619,00	46.891.933.619,00	- 2.500.000.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.045.986.611.806,00	1.131.528.020.030,00	- 85.541.408.224,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.871.519.774,00	21.871.519.774,00	-
7	Badan Riset dan Inovasi Daerah	7.314.532.199,00	7.314.532.199,00	-
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	39.495.180.065,00	81.045.680.065,00	- 41.550.500.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.705.738.695,00	15.705.738.695,00	- 2.000.000.000,00
10	Dinas Kesehatan	524.180.305.563,00	529.302.776.942,00	- 5.122.471.379,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	10.422.057.359,00	10.422.057.359,00	-
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	78.600.873.522,00	69.844.413.372,00	8.756.460.150,00
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	15.456.023.335,00	15.456.023.335,00	-
14	Dinas Lingkungan Hidup	48.902.425.216,00	40.652.425.216,00	8.250.000.000,00
15	Dinas Pariwisata	18.374.157.576,00	20.574.157.576,00	- 2.200.000.000,00
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	693.338.153.751,00	874.224.772.399,00	- 180.886.618.648,00
17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	29.113.108.133,00	29.113.108.133,00	-
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19.877.481.243,00	19.877.481.243,00	-
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.490.930.423,00	12.390.930.423,00	- 900.000.000,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	13.971.126.923,00	15.471.126.923,00	- 1.500.000.000,00
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.073.036.291.636,00	1.064.263.987.486,00	8.772.304.150,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22.769.468.145,00	22.769.468.145,00	-

No.	Perangkat Daerah	RKPD 2026	APBD 2026	Selisih
23	Dinas Perhubungan	82.776.914.278,00	73.414.156.880,00	9.362.757.398,00
24	Dinas Perikanan	20.550.866.301,00	19.550.866.301,00	1.000.000.000,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23.877.291.678,00	26.926.408.678,00	- 3.049.117.000,00
26	Dinas Perkebunan	14.947.384.357,00	19.836.163.357,00	- 4.888.779.000,00
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27.153.943.936,00	27.353.943.936,00	- 200.000.000,00
28	Dinas Pertanahan	20.474.292.352,00	15.474.292.352,00	5.000.000.000,00
29	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	151.521.980.288,00	653.860.675.088,00	- 502.338.694.800,00
30	Dinas Sosial	13.387.475.620,00	14.387.475.620,00	- 1.000.000.000,00
31	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	96.759.309.387,00	104.370.523.886,00	- 7.611.214.499,00
32	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	45.952.163.076,00	46.552.163.076,00	- 600.000.000,00
33	Inspektorat	40.288.303.647,00	43.488.303.647,00	- 3.200.000.000,00
34	Kantor Camat Batu Ampar	4.925.881.735,00	4.925.881.735,00	-
35	Kantor Camat Bengalon	7.745.904.764,00	7.745.904.764,00	-
36	Kantor Camat Busang	4.701.256.689,00	4.701.256.689,00	-
37	Kantor Camat Kaliorang	5.055.109.044,00	5.055.109.044,00	-
38	Kantor Camat Karangan	3.836.522.000,00	3.836.522.000,00	-
39	Kantor Camat Kaubun	4.502.473.437,00	4.502.473.437,00	-
40	Kantor Camat Kombeng	6.537.947.200,00	6.537.947.200,00	-
41	Kantor Camat Long Mesangat	5.990.809.196,00	5.990.809.196,00	-
42	Kantor Camat Muara Ancalong	7.243.190.325,00	7.243.190.325,00	-
43	Kantor Camat Muara Bengkal	8.965.957.095,00	8.965.957.095,00	-
44	Kantor Camat Muara Wahau	7.264.501.362,00	7.264.501.362,00	-
45	Kantor Camat Rantau Pulung	4.294.764.001,00	4.294.764.001,00	-

No.	Perangkat Daerah	RKPD 2026	APBD 2026	Selisih
46	Kantor Camat Sandaran	4.369.969.659,00	4.369.969.659,00	-
47	Kantor Camat Sangatta Selatan	22.154.544.269,00	22.154.544.269,00	-
48	Kantor Camat Sangatta Utara	28.500.434.589,00	28.500.434.589,00	-
49	Kantor Camat Sangkulirang	5.876.648.728,00	5.876.648.728,00	-
50	Kantor Camat Telen	5.468.619.536,00	5.468.619.536,00	-
51	Kantor Camat Teluk Pandan	6.595.490.826,00	6.595.490.826,00	-
52	Satuan Polisi Pamong Praja	32.340.512.155,00	37.040.512.155,00	- 4.700.000.000,00
53	Sekretariat Daerah	267.188.245.859,00	316.663.228.049,00	- 49.474.982.190,00
54	Sekretariat DPRD	70.394.577.286,00	105.394.577.286,00	- 35.000.000.000,00
JUMLAH		4.842.369.201.258,00	5.738.691.465.300,00	- 896.322.264.042,00

Berdasarkan Tabel 5.6, Berdasarkan perbandingan pagu RKPD Tahun 2026 dengan APBD Tahun 2026, total alokasi anggaran mengalami peningkatan dari Rp4,84 triliun menjadi Rp5,74 triliun, atau bertambah sebesar Rp896,32 miliar (18,51%). Kenaikan ini menunjukkan adanya penguatan prioritas pembangunan daerah pada beberapa sektor strategis, terutama infrastruktur, perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan pemerintahan, serta dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peningkatan anggaran terbesar terjadi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang naik dari Rp151,52 miliar menjadi Rp653,86 miliar, atau bertambah Rp502,34 miliar. Kenaikan signifikan ini mengindikasikan fokus pemerintah daerah pada percepatan pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman, dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar masyarakat.

Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengalami kenaikan sebesar Rp180,89 miliar, dari Rp693,34 miliar menjadi Rp874,22 miliar, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, serta sarana publik lainnya. Kenaikan cukup besar juga terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp85,54 miliar, dari Rp1,05 triliun menjadi Rp1,13 triliun.

Pada unsur penunjang pemerintahan, Sekretariat Daerah memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp49,47 miliar, sedangkan Sekretariat DPRD meningkat sebesar Rp35 miliar. Selain itu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar Rp41,55 miliar, dari Rp39,50 miliar menjadi Rp81,05 miliar, yang mengindikasikan adanya peningkatan dukungan terhadap program kepemudaan dan kegiatan olahraga daerah.

Beberapa perangkat daerah lainnya juga mengalami peningkatan anggaran, antara lain Dinas Kesehatan sebesar Rp5,12 miliar, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp7,61 miliar, Dinas Perkebunan sebesar Rp4,89 miliar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp3,05 miliar, Inspektorat sebesar Rp3,20 miliar, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Pendapatan Daerah yang masing-masing meningkat sebesar Rp2,50 miliar.

Di sisi lain, terdapat beberapa perangkat daerah yang mengalami penurunan alokasi anggaran pada APBD 2026 dibandingkan RKPD 2026. Penurunan terbesar terjadi pada Dinas Perhubungan sebesar Rp9,36 miliar, dari Rp82,78 miliar menjadi Rp73,41 miliar. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami penurunan sebesar Rp8,77 miliar, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian turun sebesar Rp8,76 miliar, Dinas Lingkungan Hidup turun sebesar Rp8,25 miliar, Dinas Pertanahan turun sebesar Rp5 miliar, dan Dinas Perikanan turun sebesar Rp1 miliar.

Sementara itu, sejumlah perangkat daerah tidak mengalami perubahan pagu anggaran antara RKPD 2026 dan APBD 2026. Di antaranya adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta seluruh kantor kecamatan yang tetap mempertahankan alokasi anggaran sebagaimana direncanakan dalam RKPD.

Secara keseluruhan, struktur APBD Tahun 2026 menunjukkan adanya pergeseran dan penambahan alokasi anggaran yang lebih besar pada sektor infrastruktur, perumahan dan kawasan permukiman, serta dukungan tata kelola pemerintahan. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan fisik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah tahun 2026.

.

BAB 6

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD

Bab ini menguraikan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 sebagai bentuk evaluasi atas capaian pembangunan daerah selama tahun berjalan. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD menjadi bagian penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah karena memberikan gambaran mengenai sejauh mana target yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan oleh perangkat daerah. Dengan demikian, bab ini tidak hanya berfungsi sebagai media pelaporan capaian, tetapi juga sebagai dasar penilaian atas efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Secara substantif, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD diarahkan untuk menilai dua dimensi utama. Pertama, capaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai representasi kinerja pembangunan pada level makro. Kedua, capaian indikator kinerja dan keuangan pada program, kegiatan, dan subkegiatan per perangkat daerah sebagai gambaran kinerja pelaksanaan pembangunan pada level operasional. Melalui dua dimensi tersebut, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara arah kebijakan pembangunan, implementasi program, dan tingkat capaian yang berhasil diwujudkan pada Tahun Anggaran 2026.

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD juga penting untuk menilai kualitas keterhubungan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah. Target yang telah dirumuskan dalam RKPD pada dasarnya merupakan komitmen kinerja tahunan pemerintah daerah, sehingga pelaksanaannya perlu dilihat tidak hanya dari sisi penyerapan anggaran, tetapi juga dari sisi pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi pada bab ini menempatkan aspek kinerja dan keuangan secara seimbang, agar pelaksanaan pembangunan tidak hanya dinilai dari seberapa besar anggaran dibelanjakan, tetapi juga dari seberapa jauh hasil yang direncanakan benar-benar dapat dicapai.

Dalam pelaksanaannya, capaian pembangunan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal dapat berupa kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan kegiatan, efektivitas koordinasi antarperangkat daerah, ketersediaan sumber daya manusia, serta kapasitas kelembagaan pelaksana. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa dinamika fiskal daerah, perubahan kebijakan nasional dan daerah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta perkembangan situasi yang memengaruhi jalannya pelaksanaan pembangunan. Oleh sebab itu, hasil evaluasi pada bab ini perlu dibaca secara komprehensif, tidak semata-mata sebagai perbandingan angka target dan realisasi, tetapi juga sebagai refleksi atas dinamika implementasi pembangunan daerah pada tahun berjalan.

Bab ini disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026. Pembahasan diawali dengan evaluasi capaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi capaian indikator kinerja dan keuangan pada program, kegiatan, dan subkegiatan per perangkat daerah. Dengan susunan tersebut, Bab VI diharapkan dapat menunjukkan capaian pembangunan yang telah berhasil diwujudkan, sekaligus mengidentifikasi bagian-bagian yang masih memerlukan penguatan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah pada periode berikutnya.

6.1 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga capaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2026 perlu dievaluasi untuk menilai tingkat keterlaksanaan arah kebijakan, prioritas, serta target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari pengendalian kinerja pembangunan daerah dengan membandingkan target dan realisasi indikator tujuan serta sasaran pembangunan yang termuat dalam RKPD Tahun 2026, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah selama tahun berjalan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar penting dalam memberikan umpan balik bagi perbaikan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah pada periode berikutnya. Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur dilakukan dengan menggunakan formulir Evaluasi Hasil RKPD sebagaimana diatur dalam Lampiran E.60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sedangkan penilaian terhadap rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja mengacu pada Tabel T-E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Tabel 6.1 Interval Nilai dan Kriteria Penilaian

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1	91% <= 100%	Sangat Tinggi
2	76% <= 90%	Tinggi
3	66% <= 75%	Sedang
4	51% <= 65%	Rendah
5	<= 50%	Sangat Rendah

Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penilaian capaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan pada subbab ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator pembangunan daerah Tahun 2026. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dinilai berdasarkan interval kriteria penilaian yang telah ditetapkan, sehingga tingkat capaian masing-masing indikator dapat diklasifikasikan secara lebih terukur. Melalui pendekatan ini, evaluasi tidak hanya menunjukkan besarnya realisasi terhadap target, tetapi juga memberikan gambaran mengenai posisi keberhasilan pembangunan daerah dalam kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, atau sangat rendah. Dengan demikian, pembahasan capaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan dapat disajikan secara lebih sistematis dan memudahkan penafsiran terhadap hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2026.

Tabel 6.2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Realisasi 2025	Target 2026	Capaian 2026 (s.d triwulan I)
Mewujudkan SDM Yang Berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	76,48	76,60	76,48*
	Terwujudnya layanan kesehatan yang prima dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	74,87	74,79	74,87*
		Angka Stunting (%)	14,96	23,70	14,96*
	Terwujudnya layanan pendidikan berkualitas yang merata	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun ((tahun))	9,48	9,51	9,48*
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,22	13,04	13,22*
	Meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,477	0,49	0,477*
		Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) (Indeks)	69	67,90	69*
	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Kemiskinan (%) (%)	8,07	7.16-7.55	8,07*
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (%)	6,2	5.21-5.31	6,2*
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,05	10.17-10.38	1,05*
		PDRB per kapita (Rp)	325,08	389,99	325,08*
		Rasio Gini (Rasio)	0,305	0.271-0.281	0,305*
	Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor non tambang	Proporsi PDRB Sektor Non-Tambang (%)	29,83	25,66	29,83*
	Meningkatkan kinerja dan daya saing industri pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))	5,81	5,06	5,81*
	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	80,17	66,90	80,17*
	Terwujudnya ekosistem sosial dan ekonomi yang ramah investasi	Nilai investasi PMDN (Juta Rupiah) (Nilai)	1.623.267,42	5.250.000,00	1623267,42*
		Nilai investasi PMA (Ribu \$) (Nilai)	268.750,00	271.875,00	268750*

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Realisasi 2025	Target 2026	Capaian 2026 (s.d triwulan I)
	Terwujudnya integrasi ekonomi Kutai Timur dengan ekonomi domestik, nasional, dan global	Proporsi Nilai Ekspor terhadap PDRB (Angka)	63,74	71,69	63,74*
	Terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan antara desa dan kota	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (Indeks)	7,60	8.11-8.13	7,6*
Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel dan Responsif		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	73,12	73,00	73,12*
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, efektif, adaptif, dan visioner	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	63,22 (SPBE)	3,00	63,22 (SPBE)*
		Indeks Sistem Merit (Predikat)	67,25	Menengah	67,25*
		Nilai SAKIP (Nilai)	60,5	66,72	60,5*
		Indeks Integritas Pemerintah (Indeks)	66,36	65,11	66,36*
		Indeks Inovasi Daerah (Angka)	48,88	32,00	48,88*
	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4,4	2,61	4,4*
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	73,82	76,23	73,82*
Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan		Penurunan intensitas emisi GRK ((%))	69,9	63,50	69,9*
	Pembangunan ramah lingkungan dan resiliensi terhadap bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	80,85	79,05	80,85*
	Terwujudnya kesiapsiagaan daerah terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	160,51	159,36	160,51*

6.1.1 Analisis Capaian per Tujuan dan Sasaran

Tujuan 1: Mewujudkan SDM yang Berkualitas

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, capaian pada tujuan Mewujudkan SDM yang Berkualitas belum dapat diukur karena seluruh indikator tujuan maupun sasaran masih menggunakan realisasi Tahun 2025 sebagai data dasar (baseline). Indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Stunting, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA), Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator makro yang publikasi datanya dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang. Oleh karena itu, hingga akhir Triwulan I Tahun 2026 belum tersedia realisasi tahun berjalan sehingga belum dapat dilakukan pengukuran capaian terhadap target Tahun 2026.

Tujuan 2: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Pada tujuan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, seluruh indikator juga masih menggunakan data realisasi Tahun 2026. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita, Rasio Gini, Proporsi PDRB Sektor Non-Tambang, Kontribusi PDRB Industri Pengolahan, Indeks Ketahanan Pangan, Nilai Investasi PMDN dan PMA, Proporsi Nilai Ekspor terhadap PDRB, serta Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur belum memiliki realisasi Tahun 2026. Hal ini disebabkan sebagian besar indikator tersebut merupakan indikator makro ekonomi yang memerlukan proses pengumpulan, pengolahan, dan validasi data sebelum dipublikasikan. Dengan demikian, sampai Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dilakukan penilaian terhadap tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan.

Tujuan 3: Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel dan Responsif

Capaian pada tujuan Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel dan Responsif hingga Triwulan I Tahun 2026 juga belum dapat dievaluasi karena seluruh indikator masih menggunakan capaian Tahun 2025. Indikator seperti Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pemerintahan Digital (SPBE), Indeks Sistem Merit, Nilai SAKIP, Indeks Integritas Pemerintah, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan hasil penilaian yang diterbitkan secara berkala oleh kementerian, lembaga pembina, maupun instansi terkait. Oleh karena itu, data realisasi Tahun 2026 belum tersedia pada Triwulan I sehingga evaluasi terhadap pencapaian target belum dapat dilakukan.

Tujuan 4: Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan

Pada tujuan Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan, indikator Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Indeks Risiko Bencana masih menggunakan realisasi Tahun 2025 sebagai baseline. Ketiga indikator tersebut memerlukan proses pengukuran, verifikasi, dan publikasi oleh instansi teknis sehingga data capaian Tahun 2026 belum tersedia pada Triwulan I. Dengan demikian, sampai dengan periode pelaporan ini belum dapat dilakukan analisis terhadap pencapaian target Tahun 2026.

6.1.2 Simpulan Umum

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, belum terdapat capaian kinerja yang dapat diukur terhadap seluruh indikator tujuan dan sasaran RPJMD karena seluruh indikator masih menggunakan realisasi Tahun 2025 sebagai data dasar (baseline). Hal ini disebabkan sebagian besar indikator merupakan indikator makro daerah maupun indikator hasil

evaluasi kementerian/lembaga yang jadwal publikasinya dilakukan setelah periode Triwulan II. Oleh karena itu, evaluasi terhadap tingkat pencapaian target Tahun 2026 belum dapat dilakukan dan akan menunggu ketersediaan data resmi yang dipublikasikan sesuai siklus pelaporan masing-masing indikator.

6.3 Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan pada Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah

No.	Kode	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.064.263.987.486,00	100	6,23	309.657.042.207,00	29,1
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	331.794.799.029,00	95,3	100	108.444.654.218,00	32,7
3	1.02.0.00.0.00.01.0001	RSUD Kudungga Sangatta	137.618.906.413,00	100	50,1	63.937.595.477,00	46,5
4	1.02.0.00.0.00.01.0002	RSUD Sangkulirang	0,00	91,17	0	5.161.634.826,00	0
5	1.02.0.00.0.00.01.0011	PUSKESMAS SANDARAN	2.277.413.780,00	96,12	78,07	652.491.652,00	28,7
6	1.02.0.00.0.00.01.0012	PUSKESMAS SANGKULIRANG	3.097.592.880,00	96,09	24,62	910.870.444,00	29,4
7	1.02.0.00.0.00.01.0013	PUSKESMAS KALIORANG	3.432.055.660,00	100	64,55	1.443.473.425,00	42,1
8	1.02.0.00.0.00.01.0014	PUSKESMAS KAUBUN	3.497.794.960,00	95,38	100	1.779.026.736,00	50,9
9	1.02.0.00.0.00.01.0015	PUSKESMAS KARANGAN	3.137.820.360,00	94,34	100	1.100.709.188,00	35,1
10	1.02.0.00.0.00.01.0016	PUSKESMAS SEPASO	3.416.715.320,00	95,51	100	1.350.093.663,00	39,5
11	1.02.0.00.0.00.01.0017	PUSKESMAS BUSANG	2.144.524.000,00	95,45	15,71	630.984.562,00	29,4
12	1.02.0.00.0.00.01.0018	PUSKESMAS LONG MESANGAT	2.267.181.160,00	93,94	100	1.056.866.802,00	46,6
13	1.02.0.00.0.00.01.0019	PUSKESMAS MUARA ANCALONG	2.926.884.730,00	96,6	100	1.341.878.852,00	45,9
14	1.02.0.00.0.00.01.0020	PUSKESMAS MUARA BENGKAL	2.575.736.160,00	95,85	77,96	1.416.990.759,00	55
15	1.02.0.00.0.00.01.0021	PUSKESMAS BATU AMPAR	2.030.023.560,00	98,54	20,27	845.355.399,00	41,6
16	1.02.0.00.0.00.01.0022	PUSKESMAS KOMBENG	4.079.723.840,00	93,33	100	2.439.651.643,00	59,8
17	1.02.0.00.0.00.01.0023	PUSKESMAS TELEN	1.883.327.640,00	95,38	41,53	777.761.839,00	41,3
18	1.02.0.00.0.00.01.0024	PUSKESMAS MUARA WAHAU 1	2.313.915.540,00	95,62	100	1.084.350.429,00	46,9
19	1.02.0.00.0.00.01.0025	PUSKESMAS MUARA WAHAU 2	2.782.423.620,00	95,32	100	1.499.232.799,00	53,9
20	1.02.0.00.0.00.01.0026	PUSKESMAS RANTAU PULUNG	2.432.025.160,00	95,32	65,97	1.090.166.188,00	44,8
21	1.02.0.00.0.00.01.0027	PUSKESMAS TEPIAN BARU	2.501.373.040,00	95,63	60,91	1.296.269.794,00	51,8
22	1.02.0.00.0.00.01.0028	PUSKESMAS TELUK LINGGA	3.419.262.590,00	95,32	100	1.605.257.633,00	47
23	1.02.0.00.0.00.01.0029	PUSKESMAS SANGATTA UTARA	2.791.225.810,00	95,32	100	1.050.282.525,00	37,6
24	1.02.0.00.0.00.01.0030	PUSKESMAS SANGATTA SELATAN	2.555.128.310,00	95,32	100	1.185.460.481,00	46,4
25	1.02.0.00.0.00.01.0031	PUSKESMAS TELUK PANDAN	2.081.586.880,00	- 1593,9	22,35	694.848.552,00	33,4
26	1.02.0.00.0.00.01.0032	Instalasi Farmasi Kabupaten	1.044.543.500,00	- 1819,5	0	320.957.665,00	30,7
27	1.02.0.00.0.00.01.0033	Laboratorium Kesehatan Daerah	1.200.793.000,00	91,17	0	278.366.790,00	23,2
28	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	869.224.772.399,00	82,12	10,58	100.877.783.110,00	11,6
29	1.03.0.00.0.00.01.0001	UPT Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat	2.000.000.000,00	88,96	0	7.050.000,00	0,35
30	1.03.0.00.0.00.01.0002	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangatta Utara	750.000.000,00	89,45	0	0,00	0

No.	Kode	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
31	1.03.0.00.0.00.01.0003	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangkulirang	750.000.000,00	89,45	0	0,00	0
32	1.03.0.00.0.00.01.0004	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Wahau	750.000.000,00	89,45	0	0,00	0
33	1.03.0.00.0.00.01.0005	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Bengkal	750.000.000,00	89,45	0	0,00	0
34	1.04.0.00.0.00.01.0001	UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Utara	2.410.000.000,00	0	0	1.001.817.950,00	41,6
35	1.04.0.00.0.00.01.0002	UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan	1.040.000.000,00	0	0	519.951.650,00	50
36	1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	650.410.675.088,00	0	7,08	15.548.143.894,00	2,39
37	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	37.040.512.155,00	93,43	13,33	15.551.466.309,00	42
38	1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	29.113.108.133,00	56,56	44,04	13.610.251.275,00	46,8
39	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.280.216.255,00	90,15	50,31	6.894.840.083,00	45,1
40	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	14.387.475.620,00	48,71	60,65	5.314.099.196,00	36,9
41	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	44.272.163.076,00	34,7	43,08	12.133.488.771,00	27,4
42	2.07.3.32.0.00.01.0001	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Mandiri	2.280.000.000,00	0	39,02	546.654.233,00	24
43	2.08.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.390.930.423,00	59,25	14,9	4.345.210.911,00	35,1
44	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	10.422.057.359,00	100	84,11	5.193.732.153,00	49,8
45	2.10.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pertanahan	15.404.292.352,00	13,43	29,25	7.270.187.891,00	47,2
46	2.10.1.03.0.00.01.0002	UPT Survey dan Pemetaan	70.000.000,00	0	100	6.237.211,00	8,91
47	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	27.372.743.449,00	37,84	66,23	8.515.881.533,00	31,1
48	2.11.0.00.0.00.01.0001	UPT Kebersihan Sangatta Utara	7.000.000.000,00	46,26	93,63	4.765.130.450,00	68,1
49	2.11.0.00.0.00.01.0002	UPT Kebersihan Sangatta Selatan	2.235.920.000,00	15,76	83,46	1.303.296.000,00	58,3
50	2.11.0.00.0.00.01.0003	UPT TPA, Pengelolaan Limbah Domestik dan Lumpur Tinja	4.016.171.700,00	46,26	63,1	961.638.628,00	23,9
51	2.11.0.00.0.00.01.0004	UPT Laboratorium LH	27.590.067,00	0	0	0,00	0
52	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.705.738.695,00	82,34	100	6.907.862.667,00	44
53	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19.877.481.243,00	87,97	42,23	8.694.691.369,00	43,7
54	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22.769.468.145,00	78,67	31,06	4.476.763.086,00	19,7
55	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	73.137.156.880,00	51,53	51,2	8.469.477.549,00	11,6
56	2.15.0.00.0.00.01.0001	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	277.000.000,00	100	33,33	125.522.385,00	45,3
57	2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	69.844.413.372,00	17,02	19,03	8.926.211.975,00	12,8
58	2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	15.456.023.335,00	17,68	18,71	4.437.596.828,00	28,7
59	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	15.471.126.923,00	59,02	13,39	5.354.622.635,00	34,6
60	2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	78.695.180.065,00	100	17,34	6.123.775.440,00	7,78
61	2.19.0.00.0.00.01.0001	UPTD Sarana Prasarana Olahraga	2.350.500.000,00	100	26,19	958.852.681,00	40,8
62	2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27.253.943.936,00	100	14,7	12.107.451.476,00	44,4
63	2.23.2.24.0.00.02.0001	UPT Perpustakaan Kecamatan Muara Bengkal	25.000.000,00	93,57	75	16.789.455,00	67,2

No.	Kode	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
64	2.23.2.24.0.00.02.0002	UPT Perpustakaan Kecamatan Sangkulirang	25.000.000,00	93,57	33,33	11.140.400,00	44,6
65	2.23.2.24.0.00.02.0003	UPT Perpustakaan Kecamatan Sangatta Utara	25.000.000,00	93,57	33,33	11.138.425,00	44,6
66	2.23.2.24.0.00.02.0004	UPT Perpustakaan Kecamatan Muara Wahau	25.000.000,00	93,57	41,67	11.920.000,00	47,7
67	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	19.325.866.301,00	10,8	26,72	7.147.852.597,00	37
68	3.25.0.00.0.00.01.0001	UPT Balai Benih Ikan Kaliorang	100.000.000,00	0	0	24.895.228,00	24,9
69	3.25.0.00.0.00.01.0002	UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba	25.000.000,00	0	100	24.979.700,00	99,9
70	3.25.0.00.0.00.01.0003	UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok	0,00	0	0	0,00	0
71	3.25.0.00.0.00.01.0004	UPT Tempat Pelelangan Ikan Kenyamukan	50.000.000,00	0	0	4.152.188,00	8,3
72	3.25.0.00.0.00.01.0005	UPT Tempat Pelelangan Ikan Sangkulirang	50.000.000,00	100	0	19.748.400,00	39,5
73	3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	20.574.157.576,00	0	7,64	8.874.110.689,00	43,1
74	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	104.370.523.886,00	100	21,72	27.138.193.659,00	26
75	3.27.0.00.0.00.06.0000	Dinas Perkebunan	19.836.163.357,00	0	30,19	5.301.017.490,00	26,7
76	3.31.3.30.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24.926.408.678,00	27,32	46,33	13.023.530.747,00	52,3
77	3.31.3.30.0.00.01.0001	UPT Pasar Induk Sangatta Utara	1.000.000.000,00	81,82	0	761.393.297,00	76,1
78	3.31.3.30.0.00.01.0002	UPT Pasar Sangkulirang	400.000.000,00	81,82	0	190.720.096,00	47,7
79	3.31.3.30.0.00.01.0003	UPT Pasar Muara Wahau	600.000.000,00	81,82	0	320.719.100,00	53,5
80	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	316.663.228.049,00	0	41,06	103.079.231.536,00	32,6
81	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	105.394.577.286,00	93,24	23,46	42.021.224.389,00	39,9
82	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.871.519.774,00	100	27,73	8.011.412.448,00	36,6
83	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.131.528.020.030,00	64,22	13,7	258.381.874.863,00	22,8
84	5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	46.891.933.619,00	38,4	24,26	15.994.084.212,00	34,1
85	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	27.416.891.232,00	85,73	21,53	10.588.583.786,00	38,6
86	5.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	7.314.532.199,00	0	46	2.887.860.607,00	39,5
87	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	43.488.303.647,00	100	46,56	13.468.349.875,00	31
88	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kantor Camat Sangatta Selatan	8.921.940.269,00	64,18	12,32	5.486.638.222,00	61,5
89	7.01.0.00.0.00.01.0001	Kantor Lurah Singa Geweh	13.232.604.000,00	67,09	42,66	987.965.840,00	7,47
90	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kantor Camat Sangatta Utara	8.905.760.589,00	100	36,29	3.815.205.974,00	42,8
91	7.01.0.00.0.00.02.0001	Kantor Lurah Teluk Lingga	19.594.674.000,00	100	27,05	785.635.141,00	4,01
92	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kantor Camat Bengalon	7.745.904.764,00	7,65	64,31	3.569.606.218,00	46,1
93	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kantor Camat Kaliorang	5.055.109.044,00	45,41	42,01	2.011.516.334,00	39,8
94	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kantor Camat Muara Wahau	7.264.501.362,00	12,91	75,91	3.674.887.908,00	50,6
95	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kantor Camat Kombeng	6.537.947.200,00	55,59	43,41	2.750.307.682,00	42,1
96	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kantor Camat Muara Ancalong	7.243.190.325,00	88,47	54,2	3.134.355.215,00	43,3
97	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kantor Camat Batu Ampar	4.925.881.735,00	24,41	41,15	2.196.210.761,00	44,6
98	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kantor Camat Telen	5.468.619.536,00	20,56	12,92	2.036.712.823,00	37,2
99	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kantor Camat Busang	4.701.256.689,00	35,01	29,22	1.892.883.433,00	40,3
100	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kantor Camat Teluk Pandan	6.595.490.826,00	98,44	76,11	4.095.932.223,00	62,1

No.	Kode	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
101	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kantor Camat Rantau Pulung	4.294.764.001,00	79,72	19,41	2.578.381.085,00	60
102	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kantor Camat Kaubun	4.502.473.437,00	28,05	46,98	1.647.957.289,00	36,6
103	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kantor Camat Sangkulirang	5.876.648.728,00	55,19	40,78	2.360.070.190,00	40,2
104	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kantor Camat Muara Bengkal	8.965.957.095,00	24,45	27,12	4.012.632.518,00	44,8
105	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kantor Camat Long Mesangat	5.990.809.196,00	100	59,93	2.464.680.229,00	41,1
106	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kantor Camat Karangan	3.836.522.000,00	52,17	46,51	1.797.765.935,00	46,9
107	7.01.0.00.0.00.18.0000	Kantor Camat Sandaran	4.369.969.659,00	52,57	56,22	1.481.388.401,00	33,9
108	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.930.890.113,00	100	34,91	6.927.959.213,00	36,6
JUMLAH			5.738.691.465.300,00	32,94	41,96	1.361.025.579.708,00	23,7

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan realisasi keuangan perangkat daerah, diketahui bahwa total pagu RKPD mencapai Rp5.738.691.465.300,00, dengan rata-rata capaian indikator program sebesar 32,94 persen dan rata-rata capaian indikator sub kegiatan sebesar 41,96 persen. Sementara itu, realisasi keuangan sampai dengan periode evaluasi mencapai Rp1.361.025.579.708,00 atau sebesar 23,70 persen dari total pagu RKPD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi keuangan masih relatif rendah dibandingkan dengan pagu yang telah direncanakan, sementara capaian kinerja pada tingkat program dan sub kegiatan juga masih bervariasi antarperangkat daerah.

Pada sektor pendidikan dan kesehatan, terdapat perangkat daerah dengan capaian kinerja yang relatif tinggi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat capaian indikator program sebesar 100 persen dan indikator sub kegiatan sebesar 6,23 persen, dengan realisasi keuangan sebesar Rp309,66 miliar atau 29,1 persen. Dinas Kesehatan mencatat capaian program 95,3 persen dan capaian sub kegiatan 100 persen dengan realisasi keuangan 32,7 persen. Beberapa puskesmas juga menunjukkan capaian kinerja program maupun sub kegiatan yang tinggi, seperti Puskesmas Kaubun, Puskesmas Karangan, Puskesmas Sepaso, Puskesmas Long Mesangat, Puskesmas Muara Ancalong, Puskesmas Kombeng, dan beberapa puskesmas lainnya. Namun demikian, terdapat pula unit kerja dengan capaian yang sangat rendah atau belum menunjukkan capaian kinerja, seperti RSUD Sangkulirang, Instalasi Farmasi Kabupaten, dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pada sektor infrastruktur dan pelayanan dasar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki pagu yang cukup besar, yaitu Rp869,22 miliar, namun realisasi keuangannya baru mencapai Rp100,88 miliar atau 11,6 persen, dengan capaian indikator program 82,12 persen dan indikator sub kegiatan 10,58 persen. Kondisi serupa terlihat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan pagu Rp650,41 miliar tetapi realisasi keuangan baru 2,39 persen. Sebaliknya, beberapa perangkat daerah dengan pagu relatif lebih kecil telah menunjukkan realisasi keuangan yang lebih tinggi, seperti UPT Kebersihan Sangatta Utara sebesar 68,1 persen, UPT Pasar Induk Sangatta Utara sebesar 76,1 persen, UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba sebesar 99,9 persen, serta beberapa kecamatan yang telah mencapai realisasi di atas 50 persen. Variasi ini menunjukkan bahwa besarnya pagu belum secara otomatis berbanding lurus dengan kecepatan pelaksanaan kegiatan maupun pencapaian kinerja.

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan perlunya penguatan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pencapaian indikator, dan realisasi anggaran. Perangkat daerah dengan pagu besar tetapi realisasi keuangan dan capaian kinerja masih rendah perlu menjadi perhatian dalam evaluasi lebih lanjut, khususnya untuk mengidentifikasi kendala pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, administrasi pertanggungjawaban, maupun ketepatan penetapan target. Selain itu, terdapat beberapa data capaian yang sangat rendah bahkan bernilai negatif, seperti pada Puskesmas Teluk Pandan dan Instalasi Farmasi Kabupaten, yang perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan tidak terjadi kesalahan input atau perbedaan metode pengukuran. Dengan demikian, tindak lanjut evaluasi perlu diarahkan pada percepatan pelaksanaan kegiatan, peningkatan kualitas pengukuran kinerja, serta penyesuaian target pada perubahan rencana kerja apabila terdapat perubahan kondisi pelaksanaan.

BAB 7

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

Mengacu pada Formulir E.60 (Evaluasi terhadap RKPD) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam pengisiannya, Perangkat Daerah seharusnya menyebutkan faktor pendorong keberhasilan pencapaian yang merupakan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target, serta mengisi faktor penghambat pencapaian kinerja yang merupakan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas. Sangat disayangkan, hanya sedikit Perangkat Daerah yang melengkapi pengisian faktor pendorong dan penghambat, padahal substansi ini sangat penting untuk membantu dalam perumusan solusi sehingga masalah yang terjadi dapat tertangani secara tepat.

Dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan triwulan II tahun 2026, secara umum beberapa faktor pendorong dan penghambat yang sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

1. Komitmen pimpinan dan aparatur untuk pelaksanaan program dan kegiatan /sub kegiatan untuk selalu normatif sesuai peraturan perundang-undangan
2. Anggaran dapat menjadi faktor pendorong maupun penghambat, dimana Ketika anggaran yang diberikan mencukupi maka dapat mendorong ketercapaian kinerja program dan kegiatan sedangkan ketika anggaran yang diberikan kurang dari cukup, maka dapat menjadi penghambat keberlangsungan program, kegiatan, dan sub-kegiatan
3. Manajemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
4. Evaluasi Kinerja pada tiap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah dibuat secara periodik sebagai bentuk transparansi dan pengukuran kinerja instansi, dengan didukung oleh keselarasan dan kesesuaian indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran pada masing-masing satuan unit kerja sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi.
5. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai arahan dan bimbingan dari pimpinan yang optimal, dukungan dari staf dan bawahan, perencanaan, dukungan anggaran yang tersedia, dukungan data dan informasi yang akurat serta terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang cukup baik.
6. Sinergitas yang baik antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan.
7. Dukungan Stakeholder yaitu pihak yang juga memiliki kepentingan dalam keberlangsungan program, kegiatan, dan sub-kegiatan, misalnya sesama Perangkat Daerah atau juga instansi-instansi lainnya. Ketika stakeholder dapat bekerjasama dengan baik, maka dapat membantu dalam ketercapaian kinerja program, kegiatan, dan sub-kegiatan.

8. Paradigma pemerintah daerah dalam proses pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai salah satu subyek pembangunan.
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keterlibatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Faktor Penghambat:

1. Kurangnya koordinasi antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan.
2. Waktu pelaksanaan berkaitan erat dengan perencanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan, ketika waktu pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan maka dapat menjadi faktor penghambat keberjalanan program, kegiatan, dan sub-kegiatan.
3. Kejadian tidak terduga merupakan kejadian yang tidak diduga akan terjadi pada tahun perencanaan, misalnya bencana alam, wabah, dan lain sebagainya yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan.
4. Ketersediaan data, ketersediaan data sektoral yang belum lengkap dan terpadu.
5. Lemahnya/kurangnya pemahaman para stakeholder terhadap sistem perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan dan Perundangundangan yang berlaku.
6. Kurangnya sarana dan prasana dalam mendukung kinerja pegawai

BAB 8

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

8.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 Triwulan II sebagaimana diuraikan pada Bab II sampai dengan Bab VII, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. **Capaian makro pembangunan daerah** menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Di satu sisi, pembangunan manusia terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta menurunnya tingkat kemiskinan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur mengalami perlambatan yang cukup signifikan sebagai akibat dari kontraksi sektor pertambangan yang masih menjadi sektor dominan dalam struktur perekonomian daerah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya PDRB per kapita, sementara pada saat yang sama ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Indeks Gini mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun indikator sosial membaik, struktur ekonomi daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sektor ekstraktif sehingga diperlukan upaya percepatan diversifikasi ekonomi.
2. **Kebijakan keuangan daerah** secara umum telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan fiskal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan melalui pengelolaan keuangan yang mendukung prioritas pembangunan daerah. Namun demikian, realisasi anggaran pada Triwulan I masih relatif rendah sebagaimana karakteristik awal tahun anggaran, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya agar target kinerja dan penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal.
3. **Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD** menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh tujuan, sasaran, program, indikator kinerja, target, serta struktur program pada RKPD telah disusun selaras dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen RKPD telah berfungsi sebagai penjabaran tahunan RPJMD sehingga kesinambungan pelaksanaan pembangunan jangka menengah tetap terjaga. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa penyesuaian target dan pagu anggaran yang dilakukan untuk menyesuaikan kondisi fiskal, kebutuhan pembangunan, serta dinamika pelaksanaan pembangunan daerah.
4. **Pengendalian pelaksanaan RKPD terhadap APBD** menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat tinggi. Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan dalam RKPD telah terakomodasi dalam APBD dengan tingkat konsistensi mencapai **100 persen**, tanpa adanya inkonsistensi pada level program, kegiatan, maupun subkegiatan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses penyusunan APBD telah dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan serta menunjukkan semakin baiknya integrasi antara proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
5. **Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD** menunjukkan bahwa hingga Triwulan I pelaksanaan program pembangunan telah berjalan sesuai rencana, meskipun sebagian besar indikator

kinerja dan realisasi keuangan masih berada pada tahap awal pencapaian. Kondisi tersebut merupakan hal yang wajar mengingat pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran masih berada pada tahapan persiapan administrasi, pengadaan barang dan jasa, serta proses pelaksanaan fisik. Namun demikian, beberapa indikator kinerja masih memerlukan perhatian khusus agar target tahunan dapat dicapai melalui percepatan pelaksanaan program dan peningkatan kualitas pengendalian kinerja.

6. **Faktor pendorong pelaksanaan RKPD** antara lain didukung oleh tersedianya dokumen perencanaan yang telah tersusun secara konsisten, komitmen pemerintah daerah dalam menjaga sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, dukungan regulasi, koordinasi antar Perangkat Daerah, serta meningkatnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan penganggaran. Sebaliknya, **faktor penghambat** masih didominasi oleh keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, perubahan kebijakan pemerintah pusat, dinamika penyesuaian anggaran, keterbatasan kapasitas pelaksana pada beberapa Perangkat Daerah, serta masih perlunya peningkatan kualitas perencanaan teknis dan pengelolaan data kinerja.
7. Secara keseluruhan, pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II telah menunjukkan bahwa proses **perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan berada pada jalur yang sesuai dengan arah kebijakan RPJMD**. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya percepatan pelaksanaan program, peningkatan kualitas belanja daerah, penguatan monitoring dan evaluasi, serta penyempurnaan target kinerja pada Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah, khususnya terhadap indikator yang telah mencapai target tahunan pada Triwulan II maupun indikator yang realisasinya masih berada di bawah target yang direncanakan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan serta memastikan tercapainya target pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 secara optimal.

8.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 Triwulan II, beberapa rekomendasi yang perlu menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah adalah sebagai berikut.

1. **Mempercepat diversifikasi struktur ekonomi daerah** melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri pengolahan, dan UMKM agar ketergantungan terhadap sektor pertambangan dapat dikurangi. Pengembangan hilirisasi komoditas unggulan daerah dan peningkatan investasi pada sektor non-ekstraktif perlu menjadi prioritas untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tahan terhadap fluktuasi komoditas.
2. **Meningkatkan kualitas pembangunan manusia** melalui penguatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya penurunan kemiskinan tidak hanya difokuskan pada penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi juga diarahkan pada pengurangan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

3. **Mendorong pemerataan hasil pembangunan** dengan memperkuat program yang mendukung pemerataan pendapatan, khususnya melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, peningkatan konektivitas wilayah, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. **Melakukan percepatan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran** pada triwulan berikutnya melalui penyelesaian lebih awal proses pengadaan barang dan jasa, percepatan penyusunan dokumen teknis, serta penguatan koordinasi antar Perangkat Daerah agar target fisik maupun keuangan dapat tercapai sesuai rencana.
5. **Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan RKPD** melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja dan realisasi keuangan pada setiap Perangkat Daerah. Hasil monitoring tersebut perlu dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan serta percepatan penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan program.
6. **Mempertahankan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran** yang telah menunjukkan capaian sangat baik. Seluruh Perangkat Daerah perlu terus menjaga keselarasan antara RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, dan APBD sehingga kualitas implementasi pembangunan tetap terjaga.
7. **Melakukan penyesuaian target indikator kinerja pada Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah**, khususnya terhadap indikator yang telah mencapai atau melampaui target tahunan pada Triwulan II agar target yang ditetapkan lebih realistis, menantang, dan mencerminkan kondisi pelaksanaan sampai akhir tahun. Sebaliknya, terhadap indikator yang realisasinya masih rendah perlu dilakukan identifikasi penyebab, penyusunan rencana aksi percepatan, serta penyesuaian strategi pelaksanaan apabila diperlukan.
8. **Meningkatkan kualitas data perencanaan dan pelaporan kinerja** melalui penguatan verifikasi data, pemutakhiran basis data pembangunan, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi. Selain itu, Perangkat Daerah perlu memastikan bahwa capaian kinerja yang diinput merupakan capaian tahun berjalan sesuai periode pelaporan untuk menghindari kesalahan pengukuran yang dapat memengaruhi hasil evaluasi.
9. **Memperkuat kapasitas aparatur Perangkat Daerah** dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan kinerja, pengendalian pembangunan, serta evaluasi melalui pembinaan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berkelanjutan sehingga kualitas dokumen perencanaan dan akurasi pelaporan semakin meningkat.
10. **Menindaklanjuti hasil Evaluasi RKPD sebagai dasar penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026, Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta RKPD Tahun 2027.** Seluruh temuan, permasalahan, dan rekomendasi hasil evaluasi perlu diintegrasikan ke dalam proses perencanaan berikutnya agar kebijakan pembangunan semakin adaptif terhadap kondisi aktual, memperkuat efektivitas pelaksanaan program, serta mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029.
11. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, sehingga penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah.

EVALUASI PROGRAM PRIORITAS TERHADAP HASIL RKPD PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2026																																	
No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket					
											I		II		III		IV																
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%							
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, efektif, adaptif, dan visioner					1.585.154.755.323			285.112.845.797			220.367.326.897			12.727.370.499			44.612.154.279						57.339.524.778	29,99	26,02			57.339.524.778	17,73	3,62		
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				101.265.142.890			34.419.629.231			8.600.000.000			-			390.867.423						390.867.423	17,56	4,54			390.867.423	8,13	0,39	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		MENINGKATNYA JANGKAUAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Indeks)	99			0			98,25			0			0						0			0		0			0			
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				101.265.142.890			34.419.629.231			8.600.000.000			-			390.867.423						390.867.423	17,56	4,54			390.867.423	8,13	0,39		
		jumlah penyebaran informasi melalui media (elektronik, cetak dan online)	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2			0			1			0			0						0			0		0			0			
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	5			3			2			0			0						0			0		0			0			
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	1			0			1			0			0						0			0		0			0			
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	10			2			8			0			4						4			50		4			40			
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	95			0			0			0			0						0			0		0			0			
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2			27			0			0			0						0			0		0			0			
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	95			1			100			0			40,47						40,47			40,47		40,47			42,6			
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	70			202			85			0			0						0			0		0			0			
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	1			27			1			0			0						0			0		0			0			
			Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	730			365			100			0			50						50			50		50			6,85			
	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	15			0			0			0			0						0			0		0			0					
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media				450.000.000			-			-			-			-			-	0	0		-	0	0			-	0	0	
	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2			0			1			0			0					0			0		0			0					
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				1.000.000.000			108.607.492			50.000.000			-			14.366.054				14.366.054	0	28,73		14.366.054	0	1,44						
	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	5			3			2			0			0					0			0		0			0					
2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik				450.000.000			-			-			-			-			-	0	0		-	0	0			-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informatika Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	1	0		1		0		0		0				0		0		0		0				
		2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik			13.614.960.890		1.633.487.363		750.000.000		-		194.958.791					194.958.791	50	25,99		194.958.791	40	1,43			
			Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	10	2		8		0		4						4		50		4		40				
		2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			250.000.000		-		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	95	0		0		0		0						0		0		0		0				
		2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			2.000.000.000		160.526.351		100.000.000		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2	27		0		0		0						0		0		0		0				
		2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi			11.150.620.526		13.358.497.234		500.000.000		-		138.397.913					138.397.913	40,47	27,68		138.397.913	42,6	1,24			
			Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	95	1		100		0		40,47						40,47		40,47		40,47		42,6				
		2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			64.657.994.734		18.579.399.669		6.850.000.000		-		3.885.865					3.885.865	0	0,06		3.885.865	0	0,01			
			Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	70	202		85		0		0						0		0		0		0				
		2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik			2.100.000.000		223.462.000		100.000.000		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	1	27		1		0		0						0		0		0		0				
		2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten			4.741.566.740		355.649.122		250.000.000		-		39.258.800					39.258.800	50	15,7		39.258.800	6,85	0,83			
			Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	730	365		100		0		50						50		50		50		6,85				
		2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik			850.000.000		-		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	15	0		0		0		0						0		0		0		0				
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			472.928.505.219		17.133.041.064		46.052.326.896		51.794.000		457.725.274					509.519.274	16,18	1,11		509.519.274	22,65	0,11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
			MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Lokasi yang Terkoneksi Jaringan Intranet / Internet di Kabupaten Kutai Timur (%)	100	0		84		20		30						30		35,71		30		30				
				Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi (%)	80	0		80		15		15						15		18,75		15		18,75				
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			6.262.022.193		-		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Jumlah Domain yang Dikelola	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	1	0		0		0		0						0		0		0		0				
		2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa			6.262.022.193		-		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	1	0		0		0		0						0		0		0		0				
		2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			466.666.483.026		17.133.041.064		46.052.326.896		51.794.000		457.725.274					509.519.274	16,18	1,11		509.519.274	24,4	0,11			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2		0		3		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi			3.850.050.000		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE			9.730.000.000		-		2.400.000.000		15.474.000		17.189.398				32.663.398	0	1,36		32.663.398	0	0,34				
			Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2		0		3		0		0					0		0		0		0				
		2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE			2.550.500.000		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				
			Jumlah Sistem Informasi/ Aplikasi layanan yang terintegrasi	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	1		0		2		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	7		0		2		0		1					1		50		1		14,29				
				Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	1		0		5		0		3					3		60		3		300				
				Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2		0		2		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	25		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional			2.720.050.000		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket								
								I		II		III		IV															
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp			K
		2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			1.069.050.000			-			-			-					-	0	0			-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1		0		0		0		0		0				0		0		0		0				
		2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo			1.050.000.000			-			-			-					-	0	0			-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	1		0		2		0		0		0				0		0		0		0				
		2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah			103.005.900.000			-			21.000.000.000		3.291.000		41.546.254				44.837.254	50	0,21			44.837.254	14,29	0,04		
			Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	7		0		2		0		1						1		50		1		14,29				
		2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan			19.404.000.000			-			4.904.000.000		7.522.500		15.500.000				23.022.500	60	0,47			23.022.500	300	0,12		
			Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	1		0		5		0		3						3		60		3		300				
		2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah			3.277.623.923			-			-			-					-	0	0			-	0	0		
			Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0		0				0		0		0		0				
		2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas			2.200.200.000			-			250.000.000		8.856.500		4.980.000				13.836.500	0	5,53			13.836.500	0	0,63		
			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0				
		2.16.03.2.02.0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi			4.789.109.103			-			-			-					-	0	0			-	0	0		
			Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	25		0		0		0		0						0		0		0		0				
			Jumlah Infrastruktur TIK	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat	56		38		38		0		0						0		0		0		0				
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	350	0		306		0		10				10		3,27		10		2,86								
		2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			66.500.000.000		17.133.041.064		6.974.356.880		16.650.000		510.000					17.160.000	0	0,25			17.160.000	0	0,03			
			Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat	56		38		38		0		0						0		0		0		0				
		2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet			246.520.000.000			-			10.523.970.016		-		377.999.622				377.999.622	3,27	3,59			377.999.622	2,86	0,15		
			Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	350		0		306		0		10						10		3,27		10		2,86				
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			8.232.496.058		-		1.000.000.000		-		235.023.155					235.023.155	36,62	23,5			235.023.155	18,97	2,85	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
			TERCAPAINYA KOLABORASI, INTEGRASI DAN STANDARISASI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)	Persentase Publikasi Data Sektoral dalam Portal Satu Data (%)	100		0		45		0,3		6,6						6,6		14,67		6,6		6,6				
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			8.232.496.058		-		1.000.000.000		-		235.023.155					235.023.155	36,62	23,5			235.023.155	18,97	2,85			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket									
								I		II		III		IV																
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp			K	%
			Jumlah OPD yang menyampaikan data statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	65		0	100		0		0						0		0		0		0						
				Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	50		0	35		0		6,9						6,9		19,71		6,9		13,8						
				Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	50		0	35		0		0						0		0		0		0						
				Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	40		0	20		0		40						40		200		40		100						
				Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	50		0	100		0		0						0		0		0		0						
				Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	1		0	4		0		0						0		0		0		0						
		2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional			1.742.092.912		-		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0				
			Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	65		0	100		0		0						0		0		0		0						
		2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia			1.000.000.000		-		439.000.000		-		42.523.155					42.523.155	19,71	9,69		42.523.155	13,8	4,25					
			Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	50		0	35		0		6,9						6,9		19,71		6,9		13,8						
		2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral			1.250.000.000		-		250.000.000		-		-				-		-	0	0		-	0	0				
			Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	50		0	35		0		0						0		0		0		0						
		2.20.02.2.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			2.301.705.586		-		311.000.000		-		192.500.000					192.500.000	200	61,9		192.500.000	100	8,36					
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	40		0	20		0		40						40		200		40		100						
		2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			1.138.697.560		-		-		-		-				-		-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	50		0	100		0		0						0		0		0		0						
		2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral			800.000.000		-		-		-		-				-		-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	1		0	4		0		0						0		0		0		0						
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			695.949.985.393		200.049.700.899		130.215.000.000		11.812.646.063		37.951.305.365				49.763.951.428	31,97	38,22		49.763.951.428	6,39	7,15	Sekretariat Daerah					
			MENINGKATNYA KUALITAS KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Penerima Beasiswa (%)	79,57		0	76,00		0		0						0		0		0		0						
		Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) (Indeks)		90	0		75,00	0		0				0		0		0												
		Persentase Ketercapaian Kinerja SPM (%)		97	0		93,00	0		0				0		0		0												
		Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		77,5	82,5		71,5	82,5		0				0		0		0												
		Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)		85	0		80,00	0		0				0		0		0												
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			28.500.000.000		14.632.618.981		800.000.000		138.598.587		127.512.121				266.110.708	46,67	33,26		266.110.708	9,33	0,93						
			Tersusunnya Dokumen dibidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	20		4	4		1		1						2		50		2		10						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	25		5	5		1		1						2		40		2		8						

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket	
								I		II		III		IV												
								9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%								15 = 13
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	17	18
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	20		4		4		1		1				2		50		2		10			
		4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan			13.500.000.000		6.515.817.527		250.000.000		49.665.210		31.862.000				81.527.210	50	32,61		81.527.210	10	0,6		
			Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	20		4		4		1		1				2		50		2		10			
		4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			7.500.000.000		6.577.757.221		250.000.000		41.156.577		52.755.921				93.912.498	40	37,56		93.912.498	8	1,25		
			Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	25		5		5		1		1				2		40		2		8			
		4.01.02.2.01.0003	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah			7.500.000.000		1.539.044.233		300.000.000		47.776.800		42.894.200				90.671.000	50	30,22		90.671.000	10	1,21		
			Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	20		4		4		1		1				2		50		2		10			
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			624.249.985.393		169.759.572.163		123.943.400.000		11.268.609.650		37.416.470.482				48.685.080.132	20,93	39,28		48.685.080.132	4,19	7,8		
			Tersusunnya Dokumen bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	100		11		20		2		2				4		20		4		4			
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	225		43		45		1		7				8		17,78		8		3,56			
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	100		7		20		2		3				5		25		5		5			
		4.01.02.2.02.0001	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual			112.000.000.000		19.308.851.540		19.486.900.000		3.137.100.000		6.284.985.256				9.422.085.256	20	48,35		9.422.085.256	4	8,41		
			Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	100		11		20		2		2				4		20		4		4			
		4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			165.000.000.000		60.221.677.490		28.225.500.000		23.693.050		15.214.400.226				15.238.093.276	17,78	53,99		15.238.093.276	3,56	9,24		
			Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	225		43		45		1		7				8		17,78		8		3,56			
		4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			347.249.985.393		90.229.043.133		76.231.000.000		8.107.816.600		15.917.085.000				24.024.901.600	25	31,52		24.024.901.600	5	6,92		
			Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	100		7		20		2		3				5		25		5		5			
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			28.500.000.000		13.920.531.258		5.000.000.000		362.061.330		380.243.886				742.305.216	18,64	14,85		742.305.216	3,73	2,6		
			Tersusunnya Dokumen hasil Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	3350		176		670		116		11				127		18,96		127		3,79			
				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	250		3		50		9		0				9		18		9		3,6			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	3350		176		670		116		11					127		18,96		127		3,79				
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			13.500.000.000		9.130.950.994		2.800.000.000		188.615.924		216.611.561					405.227.485	18,96	14,47		405.227.485	3,79	3			
			Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	3350		176		670		116		11					127		18,96		127		3,79				
		4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum			7.500.000.000		3.046.835.409		1.200.000.000		54.471.882		42.892.800					97.364.682	18	8,11		97.364.682	3,6	1,3			
			Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	250		3		50		9		0					9		18		9		3,6				
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			7.500.000.000		1.742.744.855		1.000.000.000		118.973.524		120.739.525					239.713.049	18,96	23,97		239.713.049	3,79	3,2			
			Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	3350		176		670		116		11					127		18,96		127		3,79				
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			14.700.000.000		1.736.978.497		471.600.000		43.376.496		27.078.876					70.455.372	41,67	14,94		70.455.372	8,33	0,48			
			Tersusunnya Dokumen Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri, Luar Negeri dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	20		7		4		1		1					2		50		2		10				
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	20		2		4		0		2					2		50		2		10				
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	100		16		20		0		5					5		25		5		5				
		4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			4.900.000.000		661.628.725		175.200.000		18.442.047		16.522.603					34.964.650	50	19,96		34.964.650	10	0,71			
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	20		7		4		1		1					2		50		2		10				
		4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri			4.900.000.000		495.488.556		140.200.000		7.218.011		6.135.773					13.353.784	50	9,52		13.353.784	10	0,27			
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	20		2		4		0		2					2		50		2		10				
		4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			4.900.000.000		579.861.216		156.200.000		17.716.438		4.420.500					22.136.938	25	14,17		22.136.938	5	0,45			
			Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	100		16		20		0		5					5		25		5		5				
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			68.428.721.755		11.327.125.018		6.300.000.000		313.455.342		817.853.494					1.131.308.836	37,67	17,96		1.131.308.836	7,53	1,65	Sekretariat Daerah		
			MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Perkembangan Harga (Indeks)	5		0		5,00		0		0					0		0		0		0				
				Presentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pembangunan dan Perekonomian (%)	95		0		75,00		0		0					0		0		0		0				
				Presentase Layanan Eletrifikasi Rumah Tangga (%)	100		0		90,42		0		0					0		0		0		0				
				Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	72,5		0		7190,00		0		0					0		0		0		0				
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			14.850.000.000		1.628.360.223		750.000.000		79.808.780		80.296.308					160.105.088	16,67	21,35		160.105.088	3,33	1,08			
			Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan dibidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	10		2		2		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	20		4		4		1		1					2		50		2		10				
				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0		0		0				
		4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			4.950.000.000		472.369.959		250.000.000		13.916.899		40.099.629					54.016.528	0	21,61		54.016.528	0	1,09			
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	10		2		2		0		0					0		0		0		0				
		4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			4.950.000.000		554.247.533		250.000.000		38.440.418		22.660.100					61.100.518	50	24,44		61.100.518	10	1,23			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	20		4		4		1		1					2		50		2		10				
		4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			4.950.000.000		601.742.731		250.000.000		27.451.463		17.536.579					44.988.042	0	18		44.988.042	0	0,91			
			Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0		0		0				
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			15.450.000.000		3.724.765.071		1.800.000.000		84.442.985		145.950.555					230.393.540	66,67	12,8		230.393.540	13,33	1,49			
			Tersusunnya Dokumen laporan hasil pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	10		2		2		1		1					2		100		2		20				
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	60		12		12		3		3					6		50		6		10				
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	60		12		12		3		3					6		50		6		10				
		4.01.03.2.02.0001	Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan			5.150.000.000		800.156.441		370.508.600		44.777.179		18.433.500					63.210.679	100	17,06		63.210.679	20	1,23			
			Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	10		2		2		1		1					2		100		2		20				
		4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			5.150.000.000		1.269.375.923		211.890.000		32.435.806		45.102.317					77.538.123	50	36,59		77.538.123	10	1,51			
			Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	60		12		12		3		3					6		50		6		10				
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			5.150.000.000		1.655.232.707		1.217.601.400		7.230.000		82.414.738					89.644.738	50	7,36		89.644.738	10	1,74			
			Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	60		12		12		3		3					6		50		6		10				
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			23.428.721.755		3.713.226.719		3.000.000.000		67.133.240		502.013.044					569.146.284	17,33	18,97		569.146.284	3,47	2,43			
			Tersusunnya Dokumen bidang pengelolaan Barang daan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	23750		7.518		4750		0		170					170		3,58		170		0,72				
				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	23750		7.518		4750		0		170					170		3,58		170		0,72				
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	290		54		58		3		23					26		44,83		26		8,97				
		4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			4.900.000.000		241.232.695		250.000.000		-		43.268.044					43.268.044	3,58	17,31		43.268.044	0,72	0,88			
			Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	23750		7.518		4750		0		170					170		3,58		170		0,72				
		4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			4.900.000.000		324.824.373		250.000.000		-		33.504.800					33.504.800	3,58	13,4		33.504.800	0,72	0,68			
			Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	23750		7.518		4750		0		170					170		3,58		170		0,72				
		4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			13.628.721.755		3.147.169.651		2.500.000.000		67.133.240		425.240.200					492.373.440	44,83	19,69		492.373.440	8,97	3,61			
			Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	290		54		58		3		23					26		44,83		26		8,97				
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			14.700.000.000		2.260.773.005		750.000.000		82.070.337		89.593.587					171.663.924	50	22,89		171.663.924	10	1,17			
			Tersusunnya Dokumen hasil Pemantauan bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	10		4		2		1		0					1		50		1		10				
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	10		4		2		1		0					1		50		1		10				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dokumen)	10		4		2		0		1					1		50		1		10				
		4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			4.900.000.000		571.476.027		250.000.000		23.461.875		33.903.224				57.365.099	50	22,95		57.365.099	10	1,17				
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	10		4		2		1		0					1		50		1		10				
		4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			4.900.000.000		495.126.336		250.000.000		31.767.885		20.599.313				52.367.198	50	20,95		52.367.198	10	1,07				
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	10		4		2		1		0					1		50		1		10				
		4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			4.900.000.000		1.194.170.642		250.000.000		26.840.577		35.091.050				61.931.627	50	24,77		61.931.627	10	1,26				
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	10		4		2		0		1					1		50		1		10				
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			37.470.637.636		4.071.094.958		3.150.000.001		181.817.700		585.086.801				766.904.501	50,01	24,35		766.904.501	25,01	2,05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
			MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program (Persentase)	96,5		0		94,50		91,35		91,35					91,35		96,67		91,35		94,66				
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	100		0		100		99,92		99,92					99,92		99,92								
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			26.168.795.900		2.943.754.370		2.550.000.001		168.397.900		334.432.692				502.830.592	75,02	19,72		502.830.592	30,01	1,92				
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Tepat Waktu	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2		5		1		1		0					1		100		1		50				
				Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	2		4		0		0		0					0		0								
				Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2		5		1		0		2					2		200		2		100				
				Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	2820		7.740		2820		2		0					2		0,07		2		0,07				
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	4		3		3		0		0					0		0		0						
		5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik			1.500.000.000		89.030.000		100.000.000		57.140.000		10.780.800				67.920.800	100	67,92		67.920.800	50	4,53				
			Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2		5		1		1		0					1		100		1		50				
		5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			800.000.000		40.669.000		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	2		4		0		0		0					0		0		0		0				
		5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			4.100.000.000		331.763.914		200.000.000		-		109.421.000				109.421.000	200	54,71		109.421.000	100	2,67				
			Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2		5		1		0		2					2		200		2		100				
		5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			1.600.000.000		108.768.000		100.000.000		71.810.000		-				71.810.000	0,07	71,81		71.810.000	0,07	4,49				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	2820		7.740		2820		2		0						2		0,07		2		0,07			
		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			18.168.795.900		2.373.523.456		2.150.000.001		39.447.900		214.230.892						253.678.792	0	11,8		253.678.792	0	1,4		
			Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	4		3		3		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			4.100.000.000		218.680.500		250.000.000		-		82.053.109						82.053.109	0	32,82		82.053.109	0	2		
			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Kutai Timur	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	3		1		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	110		60		110		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			2.300.000.000		110.354.700		150.000.000		-		47.481.823						47.481.823	0	31,65		47.481.823	0	2,06		
			Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	3		1		2		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			1.800.000.000		108.325.800		100.000.000		-		34.571.286						34.571.286	0	34,57		34.571.286	0	1,92		
			Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	110		60		110		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			5.221.841.736		798.071.488		350.000.000		13.419.800		168.601.000						182.020.800	50	52,01		182.020.800	50	3,49		
			Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5		9		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	1		4		1		1		0						1		100		1		100			
		5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			2.521.841.736		439.677.278		150.000.000		13.419.800		29.300.600						42.720.400	0	28,48		42.720.400	0	1,69		
			Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5		9		5		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			2.700.000.000		358.394.210		200.000.000		-		139.300.400						139.300.400	100	69,65		139.300.400	100	5,16		
			Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	1		4		1		1		0						1		100		1		100			
		5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			1.980.000.000		110.588.600		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		4		0		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			1.980.000.000		110.588.600		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		4		0		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			52.623.888.270		3.940.829.384		3.450.000.000		359.377.394		516.763.595						876.140.989	13,89	25,4		876.140.989	9,03	1,66	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
								1	2	3	4	5	6		7							8		9		10		11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	%	K	%	17	18
			5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		1.400.000.000		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang	1		0		0		0		0				0		0		0		0					
			5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		5.857.829.153		880.602.542		815.970.000		65.472.886		70.284.426				135.757.312	0	16,64		135.757.312	0	2,32				
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	6		4		12		0		0				0		0		0		0					
			5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		1.200.000.000		36.452.501		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	3		4		0		0		0				0		0		0		0					
			5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		1.400.000.000		57.030.180		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4		3		0		0		0				0		0		0		0					
			5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		1.800.000.000		137.210.600		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2		3		0		0		0				0		0		0		0					
			5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		17.541.296.084		1.385.500.056		1.150.000.000		115.056.600		207.485.000				322.541.600	12,5	28,05		322.541.600	12,5	1,84				
			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3		5		2		0		0				0		0		0		0					
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)		3		5		2		0		0					0		0		0		0					
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)		4		3		4		0		2					2		50		2		50					
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)		1		1		1		0		0					0		0		0		0					
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		3		5		2		0		0					0		0		0		0					
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)		3		4		2		0		0					0		0		0		0					
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)		4		3		4		0		2					2		50		2		50					
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		1		1		1		0		0					0		0		0		0					
			5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		4.243.531.972		326.379.400		250.000.000		76.820.000		62.665.900				139.485.900	0	55,79		139.485.900	0	3,29				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket		
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3		5		2		0		0					0		0		0		0				
		5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			1.500.000.000		78.944.000		50.000.000			-		15.374.200				15.374.200	0	30,75		15.374.200	0	1,02			
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	3		5		2		0		0					0		0		0		0				
		5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			1.750.000.000		203.325.900		100.000.000			-		24.239.500				24.239.500	50	24,24		24.239.500	50	1,39			
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	4		3		4		0		2					2		50		2		50				
		5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			1.750.000.000		260.233.700		200.000.000			9.556.600		24.218.000				33.774.600	0	16,89		33.774.600	0	1,93			
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1		1		1		0		0					0		0		0		0				
		5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			2.797.764.112		157.972.200		250.000.000			28.680.000		29.306.000				57.986.000	0	23,19		57.986.000	0	2,07			
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3		5		2		0		0					0		0		0		0				
		5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			1.500.000.000		78.916.056		50.000.000			-		28.581.600				28.581.600	0	57,16		28.581.600	0	1,91			
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	3		4		2		0		0					0		0		0		0				
		5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			2.250.000.000		149.347.600		100.000.000			-		16.989.800				16.989.800	50	16,99		16.989.800	50	0,76			
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	4		3		4		0		2					2		50		2		50				
		5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			1.750.000.000		130.381.200		150.000.000			-		6.110.000				6.110.000	0	4,07		6.110.000	0	0,35			
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1		1		1		0		0					0		0		0		0				
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			17.541.296.084		1.190.467.825		1.150.000.000			101.000.408		185.231.221				286.231.629	18,75	24,89		286.231.629	14,58	1,63			
			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3		5		2		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	3			5		2		0		1				1		50		1		33,33				
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	4			3		4		2		0				2		50		2		50				
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang	1			1		1		0		0				0		0		0		0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket						
								I		II		III		IV					13				15 = 13		16=15/6 x100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8 x 100%	15 = 13	16=15/6 x100%	17	18											
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3		5	2		0		0					0		0		0							
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	3		5	2		0		1					1		50		1		33,33					
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	4		3	4		0		0					0		0		0		0					
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang	1		1	1		0		0					0		0		0		0					
		5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			4.243.531.972		399.497.328		350.000.000		98.790.408		74.129.675				172.920.083	0	49,41		172.920.083	0	4,07				
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3		5	2		0		0					0		0		0		0					
		5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			1.500.000.000		132.542.838		100.000.000		-		26.352.813				26.352.813	50	26,35		26.352.813	33,33	1,76				
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	3		5	2		0		1					1		50		1		33,33					
		5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			1.750.000.000		77.600.000		100.000.000		-		4.260.000				4.260.000	50	4,26		4.260.000	50	0,24				
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	4		3	4		2		0					2		50		2		50					
		5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			2.250.000.000		181.661.003		100.000.000		-		22.935.977				22.935.977	0	22,94		22.935.977	0	1,02				
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang	1		1	1		0		0					0		0		0		0					
		5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			2.797.764.112		110.606.951		200.000.000		-		30.246.000				30.246.000	0	15,12		30.246.000	0	1,08				
			Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3		5	2		0		0					0		0		0		0					
		5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			1.500.000.000		167.707.100		100.000.000		1.560.000		2.877.090				4.437.090	50	4,44		4.437.090	33,33	0,3				
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	3		5	2		0		1					1		50		1		33,33					
		5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			1.750.000.000		49.840.105		100.000.000		650.000		13.820.000				14.470.000	0	14,47		14.470.000	0	0,83				
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	4		3	4		0		0					0		0		0		0					
		5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			1.750.000.000		71.012.500		100.000.000		-		10.609.666				10.609.666	0	10,61		10.609.666	0	0,61				
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang	1		1	1		0		0					0		0		0		0					
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			15.450.000.000		2.906.800.115		1.950.000.000		8.280.000		395.108.000				403.388.000	26,26	20,69		403.388.000	9,72	2,61	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	15		0		15		15		15						15		100		15		100			
	5.03.02.2.03		Pengembangan Kompetensi ASN			15.450.000.000		2.906.800.115		1.950.000.000		8.280.000		395.108.000					403.388.000	26,26	20,69		403.388.000	9,72	2,61			
			Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	3		2		3		0		1					1		33,33		1		33,33				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	5		1		2		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	20		5		11		0		5					5		45,45		5		25				
				Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)	10		10		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (Dokumen)	1		2		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	10		25		0		0		0					0		0		0		0				
	5.03.02.2.03.0002		Pengelolaan Assessment Center			5.300.000.000		1.553.446.600		500.000.000		-		248.482.000					248.482.000	33,33	49,7		248.482.000	33,33	4,69			
			Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	3		2		3		0		1						1		33,33		1		33,33			
	5.03.02.2.03.0003		Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			5.850.000.000		562.575.073		1.100.000.000		8.280.000		20.336.000					28.616.000	0	2,6		28.616.000	0	0,49			
			Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	5		1		2		0		0						0		0		0		0			
	5.03.02.2.03.0004		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			2.200.000.000		345.140.456		350.000.000		-		126.290.000					126.290.000	45,45	36,08		126.290.000	25	5,74			
			Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	20		5		11		0		5						5		45,45		5		25			
	5.03.02.2.03.0010		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN			850.000.000		177.013.986		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)	10		10		0		0		0						0		0		0		0			
	5.03.02.2.03.0012		Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN			750.000.000		168.444.000		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (Dokumen)	1		2		0		0		0						0		0		0		0			
	5.03.02.2.03.0014		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			500.000.000		100.180.000		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	10		25		0		0		0						0		0		0		0			
	5.05.03		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			10.602.435.452		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			MENINGKATNYA PEMANFAATAN INOVASI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAERAH	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah (%)	85,71		0		28,57		0		0						0		0		0		0			
	5.05.03.2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			6.067.993.452		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
	5.05.03.2.01.0003		Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			4.692.987.452		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket								
								I	II		III		IV		13		14 = 13/8 x 100%			15 = 13				16=15/6 x100%							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp			K	%	
		5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			1.375.006.000			-			-			-					-	0	0			-	0	0				
			Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0						
		5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi			4.534.442.000			-			-			-					-	0	0			-	0	0				
			Tersedianya Laporan Pelaksanaan Invensi dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0		0				
		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)		5	0		0				0		0		0																
		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)		5	0		0				0		0		0																
			5.05.03.2.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah			1.175.000.000			-			-			-				-	0	0			-	0	0				
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	5		0		0		0		0					0		0		0		0						
			5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual			1.798.380.000			-			-			-				-	0	0			-	0	0				
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	5		0		0		0		0					0		0		0		0						
			5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi			1.561.062.000			-			-			-				-	0	0			-	0	0				
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5		0		0		0		0					0		0		0		0						
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				87.082.328.222		7.729.050.469		16.650.000.000		-		3.132.655.572				3.132.655.572	57,05	18,81			3.132.655.572	76,17	3,6	Inspektorat				
				MENURUNNYA TERJADINYA PENYELEWENGAN ATAU PENYIMPANGAN, BAIK YANG BERSIFAT ANGGARAN ATAUPUN PROSES DAN KEWENANGAN	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	90		86,76		83		86,76		86,76					86,76		104,53		86,76		96,4						
			6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			68.182.328.222		6.421.775.471		13.150.000.000		-		2.361.233.942				2.361.233.942	43,57	17,96			2.361.233.942	50,02	3,46					
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	70		87		100		20		56						56		56		56		80					
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)		90	35		53		22		62				62				62				116,98				62			68,89
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)		60	88		200		28		58				58				58				29				58			96,67
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)		110	131		53		2		5				5				5				9,43				5			4,55
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)		35	139		139		0		0				0				0				0				0			0
		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	0		0	0		0		0				0				0				0				0				0	
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	2		1	2		0		1				1				1				50				1				50	
		6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			10.500.000.000		995.900.587		2.000.000.000		-		393.199.408				393.199.408	56	19,66			393.199.408	80	3,74						
			Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	70		87		100		20		56					56		56		56		80							

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket												
								I		II		III		IV																			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp			K	%			
		6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		10.600.000.000		912.397.598		2.000.000.000		-		740.514.772					740.514.772	116,98	37,03		740.514.772	68,89	6,99									
			Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	90		35		53		22		62					62	116,98		62		68,89										
		6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja		12.600.000.000		939.827.117		2.400.000.000		-		408.335.258					408.335.258	29	17,01		408.335.258	96,67	3,24									
			Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	60		88		200		28		58					58	29		58		96,67										
		6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan		12.060.000.000		1.105.493.794		2.360.000.000		-		684.945.337					684.945.337	9,43	29,02		684.945.337	4,55	5,68									
			Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	110		131		53		2		5					5	9,43		5		4,55										
		6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa		12.022.328.222		1.990.665.000		2.390.000.000		-		35.712.000					35.712.000	0	1,49		35.712.000	0	0,3									
			Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	35		139		139		0		0					0	0		0		0										
		6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal		100.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0									
			Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	0		0		0		0		0					0	0		0		0										
		6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		10.300.000.000		477.491.375		2.000.000.000		-		98.527.167					98.527.167	50	4,93		98.527.167	50	0,96									
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	2		1		2		0		1					1	50		1		50										
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		18.900.000.000		1.307.274.998		3.500.000.000		-		771.421.630					771.421.630	97,5	22,04		771.421.630	154,64	4,08									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	20	1	14	15	20	1	19	15					19		95		19		95										
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	7														14		15		1					15	15	100	15	214,29	
		6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		10.500.000.000		566.439.250		2.000.000.000		-		470.106.580					470.106.580	95	23,51		470.106.580	95	4,48									
			Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	20		1		20		1		19					19	95		19		95										
		6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		8.400.000.000		740.835.748		1.500.000.000		-		301.315.050					301.315.050	100	20,09		301.315.050	214,29	3,59									
			Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	7		14		15		1		15					15	100		15		214,29										
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		35.120.614.428		3.535.574.659		3.000.000.000		-		129.765.600					129.765.600	12,5	4,33		129.765.600	36,2	0,37	Inspektorat								
			MENINGKATNYA KUALITAS PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Maturitas SPIP SKPD Level 3 (%)	75	0	0	55		0		0	2,625	2,625				0		0		0		0									
				Manajemen Risiko Indeks (Nilai)	16															0		3		2,625					2,625	5,25	175	5,25	32,81
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	16															0		3		2,09					2,09	4,18	139,33	4,18	26,13
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		3.650.000.000		881.601.809		800.000.000		-		69.245.600					69.245.600	25	8,66		69.245.600	50	1,9									
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2		2		4		0		1					1	25		1		50										
		6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		3.650.000.000		881.601.809		800.000.000		-		69.245.600					69.245.600	25	8,66		69.245.600	50	1,9									
			Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2		2		4		0		1					1	25		1		50										
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi		31.470.614.428		2.653.972.850		2.200.000.000		-		60.520.000					60.520.000	0	2,75		60.520.000	32,75	0,19									
			Jumlah laporan hasil pelaksanaan pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	53		8		0		0		53					53		0		53		100									
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	53															29		0		0					6	6	0	11,32	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket								
								I		II		III		IV															
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp			K
				Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	20		1		20		0		0					0		0		0		0					
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	61		53		0		0		12					12		0		12		19,67					
		6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		3.600.000.000		1.208.488.800		500.000.000		-		14.110.000					14.110.000	0	2,82		14.110.000	100	0,39					
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	53		8		0		0		53					53		0		53		100					
		6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		3.650.000.000		257.841.562		500.000.000		-		13.600.000					13.600.000	0	2,72		13.600.000	11,32	0,37					
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	53		29		0		0		6					6		0		6		11,32					
		6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		14.150.000.000		466.448.756		700.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0					
			Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	20		1		20		0		0					0		0		0		0					
		6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		10.070.614.428		721.193.732		500.000.000		-		32.810.000					32.810.000	0	6,56		32.810.000	19,67	0,33					
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	61		53		0		0		12					12		0		12		19,67					
2	Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor non tambang					908.877.777.681		98.980.064.732		76.159.859.800		3.493.426.373		11.121.355.094				14.614.781.467	14,86	19,19		14.614.781.467	4,24	1,61					
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				131.137.853.055		21.728.844.084		13.814.154.301		2.932.723.082		3.595.992.195				6.528.715.277	13,54	47,26		6.528.715.277	5,17	4,98	Dinas Perikanan				
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERIKANAN	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	84		79		80		79		0						0		0		0		0					
	Nilai SAKIP (Nilai)		76,5	64,3		70,50		64,3		0		0		0		0													
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.305.000.000		200.462.312		100.000.000		-		18.704.400				18.704.400	6,25	18,7		18.704.400	1,11	0,81					
		Tersedianya dokumen rencana, anggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30		7		8		1		0						1		12,5		1		3,33					
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		1		1		0		0		0		0													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		0		0		0		0		0		0													
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000.000		134.148.230		47.519.000		-		5.474.400				5.474.400	12,5	11,52		5.474.400	3,33	0,36					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30		7		8		1		0					1		12,5		1		3,33						
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				335.000.000		66.314.082		52.481.000		-		13.230.000				13.230.000	0	25,21		13.230.000	0	3,95					
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		1		1		0		0					0		0		0		0						
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				470.000.000		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0					
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		0		0		0		0					0		0		0		0						
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				97.850.000.000		15.606.268.535		12.639.154.301		2.932.723.082		3.380.976.964				6.313.700.046	75	49,95		6.313.700.046	52,62	6,45					

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I	II		III		IV															
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	126		121		120		121		120					120		100		120		95,24				
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		6		12		3		3					6		50		6		10				
	3.25.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			97.000.000.000		15.328.527.640		12.539.154.301		2.932.723.082		3.341.956.964					6.274.680.046	100	50,04		6.274.680.046	95,24	6,47			
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	126		121		120		121		120					120		100		120		95,24				
	3.25.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			850.000.000		277.740.895		100.000.000		-		39.020.000					39.020.000	50	39,02		39.020.000	10	4,59			
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		6		12		3		3					6		50		6		10				
	3.25.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			400.000.000		29.620.000		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Dokumen Barang Milik daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		1		0		0		0					0		0		0		0				
	3.25.01.2.03.0004		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			400.000.000		29.620.000		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		1		0		0		0					0		0		0		0				
	3.25.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			8.075.000.000		289.180.000		50.000.000		-		8.280.000					8.280.000	0	16,56		8.280.000	0	0,1			
			Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	15		2		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	600		2		0		0		0					0		0		0		0				
	3.25.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1.500.000.000		256.260.000		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	15		2		0		0		0					0		0		0		0				
	3.25.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			475.000.000		17.920.000		50.000.000		-		8.280.000					8.280.000	0	16,56		8.280.000	0	1,74			
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0		0		0				
	3.25.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			6.100.000.000		15.000.000		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	600		2		0		0		0					0		0		0		0				
	3.25.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.857.853.055		2.547.287.739		350.000.000		-		103.555.831					103.555.831	0	29,59		103.555.831	0	1,77			
			Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		1		1		0		0					0		0		0		0				
	3.25.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.607.853.055		1.879.759.254		150.000.000		-		44.374.200					44.374.200	0	29,58		44.374.200	0	1,7			
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0					0		0		0		0				
	3.25.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			800.000.000		294.284.751		25.000.000		-		8.738.000					8.738.000	0	34,95		8.738.000	0	1,09			
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0					0		0		0		0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket								
								I		II		III		IV															
								9		10		11		12															
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%			
		3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			850.000.000		54.358.000		25.000.000		-		9.471.000					9.471.000	0	37,88			9.471.000	0	1,11			
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0					0			0		0		0				
		3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.600.000.000		318.885.734		150.000.000		-		40.972.631					40.972.631	0	27,32			40.972.631	0	2,56			
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		1		1		0		0					0			0		0		0				
		3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			13.000.000.000		1.521.388.432		336.000.000		-		-				-		-	0	0			-	0	0		
			Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	30		5		1		0		0					0			0		0		0				
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		1		0		0		0					0			0		0		0				
		3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			8.500.000.000		1.091.481.004		336.000.000		-		-				-		-	0	0			-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	30		5		1		0		0					0			0		0		0				
		3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.500.000.000		429.907.428		-		-		-				-		-	0	0			-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		1		0		0		0					0			0		0		0				
		3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.000.000.000		959.414.848		200.000.000		-		84.475.000					84.475.000	0	42,24			84.475.000	0	4,22			
			Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		0		0		0		0					0			0		0		0				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		0		0		0					0			0		0		0				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		1		1		0		0					0			0		0		0				
		3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			500.000.000		-		-		-		-				-		-	0	0			-	0	0		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		0		0		0		0					0			0		0		0				
		3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			500.000.000		-		-		-		-				-		-	0	0			-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		0		0		0					0			0		0		0				
		3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.000.000.000		959.414.848		200.000.000		-		84.475.000					84.475.000	0	42,24			84.475.000	0	8,45			
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		1		1		0		0					0			0		0		0				
		3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.650.000.000		575.222.218		139.000.000		-		-				-		-	0	0			-	0	0		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	120		22		22		0		0					0			0		0		0				
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	14		1		0		0		0					0			0		0		0				
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0					0			0		0		0				
		3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			500.000.000		94.441.800		139.000.000		-		-				-		-	0	0			-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	120		22		22		0		0					0			0		0		0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
		3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			900.000.000		480.780.418		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	14		1		0		0		0					0		0		0		0				
		3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			250.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0					0		0		0		0				
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			73.476.436.660		2.440.594.438		1.350.000.000		-		150.321.520					150.321.520	0	11,13		150.321.520	0	0,2	Dinas Perikanan		
			MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DINAS PERIKANAN	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8.809,55		8.802,09		8799,28		8802,09		0					0		0		0		0				
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			1.500.000.000		185.306.900		100.000.000		-		39.182.000					39.182.000	0	39,18		39.182.000	0	2,61			
			Tersedianya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	60		1		1		0		0					0		0		0		0				
		3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			1.500.000.000		185.306.900		100.000.000		-		39.182.000					39.182.000	0	39,18		39.182.000	0	2,61			
			Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	60		1		1		0		0					0		0		0		0				
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			70.476.436.660		2.255.287.538		1.250.000.000		-		111.139.520					111.139.520	0	8,89		111.139.520	0	0,16			
			Tersedianya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1270		135		250		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	2500		0		0		0		0					0		0		0		0				
		3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			20.476.436.660		2.255.287.538		1.250.000.000		-		111.139.520					111.139.520	0	8,89		111.139.520	0	0,54			
			Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1270		135		250		0		0					0		0		0		0				
		3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil			50.000.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	2500		0		0		0		0					0		0		0		0				
		3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.500.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Tanda Daftar Kapal yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	500		0		0		0		0		0			0		0		0		0				
		3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT			1.500.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	500		0		0		0		0					0		0		0		0				
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			97.230.891.359		25.400.601.405		3.300.000.000		-		238.298.000					238.298.000	45,71	7,22		238.298.000	4,22	0,25	Dinas Perikanan		
			MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DINAS PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.203,28		1.095,02		1138,63		1095,02		0					0		0		0		0				
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			11.800.000.000		83.728.150		1.000.000.000		-		120.838.000					120.838.000	128,57	12,08		120.838.000	9	1,02			
			Terselenggaranya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	115		15		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	50		22		7		0		9					9		128,57		9		18				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
								I		II		III		IV			13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13				16=15/6 x100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	%	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8 x 100%	15 = 13	16=15/6 x100%	17	18										
		3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil		1.800.000.000		30.108.000		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	115		15		0		0		0				0			0		0					
		3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		10.000.000.000		53.620.150		1.000.000.000		-		120.838.000				120.838.000	128,57	12,08		120.838.000	18	1,21				
			Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	50		22		7		0		9				9			128,57		9		18			
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		85.430.891.359		25.316.873.255		2.300.000.000		-		117.460.000				117.460.000	25	5,11		117.460.000	2,86	0,14				
			Terselenggaranya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	60		12		12		0		6				6			50		6		10			
				Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	85		44		10		0		0				0			0		0		0			
				Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	5		17		0		0		0				0			0		0		0			
				Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	60		0		12		0		6				6			50		6		10			
				Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	140		0		0		0		0				0			0		0		0			
				Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)	50		0		3		0		0				0			0		0		0			
				Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia (Unit)	80		0		0		0		0				0			0		0		0			
		3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		500.000.000		69.472.400		100.000.000		-		40.770.000				40.770.000	50	40,77		40.770.000	10	8,15				
			Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	60		12		12		0		6				6			50		6		10			
		3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		71.830.891.359		25.089.437.707		1.700.000.000		-		61.480.000				61.480.000	0	3,62		61.480.000	0	0,09				
			Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	85		44		10		0		0				0			0		0		0			
		3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		500.000.000		157.963.148		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	5		17		0		0		0				0			0		0		0			
		3.25.04.2.04.0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		500.000.000		-		200.000.000		-		15.210.000				15.210.000	50	7,61		15.210.000	10	3,04				
			Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	60		0		12		0		6				6			50		6		10			
		3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		6.500.000.000		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	140		0		0		0		0				0			0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket									
								I		II		III		IV																
								1	2	3	4	5	6		7							8		9		10		11		12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	17	18
		3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			5.000.000.000			-		300.000.000			-			-			-	0	0			-	0	0			
			Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)	50		0		3		0		0				0		0		0		0		0					
		3.25.04.2.04.0013	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan			600.000.000			-				-						-	0	0			-	0	0				
			Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia (Unit)	80		0		0		0		0				0		0		0		0		0					
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			15.487.606.434		327.946.900		50.000.000			-		-			-	0	0			-	0	0	Dinas Perikanan				
			MENINGKATNYA KELESTARIAN LAUT DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase Kawasan Perairan Umum Darat yang Diawasi (%)	71,62		0		48,65		48,65		8,1				8,1		16,65		8,1		11,31							
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			15.487.606.434		327.946.900		50.000.000			-		-			-	0	0			-	0	0					
			Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	42		11		0		0		0				0		0		0		0		0					
		Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)		42	31		0		0		0		0				0													
		Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)		42	0		10		0		0		0				0													
		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk (Orang)		100	0		0		0		0		0				0													
		3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota			2.850.000.000		157.066.450		-			-		-			-	0	0			-	0	0					
			Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	42		11		0		0		0				0		0		0		0		0					
		3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota			2.850.000.000		170.880.450		-			-		-			-	0	0			-	0	0					
			Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	42		31		0		0		0				0		0		0		0		0					
		3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota			2.850.000.000		-		50.000.000			-		-			-	0	0			-	0	0					
			Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	42		0		10		0		0				0		0		0		0		0					
		3.25.05.2.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan			6.937.606.434		-		-			-		-			-	0	0			-	0	0					
			Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk (Orang)	100		0		0		0		0				0		0		0		0		0					
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			29.886.361.685		1.231.821.800		811.712.000			-		230.517.800			230.517.800	98,33	28,4			230.517.800	54,67	0,77	Dinas Perikanan				
			MENINGKATNYA KONSUMSI IKAN OLEH MASYARAKAT	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	47,89		41,46		43,49		41,46		20,93				20,93		48,13		20,93		43,7							
		3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			2.500.000.000		127.057.000		61.712.000			-		22.813.000			22.813.000	50	36,97			22.813.000	120	0,91					

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket					
								I		II		III		IV			13			14 = 13/8 x 100%				15 = 13		16=15/6 x100%		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terselenggaranya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	5		1		12		0		6					6		50		6		120				
		3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)		2.500.000.000		127.057.000		61.712.000		-		22.813.000				22.813.000	50	36,97			22.813.000	120	0,91			
			Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	5		1		12		0		6					6		50		6		120				
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)		3.950.000.000		375.570.700		750.000.000		-		207.704.800				207.704.800	146,67	27,69			207.704.800	44	5,26			
			Terselenggaranya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	50		20		15		0		22					22		146,67		22		44				
		3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)		3.950.000.000		375.570.700		750.000.000		-		207.704.800				207.704.800	146,67	27,69			207.704.800	44	5,26			
			Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	50		20		15		0		22					22		146,67		22		44				
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)		23.436.361.685		729.194.100		-		-		-				-	0	0			-	0	0			
			Tersedianya Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	43		15		0		0		0					0		0		0		0				
		3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)		23.436.361.685		729.194.100		-		-		-				-	0	0			-	0	0			
			Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	43		15		0		0		0					0		0		0		0				
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			41.512.737.797		3.386.269.056		3.090.000.000		-		-				-	0	0			-	0	0	Dinas Pariwisata		
			MENINGKATNYA DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	1,16		1,07		1,21		0		0					0		0		0		0				
				Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)	1,02		0		1,06		0		0					0		0		0		0				
		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			7.310.000.000		178.769.876		-		-		-				-	0	0			-	0	0			
			Jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	6		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	35		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		0		0		0		0					0		0		0		0				
		3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			2.800.000.000		-		-		-		-				-	0	0			-	0	0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			850.000.000		178.769.876		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			2.360.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	35		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			1.300.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			5.800.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Dikelola	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0		0				0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	4		0		0		0		0		0				0		0		0		0			
				Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	5		0		0		0		0		0				0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0		0		0				0		0		0		0			
		3.26.02.2.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			900.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			2.950.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			950.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		27.402.737.797		3.207.499.180		2.890.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	2		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	6		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	5		0		10		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	8		5		9		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		1		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen)	0		0		2		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya (Dokumen)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		15		0		0					0		0		0		0				
		3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1.250.000.000		45.452.500		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	2		0		0		0		0					0		0		0		0				
		3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		2.500.000.000		-		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	6		0		0		0		0					0		0		0		0				
		3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		3.300.000.000		-		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	5		0		10		0		0					0		0		0		0				
		3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		14.752.737.797		2.994.068.005		1.890.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	8		5		9		0		0					0		0		0		0				
		3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		2.400.000.000		-		400.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		1		0		0					0		0		0		0				
		3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota		300.000.000		-		400.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen)	0		0		2		0		0					0		0		0		0				
		3.26.02.2.03.0009	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya		1.700.000.000		6.700.000		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya (Dokumen)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				
		3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1.200.000.000		161.278.675		200.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		15		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		1.000.000.000		-		200.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.04.0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota			1.000.000.000		-		200.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya komitmen melaksanakan standar usaha	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			19.463.391.989		1.715.504.601		1.160.000.000		-		63.678.600						63.678.600	0	5,49		63.678.600	0	0,33	Dinas Pariwisata	
			MENINGKATNYA JANGKAUAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan promosi pemasaran pariwisata (%)	9,52		20		16,67		0		0						0		0		0		0			
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			19.463.391.989		1.715.504.601		1.160.000.000		-		63.678.600						63.678.600	0	5,49		63.678.600	0	0,33		
			Jumlah Promosi Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	9		5		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	4		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			2.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			2.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			11.763.391.989		1.100.655.101		1.060.000.000		-		51.128.600						51.128.600	0	4,82		51.128.600	0	0,43		
			Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	9		5		2		0		0						0		0		0		0			
		3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			2.700.000.000		614.849.500		100.000.000		-		12.550.000						12.550.000	0	12,55		12.550.000	0	0,46		
			Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	4		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			29.716.329.123		254.328.425		2.550.000.000		-		619.888.390						619.888.390	11,11	24,31		619.888.390	2,08	2,09	Dinas Pariwisata	
			MENINGKATNYA KUALITAS EKOSISTEM KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0,25		0,11		0,14		0		0						0		0		0		0			
		3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			29.716.329.123		254.328.425		2.550.000.000		-		619.888.390						619.888.390	11,11	24,31		619.888.390	2,08	2,09		
			Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia (Unit)	3		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah terlaksanakanya pendukung pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	8		0		3		0		1						1		33,33		1		12,5			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket				
								I		II		III		IV		13		14 = 13/8 x 100%								15 = 13		16=15/6 x100%	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%			
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan)	1		1		3		0		0						0		0		0		0				
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	2		0		5		0		0						0		0		0		0					
		3.26.04.2.02.0004	Penyediaan Infrastruktur				2.450.000.000		80.191.846		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia (Unit)	3		1		0		0		0						0		0		0		0				
		3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				500.000.000		-		-		-		-		-		-		0	0		-	0	0			
			Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0				
		3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual				1.900.000.000		-		-		-		-		-		-		0	0		-	0	0			
			Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan) intelektual	1		0		0		0		0						0		0		0		0				
		3.26.04.2.02.0017	Pendukungn Pemasaran Ekonomi Kreatif				20.000.000.000		-		2.000.000.000		-		579.056.150				579.056.150		33,33	28,95		579.056.150	12,5	2,9			
			Terlaksanakanya pendukungn pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungn pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	8		0		3		0		1						1		33,33		1		12,5				
		3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				2.866.329.123		33.582.990		150.000.000		-		14.060.465				14.060.465		0	9,37		14.060.465	0	0,49			
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan)	1		1		3		0		0						0		0		0		0				
		3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual				2.000.000.000		140.553.589		400.000.000		-		26.771.775				26.771.775		0	6,69		26.771.775	0	1,34			
			Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	2		0		5		0		0						0		0		0		0				
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				27.958.883.422		1.599.961.950		3.400.000.000		-		958.900.200				958.900.200		0	28,2		958.900.200	0	3,43	Dinas Pariwisata		
			MENINGKATNYA KAPASITAS SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih (%)	58,82		33,61		37,82		0		0						0		0		0		0				
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				12.600.000.000		439.007.200		1.650.000.000		-		638.352.950				638.352.950		0	38,69		638.352.950	0	5,07			
			Jumlah Pelatihan di Bidang Pariwisata dan Ekraf	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	7		0		30		0		0						0		0		0		0				
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	6		0		0		0		0						0		0		0		0				
		3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				6.300.000.000		-		1.650.000.000		-		317.805.700				317.805.700		0	19,26		317.805.700	0	5,04			
			Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	7		0		30		0		0						0		0		0		0				
		3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				6.300.000.000		439.007.200		-		-		320.547.250				320.547.250		0	0		320.547.250	0	5,09			
			Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	6		0		0		0		0						0		0		0		0				
		3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				15.358.883.422		1.160.954.750		1.750.000.000		-		320.547.250				320.547.250		0	18,32		320.547.250	0	2,09			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			49.605.227.986		1.610.671.609		3.300.000.000		63.515.000		194.557.000					258.072.000	0	7,82		258.072.000	0	0,52			
			Luas Tanam (Hortikultura)	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1		1		1		0		0						0			0		0				
		3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			40.805.227.986		982.128.500		2.800.000.000		48.875.000		55.525.000					104.400.000	0	3,73		104.400.000	0	0,26			
			Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1		1		1		0		0						0			0		0				
			Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan (Kelahiran IB)	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1		1		1		0		0						0			0		0				
				Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	4		0		0		0		0						0			0		0				
		3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			5.200.000.000		628.543.109		500.000.000		14.640.000		139.032.000					153.672.000	0	30,73		153.672.000	0	2,96			
			Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1		1		1		0		0						0			0		0				
		3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman			3.600.000.000		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	4		0		0		0		0						0			0		0				
		3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			47.238.965.289		6.982.873.704		4.549.000.000		35.820.000		138.031.021					173.851.021	0	3,82		173.851.021	0	0,37			
			Jumlah Populasi Ternak	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	24.25		0		0		0		0						0			0		0				
				Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	3292		2.355		110		0		0						0			0		0				
		3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			2.670.000.000		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	24.25		0		0		0		0						0			0		0				
		3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			44.568.965.289		6.982.873.704		4.549.000.000		35.820.000		138.031.021					173.851.021	0	3,82		173.851.021	0	0,39			
			Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	3292		2.355		110		0		0						0			0		0				
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			78.665.938.323		15.651.348.493		20.721.214.499		183.605.900		4.337.252.798					4.520.858.698	50	21,82		4.520.858.698	19,19	5,75	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan		
			MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Proporsi Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (%)	312,81		0		65,33		0		0						0			0		0				
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			8.509.718.215		413.365.018		200.000.000		13.310.000		33.687.400					46.997.400	0	23,5		46.997.400	0	0,55			
			Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1		1		1		0		0						0			0		0				
				Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	525		0		0		0		0						0			0		0				
				Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	140		0		0		0		0						0			0		0				
				Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	3		0		0		0		0						0			0		0				
		3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			1.400.000.000		154.100.000		200.000.000		13.310.000		33.687.400					46.997.400	0	23,5		46.997.400	0	3,36			
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1		1		1		0		0						0			0		0				
		3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan			3.509.718.215		131.894.000		-		-		-					-		0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	525		0		0		0		0					0		0		0		0				
		3.27.03.2.01.0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan			2.600.000.000		54.783.800		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	140		0		0		0		0					0		0		0		0				
		3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian			1.000.000.000		72.587.218		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	3		0		0		0		0					0		0		0		0				
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			63.886.220.108		13.163.245.375		16.500.000.000		161.885.900		315.549.500					477.435.400	50	2,89		477.435.400	40	0,75			
			Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	153		59		3		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	18		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	480		2		2		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	6		5		6		0		6					6		100		100		6		100		
				Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1		1		1		0		1					1		100		100		1		100		
		3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			28.790.327.035		11.203.432.620		2.800.000.000		81.353.800		58.088.000					139.441.800	0	4,98		139.441.800	0	0,48			
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	153		59		3		0		0					0		0		0		0				
		3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya			4.500.000.000		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	18		0		0		0		0					0		0		0		0				
		3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			24.395.893.073		1.460.411.205		13.000.000.000		47.692.100		66.470.500					114.162.600	0	0,88		114.162.600	0	0,47			
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	480		2		2		0		0					0		0		0		0				
		3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas			5.000.000.000		385.695.650		500.000.000		30.840.000		182.011.000					212.851.000	100	42,57		212.851.000	100	4,26			
			Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	6		5		6		0		6					6		100		6		100				
		3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan			1.200.000.000		113.705.900		200.000.000		2.000.000		8.980.000					10.980.000	100	5,49		10.980.000	100	0,92			
			Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1		1		1		0		1					1		100		1		100				
		3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum			6.270.000.000		2.074.738.100		4.021.214.499		8.410.000		3.988.015.898					3.996.425.898	100	99,38		3.996.425.898	5,56	63,74			
			Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikembangkan	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola (Ha)	18		10		2		0		2					2		100		2		11,11				
				Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum (Laporan)	4		0		0		0		0					0		0		0		0				
		3.27.03.2.04.0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum			5.500.000.000		2.016.997.100		4.021.214.499		8.410.000		3.988.015.898					3.996.425.898	100	99,38		3.996.425.898	11,11	72,66			
			Terkelolanya Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola (Ha)	18		10		2		0		2					2		100		2		11,11				
		3.27.03.2.04.0003	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum			770.000.000		57.741.000		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum (Laporan)	4		0		0		0		0					0		0		0		0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket					
								I		II		III		IV												
								1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	17	18
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			5.641.870.321		527.162.899		750.000.000		16.340.000		66.815.000				83.155.000	0	11,09		83.155.000	0	1,47	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
			MENINGKATNYA PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYRAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	100		0		100		0		100				100		100		100		100			
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			2.312.998.938		224.319.399		500.000.000		16.340.000		66.815.000				83.155.000	0	16,63		83.155.000	0	3,6		
			Jumlah hewan ternak yang mendapatkan penanganan penyakit hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	20		0		0		0		0				0		0		0		0			
				Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	25		3		5		0		0		0		0									
		3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan			941.508.556		-		-		-		-			-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	20		0		0		0		0				0			0		0				
		3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.371.490.382		224.319.399		500.000.000		16.340.000		66.815.000				83.155.000	0	16,63		83.155.000	0	6,06		
			Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	25		3		5		0		0				0		0		0		0			
		3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000		119.108.500		-		-		-			-	0	0		-	0	0			
			Jumlah SKKH dan SV yang Diterbitkan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	4		80		0		0		0				0			0		0				
		3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan			500.000.000		119.108.500		-		-		-			-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	4		80		0		0		0				0			0		0				
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			468.755.726		89.327.000		-		-		-			-	0	0		-	0	0			
			Jumlah rekomendasi surat keterangan hewan yang dikeluarkan	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	4		8		0		0		0				0			0		0				
		3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium			468.755.726		89.327.000		-		-		-			-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	4		8		0		0		0				0			0		0				
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			2.360.115.657		94.408.000		250.000.000		-		-			-	0	0		-	0	0			
			Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Diawasi	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	1100		0		0		0		0				0		0		0		0			
				Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	120		0		2		0		0		0		0									
				Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	97		8		0		0		0		0		0									
		3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner			426.019.493		-		-		-		-			-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	1100		0		0		0		0				0			0		0				
		3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan			634.096.164		-		250.000.000		-		-			-	0	0		-	0	0			
			Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	120		0		2		0		0				0			0		0				
		3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan			1.300.000.000		94.408.000		-		-		-			-	0	0		-	0	0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket						
								I		II		III		IV					13				14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	97		8		0		0		0				0		0		0		0		0			
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			11.338.421.779		-		1.000.000.000		10.660.000		28.210.000					38.870.000	0	3,89		38.870.000	0	0,34		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
			MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	306,4		0		55,33		22,3		0				22,3		40,3		22,3		7,28					
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			11.338.421.779		-		1.000.000.000		10.660.000		28.210.000					38.870.000	0	3,89		38.870.000	0	0,34			
			Luas areal bencana pertanian yang tertanggulangi	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	2		0		2		0		0				0		0		0		0					
		3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			11.338.421.779		-		1.000.000.000		10.660.000		28.210.000					38.870.000	0	3,89		38.870.000	0	0,34			
			Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	2		0		2		0		0				0		0		0		0					
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			22.486.289.034		4.700.582.470		3.800.000.000		62.059.100		189.389.720					251.448.820	0	6,62		251.448.820	0	1,12		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
			MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	168,39		0		19,34		68,62		0				68,62		354,81		68,62		40,75					
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			22.486.289.034		4.700.582.470		3.800.000.000		62.059.100		189.389.720					251.448.820	0	6,62		251.448.820	0	1,12			
			Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	18		18		18		0		0				0		0		0		0		0			
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2290		45		0		0		0				0		0		0							
				Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	5		0		7		0		0				0		0		0							
				Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	357		0		0		0		0				0		0		0							
				Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	60		0		12		0		0				0		0		0							
		3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			13.724.275.737		4.482.799.820		3.300.000.000		62.059.100		189.389.720					251.448.820	0	7,62		251.448.820	0	1,83			
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	18		18		18		0		0				0		0		0		0					
		3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			2.500.000.000		217.782.650		-		-		-				-	0	0			-	0	0			
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2290		45		0		0		0				0		0		0		0					
		3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			1.150.000.000		-		300.000.000		-		-				-	0	0			-	0	0			
			Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	5		0		7		0		0				0		0		0		0					
		3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian			4.162.013.297		-		-		-		-				-	0	0			-	0	0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	357		0		0		0		0					0		0		0		0				
		3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			950.000.000		-		200.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	60		0		12		0		0					0		0		0		0				
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			70.687.396.146		4.961.147.486		3.400.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0	Dinas Perkebunan		
			MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS SARANA PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN	Tingkat Cakupan Penyediaan Sarana Pertanian (%)	79		68,42		45		0		0					0		0		0		0				
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			69.437.396.146		4.915.866.486		3.400.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Luas Ekstensifikasi , Intensifikasi Rehabilitasi dan Sarana Pengolahan Hasil (Ha)	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1		1		0		0		0				0		0		0		0		0			
				Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	2		1		0		0		0		0		0		0									
				Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan (Anakan)	100000		0		100000		0		0				0		0		0		0					
		3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			15.000.000.000		3.221.256.283		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1		1		0		0		0					0		0		0		0				
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			26.937.396.146		1.694.610.203		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	2		1		0		0		0					0		0		0		0				
		3.27.02.2.01.0017	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan			27.500.000.000		-		3.400.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan (Anakan)	100000		0		100000		0		0					0		0		0		0				
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			1.250.000.000		45.281.000		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Jumlah komoditi yang dikelola	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1		1		0		0		0					0		0		0		0				
		3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			1.250.000.000		45.281.000		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1		1		0		0		0					0		0		0		0				
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			17.003.146.370		3.454.734.746		3.788.779.000		8.594.162		18.156.200					26.750.362	0	0,71		26.750.362	0	0,16	Dinas Perkebunan		
			MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN	Tingkat Penyediaan Prasarana Pertanian (%)	54		0		20		0		0					0		0		0		0				
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			7.003.146.370		3.444.729.346		1.488.779.000		8.594.162		18.156.200					26.750.362	0	1,8		26.750.362	0	0,38			
			Jumlah pendataan pekebun untuk STDB dan CPCL (Laporan)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	5		1		10		0		0				0		0		0		0		0			
				Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0											
		3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			5.000.000.000		3.444.729.346		1.488.779.000		8.594.162		18.156.200					26.750.362	0	1,8		26.750.362	0	0,54			
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	5		1		10		0		0					0		0		0		0				
		3.27.03.2.01.0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan			2.003.146.370		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
								I		II		III		IV														
								9	10	11	12	13	14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		K	%	K	Rp	K	%	17	18
			terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			10.000.000.000		10.005.400		2.300.000.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Panjang jalan usaha tani yang ditingkatkan (meter)	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	5		0		10		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			10.000.000.000		10.005.400		2.300.000.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	5		0		10		0		0						0		0		0		0			
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			7.592.811.258		657.709.797		575.000.000		8.109.274		-					8.109.274		0	1,41		8.109.274	0	0,11	Dinas Perkebunan	
			MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
				Persentase peningkatan luas ANKT (%)	0,1		0		0,08		0		0						0		0		0		0			
				Cakupan Penanggulangan bencana Pertanian (%)	94		100		60		0		0						0		0		0		0			
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			7.592.811.258		657.709.797		575.000.000		8.109.274		-					8.109.274		0	1,41		8.109.274	0	0,11		
			Luas penanggulangan Bencana yang ditangani (Ha)	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	2000		200		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	100		100		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	1000		20		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			2.500.000.000		381.236.300		525.000.000		5.997.074		-					5.997.074		0	1,14		5.997.074	0	0,24		
			Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	2000		200		20		0		0						0		0		0		0			
		3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			2.092.811.258		110.683.765		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	100		100		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			2.500.000.000		165.789.732		50.000.000		2.112.200		-					2.112.200		0	4,22		2.112.200	0	0,08		
			Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	1000		20		20		0		0						0		0		0		0			
		3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			500.000.000		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			2.469.907.956		220.016.900		700.000.000		30.026.300		5.640.000					35.666.300		0	5,1		35.666.300	0	1,44	Dinas Perkebunan	
			MENINGKATNYA KUALITAS DAN KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan usaha pertanian yang diawasi (%)	54		15,33		20		0		0						0		0		0		0			
		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.469.907.956		220.016.900		700.000.000		30.026.300		5.640.000					35.666.300		0	5,1		35.666.300	0	1,44		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Jumlah PBS dan koperasi yang diawasi izinnya	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	75		1		3		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	75		1		2		0		0					0		0		0		0				
		3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian			1.369.907.956		112.944.800		675.000.000		15.190.300		-					15.190.300	0	2,25		15.190.300	0	1,11			
			Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	75		1		3		0		0						0		0		0		0			
		3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian			1.100.000.000		107.072.100		25.000.000		14.836.000		5.640.000					20.476.000	0	81,9		20.476.000	0	1,86			
			Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	75		1		2		0		0						0		0		0		0			
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			34.214.530.181		379.111.382		1.000.000.000		43.920.255		12.807.850					56.728.105	0	5,67		56.728.105	0	0,17	Dinas Perkebunan		
			MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG PENYULUH PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	34		0,16		0,17		0		0						0		0		0		0			
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			34.214.530.181		379.111.382		1.000.000.000		43.920.255		12.807.850					56.728.105	0	5,67		56.728.105	0	0,17			
			Jumlah SDM petani dan penyuluh yang ditingkatkan (orang)	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	18		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	20		2		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	28		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	150		0		15		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			1.000.000.000		42.580.693		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	18		0		0		0		0					0		0		0		0				
		3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			11.964.530.181		245.898.809		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	20		2		0		0		0					0		0		0		0				
		3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			1.250.000.000		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	28		0		0		0		0					0		0		0		0				
		3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			10.000.000.000		90.631.880		1.000.000.000		43.920.255		12.807.850				56.728.105	0	5,67		56.728.105	0	0,57				
			Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	150		0		15		0		0					0		0		0		0				
		3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian			2.500.000.000		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	100		0		0		0		0					0		0		0		0				
		3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota			2.500.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	5		0		0		0		0					0		0		0		0				
		3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani			2.500.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	2		0		0		0		0					0		0		0		0				
		3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			2.500.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				
3	Pembangunan ramah lingkungan dan resiliensi terhadap bencana					177.240.693.560		13.654.671.626		11.680.889.300		-		1.834.293.650					1.834.293.650	80,27	15,7		1.834.293.650	6,95	1,03			
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			25.093.645.762		4.320.767.000		1.975.461.000		-		1.545.460.500					1.545.460.500	78,17	78,23		1.545.460.500	0	6,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			MENINGKATNYA LAYANAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Infrstruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan (%)	93,59		91,09		91,59		91,09		91,09					91,09		99,45		91,09		97,33				
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			25.093.645.762		4.320.767.000		1.975.461.000		-		1.545.460.500					1.545.460.500	78,17	78,23		1.545.460.500	0	6,16			
			Tersedianya Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	0		18,5		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	0		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)	3		1		0		0		0					0		0		0		0		0		
				Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	0		0		12		0		9,38					9,38		78,17		9,38		0				
		1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			4.392.000.000		4.220.922.500		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	0		18,5		0		0		0					0		0		0		0				
		1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			3.435.253.106		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	0		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			9.870.392.656		99.844.500		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)	3		1		0		0		0					0		0		0		0				
		1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R			7.396.000.000		-		1.975.461.000		-		1.545.460.500					1.545.460.500	78,17	78,23		1.545.460.500	0	20,9			
			Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	0		0		12		0		9,38					9,38		78,17		9,38		0				
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			11.227.493.086		314.776.367		-		-		-					-	0	0		-	0	0	Dinas Lingkungan Hidup		
			MENURUNNYA PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan IKLH (%)	0,2		6,59		0,2		0		0					0		0		0		0				
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			9.575.000.000		314.776.367		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	1		1		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket													
								I		II		III		IV																				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp			K	%				
				Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	1		0		0		0		0					0		0		0		0		0								
				Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (Laporan)	1		0		0		0		0					0		0		0		0		0				0				
				Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	26		0		1		0		0					0		0		0		0		0				0	0	0	0	0
				Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	1		0		0		0		0					0		0		0		0		0				0	0	0	0	
				Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	1		0		0		0		0					0		0		0		0		0				0	0	0	0	
				Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	1		0		0		0		0					0		0		0		0		0				0	0	0	0	
				Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0					0		0		0		0		0				0	0	0	0	
				Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	1		0		0		0		0					0		0		0		0		0				0	0	0	0	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		1.000.000.000		314.776.367		-		-		-		-				-		0	0		-	0	0									
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	1		1		0		0		0		0				0		0		0		0										
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		500.000.000		-		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0								
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0				0		0		0		0										
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK		1.000.000.000		-		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0								
		Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	1		0		0		0		0		0				0		0		0		0										
	2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut		250.000.000		-		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0								
		Laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (Laporan)	1		0		0		0		0		0				0		0		0		0										
2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		3.100.000.000		-		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0									
	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	26		0		1		0		0		0				0		0		0		0											
2.11.03.2.01.0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan		250.000.000		-		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0									
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	1		0		0		0		0		0				0		0		0		0											
2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota		250.000.000		-		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0									

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab		Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%			
			Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	1		0		0		0		0					0		0		0		0					
	2.11.03.2.01.0010		Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota			350.000.000		-		-		-		-		-			-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0				
	2.11.03.2.01.0011		Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah			2.500.000.000		-		-		-		-		-			-	0	0		-	0	0				
			Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0				
	2.11.03.2.01.0014		Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota			375.000.000		-		-		-		-		-			-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0				
	2.11.03.2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			750.000.000		-		-		-		-		-			-	0	0		-	0	0				
			Jumlah upaya penanggulangan pencemaran/kerusakan LH	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0				
	2.11.03.2.02.0001		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			750.000.000		-		-		-		-		-			-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0				
	2.11.03.2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			902.493.086		-		-		-		-		-			-	0	0		-	0	0				
			Jumlah upaya pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0				
	2.11.03.2.03.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran			902.493.086		-		-		-		-		-			-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0				
	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			17.700.232.608		1.614.424.473		-		-		-		-			-	0	0		-	0	0		Dinas Lingkungan Hidup		
			MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase RTH yang Dikelola (%)	12,87		0		12,87		0		0						0		0		0		0				
	2.11.04.2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			17.700.232.608		1.614.424.473		-		-		-		-			-	0	0		-	0	0				
				Dokumen Luasan Kawasan Terverifikasi Sebagai Unit Pengelolaan Kehati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	1		1		0		0		0					0		0		0		0				
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)					100		0		0		0		0						0		0		0		0				
Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)					1		0		0		0		0						0		0		0		0				
Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)					1		1		0		0		0						0		0		0		0		0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
								I		II		III		IV														
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							13	14 = 13/8 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	17	18
				Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	13		10		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			850.000.000		530.818.573		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			2.350.232.608		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			2.500.000.000		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati			900.000.000		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya			1.600.000.000		54.856.600		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan			9.500.000.000		1.028.749.300		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	13		10		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			6.012.572.651		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	
			MENINGKATNYA PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penurunan Limbah B3 (%)	1		0		4		0		0						0		0		0		0			
		2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3			5.225.000.000		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Jumlah Limbah B3 yg dikelola di TPS LB3 Kabupaten	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.05.2.01.0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota			775.000.000		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			beroperasinya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.05.2.01.0004	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota			4.450.000.000		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			787.572.651		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Volume Limbah B3 yang dikumpulkan dalam 1 daerah kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewengangnya (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket																			
								I		II		III		IV																										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp			K	%										
		2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		787.572.651		-		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0															
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	1		0		0		0		0					0		0		0		0																
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			13.913.892.518		440.142.255		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	Dinas Lingkungan Hidup													
			MENINGKATNYA KEPATUHAN USAHA DAN / ATAU KEGIATAN TERHADAP PERSETUJUANLINGKUNGAN YANG DITERBITKAN	Persentase Peningkatan Tolak Ukur Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	54		69,72		50		0		0					0		0		0		0																
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		13.913.892.518		440.142.255		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0															
			Jumlah Rekomendasi, Badan Usaha yang Diawasi dan Dibina Peningkatan Kapasitas PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	18	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
				Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	15		14		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	105		76		90		0		0		0		0		0		0		0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		3.963.892.518		-		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0															
			Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	18	37	0		0		0		0				0		0	0		0		0																
		2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		5.000.000.000		63.264.255		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0															
			Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	15	14	0		0		0		0				0		0	0		0		0																
		2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		4.950.000.000		376.878.000		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0															
			Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	105	76	90		0		0		0				0		0	0		0		0																
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			6.671.853.217		424.412.000		1.500.000.000		-		246.476.600					246.476.600	180	16,43		246.476.600	47,25	3,69	Dinas Lingkungan Hidup														
			MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang Diberikan Kepada Lembaga Masyarakat / Lembaga Pendidikan (%)	81	100		80		105		180						180		225		180		222,22																
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah		6.671.853.217		424.412.000		1.500.000.000		-		246.476.600					246.476.600	180	16,43		246.476.600	47,25	3,69																
			Jumlah Pembinaan Sekolah, Kelompok Masyarakat, Keluarga, Lembaga pendidikan/lembaga masyarakat	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	0		0		0		0					0		0		0		0																	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket								
								I		II		III		IV															
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp			K
				Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	100		870		100		0		75						75		75		75		75				
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)	40		0		0		0		0						0		0		0		0				
				Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	50		0		20		21		36						57		285		57		114				
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			1.066.496.103		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0						
		Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0		0		0					0		0		0		0						
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup			2.750.000.000		424.412.000		500.000.000		-		21.476.600					21.476.600	75	4,3		21.476.600	75	0,78					
		Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	100		870		100		0		75					75		75		75		75						
	2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat			1.275.000.000		-		-		-		-				-		0	0		-	0	0					
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)	40		0		0		0		0					0		0		0		0						
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat			1.580.357.114		-		1.000.000.000		-		225.000.000					225.000.000	285	22,5		225.000.000	114	14,24					
		Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	50		0		20		21		36					57		285		57		114						
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			3.977.037.014		211.650.000		-		-		-					-		0	0		-	0	0	Dinas Lingkungan Hidup			
		MENINGKATNYA KINERJA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (%)	81		0		80		0		0						0		0		0		0					
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.977.037.014		211.650.000		-		-		-					-		0	0		-	0	0				
		Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	12		0		0		0		0						0		0		0		0					
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			3.977.037.014		211.650.000		-		-		-					-		0	0		-	0	0					
	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	12		0		0		0		0						0		0		0		0						
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			6.749.150.497		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0	Dinas Lingkungan Hidup				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
								I		II		III		IV														
								13	14 = 13/8 x 100%	15 = 13	16=15/6 x100%																	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			MENINGKATNYA PENYELESAIAN SENGKETA / KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup (%)	83		100		80		0		0				0		0		0		0		0			
	2.11.10.2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			6.749.150.497		-		-		-		-				-		-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	30		0		10		0		0				0		0		0		0		0			
	2.11.10.2.01.0009		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			6.749.150.497		-		-		-		-				-		-	0	0		-	0	0		
			Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	30		0		10		0		0				0		0		0		0		0			
	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			85.894.816.207		6.328.499.531		8.205.428.300		-		42.356.550				42.356.550		42.356.550	102	0,52		42.356.550	11,33	0,05	Dinas Lingkungan Hidup	
			MENINGKATNYA TATA KELOLA PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Capaian Pengelolaan Persampahan Yang Dikelola pada Fasilitas Pengelolaan Sampah (%)	26,7		23,63		26,2		7,99		4,13				12,12		46,26		12,12		45,39					
	2.11.11.2.01		Pengelolaan Sampah			83.825.085.358		6.328.499.531		8.205.428.300		-		42.356.550				42.356.550		42.356.550	102	0,52		42.356.550	17	0,05		
			Jumlah Sampah yang Terkelola	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	75		118		25		27		24				51		204		51		68					
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	50		169		3		0		0				0		0		0		0		0			
				Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1		1		0		0		0				0		0		0		0		0			
				Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	200		0		0		0		0				0		0		0		0		0			
	2.11.11.2.01.0004		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			9.550.000.000		203.886.300		1.500.000.000		-		42.356.550				42.356.550		42.356.550	204	2,82		42.356.550	68	0,44		
			Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	75		118		25		27		24				51		204		51		68					
	2.11.11.2.01.0007		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			66.775.085.358		5.660.572.931		6.705.428.300		-		-				-		-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	50		169		3		0		0				0		0		0		0		0			
	2.11.11.2.01.0008		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota			5.000.000.000		464.040.300		-		-		-				-		-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1		1		0		0		0				0		0		0		0		0			
	2.11.11.2.01.0024		Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah			2.500.000.000		-		-		-		-				-		-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	200		0		0		0		0				0		0		0		0		0			
	2.11.11.2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta			2.069.730.849		-		-		-		-				-		-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Laporan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah (Laporan)	1		0		0		0		0				0		0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket						
								I		II		III		IV					14 = 13/8 x 100%				16=15/6 x100%					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				
	2.11.11.2.03.0001		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah			1.069.730.849		-		-		-		-			-	0	0		-	0	0					
			Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah (Laporan)	1		0		0		0		0				0		0		0		0					
	2.11.11.2.03.0003		Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah			1.000.000.000		-		-		-		-			-	0	0		-	0	0					
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0		0				0		0		0		0					
4	Terwujudnya layanan kesehatan yang prima dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat					956.596.470.362		183.977.449.063		153.810.922.173		11.376.110.522		17.552.250.510					28.928.361.032	571,97	18,81		28.928.361.032	40,59	3,02			
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				768.174.098.541		149.384.699.295		146.493.932.541		11.209.415.021		16.866.766.085					28.076.181.106	726,38	19,17		28.076.181.106	46,14	3,65	Dinas Kesehatan		
			MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	77	0	109	93	93			93				93		114,68		93		79,22						
				Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	40	0	25	5	5			5				20		12,5										
				Jumlah kematian balita (Jiwa)	36	0	44	0	0			0				0		0										
				Jumlah Kematian Ibu (Orang)	5	0	8	4	6			6				125		6										
				Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	85	0	77	90	96			96				124,68		96										
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	20	0	10	6,2	12,01			12,01				120,1		12,01										
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	39,42	0	24,82	56,82	56,82			56,82				228,93		56,82										
				Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)	99	0	98,2	94,18	95,75			95,75				97,51		95,75										
				Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	7,9	0	8,3	6,6	0,96			0,96				188,43		0,96										
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0	0,14	0,11	0,11			0,11				121,43		0,11										
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	8,5	0	8,9	6,6	10,6			10,6				80,9		10,6										
				proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	80	0	68	65	67			67				98,53		67										
				Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	36	0	44	0	0			0				0		0										
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100	0	88	81	81			81				92,05		81										
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	95	0	86	38	38			38				44,19		38										
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	0	100	18,34	37,6			37,6				37,6		37,6										
				Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95	0	95,00	100	100			100				105,26		100										
				Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	92	0	84	89,2	89,2			89,2				106,19		89,2										
				Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	10	0	12	11	10			10				116,67		10										

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket				
								I		II		III		IV			14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	92,25		0		90,45		21		40					40		44,22		40		43,36				
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	23,4		0		23,4		22		21					21		110,26		21		110,26				
				Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	79		0		45		43		49					49		108,89		49		62,03				
				Penemuan Kasus TBC (%)	90		0		90		12		23,8					23,8		26,44		23,8		26,44				
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	95		0		84		19,23		39,37					39,37		46,87		39,37		41,44				
				Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100		0		100		100		100					100		100		100		100				
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100		0		100		24,27		52					52		52		52		52				
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	100		0		48		48		68					68		141,67		68		68				
	1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		260.347.813.507		52.859.248.343		43.185.568.654		266.977.850		2.040.846.157					2.307.824.007	25,36	5,34		2.307.824.007	5,44	0,89				
			Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	5		0		1		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	15		2		9		5,5		0					0		0		0		0				
				Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	5		6		12		0		1					1		8,33		1		20				
				Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	50		21		30		0		4					4		13,33		4		8				
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	62		24		12		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	21		9		6		0		1					1		16,67		1		4,76				
				Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	5		1		1		0		1					1		100		1		20				
				Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	21		0		1		0		1					1		100		1		4,76				
	1.02.02.2.01.0001		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		32.048.331.499		-		1.000.000.000		12.012.300		8.461.500					20.473.800	0	2,05		20.473.800	0	0,06				
			Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	5		0		1		0		0					0		0		0		0				
	1.02.02.2.01.0002		Pembangunan Puskesmas		45.953.980.047		10.280.985.478		12.991.365.654		34.450.000		951.148.654					985.598.654	0	7,59		985.598.654	0	2,14				
			Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	15		2		9		5,5		0					0		0		0		0				
	1.02.02.2.01.0004		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		27.987.517.307		2.854.909.000		1.000.000.000		-		404.086.600					404.086.600	8,33	40,41		404.086.600	20	1,44				
			Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	5		6		12		0		1					1		8,33		1		20				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas		28.429.377.657		9.872.271.059		2.200.000.000		5.017.000		201.242.000					206.259.000	13,33	9,38		206.259.000	8	0,73				
			Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	50		21		30		0		4				4		13,33		4		8					
		1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		16.942.992.235		3.501.272.250		1.377.000.000		16.856.250		49.235.000					66.091.250	0	4,8		66.091.250	0	0,39				
			Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	62		24		12		0		0				0		0		0		0					
		1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		6.179.958.517		1.320.093.181		800.000.000		10.950.000		38.564.500					49.514.500	16,67	6,19		49.514.500	4,76	0,8				
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	21		9		6		0		1				1		16,67		1		4,76					
		1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit		19.346.867.709		3.740.964.722		1.650.000.000		12.960.000		12.395.000					25.355.000	100	1,54		25.355.000	20	0,13				
			Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	5		1		1		0		1				1		100		1		20					
		1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)		1.819.450.312		-		1.000.000.000		-		14.400.000					14.400.000	100	1,44		14.400.000	4,76	0,79				
			Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	21		0		1		0		1				1		100		1		4,76					
			Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	2		1		1		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	15100		235		1392		0		0				0		0		0		0		0			
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	2181		359		1754		0		0				0		0		0		0		0			
				Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	5		1		1		0		0,66				0,66		66		0,66		13,2					
				Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1		0		0		0		0				0		0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		14.369.757.859		490.265.205		4.000.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	2		1		1		0		0				0		0		0		0					
		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		20.528.100.564		12.738.369.335		8.000.000.000		15.796.200		25.205.675					41.001.875	0	0,51		41.001.875	0	0,2				
			Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	15100		235		1392		0		0				0		0		0		0					
		1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		759.852.479		271.108.300		1.167.203.000		17.838.700		31.390.000					49.228.700	0	4,22		49.228.700	0	6,48				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	2181		359		1754		0		0					0		0		0		0				
		1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			44.680.555.174		7.789.009.813		8.000.000.000		141.097.400		304.717.228					445.814.628	66	5,57		445.814.628	13,2	1			
			Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	5		1		1		0		0,66						0,66		66		0,66		13,2			
		1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			1.301.072.148		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1		0		0		0		0		0				0		0		0		0			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			502.233.725.497		95.299.077.080		101.725.363.887		10.927.073.971		14.756.902.280					25.683.976.251	1033,19	25,25		25.683.976.251	18,72	5,11			
			Meningkatnya cakupan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	247295		280.614		291003		71.671		153.803							153.803		52,85		153.803		62,19		
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	109988		114.191		116025		31.368		67.136							67.136		57,86		67.136		61,04		
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9350		9.435		9861		2.937		6.073							6.073		61,59		6.073		64,95		
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	822		458		1		250		344							344		34400		344		41,85		
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	15144		9.480		9844		1.708		4.072							4.072		41,37		4.072		26,89		
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	18494		17.409		22000		4.274		10.096							10.096		45,89		10.096		54,59		
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4		1		1		0		0							0		0		0		0		
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	5		1		1		0		0							0		0		0		0		
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0		0		50		4		12							12		24		12		0		
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	5		1		1		0		0							0		0		0		0		
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1		1		1		0		0							0		0		0		0		
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1		1		1		0		0							0		0		0		0		
				Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	0		0		1		1		1		0		0			0		0		0		0		
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	4170		100		1823		214		568							568		31,16		568		13,62		
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	200		100		221		34		61							61		27,6		61		30,5		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket					
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	300		100		300		36		82					82		27,33		82		27,33				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	5		1		1		1		0					0		0		0		0				
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			2.433.285.242		682.476.456		890.000.000		12.250.000		-				12.250.000	52,85	1,38		12.250.000	62,19	0,5				
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	247295		280.614		291003		71.671		153.803					153.803		52,85		153.803		62,19				
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			1.180.292.446		261.181.346		350.000.000		-		-				-	57,86	0		-	61,04	0				
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	109988		114.191		116025		31.368		67.136					67.136		57,86		67.136		61,04				
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			2.433.285.242		754.271.101		770.000.000		-		21.367.000				21.367.000	61,59	2,77		21.367.000	64,95	0,88				
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9350		9.435		9861		2.937		6.073					6.073		61,59		6.073		64,95				
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			1.806.788.845		478.059.582		550.000.000		-		925.000				925.000	34400	0,17		925.000	41,85	0,05				
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	822		458		1		250		344					344		34400		344		41,85				
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.310.380.199		1.434.951.346		3.930.181.200		5.180.000		81.400.000				86.580.000	41,37	2,2		86.580.000	26,89	2,62				
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	15144		9.480		9844		1.708		4.072					4.072		41,37		4.072		26,89				
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			5.440.467.956		2.408.455.554		3.480.895.093		-		298.909.320				298.909.320	45,89	8,59		298.909.320	54,59	5,49				
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	18494		17.409		22000		4.274		10.096					10.096		45,89		10.096		54,59				
		1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			679.095.326		185.673.893		200.000.000		17.405.000		13.565.000				30.970.000	0	15,49		30.970.000	0	4,56				
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	4		1		1		0		0					0		0		0		0				
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1.739.661.007		408.056.031		420.000.000		5.340.000		1.542.634				6.882.634	0	1,64		6.882.634	0	0,4				
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0		0		0				
		1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			-		-		205.000.000		7.175.000		4.740.000				11.915.000	24	5,81		11.915.000	0	0				
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0		0		50		4		12					12		24		12		0				
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			9.236.702.832		2.044.020.544		3.454.641.000		98.762.830		168.914.000				267.676.830	0	7,75		267.676.830	0	2,9				
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0		0		0				
		1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			132.090.233		29.750.000		197.755.000		-		26.669.250				26.669.250	0	13,49		26.669.250	0	20,19				
			Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1		1		1		0		0					0		0		0		0				
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			125.351.879		-		50.000.000		-		-				-	0	0		-	0	0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket								
								I		II		III		IV															
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%			
			Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0				
		1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Terpadu (SPGDT)	Sistem Penanganan Gawat Darurat		-		-		1.000.000.000		41.376.000		51.000.000						92.376.000	0	9,24		92.376.000	0	0			
			Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	0		0		1		1		0						0		0		0		0				
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			1.508.851.249		1.454.017.671		1.000.000.000		16.036.000		260.000.000						276.036.000	31,16	27,6		276.036.000	13,62	18,29			
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	4170		100		1823		214		568						568		31,16		568		13,62				
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			3.814.280.481		1.432.938.218		1.148.000.000		178.464.469		165.066.600						343.531.069	27,6	29,92		343.531.069	30,5	9,01			
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	200		100		221		34		61						61		27,6		61		30,5				
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			1.628.890.636		478.469.043		612.600.000		24.744.000		50.133.000						74.877.000	27,33	12,22		74.877.000	27,33	4,6			
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	300		100		300		36		82						82		27,33		82		27,33				
		1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			2.380.686.313		1.103.884.600		1.750.000.000		71.706.500		522.570.621						594.277.121	0	33,96		594.277.121	0	24,96			
			Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0				
		1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji			250.598.559		45.482.180		100.000.000		10.390.000		18.900.000						29.290.000	0	29,29		29.290.000	0	11,69			
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	5		1		1		1		0						0		0		0		0				
			Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan siklus hidup	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	44170		6.969		8541		1.674		3.434						3.434		40,21		3.434		7,77				
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9455		7.603		8496		1.896		1.896		3.840					3.840		45,2		3.840		40,61			
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10195		7.512		8228		1.837		1.837		3.642					3.642		44,26		3.642		35,72			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	56073		27.368		31644		6.213		6.213		13.131					13.131		41,5		13.131		23,42			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	117688		73.102		82133		15.348		15.348		31.425					31.425		38,26		31.425		26,7			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	69584		25.481		26917		6.383		6.383		13.312					13.312		49,46		13.312		19,13			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	5		1		1		1		0		0					0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	5		1		1		1		0		0					0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1		1		1		1		0		0					0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		0		1		1		0		0					0		0		0		0			
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		1		1		0		0				0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			5.064.570.116		597.358.978		740.000.000		-		37.700.000						37.700.000	40,21	5,09		37.700.000	7,77	0,74			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket				
								I		II		III		IV					14 = 13/8 x 100%				15 = 13		16=15/6 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp			K	%	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8 x 100%	15 = 13	16=15/6 x100%	17	18									
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	44170	6.969	8541	1.674	3.434			3.434						40,21		3.434	7,77					
	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		4.563.372.997	697.735.448	740.000.000	-	106.907.444			106.907.444						45,2	14,45	106.907.444	40,61	2,34				
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9455	7.603	8496	1.896	3.840			3.840						45,2		3.840	40,61					
	1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		4.563.372.997	742.571.124	1.262.320.000	125.231.528	210.739.200			335.970.728						44,26	26,62	335.970.728	35,72	7,36				
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10195	7.512	8228	1.837	3.642			3.642						44,26		3.642	35,72					
	1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		2.057.387.403	696.817.730	730.000.000	-	94.983.496			94.983.496						41,5	13,01	94.983.496	23,42	4,62				
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	56073	27.368	31644	6.213	13.131			13.131						41,5		13.131	23,42					
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		5.816.365.794	713.170.238	740.000.000	-	51.676.700			51.676.700						38,26	6,98	51.676.700	26,7	0,89				
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	117688	73.102	82133	15.348	31.425			31.425						38,26		31.425	26,7					
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		5.565.767.234	705.315.083	740.000.000	5.890.000	60.857.400			66.747.400						49,46	9,02	66.747.400	19,13	1,2				
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	69584	25.481	26917	6.383	13.312			13.312						49,46		13.312	19,13					
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		22.447.339.185	15.885.491.543	2.050.000.000	33.980.000	125.560.000			159.540.000						0	7,78	159.540.000	0	0,71				
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	5	1	1	0	0			0						0		0	0					
	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		2.575.625.224	1.003.483.800	1.782.840.000	8.298.600	60.310.000			68.608.600						0	3,85	68.608.600	0	2,66				
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	5	1	1	0	0			0						0		0	0					
	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		23.657.103.731	9.192.019.038	11.848.250.594	-	52.304.500			52.304.500						0	0,44	52.304.500	0	0,22				
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	1	0	0			0						0		0	0					
	1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		2.538.581.745	388.929.400	518.692.000	-	-			-						0	0	-	0	0				
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	0	1	0	0			0						0		0	0					
	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		911.321.708	327.529.000	1.360.615.000	-	117.272.000			117.272.000						0	8,62	117.272.000	0	12,87				
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1	1	0	0			0						0		0	0					
			Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	1	1	0	0			0						0		0	0					
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	5	1	1	0	0			0							0		0	0				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	5	1	0	0	0			0							0		0	0				
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	2	1	2	0	0			0							0		0	0				
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	21	0	0	0	0			0							0		0	0				
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	1	0	0			0							0		0	0				
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	21	21	21	1	21			1	21			21				21		100	21	100		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
								9		10		11		12														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			553.796.047		49.499.000		75.000.000		-		8.670.000					8.670.000	0	11,56		8.670.000	0	1,57			
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1		1		1		0		0				0		0		0		0					
		1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			929.693.887		455.663.774		350.000.000		8.683.000		22.900.000					31.583.000	0	9,02		31.583.000	0	3,4			
			Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	5		1		1		0		0				0		0		0		0					
		1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			267.030.559.803		43.681.019.297		44.196.319.000		10.109.984.974		10.628.002.969					20.737.987.943	0	46,92		20.737.987.943	0	7,77			
			Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	5		1		0		0		0				0		0		0		0					
		1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			41.054.705.817		6.012.363.688		13.342.255.000		146.176.070		1.488.486.146					1.634.662.216	0	12,25		1.634.662.216	0	3,98			
			Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	2		1		2		0		0				0				0		0					
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			65.508.553.376		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	21		0		0		0		0				0		0		0		0					
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			6.783.654.501		31.325.000		200.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1		1		1		0		0				0		0		0		0					
		1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			2.511.245.487		917.097.374		940.000.000		-		4.830.000					4.830.000	100	0,51		4.830.000	100	0,19			
			Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	21		21		21		1		21				21				100		21		100			
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			4.162.405.526		1.077.261.772		1.333.000.000		3.861.200		46.462.248					50.323.448	0	3,78		50.323.448	0	1,21			
			Tersedianya fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1		1		1		0		0				0				0		0		0			
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			4.162.405.526		1.077.261.772		1.333.000.000		3.861.200		46.462.248					50.323.448	0	3,78		50.323.448	0	1,21			
			Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1		1		1		0		0				0				0		0		0			
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.430.154.011		149.112.100		250.000.000		11.502.000		22.555.400					34.057.400	80	13,62		34.057.400	800	2,38			
			Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1		10		10		3		6				6				60		6		600			
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1		10		10		10		10				10				100		10		1000			
		1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			909.725.153		86.519.400		100.000.000		5.130.000		8.761.400					13.891.400	60	13,89		13.891.400	600	1,53			
			Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1		10		10		3		6				6				60		6		600			
		1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			520.428.858		62.592.700		150.000.000		6.372.000		13.794.000					20.166.000	100	13,44		20.166.000	1000	3,87			
			Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1		10		10		10		10				10				100		10		1000			
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			9.974.501.697		1.392.786.168		3.445.870.000		99.874.200		561.296.600					661.170.800	10,38	19,19		661.170.800	3,15	6,63	Dinas Kesehatan		
			MENINGKATNYA MUTU DAN DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi (Rasio)	7,15		0		6,81		6,62		6,75				6,75				99,12		6,75		94,41			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket				
								I		II		III		IV															
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp			K
				Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar. (%)	100		0		67,00		100		100					100		149,25		100		100					
				Rasio Tenaga Medis Terhadap Populasi (Rasio)	0,9		0		0,85		0,82		0,83					0,83		97,65		0,83		92,22					
				Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)	100		0		76,19		0		71					71		93,19		71		71					
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		4.440.031.333		428.394.835		1.137.462.000		94.144.200		49.100.400					143.244.600	0	12,59		143.244.600	0	3,23					
			Terselenggaranya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	1		0		0		0				0		0		0		0						
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	30	30	23		15		0		0				0		0		0		0		0				
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	5	1	1		0		0		0				0		0		0		0		0				
		1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		1.079.398.715		25.634.950		150.000.000		-		-				-	0	0		-	0	0						
			Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	1		0		0		0				0		0		0		0						
		1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		1.079.398.712		295.998.835		300.000.000		2.794.200		552.000				3.346.200	0	1,12		3.346.200	0	0,31						
			Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	30	30	23		15		0		0				0		0		0		0						
		1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		2.281.233.906		106.761.050		687.462.000		91.350.000		48.548.400				139.898.400	0	20,35		139.898.400	0	6,13						
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	5	1	1		0		0		0				0		0		0		0						
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		5.534.470.364		964.391.333		2.308.408.000		5.730.000		512.196.200				517.926.200	41,5	22,44		517.926.200	12,61	9,36						
			Terselenggaranya pelatihan peningkatan kompetensi teknis tenaga kesehatan sesuai rencana kebutuhan pelatihan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	658	230	200		0		83		83				83		41,5		83		12,61						
		1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		5.534.470.364		964.391.333		2.308.408.000		5.730.000		512.196.200				517.926.200	41,5	22,44		517.926.200	12,61	9,36						
			Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	658	230	200		0		83		83				83		41,5		83		12,61						
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		7.896.078.210		569.904.745		1.617.000.000		66.821.301		21.947.025				88.768.326	0	5,49		88.768.326	0	1,12	Dinas Kesehatan					
			MENINGKATNYA KUALITAS DAN DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	60	0		40,00	0		20						20		50		20		33,33						
				Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	40	0		20	3	22		22					22		110		22		55						
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (%)	100	0		100	4	100		100					100		100		100		100						
				Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	100	0		100	98	100		100					100		100		100		100		100				
				Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT Sesuai standar (%)	40	0		20	3	12		12					12		60		12		30						

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			3.546.289.738		249.268.270		300.000.000		4.209.000		-				4.209.000	0	1,4		4.209.000	0	0,12				
			Terselenggaranya Pengawasan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0		4.209.000	0					
		1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			3.546.289.738		249.268.270		300.000.000		4.209.000		-				4.209.000	0	1,4		4.209.000	0	0,12				
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0		4.209.000	0					
		1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		-		-		377.000.000		36.560.801		-					36.560.801	0	9,7		36.560.801	0	0				
				Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	0		0		1		0		0					0		0			0					
		1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		-		-		377.000.000		36.560.801		-					36.560.801	0	9,7		36.560.801	0	0				
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	0		0		1		0		0					0		0		36.560.801	0					
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			4.349.788.472		320.636.475		390.000.000		9.428.500		21.947.025				31.375.525	0	8,05		31.375.525	0	0,72				
			Terselenggaranya Pengawasan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0			0					
		1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			4.349.788.472		320.636.475		390.000.000		9.428.500		21.947.025				31.375.525	0	8,05		31.375.525	0	0,72				
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0			0					
		1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		-		-		550.000.000		16.623.000		-					16.623.000	0	3,02		16.623.000	0	0				
				Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	0		0		1		0		0					0		0			0					
		1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		-		-		550.000.000		16.623.000		-					16.623.000	0	3,02		16.623.000	0	0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			170.551.791.914		32.630.058.855		2.254.119.632		-		102.240.800						102.240.800	66,67	4,54		102.240.800	36,36	0,06	RSUD Kudungga Sangatta	
			MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT RSUD KUDUNGGA	Peringkat Kelulusan Akreditasi (Nilai Akreditasi)	80		80		80		80		80						80		100		80		100			
	1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			163.557.217.087		31.418.521.773		1.499.119.632		-		4.840.000						4.840.000	50	0,32		4.840.000	16,67	0		
		1		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1		477		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	750		385		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	10		7		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
				Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	4		5		0		0		0						0		0		0		0			
	1.02.02.2.01.0010		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			668.500.000		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
	1.02.02.2.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			61.865.575.821		2.413.812.950		222.580.000		-		4.840.000						4.840.000	0	2,17		4.840.000	0	0,01		
			Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1		477		3		0		0						0		0		0		0			
	1.02.02.2.01.0015		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			1.033.294.000		641.235.115		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	750		385		0		0		0						0		0		0		0			
	1.02.02.2.01.0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			8.796.538.400		3.263.175.182		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	10		7		0		0		0						0		0		0		0			
	1.02.02.2.01.0022		Pengembangan Rumah Sakit			42.102.225.562		12.364.231.700		1.276.539.632		-		-						-	100	0		-	100	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket	
								I		II		III		IV		13		14 = 13/8 x 100%			15 = 13			16=15/6 x100%				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1		1		1		1		1					1		100		1		100				
	1.02.02.2.01.0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			49.091.083.304		12.736.066.826		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	4		5		0		0		0						0		0		0		0			
	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.773.074.240		873.719.125		555.000.000		-		15.992.000					15.992.000	100	2,88		15.992.000	66,67	0,34			
		1		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		1		0		0		0					0		0		0		0		0		
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1		1		1		0		1					100		1		100						
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1		1		1		0		1					1		100		1		100				
	1.02.02.2.02.0018			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			400.546.740		308.374.125		-		-		-				-	0	0		-	0	0			
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		1		0		0		0					0		0		0		0			
	1.02.02.2.02.0032			Operasional Pelayanan Rumah Sakit			3.998.527.500		486.000.000		455.000.000		-		-				-	100	0		-	100	0			
				Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1		1		1		0		1					1		100		1		100			
	1.02.02.2.02.0035			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			374.000.000		79.345.000		100.000.000		-		15.992.000				15.992.000	100	15,99		15.992.000	100	4,28			
				Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1		1		1		0		1					1		100		1		100			
	1.02.02.2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			1.841.053.400		218.915.957		100.000.000		-		77.368.800				77.368.800	100	77,37		77.368.800	100	4,2			
				1				1		1		0		1					1		100		1		100			
	1.02.02.2.03.0002			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1.841.053.400		218.915.957		100.000.000		-		77.368.800				77.368.800	100	77,37		77.368.800	100	4,2			
				Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1		1		1		0		1					1		100		1		100			
	1.02.02.2.04			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			380.447.187		118.902.000		100.000.000		-		4.040.000				4.040.000	0	4,04		4.040.000	0	1,06			
				1				1		1		0		0					0		0		0		0			
	1.02.02.2.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			380.447.187		118.902.000		100.000.000		-		4.040.000				4.040.000	0	4,04		4.040.000	0	1,06			
				Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1		1		1		0		0					0		0		0		0			
5	Terwujudnya kesiapsiagaan daerah terhadap bencana					53.907.118.290		3.005.640.180		4.104.000.000		454.458.540		436.410.280					890.868.820	36,12	21,71		890.868.820	2,84	1,65			
		1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			46.093.300.253		2.083.583.156		4.104.000.000		454.458.540		436.410.280					890.868.820	36,12	21,71		890.868.820	3,57	1,93	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan (Indeks)	0,134		0,101		0,131		0,101		0,101					0,101		77,1		0,101		75,37			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Indeks Pasca Bencana (Indeks)	0,057		0,028		0,042		0,028		0,028					0,028		66,67		0,028		49,12				
				Indeks Pra Bencana (Indeks)	0,453		0,341		0,317		0,341		0,341					0,341		107,57		0,341		75,28				
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			4.450.000.000		79.592.288		700.000.000		96.112.190		18.520.000					114.632.190	5,72	16,38		114.632.190	0,45	2,58			
			Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupatena	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	9170		0		1450		46		37					83		5,72		83		0,91				
				Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		1		0		0		0					0		0		0		0				
		1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			4.000.000.000		8.350.000		700.000.000		96.112.190		18.520.000					114.632.190	5,72	16,38		114.632.190	0,91	2,87			
			Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	9170		0		1450		46		37					83		5,72		83		0,91				
		1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			450.000.000		71.242.288		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		1		0		0		0					0		0		0		0				
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			19.376.507.035		988.924.260		1.750.000.000		109.792.550		173.221.480					283.014.030	34	16,17		283.014.030	3,39	1,46			
			Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	5		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	130		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1300		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	2700		0		600		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	12		5		2		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	150		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	5		1		1		0		0,2					0,2		20		0,2		4				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket				
								I		II		III		IV		13					14 = 13/8 x 100%				15 = 13		16=15/6 x100%	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	3		0		0		0		0				0		0		0		0		0			
				Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	4		1		1		1		1				1		100		1		25					
				Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0		0				0		0		0		0		0			
				Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	12		6		2		0		1				1		50		1		8,33					
		1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			1.550.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0			-	0	0			
			Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	5		0		0		0		0				0		0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			1.450.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0			-	0	0			
			Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	130		0		0		0		0				0		0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			1.550.000.000		1.429.000		-		-		-		-		-	0	0			-	0	0			
			Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1300		0		0		0		0				0		0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			1.850.000.000		-		400.000.000		32.316.000		9.844.200				42.160.200	0	10,54			42.160.200	0	2,28			
			Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	2700		0		600		0		0				0		0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			3.030.371.180		222.545.072		150.000.000		34.409.000		2.010.000				36.419.000	0	24,28			36.419.000	0	1,2			
			Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	12		5		2		0		0				0		0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			1.350.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0			-	0	0			
			Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	150		0		0		0		0				0		0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota			2.400.000.000		227.093.780		200.000.000		8.600.000		20.944.000				29.544.000	20	14,77			29.544.000	4	1,23			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	5		1		1		0		0,2					0,2		20		0,2		4				
		1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			1.050.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	3		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			1.400.000.000		136.471.652		100.000.000		5.040.000		19.081.000					24.121.000	100	24,12		24.121.000	25	1,72			
			Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	4		1		1		1		1					1		100		1		25				
		1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			450.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			3.296.135.855		401.384.756		900.000.000		29.427.550		121.342.280					150.769.830	50	16,75		150.769.830	8,33	4,57			
			Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	12		6		2		0		1					1		50		1		8,33				
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			8.900.161.719		530.911.898		1.100.000.000		204.015.000		186.167.500					390.182.500	52,5	35,47		390.182.500	8,56	4,38			
			Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	25		5		5		1		1					2		40		2		8				
				Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	3		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	185		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	2100		500		700		368		122					490		70		490		23,33				
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	5		0		1		1		0					1		100		1		20				
		1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			1.350.000.000		101.853.000		300.000.000		27.200.000		9.190.000					36.390.000	0	12,13		36.390.000	0	2,7			
			Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0		0		0				
		1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			500.000.000		69.929.500		50.000.000		12.170.000		8.359.500					20.529.500	40	41,06		20.529.500	8	4,11			
			Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	25		5		5		1		1					2		40		2		8				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket								
								I		II		III		IV															
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp			K
		1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota			950.000.000		-		-		-		-				-		-	0	0		-	0	0			
			Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	3		0		0		0		0					0			0		0		0				
		1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota			1.450.161.719		-		-		-		-				-		-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	185		0		0		0		0					0			0		0		0				
		1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			3.850.000.000		359.129.398		700.000.000		140.435.000		167.898.000					308.333.000		70	44,05		308.333.000	23,33	8,01			
			Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	2100		500		700		368		122					490			70		490		23,33				
		1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			800.000.000		-		50.000.000		24.210.000		720.000					24.930.000		100	49,86		24.930.000	20	3,12			
			Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	5		0		1		1		0					1			100		1		20				
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			13.366.631.499		484.154.710		554.000.000		44.538.800		58.501.300					103.040.100		30	18,6		103.040.100	1,75	0,77			
			Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	5		0		1		0,1		0,2					0,3			30		0,3		6				
				Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	5		0		0		0		0		0				0			0		0		0			
				Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	4		0		0		0		0		0				0			0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	5		0		1		0,1		0,2		0				0,3			30		0,3		6			
				Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	115		0		0		0		0		0				0			0		0		0			
				Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	105		0		0		0		0		0				0			0		0		0			
				Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	10		1		1		0,1		0,2						0,3			30		0,3		3			
				Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	4		0		0		0		0		0				0			0		0		0			
				Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	4		0		0		0		0		0				0			0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	5		1		1		0,1		0,2					0,3		30		0,3		6				
				Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	5		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			1.678.189.714		-		104.000.000		6.059.000		2.137.000				8.196.000	30	7,88		8.196.000	6	0,49				
			Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	5		0		1		0,1		0,2					0,3		30		0,3		6				
		1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			1.150.000.000		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	5		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan	Sistem Informasi Kebencanaan		200.000.000		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	4		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		1.750.000.000		-		150.000.000		18.704.800		15.491.900				34.196.700	30	22,8		34.196.700	6	1,95				
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	5		0		1		0,1		0,2					0,3		30		0,3		6				
		1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			1.500.000.000		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	115		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota			1.000.000.000		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	105		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			2.338.441.785		268.229.414		200.000.000		10.555.000		24.072.400				34.627.400	30	17,31		34.627.400	3	1,48				
			Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	10		1		1		0,1		0,2					0,3		30		0,3		3				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		400.000.000		-		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	4		0		0		0		0				0		0		0		0					
		1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota		400.000.000		-		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan) bencana	4		0		0		0		0				0		0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		100.000.000		-		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penganggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0		0				0		0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		2.100.000.000		215.925.296		100.000.000		9.220.000		16.800.000				26.020.000		30	26,02		26.020.000	6	1,24				
			Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	5		1		1		0,1		0,2				0,3		30		0,3		6					
		1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota		750.000.000		-		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	5		0		0		0		0				0		0		0		0		0			
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		7.813.818.037		922.057.024		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0	Dinas Lingkungan Hidup		
			MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KAJIAN LINGKUNGAN UNTUK MEMITIGASI DAMPAK KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	100		100		100		0		0				0		0		0		0		0			
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		4.397.806.981		349.367.542		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0				0		0		0		0		0			
				Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	1		1		0		0		0				0		0		0		0		0			
				Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	1		0		0		0		0				0		0		0		0		0			
				Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen)	1		0		0		0		0				0		0		0		0		0			
				jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		0				0		0		0		0		0			
		2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		1.100.866.792		-		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0				0		0		0		0		0			
		2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		700.000.000		349.367.542		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.02.2.01.0004	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota			1.600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0		
			RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	1		0		0		0		0							0		0		0		0		
		2.11.02.2.01.0005	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH			796.940.189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0		
			Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen)	1		0		0		0		0							0		0		0		0		
		2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota			200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0		
			RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	1		0		0		0		0							0		0		0		0		
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			3.416.011.056	572.689.482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0		
			Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0							0		0		0		0		
				Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	1		0		0		0		0							0		0		0		0		
				Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1		1		0		0		0							0		0		0		0		
		2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			370.012.348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0		
			Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0							0		0		0		0		
		2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS			945.998.708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0		
			Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	1		0		0		0		0							0		0		0		0		
		2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang			2.100.000.000	572.689.482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0		
			Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1		1		0		0		0							0		0		0		0		
6	Terwujudnya layanan pendidikan berkualitas yang merata					2.782.387.015.551	1.157.136.890.028		480.878.825.000		13.195.062.930		18.566.763.188						31.761.826.118	2,42	6,6		31.761.826.118	1,11	1,14			
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				2.269.575.370.347	986.898.980.861		333.940.425.000		825.408.807		510.392.177						1.335.800.984	2,03	0,4		1.335.800.984	0,43	0,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	MENINGKATNYA PARTISIPASI ANAK USIA SEKOLAH	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (Angka)	102,65	105,64	104,10	105,64	105,64	105,64	105,64	105,64	105,64	105,64	105,64	105,64	105,64	105,64	105,64	105,64	101,48		105,64	102,91						
Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar 7-15 Tahun			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal yang Terakreditasi (%)			100	0	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	100		77,78	77,78						
Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun (Angka)			80,84	84,13	71,72	84,13	84,13	84,13	84,13	84,13	84,13	84,13	84,13	84,13	84,13	84,13	84,13	84,13	117,3		84,13	104,07						
Angka Partisipasi Murni (APM) 5-6 Tahun Jenjang PAUD (Angka)			408,25	67,55	79,65	67,55	67,55	67,55	67,55	67,55	67,55	67,55	67,55	67,55	67,55	67,55	67,55	67,55	135,1		169,62	135,1	33,09					
Angka Partisipasi Sekolah Kesetaran 7-18 Tahun (Angka)			57,29	44,62	42,36	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	105,34		105,34	77,88					
Angka Partisipasi Murni (APM) 13-15 Tahun Jenjang SMP/MTs (Angka)			90,86	88,32	86,86	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	101,68		101,68	97,2						
Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI terhadap Penduduk Usia Sekolah per 10.000 (Rasio)			47.45:10 000	45,90:10	46.55:10 000	45,90:10	45,90:10	45,90:10	45,90:10	45,90:10	45,90:10	45,90:10	45,90:10	45,90:10	45,90:10	45,90:10	45,90:10	45,90:10	98603,6 5		45,90:10	96733,4						
Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs terhadap Penduduk Usia Sekolah per 10.000 (Rasio)			44.49:10 000	40,07:10	43.64:10 000	40,07:10	40,07:10	40,07:10	40,07:10	40,07:10	40,07:10	40,07:10	40,07:10	40,07:10	40,07:10	40,07:10	40,07:10	40,07:10. 000	91,82		40,07:10. 000	90,07						
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS (Angka)			104,65	107,12	106,00	107,12	107,12	107,12	107,12	107,12	107,12	107,12	107,12	107,12	107,12	107,12	107,12	107,12	107,12	101,06		107,12	102,36					

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggunjawab	Ket					
								I	II		III		IV		13		14 = 13/8 x 100%			15 = 13				16=15/6 x100%				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Angka Partisipasi Murni (APM) 7-12 Tahun Jenjang SD/MI (Angka)	99,33		95,83		97,33		95,83		95,83					95,83		98,46		95,83		96,48				
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			758.921.648.898		370.987.485.484		132.806.793.656		-		171.748.250					171.748.250	1,82	0,13		171.748.250	0,7	0,02			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang dikelola Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	10		17		6		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	10		60		2		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	9		16		5		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	50		215		21		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	8		9		4		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		7		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		7		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		7		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	5		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	50		100		205		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	2		7		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1500		1.500		500		0		150					150		30		150		10				
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	10		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	100		0		200		0		20					20		10		20		20				
				Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	240		238		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	240		238		240		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	240		0		240		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	10		0		3		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		0		0		0					0		0		0		0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket					
								I		II		III		IV			14 = 13/8 x 100%			15 = 13				16=15/6 x100%				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	5		0		0		0		0				0		0		0		0		0			
				Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi (Orang)	30		0		0		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	100		0		0		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		0		0		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	476		0		0		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	3		0		1		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	3		1		1		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	2		0		1		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1		0		0		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	3		0		1		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	14		0		0		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	20		63		300		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	25		21		5		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	20		54		7		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		0		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	4		0		450		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	240		0		240		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15		30		2		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		0		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	12000		12.300		12300		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	5		22		0		0		0				0		0		0		0					
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				37.781.696.943		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0					
	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0		0				0		0		0		0					
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				24.752.702.500		1.943.110.177		1.980.000.000		-		-				-	0	0		-	0	0					
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	10		17		6		0		0		0				0		0		0		0					

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
		1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		24.752.702.500		6.517.425.455		800.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	10	60	2		0		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		21.709.961.500		1.031.200.078		1.340.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	9	16	5		0		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		43.419.923.000		25.926.196.230		3.560.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	50	215	21		0		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		21.709.961.500		3.080.874.387		800.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	8	9	4		0		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		5.050.951.000		722.143.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	7	0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		5.050.951.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	0	0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		5.050.951.000		179.403.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	7	0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		5.050.951.000		664.546.100		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5	7	0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah		22.212.014.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	5	0	0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		1.132.748.264		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	1	0	0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		10.101.902.000		77.126.341.001		8.750.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	50	100	205		0		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		3.325.306.400		248.226.800		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	2	7	0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		5.050.951.000		744.982.400		300.000.000		-		161.749.000						161.749.000	30	53,92		161.749.000	10	3,2			
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1500	1.500	500		0		150							150		30		150		10				
		1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		2.726.296.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	10	0	0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		2.729.164.949		-		1.300.000.000		-		9.999.250						9.999.250	10	0,77		9.999.250	20	0,37			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
								I		II		III		IV														
								9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%								15 = 13		16=15/6 x100%
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	100		0		200		0		20						20		10		20		20			
		1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			10.519.865.829		1.999.985.000		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	240		238		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			-		57.969.581.140		58.785.560.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	240		238		240		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			5.259.932.914		-		1.906.000.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	240		0		240		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			21.709.961.500		-		450.000.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	10		0		3		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar			5.259.932.914		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah			5.259.932.914		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar			1.826.436.041		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi (Orang)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			6.088.120.144		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			3.957.278.175		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			4.870.496.113		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	476		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			6.088.120.141		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			12.176.240.283		1.399.000.000		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	3		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			4.870.496.110		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket						
								I		II		III		IV					14 = 13/8 x 100%				15 = 13		16=15/6 x100%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
		1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK		6.088.120.141		-		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1	0	0	0	0	0	0				0			0		0	0		0					
		1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		6.696.932.157		-		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	3	0	1	0	0	0	0				0			0		0		0		0				
		1.01.02.2.01.0044	Penataan Ruang/Sudut Baca		6.088.120.141		-		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	14	0	0	0	0	0	0				0			0		0		0		0				
		1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		26.299.664.573		29.283.300.240		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	20	63	300	0	0	0	0				0			0		0		0		0				
		1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		35.673.674.805		111.391.859.070		20.921.233.656		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	25	21	5	0	0	0	0							0		0		0		0				
		1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru		152.060.363.548		23.530.558.406		3.000.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	20	54	7	0	0	0	0							0		0		0		0				
		1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		10.519.865.829		-		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5	0	0	0	0	0	0							0		0		0		0				
		1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		17.388.394.882		-		2.460.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	4	0	450	0	0	0	0							0		0		0		0				
		1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		6.924.741.797		-		1.884.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	240	0	240	0		0	0							0		0		0		0				
		1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		17.388.394.701		3.415.443.000		1.220.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15	30	2	0		0	0							0		0		0		0				
		1.01.02.2.01.0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus		6.088.120.141		-		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	2	0	0	0		0	0							0		0		0		0				
		1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		122.429.509.305		23.433.850.000		23.350.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	12000	12.300	12300	0		0	0							0		0		0		0				
		1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		15.779.798.744		379.460.000		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0			
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	5	22	0	0		0	0							0		0		0		0				
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		738.998.877.304		417.498.674.159		119.664.425.000		825.408.807		193.668.877						1.019.077.684	4,51	0,85			1.019.077.684	0,71	0,14		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang dikelola Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	2	0	0	0		0	0							0		0		0		0				
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	21	5	2	0	0		0	0						0		0		0		0				
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	3	2	3	0	0		0	0						0		0		0		0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket					
								I	II		III		IV		14 = 13/8 x 100%		15 = 13	16=15/6 x100%										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		K	%	K	Rp	K	%	17	18
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	24		1		1		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	5		1		1		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	4		4		1		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5		7		2		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	3		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2		1		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	100		15		26		1		3					4		15,38		4		4				
				Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	50		2		1		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	10		1		1		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	7000		4.788		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	6		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	25		1.810		74		0		3					3		4,05		3		12				
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	20		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	6000		4.000		3000		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1250		1.500		1000		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	50		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	300		0		200		0		10					10		5		10		3,33				
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	94		92		94		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	94		92		94		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	200		300		200		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi (Orang)	110		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	94		90		100		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket																							
								I		II		III		IV																														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18																
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%																		
				Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	120		0		100		0		0						0		0		0		0																			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	15		3		1		0		0						0		0		0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		4		1		0		0						0		0		0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	10		2		1		1		0						1		100		1		10																			
				Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	2		0		1		0		0						0		0		0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	470		0		94		0		0						0		0		0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	11		18		6		0		0						0		0		0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	94		0		100		0		0						0		0		0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	5000		5.000		0		0		0						0		0		0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	30000		18.700		7500		100		40						140		1,87		140		0,47																			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	5		812		3		0		0						0		0		0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1		0		1		0		0						0		0		0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			64.799.187.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0																			
			Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	2		0		0		0		0					0			0		0		0																			
		1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			42.381.287.000		9.820.031.019		3.491.415.725		3.777.125		-				3.777.125	0	0,11		3.777.125	0	0,01																				
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	21		5		2		0		0					0			0		0		0																			
		1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			8.580.531.500		1.513.401.046		292.541.600		-		-				-	0	0		-	0	0																				
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	3		2		3		0		0					0			0		0		0																			
		1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			5.516.420.000		3.200.343.199		400.000.000		5.068.625		-				5.068.625	0	1,27		5.068.625	0	0,09																				
			Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	24		1		1		0		0					0			0		0		0																			
		1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium			20.165.047.955		5.768.220.772		800.000.000		-		-				-	0	0		-	0	0																				
			Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	5		1		1		0		0					0			0		0		0																			
		1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula			36.955.429.925		6.666.801.451		793.421.776		-		-				-	0	0		-	0	0																				
			Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	4		4		1		0		0					0			0		0		0																			
		1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			9.480.060.977		3.480.554.091		994.340.250		-		-				-	0	0		-	0	0																				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
								I		II		III		IV														
								9		10		11		12														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5		7		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir			2.016.504.795		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah			2.016.504.795		1.891.107.705		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2		1		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			100.742.291.820		49.223.638.952		10.899.864.150		84.213.074		107.385.572						191.598.646	15,38	1,76		191.598.646	4	0,19		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	100		15		26		1		3						4		15,38		4		4			
		1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			18.264.360.430		1.946.962.100		988.963.000		8.866.250		-						8.866.250	0	0,9		8.866.250	0	0,05		
			Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	50		2		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			6.088.120.141		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			20.165.047.955		395.221.200		400.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	10		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah			31.251.676.932		25.581.233.154		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	7000		4.788		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			3.695.542.992		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			12.176.240.285		117.366.378.906		22.340.602.995		47.093.883		15.379.600						62.473.483	4,05	0,28		62.473.483	12	0,51		
			Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	25		1.810		74		0		3						3		4,05		3		12			
		1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			12.176.240.285		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			57.837.141.369		9.582.500.000		9.950.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	6000		4.000		3000		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			6.088.120.141		1.152.035.420		950.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1250		1.500		1000		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			3.652.872.082		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			3.652.872.082		-		1.300.000.000		-		26.923.705						26.923.705	5	2,07		26.923.705	3,33	0,74		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	300		0		200		0		10						10		5		10		3,33			
		1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			6.088.120.141		693.824.000		500.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
								9	10	11	12	13	14 = 13/8 x 100%		15 = 13							16=15/6 x100%						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		K	%	K	Rp	K	%	17	18
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	94		92		94		0		0				0		0		0		0					
		1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			-		25.131.622.908		26.393.900.000		-		-				-		-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	94		92		94		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			6.088.120.141		1.400.000.000		800.000.000		-		-				-		-	0	0		-	0	0		
			Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	200		300		200		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.02.0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama			1.826.436.041		-		-		-		-				-		-	0	0		-	0	0		
			Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi (Orang)	110		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			1.826.436.041		316.000.000		400.000.000		-		-				-		-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	94		90		100		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			3.044.060.069		-		-		-		-				-		-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			3.044.060.069		-		400.000.000		-		-				-		-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	120		0		100		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			6.088.120.141		447.145.318		400.000.000		94.729.850		28.830.000				123.559.850		0	30,89		123.559.850	0	2,03			
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	15		3		1		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			12.176.240.285		1.662.880.000		600.000.000		-		-				-		-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		4		1		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			1.217.624.025		749.377.900		552.000.000		552.000.000		-				552.000.000		100	100		552.000.000	10	45,33			
			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	10		2		1		1		0					1		100		1		10				
		1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			12.176.240.285		-		300.000.000		-		-				-		-	0	0		-	0	0		
			Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	2		0		1		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.02.0056	Penataan Ruang/Sudut Baca			6.088.120.141		-		-		-		-				-		-	0	0		-	0	0		
			Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			4.870.496.109		-		500.000.000		5.000.000		-				5.000.000		0	1		5.000.000	0	0,1			
			Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	470		0		94		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru			48.704.961.150		47.294.425.411		9.675.692.700		-		-				-		-	0	0		-	0	0		
			Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	11		18		6		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			12.176.240.285		-		400.000.000		-		-				-		-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket						
								I		II		III		IV			13			14 = 13/8 x 100%				15 = 13		16=15/6 x100%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%			
			Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	94		0		100		0		0				0		0		0		0		0				
		1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			12.176.240.285		16.220.852.000		-		-		-				-		-	0	0		-	0	0			
			Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	5000		5.000		0		0		0				0		0		0		0		0				
		1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			90.746.989.514		62.384.121.780		20.535.291.250		24.660.000		15.150.000				39.810.000		1,87	0,19		39.810.000	0,47	0,04				
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	30000		18.700		7500		100		40				140		1,87		140		0,47						
		1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			12.176.240.285		-		-		-		-				-		-	0	0		-	0	0			
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		0		0		0				0		0		0		0		0				
		1.01.02.2.02.0065	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus			6.088.120.141		-		-		-		-				-		-	0	0		-	0	0			
			Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		0		0		0				0		0		0		0		0				
		1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			6.088.120.141		23.609.995.827		2.000.000.000		-		-				-		-	0	0		-	0	0			
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	5		812		3		0		0				0		0		0		0		0				
		1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK			18.606.391.554		-		2.606.391.554		-		-				-		-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1		0		1		0		0				0		0		0		0		0				
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			482.690.333.473		171.913.527.615		66.812.506.344		-		91.804.335				91.804.335		0	0,14		91.804.335	0	0,02				
			Jumlah Satuan Pendidikan yang dikelola Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	345		17		22		0		0					0		0		0		0		0			
		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)		300	3.346		3		0		0		0					0		0									
		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)		290	24		17		0		0		0					0		0									
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)		2600	14.500		5000		0		0		0					0		0									
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)		10	0		0		0		0		0					0		0									
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)		50	0		200		0		0		0					0		0									
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)		355	341		100		0		0		0					0		0									
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)		345	345		343		0		0		0					0		0									
		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)		345	0		0		0		0		0					0		0									
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)		100	0		0		0		0		0					0		0									
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)		5	0		0		0		0		0					0		0									
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)		5	0		100		0		0		0					0		0									

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	8		1		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	24		12		33		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	16500		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	330		345		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	16750		23.055		6		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	30		4		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	150		3.709		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	16750		0		341		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	35		4		4		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			59.853.389.844		30.620.863.078		4.400.000.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	345		17		22		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD			12.176.240.285		1.194.885.000		2.200.000.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	300		3.346		3		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD			30.440.600.717		29.333.688.482		800.000.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	290		24		17		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			18.264.360.430		3.333.840.000		3.600.000.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	2600		14.500		5000		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			3.652.872.082		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			15.220.300.357		-		1.300.000.000		-		-					-		0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	50		0		200		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			12.176.240.285		1.519.783.784		1.200.000.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	355		341		100		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD			-		9.824.635.107		10.225.240.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	345		345		343		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			12.176.240.287		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	345		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			6.088.120.141		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			6.088.120.141		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			6.088.120.141		-		500.000.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	5		0		100		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			6.088.120.141		-		2.000.000.000		-		91.804.335					91.804.335		0	4,59		91.804.335	0	1,51		
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			18.264.360.430		1.188.084.744		500.000.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan (Dokumen)	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			12.176.240.285		3.242.967.700		1.200.000.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun (Ruang)	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	8		1		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			5.479.308.128		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru			60.881.201.440		22.991.077.496		17.800.000.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	24		12		33		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			12.176.240.285		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Perpustakaan Sekolah yang terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik			9.132.180.214		32.211.297		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	16500		1		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula			12.176.240.285		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	50		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			12.176.240.285		750.000.000		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	330		345		0		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			18.264.360.430		69.084.000		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		1		1		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			45.373.494.762		42.728.181.910		18.637.266.344		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	16750		23.055		6		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.03.0044	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus			-		-		450.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	0		0		1		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			18.264.360.430		743.256.736		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	30		4		0		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			30.440.600.717		21.554.566.721		400.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	150		3.709		3		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			9.132.180.214		-		1.000.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	16750		0		341		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			30.440.600.717		2.786.401.560		600.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	35		4		4		0		0					0		0		0		0				
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			288.964.510.672		26.499.293.603		14.656.700.000		-		53.170.715					53.170.715	0	0,36		53.170.715	0	0,02			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang di kelola Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	2750		5.000		1000		0		0					0		0		0		0		0		
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	10		0		0		0		0					0										
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	50		0		200		0		0					0										
				Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	19		0		18		0		0					0										
				Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	19		19		18		0		0					0										
				Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	19		0		0		0		0					0										
				Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		0		0		0		0					0										

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket																									
								I		II		III		IV					14 = 13/8 x 100%				16=15/6 x100%																								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18																			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp			K	%																	
				Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1		0		100		0		0					0		0		0		0																							
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	5		1		2		0		0					0		0		0		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	5		0		1		0		0					0		0		0		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		0		0		0		0					0		0		0		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		0		0		0		0					0		0		0		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	500		0		1		0		0					0		0		0		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	3000		0		0		0		0					0		0		0		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	18		0		0		0		0					0		0		0		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	18		9		2		0		0					0		0		0		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	14		4		1		0		0					0		0		0		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		0		0		0					0		0		0		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1		0		100		0		0					0		0		0		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0					0		0		0		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	2800		0		1000		0		0					0		0		0		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0		0		0					0		0		0		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	8		0		0		0		0					0		0		0		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	7		0		0		0		0					0		0		0		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	7		7		2		0		0					0		0		0		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	41		0		0		0		0					0		0		0		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	7		0		3		0		0					0		0		0		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.01.02.2.04.0010		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		21.308.420.501		1.400.000.000		1.400.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0																							
			Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	2750		5.000		1000		0		0					0			0		0																								
	1.01.02.2.04.0014		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1.826.436.041		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0																							
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	10		0		0		0		0					0			0		0																								

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket									
								I		II		III		IV																
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%				
		1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			9.132.180.214			-			1.300.000.000			-			-			-	0	0			-	0	0		
			Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	50		0			200			0		0				0			0		0		0				
		1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			9.132.180.214			-			900.000.000			-			-			-	0	0			-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	19		0			18			0		0				0			0		0		0				
		1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			-			2.778.901.600			3.856.700.000			-			-			-	0	0			-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	19		19			18			0		0				0			0		0		0				
		1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			6.088.120.141			-			-			-			-			-	0	0			-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	19		0			0			0		0				0			0		0		0				
		1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			3.044.060.069			-			-			-			-			-	0	0			-	0	0		
			Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		0			0			0		0				0			0		0		0				
		1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			3.652.872.082			-			500.000.000			-			-			-	0	0			-	0	0		
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1		0			100			0		0				0			0		0		0				
		1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			6.088.120.141			1.137.070.000			1.200.000.000			-			41.670.715			41.670.715	0	3,47			41.670.715	0	0,68		
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	5		1			2			0		0				0			0		0		0				
		1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			12.176.240.285			-			500.000.000			-			-			-	0	0			-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	5		0			1			0		0				0			0		0		0				
		1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			6.088.120.141			-			-			-			-			-	0	0			-	0	0		
			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		0			0			0		0				0			0		0		0				
		1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			12.176.240.285			-			-			-			-			-	0	0			-	0	0		
			Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		0			0			0		0				0			0		0		0				
		1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			35.280.121.070			-			-			-			-			-	0	0			-	0	0		
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	500		0			1			0		0				0			0		0		0				
		1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			6.088.120.141			-			-			-			-			-	0	0			-	0	0		
			Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	3000		0			0			0		0				0			0		0		0				
		1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			12.176.240.285			-			-			-			-			-	0	0			-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	18		0			0			0		0				0			0		0		0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket				
								I		II		III		IV			13		15 = 13		16=15/6 x100%							
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	%	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru			12.176.240.287		19.930.361.024		2.200.000.000		-		9.150.000					9.150.000	0	0,42		9.150.000	0	0,08			
			Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	18		9		2		0		0				0		0		0		0					
		1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			1.217.624.025		567.436.000		200.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	14		4		1		0		0				0		0		0		0					
		1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			6.088.120.143		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		0		0		0				0		0		0		0					
		1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			12.176.240.285		-		1.000.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1		0		100		0		0				0		0		0		0					
		1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			18.264.360.430		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0				0		0		0		0					
		1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			3.044.060.069		-		1.000.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	2800		0		1000		0		0				0		0		0		0					
		1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium			10.654.210.248		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0		0		0				0		0		0		0					
		1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah			6.088.120.141		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	8		0		0		0		0				0		0		0		0					
		1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			3.044.060.069		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	7		0		0		0		0				0		0		0		0					
		1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal			30.440.600.717		685.524.979		400.000.000		-		2.350.000					2.350.000	0	0,59		2.350.000	0	0,01			
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	7		7		2		0		0				0		0		0		0					
		1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan			28.353.582.339		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	41		0		0		0		0				0		0		0		0					
		1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			13.159.820.309		-		200.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	7		0		3		0		0				0		0		0		0					
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			1.238.650.158		-		5.000.000.000		578.500.000		12.210.000					590.710.000	19,7	11,81		590.710.000	8	47,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			MENINGKATNYA KUALITAS KURIKULUM PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100		100		100		100		100					100		100		100		100				
		1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			1.238.650.158		-		5.000.000.000		578.500.000		12.210.000					590.710.000	19,7	11,81		590.710.000	8	47,69			
			Jumlah Laporan untuk Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar.	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	250		0		203		35		5				40		19,7		40		16					
				Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	1		0		0		0		0				0		0		0		0					
		1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			-		-		5.000.000.000		578.500.000		12.210.000					590.710.000	19,7	11,81		590.710.000	16	0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
								I		II		III		IV														
								9	10	11	12	13	14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%											
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	17	18
			Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	250		0		203		35		5				40		19,7		40		16					
		1.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar			1.238.650.158		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	1		0		0		0		0				0		0		0		0					
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			296.641.928.885		74.313.073.987		75.388.400.000		11.674.950.000		17.691.941.500				29.366.891.500	20,83	38,95		29.366.891.500	50	9,9		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			MENINGKATNYA MUTU DAN DISTRIBUSI PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. (Persentase)	100		100		100		100		100				100		100		100		100					
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			296.641.928.885		74.313.073.987		75.388.400.000		11.674.950.000		17.691.941.500				29.366.891.500	20,83	38,95		29.366.891.500	50	9,9				
			Jumlah Laporan untuk Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1		19		12		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	5		2		12		3		2				5		41,67		5		100					
		1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			36.000.000.000		9.062.458.387		6.366.500.000		-		162.641.500				162.641.500	0	2,55		162.641.500	0	0,45				
			Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1		19		12		0		0				0		0		0		0					
		1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			260.641.928.885		65.250.615.600		69.021.900.000		11.674.950.000		17.529.300.000				29.204.250.000	41,67	42,31		29.204.250.000	100	11,2				
			Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	5		2		12		3		2				5		41,67		5		100					
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			6.355.251.888		7.987.832.465		7.700.000.000		55.175.000		44.821.386				99.996.386	8,1	1,3		99.996.386	1,16	1,57		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	50		50		30		30		30				30		100		30		60					
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.625.000.000		152.065.137		650.000.000		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	14		4		6		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	35		50		0		0		0				0		0		0		0					
		2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			1.250.000.000		52.489.624		650.000.000		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	14		4		6		0		0				0		0		0		0					
		2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			375.000.000		99.575.513		-		-		-				-	0	0		-	0	0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	35		50		0		0		0					0		0		0		0				
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.000.000.000		620.856.190		3.750.000.000		7.280.000		38.871.386					46.151.386	10	1,23			46.151.386	1,11	2,31		
			Jumlah Laporan Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	30		3		10		0		1					1		10		1			3,33			
				Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	1		1		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	50		50		0		0		0					0		0		0		0				
		2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			375.000.000		98.922.635		3.750.000.000		7.280.000		38.871.386					46.151.386	10	1,23			46.151.386	3,33	12,31		
			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	30		3		10		0		1					1		10		1			3,33			
		2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			375.000.000		24.097.450		-		-		-					-	0	0			-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	1		1		0		0		0					0		0		0		0				
		2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			1.250.000.000		497.836.105		-		-		-					-	0	0			-	0	0		
			Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	50		50		0		0		0					0		0		0		0				
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.730.251.888		7.214.911.138		3.300.000.000		47.895.000		5.950.000					53.845.000	14,29	1,63			53.845.000	2,38	1,97		
			Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	20		100		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	21		30		7		0		1					1		14,29		1		4,76				
		2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat			750.000.000		4.018.880.502		-		-		-					-	0	0			-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	20		100		0		0		0					0		0		0		0				
		2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat			1.980.251.888		3.196.030.636		3.300.000.000		47.895.000		5.950.000					53.845.000	14,29	1,63			53.845.000	4,76	2,72		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	21		30		7		0		1					1		14,29		1		4,76				
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			208.575.814.273		87.937.002.715		58.850.000.000		61.029.123		307.398.125					368.427.248	0,15	0,63			368.427.248	0,07	0,18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
			MENINGKATNYA PEMBUDAYAAN DAN PRESTASI OLAHRAGA	Cakupan Pembinaan Olahraga (%)	329,99		0		58,33		80		80					160		274,3		160		48,49				
				Persentase Atlet yang Berasal Dari Kab/ Kota yang Masuk Pelatda (%)	76,8		0		13,60		0		0					0		0		0		0				
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			59.670.511.531		30.528.895.135		6.700.000.000		49.029.123		24.976.000					74.005.123	0	1,1			74.005.123	0	0,12		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	45		686		55		0		0					0		0		0		0				
		2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota			9.000.000.000		28.388.861.135		5.800.000.000		49.029.123		9.416.000					58.445.123	0	1,01			58.445.123	0	0,65		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	45		686		55		0		0					0		0		0		0				
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen)	7		2		1		0		0					0		0		0		0				
		2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar			4.272.000.827		2.140.034.000			-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen)	7		2		1		0		0					0		0		0		0				
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota (Unit)	5		0		2		0		0					0		0		0		0				
		2.19.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota				46.398.510.704		-		500.000.000		-		15.560.000				15.560.000	0	3,11		15.560.000	0	0,03			
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota (Unit)	5		0		2		0		0					0		0		0		0				
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				70.755.302.742		9.363.481.600		36.650.000.000		-		63.992.125				63.992.125	0	0,17		63.992.125	0	0,09			
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	33		20		2		0		0					0		0		0		0				
		2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				7.707.709.433		8.274.352.170		3.500.000.000		-		3.531.125				3.531.125	0	0,1		3.531.125	0	0,05			
			Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	33		20		2		0		0					0		0		0		0				
			Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga tingkat kabupaten/kota (Kegiatan)	9		0		1		0		0					0		0		0		0				
		2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota				1.850.000.000		-		150.000.000		-		-				-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan)	9		0		1		0		0					0		0		0		0				
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	2850		120		1500		0		0					0		0		0		0				
		2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				61.197.593.309		1.089.129.430		33.000.000.000		-		60.461.000				60.461.000	0	0,18		60.461.000	0	0,1			
			Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	2850		120		1500		0		0					0		0		0		0				
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				49.350.000.000		41.348.842.480		4.000.000.000		-		-				-	0	0		-	0	0			
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	3250		0		500		0		0					0		0		0		0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
		2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah			5.800.000.000		-		700.000.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	3250		0		500		0		0						0		0		0		0			
			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	493		0		15		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga			30.350.000.000		-		350.000.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	493		0		15		0		0						0		0		0		0			
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	10		4		4		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)			5.400.000.000		677.314.480		500.000.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	10		4		4		0		0						0		0		0		0			
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	830		226		500		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota			7.300.000.000		40.671.528.000		2.200.000.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	830		226		500		0		0						0		0		0		0			
			Tersedianya Pembentukan dan penyediaan sistem data keolahragaan terpadu di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota			500.000.000		-		250.000.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			9.200.000.000		-		10.000.000.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	18		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait			9.200.000.000		-		10.000.000.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	18		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			19.600.000.000		6.695.783.500		1.500.000.000		12.000.000		218.430.000					230.430.000		0,5	15,36		230.430.000	0,25	1,18		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	19		2		2		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			4.100.000.000		1.849.352.000		400.000.000		-		200.000.000					200.000.000		0	50		200.000.000	0	4,88		
			Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	19		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	19		8		2		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan			4.100.000.000		3.849.770.000		200.000.000		-		18.430.000					18.430.000		0	9,22		18.430.000	0	0,45		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket					
								I		II		III		IV			13			14 = 13/8 x 100%				15 = 13		16=15/6 x100%		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Terlaksananya Pengembangan Olahrga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahrga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	19		8		2		0		0					0		0		0		0				
			Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Olahrga tradisional di masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahrga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	13		0		1		0		0					0		0		0		0				
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahrga Tradisional dalam Masyarakat				3.200.000.000		-		100.000.000		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Pemanfaatan Olahrga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahrga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	13		0		1		0		0					0		0		0		0				
			Jumlah Prasarana dan Sarana Olahrga Rekreasi Kabupaten/Kota yang tersedia dan termanfaatkan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	20		0		10		0,25		0					0,25		2,5		0,25		1,25				
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahrga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan				4.300.000.000		-		200.000.000		12.000.000		-					12.000.000	2,5	6		12.000.000	1,25	0,28			
			Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	20		0		10		0,25		0					0,25		2,5		0,25		1,25				
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahrga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahrga Rekreasi (Lembaga)	18		8		1		0		0					0		0		0		0				
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahrga dan penyelenggaraan festival Olahrga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional				3.900.000.000		996.661.500		600.000.000		-		-				-	0	0		-	0	0				
		Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahrga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahrga Rekreasi (Lembaga)	18		8		1		0		0					0		0		0		0					
7	Meningkatkan kinerja dan daya saing industri pengolahan					12.767.827.221		2.709.813.137		900.000.000		-		-				-	0	0		-	0	0				
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				9.514.906.683		2.659.840.023		900.000.000		-		-				-	0	0		-	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
		MENINGKATNYA REALISASI PEMBANGUNAN INDUSTRI	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	97,5		0	97,11		0	96,14							96,14		99		96,14		98,61					
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				9.514.906.683		2.659.840.023		900.000.000		-		-				-	0	0		-	0	0				
		Jumlah Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi)			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
		3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		1.514.742.411		624.276.135		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0			
			Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
		3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		2.378.726.672		-		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0			
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1.141.788.801		-		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0			
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Prasarana Industri	Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1.712.683.202		49.248.904		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
		3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Peran Serta Masyarakat	Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1.815.474.928		1.986.314.984		900.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota		751.490.669		-		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.31.02.2.01.0010	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri		200.000.000		-		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0			
			Tersusunnya rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			3.252.920.538		49.973.114		-		-		-		-			-	0	0		-	0	0		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			MENINGKATNYA KUALITAS PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN	persentase kepatuhan berusaha (Persentase)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		3.252.920.538		49.973.114		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0			
			Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
		3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		3.252.920.538		49.973.114		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket					
								I		II		III		IV			14 = 13/8 x 100%			15 = 13				16=15/6 x100%				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%	15 = 13	16=15/6 x100%		17	18		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	%			K	Rp
			Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1		1		0		0		0					0		0		0						
8	Meningkatnya ketahanan pangan					111.211.202.357		3.649.510.992		400.000.000		-		118.224.500						118.224.500	4,25	29,56		118.224.500	0,05	0,11		
	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				55.380.292.046		1.428.622.526		30.000.000		-		11.291.000						11.291.000	0	37,64		11.291.000	0	0,02	Dinas Ketahanan Pangan	
			MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	94,22		110,23		81,00		106,14		103,26						103,26		127,48		103,26		109,59			
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				55.380.292.046		1.428.622.526		30.000.000		-		11.291.000						11.291.000	0	37,64		11.291.000	0	0,02		
		Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	10		1		0		0		0						0		0		0		0		0		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	5		1		0		0		0																
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	13		0		0		0		0		0														
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				51.280.292.046		1.381.482.630		30.000.000		-		11.291.000						11.291.000	0	37,64		11.291.000	0	0,02		
			Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	10		1		0		0		0						0		0		0		0			
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik				1.000.000.000		47.139.896		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	5		1		0				0						0		0		0		0			
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				3.100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	13		0		0				0						0		0		0		0			
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				43.820.027.051		1.481.988.983		230.000.000		-		70.098.100						70.098.100	5,85	30,48		70.098.100	0,09	0,16	Dinas Ketahanan Pangan	
			MENINGKATNYA DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	100		90,29		91,20				90,29		90,29				90,29		99		90,29		90,29			
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				24.744.027.051		861.800.087		75.000.000		-		25.285.800						25.285.800	0	33,71		25.285.800	0	0,1		
		Terselenggaranya Kegiatan Penyaluran dan Penyediaan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	80		0		0					0						0		0		0		0			
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	1		1		1		0		0							0		0		0		0			
			Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	1		1		0				0							0		0		0		0			
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		1		0		0							0		0		0		0			
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)		1		1		1		0		0							0		0		0		0				
	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)		1		0		0				0							0		0		0		0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
		2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		4.200.000.000		13.562.836		-		-		-					-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	80	0	0				0						0		0		0		0					
		2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota		9.194.027.051		12.855.000		20.000.000		-		6.530.000					6.530.000	0	32,65		6.530.000	0	0,07				
			Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	1	1	1			0		0					0		0		0		0					
		2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		4.450.000.000		466.562.450		-		-		-					-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	1	1	0				0						0		0		0		0					
		2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota		3.950.000.000		315.785.779		25.000.000		-		13.860.800					13.860.800	0	55,44		13.860.800	0	0,35				
			Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	1			0		0					0		0		0		0					
		2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		1.750.000.000		53.034.022		30.000.000		-		4.895.000					4.895.000	0	16,32		4.895.000	0	0,28				
			Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1	1	1			0		0					0		0		0		0					
		2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota		1.200.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0				
			Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	0				0						0		0		0		0					
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		10.226.000.000		318.096.303		55.000.000		-		33.141.300					33.141.300	23,4	60,26		33.141.300	0,52	0,32				
			Terkelolahnya Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	420	85,98	81		0		0						0		0		0		0					
				Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	225	17,8	5		0		2,34						2,34		46,8		2,34		1,04					
		2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		5.976.000.000		47.844.412		5.000.000		-		2.054.100					2.054.100	0	41,08		2.054.100	0	0,03				
			Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	420	85,98	81		0		0						0		0		0		0					
		2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota		4.250.000.000		270.251.891		50.000.000		-		31.087.200					31.087.200	46,8	62,17		31.087.200	1,04	0,73				
			Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	225	17,8	5		0		2,34						2,34		46,8		2,34		1,04					
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		8.850.000.000		302.092.593		100.000.000		-		11.671.000					11.671.000	0	11,67		11.671.000	0	0,13				
			Tercapainya Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	1	1		0		0						0		0		0		0					
				Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	1	1		0		0						0		0		0		0					
				Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	1	0	1		0		0						0		0		0		0		0			
		2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		1.250.000.000		79.362.002		20.000.000		-		4.785.500					4.785.500	0	23,93		4.785.500	0	0,38				
			Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	1	1		0		0						0		0		0		0					
		2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		4.200.000.000		222.730.591		50.000.000		-		5.927.000					5.927.000	0	11,85		5.927.000	0	0,14				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket					
								I		II		III		IV			13			14 = 13/8 x 100%				15 = 13		16=15/6 x100%		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0					
		2.09.03.2.04.0005	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		3.400.000.000		-		30.000.000		-		958.500						958.500	0	3,2		958.500	0	0,03		
			Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0					
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			5.819.600.039		393.668.862		40.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0	Dinas Ketahanan Pangan		
			MENINGKATNYA PENANGNAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	8		12,76		12,00		9,22		9,22						9,22		123,17		9,22		84,75			
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			3.509.600.039		273.087.066		40.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			3.509.600.039		273.087.066		40.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			2.310.000.000		120.581.796		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Tertanganinya Daerah Rawan Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1		1		0				0						0		0		0		0			
				Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0					0					0		0		0		0			
		2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			710.000.000		41.369.320		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1		1		0				0						0		0		0		0			
		2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			1.600.000.000		79.212.476		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0				0						0		0		0		0			
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			6.191.283.221		345.230.621		100.000.000		-		36.835.400					36.835.400	0	36,84		36.835.400	0	0,59	Dinas Ketahanan Pangan		
			MENINGKATNYA PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	99,5		98,51		97,50				98,51						98,51		101,04		98,51		99,01			
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			6.191.283.221		345.230.621		100.000.000		-		36.835.400					36.835.400	0	36,84		36.835.400	0	0,59			
			Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1		1		0				0						0		0		0		0			
		2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			1.891.283.221		70.954.168		25.000.000		-		14.415.700					14.415.700	0	57,66		14.415.700	0	0,76			
			Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			2.550.000.000		175.387.453		75.000.000		-		22.419.700					22.419.700	0	29,89		22.419.700	0	0,88			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			1.750.000.000		98.889.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1		1		0				0						0		0		0		0			
9	Meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender					85.427.974.284		3.592.462.732		12.306.070.009		150.471.395		1.945.873.229					2.096.344.624	10,71	17,04		2.096.344.624	7,81	2,45			
	2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			10.872.151.078		-		1.050.000.000		37.549.910		31.154.825					68.704.735	0	6,54		68.704.735	0	0,63		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			MENINGKATNYA KUALITAS DAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PUG DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	Persentase ARG (%)	45		0		35		26,02		0					0		0		0		0				
	2.08.02.2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			4.346.107.850		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	5		0		0		0		0					0		0		0		0		0		
				jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	50		0		0		0		0					0		0		0		0		0		
				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	5		0		0		0		0					0		0		0		0		0		
				Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	22		0		0		0		0					0		0		0		0		0		
				jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	100		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0	
	2.08.02.2.01.0007		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			750.084.555		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	5		0		0		0		0					0		0		0		0		0		
	2.08.02.2.01.0011		Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			750.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	50		0		0		0		0					0		0		0		0		0		
	2.08.02.2.01.0012		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota			500.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	5		0		0		0		0					0		0		0		0		0		
	2.08.02.2.01.0013		Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota			846.023.295		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	22		0		0		0		0					0		0		0		0		0		
	2.08.02.2.01.0014		Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			1.500.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	100		0		0		0		0					0		0		0		0		0		
	2.08.02.2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			4.176.043.228		-		550.000.000		19.320.500		28.334.825					47.655.325	0	8,66		47.655.325	0	1,14			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket					
								I		II		III		IV			13			14 = 13/8 x 100%				15 = 13		16=15/6 x100%		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	50		0		10		0		0				0		0		0		0		0			
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	65		0		5		0		0				0		0		0		0		0			
			jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	60		0		0		0		0				0		0		0		0		0			
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	5		0		0		0		0				0		0		0		0		0			
			jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	250		0		50		0		0				0		0		0		0		0			
			jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	250		0		0		0		0				0		0		0		0		0			
		2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)		500.000.000	-		100.000.000		-		12.731.200					12.731.200	0	12,73			12.731.200	0	2,55			
			Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	50		0		10		0		0				0		0		0		0					
		2.08.02.2.02.0005	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			619.230.676	-		100.000.000		5.740.000		329.025					6.069.025	0	6,07			6.069.025	0	0,98			
			Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	65		0		5		0		0				0		0		0		0					
		2.08.02.2.02.0006	Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)		556.812.552	-		-		-		-					-	0	0			-	0	0			
			Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	60		0		0		0		0				0		0		0		0					
		2.08.02.2.02.0007	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			500.000.000	-		-		-		-					-	0	0			-	0	0			
			Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	5		0		0		0		0				0		0		0		0		0			
		2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			1.000.000.000	-		350.000.000		13.580.500		15.274.600					28.855.100	0	8,24			28.855.100	0	2,89			
			Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	250		0		50		0		0				0		0		0		0		0			
		2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			1.000.000.000	-		-		-		-					-	0	0			-	0	0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	250		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			2.350.000.000		-		500.000.000		18.229.410		2.820.000					21.049.410	0	4,21		21.049.410	0	0,9			
			Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pelatihan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	5		0		1		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	5		0		0		0		0					0		0		0		0				
				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	5		0		0		0		0					0		0		0		0				
				jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	50		0		50		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (Lembaga)	5		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota			500.000.000		-		100.000.000		-		-				-		0	0		-	0	0			
			terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	5		0		1		0		0					0		0		0		0				
		2.08.02.2.03.0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota			500.000.000		-		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	5		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.08.02.2.03.0009	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota			500.000.000		-		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	5		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.08.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi			750.000.000		-		400.000.000		18.229.410		2.820.000				21.049.410	0	5,26		21.049.410	0	2,81				
			terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	50		0		50		0		0					0		0		0		0				
		2.08.02.2.03.0011	mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota.			100.000.000		-		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (Lembaga)	5		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			6.674.261.510		-		262.627.153		19.210.000		57.683.253				76.893.253	8,5	29,28		76.893.253	1,83	1,15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			MENURUNNYA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100		0		100		100		0						100		100		100		100			
	2.08.03.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Perempuan Lingkup Daerah		1.809.033.674	-		62.000.000		-		27.829.330						27.829.330	0	44,89		27.829.330	0	1,54			
			Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	5		0	1	0	0	0	0						0		0		0		0				
		Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		21	0		1	0	0	0	0																	
		Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang)		50	0		0	0	0	0	0																	
		Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)		21	0		3	0	0	0	0																	
	2.08.03.2.01.0003		monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota			250.000.000	-		1.000.000		-		449.798					449.798	0	44,98		449.798	0	0,18				
			Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	5	0	1	0	0	0	0	0						0		0	0	0	0					
	2.08.03.2.01.0004		Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota			500.000.000	-		5.000.000		-		2.203.057					2.203.057	0	44,06		2.203.057	0	0,44				
			Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	21	0	1	0	0	0	0	0						0		0	0	0	0					
	2.08.03.2.01.0005		Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi		559.033.674	-		-		-		-					-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang)	50	0	0	0	0	0	0	0						0		0	0	0	0					
	2.08.03.2.01.0006		Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota			500.000.000	-		56.000.000		-		25.176.475					25.176.475	0	44,96		25.176.475	0	5,04				
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	21	0	3	0	0	0	0	0						0		0	0	0	0					
	2.08.03.2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			3.515.227.836	-		189.627.153		19.210.000		25.605.800					44.815.800	21,25	23,63		44.815.800	4,76	1,27				
			Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pengaduan, pengjangkauan dan rumah perlindungan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	110		0	10	0		4						4		40		4		3,64					
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)		110	0		10	0	0		0						0											
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)		25	0		20	1	4		20						4		16									
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)		120	0		0	0	0		0						0		0									

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	120		0	20		4		1						5		25		5		4,17				
		2.08.03.2.02.0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&			404.591.990	-		1.000.000		-		-					-	40	0		-	3,64	0				
			&Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	110		0	10		0		4					4		40		4		3,64					
		2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			250.000.000	-		5.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0				
			Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang)	110		0	10		0		0					0		0		0		0					
		2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			910.635.846	-		70.000.000		-		-					-	20	0		-	16	0				
			Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	25		0	20		1		4					4		20		4		16					
		2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			1.200.000.000	-		-		-		-					-	0	0		-	0	0				
			Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	120		0	0		0		0					0		0		0		0					
		2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			750.000.000	-		113.627.153		19.210.000		25.605.800					44.815.800	25	39,44		44.815.800	4,17	5,98				
			Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	120		0	20		4		1					5		25		5		4,17					
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.350.000.000	-		11.000.000		-		4.248.123					4.248.123	0	38,62		4.248.123	0	0,31				
			Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi (IKK Output)	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	15		0	1		0		0					0		0		0		0					
				Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan)	5		0	1		0		0		0				0		0		0		0				
				jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	28		0	1		0		0		0				0		0		0		0				
				Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	21		0	0		0		0		0				0		0		0		0		0		
		2.08.03.2.03.0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			500.000.000	-		5.000.000		-		2.109.723					2.109.723	0	42,19		2.109.723	0	0,42				
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	15		0	1		0		0					0		0		0		0					
		2.08.03.2.03.0006	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota			250.000.000	-		1.000.000		-		442.650					442.650	0	44,27		442.650	0	0,18				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
						I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp			K
			Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan provinsi (Laporan)	5		0		1		0		0					0		0		0		0					
		2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			350.000.000		-		5.000.000		-		1.695.750					1.695.750	0	33,92		1.695.750	0	0,48				
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	28		0		1		0		0					0		0		0		0					
		2.08.03.2.03.0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	21		0		0		0		0					0		0		0		0					
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			4.602.312.941		-		850.000.000		17.728.886		17.889.686					35.618.572	0	4,19		35.618.572	0	0,77	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
			MENINGKATNYA KUALITAS KELUARGA DALAM MENDUKUNG KESETARAAN GENDER, PEMENUHAN HAK, SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase Keluarga yang Menerima Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (%)	100		0		100		25		0					0		0		0		0					
		2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.000.000.000		-		75.000.000		-		12.649.686					12.649.686	0	16,87		12.649.686	0	1,26				
			Jumlah Lembaga dan pengambil kebijakan yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	9		0		0		0		0					0		0		0		0					
				Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)	5		0		1		0		0		0				0		0		0		0				
				proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	5		0		0		0		0		0				0		0		0		0				
		2.08.04.2.01.0004	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			500.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	9		0		0		0		0					0		0		0		0					
		2.08.04.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			250.000.000		-		75.000.000		-		12.649.686					12.649.686	0	16,87		12.649.686	0	5,06				
			Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)	5		0		1		0		0					0		0		0		0					
		2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket						
								I		II		III		IV					13				14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8 x 100%	15 = 13	16=15/6 x100%	17	18											
				Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	170		0	0		0		0				0		0		0		0						
		2.08.04.2.03.0003	layanan rujukan bagi keluarga dalam Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	50		0	0		0		0				0		0		0		0		0				
		2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	50		0	0		0		0				0		0		0		0		0				
		2.08.04.2.03.0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling KG dan PA Lingkup	155		0	0		0		0				0		0		0		0		0				
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	67,28		0	63,3		67,39		0				67,39		106,46		67,39		100,16				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah terstandarisasi PHA	300		0	40		0		0				0		0		0		0		0				
		2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2640		0	0		0		0				0		0		0		0		0				
		2.08.06.2.01.0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	140		0	0		0		0				0		0		0		0		0				
		2.08.06.2.01.0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	60		0	0		0		0				0		0		0		0		0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket	
								I		II		III		IV		13		14 = 13/8 x 100%			15 = 13			16=15/6 x100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	%			K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2640		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			2.700.000.000		-			-		-		-				-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	140		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.08.06.2.01.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			850.000.000		-			-		-		-				-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	60		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			9.684.167.879		-			-		-		-				-		0	0		-	0	0		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah terstandarisasi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	1460		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	45		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	70		0		0		0		0						0		0		0		0			
				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	119		0		0		0		0						0		0		0		0			
				jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	55		0		0		0		0						0		0		0		0		0	
		2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			2.650.000.000		-			-		-		-				-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	1460		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.08.06.2.02.0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			1.650.000.000		-			-		-		-				-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	45		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			1.766.157.813		-			-		-		-				-		0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
								1	2	3	4	5	6		7							8		9		10		11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	%	K	%	17	18
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	70		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.08.06.2.02.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			868.010.066	-		-		-		-					-		0	0		-	0	0			
			Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	119		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			2.750.000.000	-		-		-		-					-		0	0		-	0	0			
			Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	55		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			5.818.481.352		353.914.860		309.680.000		2.210.925		65.160.531					67.371.456	2,92	21,76			67.371.456	0,47	1,16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN, EKSPLOITASI, PENELANTARAN, PERKAWINAN DAN PERLAKUAN SALAH LAINNYA TERHADAP ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100		0		100		100		0					100		100		100		100				
		2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Anak yang Melibatkan para Pihak		920.123.913		253.948.320		120.360.000		-		6.200.000					6.200.000	0	5,15			6.200.000	0	0,67		
			Jumlah advokasi,sosialisasi dan kerjasama para pihak dalam upaya pencagahan KIA kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KIA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	42		0		5		0		0		0				0		0		0		0			
		2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota			500.000.000		253.948.320		51.000.000		-		6.200.000					6.200.000	0	12,16			6.200.000	0	1,24		
			terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0		0		0				
		2.08.07.2.01.0010	Peningkatan kapasitas kepada Pencegahan KIA Kewenangan Kabupaten/Kota	SDM yang terkait langsung		420.123.913	-		69.360.000		-		-					-		0	0		-	0	0			
			Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KIA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KIA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	42		0		5		0		0					0		0		0		0				
		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.898.357.439		-		153.320.000		-		48.390.000					48.390.000	8,75	31,56			48.390.000	1,11	1,67		
			Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	250		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	230		0		40		0		2					2		5		2		0,87				
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	250		0		50		0		0					0		0		0		0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penangggungjawab	Ket								
								I		II		III		IV															
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp			K
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		0		0		0					0		0		0		0					
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	260		0		50		11		4					15		30		15		5,77					
				Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		5		0		0					0		0		0		0					
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		835.117.106		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0							
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		0		0		0					0		0		0		0						
	2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		250.000.000		-		25.000.000		-		3.600.000					3.600.000	5	14,4		3.600.000	0,87	1,44						
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	230		0		40		0		2					2		5		2		0,87						
	2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		250.000.000		-		5.000.000		-		-		-		-	0	0		-	0	0							
		layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	250		0		50		0		0					0		0		0		0						
	2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		500.000.000		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0							
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		0		0		0					0		0		0		0						
	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		813.240.333		-		118.320.000		-		44.790.000					44.790.000	30	37,85		44.790.000	5,77	5,51						
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	260		0		50		11		4					15		30		15		5,77						
	2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		250.000.000		-		5.000.000		-		-		-		-	0	0		-	0	0							
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		5		0		0					0		0		0		0						
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.000.000.000		99.966.540		36.000.000		2.210.925		10.570.531					12.781.456	0	35,5		12.781.456	0	0,64						
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	5		1		1		0		0				0		0		0		0		0					
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	5		0		1		0		0				0		0											
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	5		0		1		0		0				0		0											

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
				Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	80		0		1		0				0		0											
				jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	20		0		1		0				0		0											
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota		250.000.000		99.966.540		10.000.000		1.073.175		2.475.807				3.548.982	0	35,49		3.548.982	0	1,42						
		Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	5	1	1	0	0				0			0		0		0	0								
	2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota		500.000.000		-		5.000.000		-		1.545.747				1.545.747	0	30,91		1.545.747	0	0,31						
		terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	5	0	1	0	0				0			0		0		0	0								
	2.08.07.2.03.0010	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		250.000.000		-		5.000.000		-		1.497.525				1.497.525	0	29,95		1.497.525	0	0,6						
		terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	5	0	1	0	0				0			0		0		0	0								
	2.08.07.2.03.0012	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		250.000.000		-		6.000.000		1.137.750		1.462.901				2.600.651	0	43,34		2.600.651	0	1,04						
		terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	0	1	0	0				0			0		0		0	0								
	2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai		500.000.000		-		5.000.000		-		1.945.195				1.945.195	0	38,9		1.945.195	0	0,39						
		terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	80	0	1	0	0				0			0		0		0	0								
	2.08.07.2.03.0014	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		250.000.000		-		5.000.000		-		1.643.356				1.643.356	0	32,87		1.643.356	0	0,66						
		terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	20	0	1	0	0				0			0		0		0	0								
2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				6.381.374.772		391.220.978		1.151.000.000		-		51.540.273				51.540.273	23,33	4,48		51.540.273	36,19	0,81	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	TERKENDALINYA PERTAMBAHAN JUMLAH PENDUDUK		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19) (%)	12,8		17,4		16		0		12,8				12,8		120		12,8		100						

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Total Fertility Rate (TFR) (Rata-Rata Jumlah Anak)	2,07		2,17		2,08		0		2,07					2,07		100,48		2,07		100				
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			5.000.000.000		-		1.000.000.000		-		28.740.273					28.740.273		20	2,87		28.740.273	8,57	0,57		
			Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	35		0		15		0		3					3		20		3		8,57				
		2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal			5.000.000.000		-		1.000.000.000		-		28.740.273					28.740.273		20	2,87		28.740.273	8,57	0,57		
			Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	35		0		15		0		3					3		20		3		8,57				
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1.381.374.772		391.220.978		151.000.000		-		22.800.000					22.800.000		25	15,1		22.800.000	50	1,65		
			Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	1		1		2		0		1					1		50		1		100				
				Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	3		0		2		0		0					0		0		0		0				
		2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			750.000.000		391.220.978		94.600.000		-		22.800.000					22.800.000		50	24,1		22.800.000	100	3,04		
			Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	1		1		2		0		1					1		50		1		100				
		2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			631.374.772		-		56.400.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	3		0		2		0		0					0		0		0		0				
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			18.869.794.841		1.936.316.094		3.374.980.056		-		543.438.750					543.438.750		30,54	16,1		543.438.750	30,54	2,88	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri / IKK (%)	35,8		18,24		22,8		0		20					20		87,72		20		55,87				
				"Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive " (%)	54,6		55,3		53,4		0		30					30		56,18		30		54,95				
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	15,3		17,5		15,9		0		5					5		31,45		5		32,68				
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			5.000.000.000		171.979.742		1.000.000.000		-		92.147.000					92.147.000		33,33	9,21		92.147.000	33,33	1,84		
			Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	3		1		3		0		1					1		33,33		1		33,33				
		2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			5.000.000.000		171.979.742		1.000.000.000		-		92.147.000					92.147.000		33,33	9,21		92.147.000	33,33	1,84		
			Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	3		1		3		0		1					1		33,33		1		33,33				
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			3.406.872.993		856.927.900		587.193.056		-		109.200.000					109.200.000		25	18,6		109.200.000	25	3,21		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket						
								I		II		III		IV					13				14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	19		20		19		0		0				0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	4		0		4		0		2				2		50		2		50					
		2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			1.325.429.937		856.927.900		105.750.000		-		-			-	0	0		-	0	0					
			Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	19		20		19		0		0				0		0		0		0					
		2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			2.081.443.056		-		481.443.056		-		109.200.000			109.200.000	50	22,68		109.200.000	50	5,25					
			Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	4		0		4		0		2				2		50		2		50					
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah			7.485.295.000		907.408.452		1.222.787.000		-		301.553.750			301.553.750	30,16	24,66		301.553.750	30,16	4,03					
			Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	3		4		3		0		1				1		33,33		1		33,33					
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	42		4		42		0		10				10		23,81		10		23,81					
				Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	18		2		18		0		6				6		33,33		6		33,33					
		2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			2.225.016.000		143.425.500		262.508.000		-		24.559.750			24.559.750	33,33	9,36		24.559.750	33,33	1,1					
			Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	3		4		3		0		1				1		33,33		1		33,33					
		2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			2.800.000.000		94.460.000		500.000.000		-		220.295.000			220.295.000	23,81	44,06		220.295.000	23,81	7,87					
			Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	42		4		42		0		10				10		23,81		10		23,81					
		2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			2.460.279.000		669.522.952		460.279.000		-		56.699.000			56.699.000	33,33	12,32		56.699.000	33,33	2,3					

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	18		2		18		0		6						6		33,33		6		33,33			
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			2.977.626.848		-		565.000.000			-			40.538.000				40.538.000	40	7,17		40.538.000	40	1,36		
			Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	5		0		5		0		2						2		40		2		40			
		2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas			2.977.626.848		-		565.000.000			-			40.538.000				40.538.000	40	7,17		40.538.000	40	1,36		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	5		0		5		0		2						2		40		2		40			
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			15.035.285.929		911.010.800		2.807.782.800			-			760.077.746				760.077.746	26,11	27,07		760.077.746	75	5,06	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	8,4		0		8,0		0		2						2		25		2		23,81			
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			7.457.738.562		-		1.500.000.000			-			447.297.746				447.297.746	26,67	29,82		447.297.746	62,5	6		
			Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	1		0		3		0		1						1		33,33		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	4		0		5		0		1						1		20		1		25			
		2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL			2.500.000.000		-		500.000.000			-			234.778.033				234.778.033	33,33	46,96		234.778.033	100	9,39		
			Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	1		0		3		0		1						1		33,33		1		100			
		2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			4.957.738.562		-		1.000.000.000			-			212.519.713				212.519.713	20	21,25		212.519.713	25	4,29		
			Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	4		0		5		0		1						1		20		1		25			
		2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			7.577.547.367		911.010.800		1.307.782.800			-			312.780.000				312.780.000	25	23,92		312.780.000	100	4,13		
			Tersedianya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	1		1		4		0		1						1		25		1		100			
		2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			7.577.547.367		911.010.800		1.307.782.800			-			312.780.000				312.780.000	25	23,92		312.780.000	100	4,13		
			Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	1		1		4		0		1						1		25		1		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab		Ket
											I		II		III		IV				K	%			K	%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%			
10	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran					428.216.777.024		43.509.080.641		51.156.494.843		2.744.018.528		9.550.693.194						12.294.711.722	64,01	24,03		12.294.711.722	12,16	2,87			
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				8.929.072.596		62.359.300		400.000.000		-		47.604.000					47.604.000	0	11,9		47.604.000	0	0,53	Dinas Sosial			
		MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)	100		0	22,18			1,23	9,86						9,86			44,45		9,86			9,86				
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				138.631.712		-		350.000.000		-		36.222.000					36.222.000	0	10,35		36.222.000	0	26,13				
		Jumah keluarga KAT diberi pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	101		0		83		0	0						0			0		0		0					
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	101		0		0		0	0						0			0		0		0					
			Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan Kabupaten/Kota (Lokasi)	3		0		0		0	0						0			0		0		0					
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT				37.635.662		-		350.000.000		-		36.222.000					36.222.000	0	10,35		36.222.000	0	96,24				
		Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	101		0		83		0	0						0			0		0		0					
	1.06.02.2.01.0004	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan				72.996.050		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0				
		Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	101		0		0		0	0						0			0		0		0					
	1.06.02.2.01.0005	Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT				28.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0				
		Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT	Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan Kabupaten/Kota (Lokasi)	3		0		0		0	0						0			0		0		0					
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				159.487.456		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0				
		Jumlah dokumen pengumpulan Sumbangan yang diterbitkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	5		0		0		0	0						0			0		0		0					
	1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				159.487.456		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0				
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	5		0		0		0	0						0			0		0		0					
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				8.630.953.428		62.359.300		50.000.000		-		11.382.000					11.382.000	0	22,76		11.382.000	0	0,13				
		Jumlah PSKS yang dikembangkan Kemampuannya	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	50		0		0		0	0						0			0		0		0					
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	83		7		3		0	0						0			0		0		0					
			Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang)	2500		0		0		0	0						0			0		0		0					

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
				Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	282		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	182		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.06.02.2.03.0003		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		1.207.997.218		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
				Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50		0		0		0		0					0	0		0		0					
		1.06.02.2.03.0004		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		1.501.446.631		62.359.300		50.000.000		-		11.382.000				11.382.000	0	22,76		11.382.000	0	0,76				
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	83		7		3		0		0					0			0		0					
		1.06.02.2.03.0011		Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial		1.340.834.007		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
				Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	2500		0		0		0		0					0			0		0					
		1.06.02.2.03.0012		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		550.000.000		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
				Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	282		0		0		0		0					0			0		0					
		1.06.02.2.03.0014		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		4.030.675.572		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
				Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	182		0		0		0		0					0			0		0					
		1.06.03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		1.034.227.421		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0	Dinas Sosial			
				MEINGKATNYA LAYANAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	100		0		40,00		0		0					0			0		0					
		1.06.03.2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		1.034.227.421		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
				Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	5		0		0		0		0					0			0		0					
		1.06.03.2.01.0003		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		1.034.227.421		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
				Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5		0		0		0		0					0			0		0					

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket				
								I		II		III		IV			13			14 = 13/8 x 100%				15 = 13		16=15/6 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	%	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8 x 100%	15 = 13	16=15/6 x100%	17	18										
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		12.280.163.445	883.934.852	1.650.000.000	128.393.514	130.512.484			258.905.998	184,93	15,69	258.905.998	10,06	2,11	Dinas Sosial									
			MENINGKATNYA REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (%)	100	0	100	39	11			50	50		50												
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		9.288.660.705	431.337.413	750.000.000	99.986.670	65.163.000			165.149.670	280,78	22,02	165.149.670	6,2	1,78										
			Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	130	14	0	0	0			0			0	0	0	0									
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	40	33	0	0	0			0			0	0	0	0									
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	14	16	0	0	0			0			0	0	0	0									
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30	28	0	0	0			0			0	0	0	0									
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300	114	25	90	81			171	684	171	57												
				Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	540	40	210	25	24			49	23,33	49	9,07												
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	18	20	12	27			27	135	27	27												
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	171	0	0	0			0	0	0	0												
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	153	0	0	0			0	0	0	0												
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	80	116	0	0	0			0	0	0	0												
				Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	35	20	0	0	0			0	0	0	0												
				Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	0	0	0	0			0	0	0	0												
				Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Orang)	20	0	0	0	0			0	0	0	0												
				Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	0	0	0	0			0	0	0	0												
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	20	0	0	0	0			0	0	0	0												

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan			646.767.004		68.779.000		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	130		14		0		0		0					0		0		0		0				
		1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang			329.391.968		11.450.000		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	40		33		0		0		0					0		0		0		0				
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu			1.000.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	14		16		0		0		0					0		0		0		0				
		1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			1.193.909.576		75.986.618		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30		28		0		0		0					0		0		0		0				
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			796.019.000		30.798.750		350.000.000		86.414.320		42.112.000					128.526.320	684	36,72		128.526.320	57	16,15			
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300		114		25		90		81					171		684		171		57				
		1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			818.613.528		15.520.000		300.000.000		10.832.350		4.460.000					15.292.350	23,33	5,1		15.292.350	9,07	1,87			
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	540		40		210		25		24					49		23,33		49		9,07				
		1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			445.000.000		36.137.697		100.000.000		2.740.000		18.591.000					21.331.000	135	21,33		21.331.000	27	4,79			
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100		18		20		12		27					27		135		27		27				
		1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			55.100.000		5.756.000		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20		171		0		0		0					0		0		0		0				
		1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan			494.645.000		38.323.167		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25		153		0		0		0					0		0		0		0				
		1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			864.007.347		94.454.181		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	80		116		0		0		0					0		0		0		0				
		1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan			798.887.693		54.132.000		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	35		20		0		0		0					0		0		0		0				
		1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota			325.489.020		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket						
								I		II		III		IV					13				14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	0	0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.06.04.2.01.0015	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis		713.702.515		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Orang)	20	0	0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.06.04.2.01.0016	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)		460.000.000		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	0	0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.06.04.2.01.0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan		347.128.054		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0			
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	0	0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan NAPZA di Luar Panti Sosial		2.991.502.740		452.597.439		900.000.000		28.406.844		65.349.484				93.756.328	89,08	10,42		93.756.328	14,88	3,13				
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	108	10	0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	108	10	0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	150	23	0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	108	22	0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	23	3	0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	125	10	120		87		82								169		140,83		169		135,2			
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	625	125	250		22		24								46		18,4		46		7,36			
				Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	6	0		0		0		0						0		0		0		0			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																									

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket					
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	75		15		25		9		18					27		108		27		36				
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	75		15		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		5		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		4		0		0		0					0		0		0		0				
		1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			50.000.000		1.730.000		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	108		10		0		0		0					0		0		0		0				
		1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan			50.000.000		5.930.000		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	108		10		0		0		0					0		0		0		0				
		1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan			920.000.000		2.350.000		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	150		23		0		0		0					0		0		0		0				
		1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang			175.000.000		40.178.922		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	108		22		0		0		0					0		0		0		0				
		1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu			500.000.000		7.801.394		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	23		3		0		0		0					0		0		0		0				
		1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			235.478.425		76.113.054		400.000.000		13.213.480		33.773.664				46.987.144	140,83	11,75		46.987.144	135,2	19,95				
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	125		10		120		87		82					169		140,83		169		135,2				
		1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			214.954.579		194.223.000		350.000.000		8.043.364		31.575.820				39.619.184	18,4	11,32		39.619.184	7,36	18,43				
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	625		125		250		22		24					46		18,4		46		7,36				
		1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			50.000.000		7.280.000		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25		6		0		0		0					0		0		0		0				
		1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			227.069.736		9.076.030		150.000.000		7.150.000		-				7.150.000	108	4,77		7.150.000	36	3,15				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket					
								I		II		III		IV														
								9		10		11		12														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	75	15		25		9		18					27		108		27		36					
	1.06.04.2.02.0011		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			150.000.000		22.530.000		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	75	15		0		0		0					0		0		0		0					
	1.06.04.2.02.0012		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			103.000.000		39.322.605		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	5		0		0		0					0		0		0		0					
	1.06.04.2.02.0013		Pemberian Layanan Rujukan			316.000.000		46.062.434		-		-		-				-	0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	4		0		0		0					0		0		0		0					
	1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			14.573.411.992		500.950.263		250.000.000		8.300.000		23.670.000				31.970.000	26,69	12,79		31.970.000	2,98	0,22	Dinas Sosial			
			MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Fakir Miskin yang Mendapatkankan Pelatihan untuk Pengembangan Usaha (%)	100	0	35,26		0	21,85		21,85				21,85		61,97		21,85		21,85		21,85				
				Cakupan Anak-Anak Terlantar yang Ditangani (%)	100		0		100							0		0		0		0						
	1.06.05.2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			931.940.770		-		-		-		-			-	0	0		-	0	0					
	jumlah anak		anak terlantar yang dipelihara	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	0		0		0		0				0		0		0		0		0				
				Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0			0		0				0		0		0								
				Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	8		0			0		0				0		0		0		0						
				Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi (Orang)	50		0			0		0				0		0		0		0						
	1.06.05.2.01.0001		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar			216.677.832		-		-		-		-			-	0	0		-	0	0					
			Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	0		0		0		0				0		0		0		0						
	1.06.05.2.01.0002		Rujukan Anak-Anak Terlantar			206.172.213		-		-		-		-			-	0	0		-	0	0					
			Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	0		0		0		0				0		0		0		0						
	1.06.05.2.01.0003		Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar			259.229.701		-		-		-		-			-	0	0		-	0	0					
			Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	8	0		0		0		0				0		0		0		0						
	1.06.05.2.01.0004		Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi			249.861.024		-		-		-		-			-	0	0		-	0	0					
			Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi (Orang)	50	0		0		0		0				0		0		0		0						
	1.06.05.2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			13.641.471.222		500.950.263		250.000.000		8.300.000		23.670.000			31.970.000	26,69	12,79		31.970.000	5,96	0,23					
			Jumlah data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang terkelola	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	60000	6.235		0		0		0				0		0		0		0						
				Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	252		0	25	0	0	0	0																

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
				Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	85		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	7000		0		3125		930		738					1.668		53,38		1.668		23,83				
		1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			3.500.127.882		500.950.263		-		-		-		-		-		0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	60000		6.235		0		0		0					0		0		0		0				
		1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			2.685.523.543		-		200.000.000		8.300.000		7.610.000					15.910.000	0	7,96		15.910.000	0	0,59			
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	252		0		25		0		0					0		0		0		0				
		1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			5.290.000.000		-		-		-		-		-		-		0	0		-	0	0			
			Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	85		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			2.165.819.797		-		50.000.000		-		16.060.000					16.060.000	53,38	32,12		16.060.000	23,83	0,74			
			Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	7000		0		3125		930		738					1.668		53,38		1.668		23,83				
		2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			3.343.018.505		300.000.000		10.000.000		-		-		-		-		0	0		-	0	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
			TERKELOLANYA INFORMASI TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	201,7		65,48		19,97		0		0					0		0		0		0				
		2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			3.343.018.505		300.000.000		10.000.000		-		-		-		-		0	0		-	0	0			
			Tersedianya Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1		1		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	79		0		10		0		0					0		0		0		0				
		2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			1.718.750.796		300.000.000		-		-		-		-		-		0	0		-	0	0			
			Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1		1		0		0		0					0		0		0		0				
		2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			1.624.267.709		-		10.000.000		-		-		-		-		0	0		-	0	0			
			Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	79		0		10		0		0					0		0		0		0				
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			17.229.734.735		703.764.800		1.430.000.000		8.121.500		-		-		-		8.121.500	0	0,57		8.121.500	0	0,05	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
			MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja (Juta Rp/Orang) (Juta Rupiah)	705,09		514,92		571,85		0		0					0		0		0		0				
				Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi (%)	94,22		35,98		90,54		0		0					0		0		0		0		0		
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			15.258.974.735		703.764.800		1.210.000.000		8.121.500		-		-		-		8.121.500	0	0,67		8.121.500	0	0,05		
			Tersedianya Lulusan Pelatihan yang memiliki Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	727		64		32		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	37		0		1		0		0					0		0		0		0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
				Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	13		0		2		0		0				0		0		0		0		0			
				Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	85		0		48		0		0				0		0		0		0		0			
				Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Lembaga)	11		0		0		0		0				0		0		0		0		0			
				Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n (Kesepakatan)	27		0		0		0		0				0		0		0		0		0			
		2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			8.976.768.000		703.764.800		900.000.000		8.121.500		-				8.121.500	0	0,9			8.121.500	0	0,09			
			Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	727		64		32		0		0					0		0		0		0				
		2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			1.194.400.000		-		10.000.000		-		-				-	0	0			-	0	0			
			Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	37		0		1		0		0					0		0		0		0				
		2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota			1.194.400.000		-		100.000.000		-		-				-	0	0			-	0	0			
			Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	13		0		2		0		0					0		0		0		0				
		2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi			2.102.006.735		-		200.000.000		-		-				-	0	0			-	0	0			
			Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	85		0		48		0		0					0		0		0		0				
		2.07.03.2.01.0005	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas			1.194.400.000		-		-		-		-				-	0	0			-	0	0			
			Tersedianya Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Lembaga)	11		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.07.03.2.01.0006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas			597.000.000		-		-		-		-				-	0	0			-	0	0			
			Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n (Kesepakatan)	27		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			597.200.000		-		100.000.000		-		-				-	0	0			-	0	0			
			Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	71		0		10		0		0					0		0		0		0				
		2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			597.200.000		-		100.000.000		-		-				-	0	0			-	0	0			
			Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	71		0		10		0		0					0		0		0		0				
		2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja			179.160.000		-		10.000.000		-		-				-	0	0			-	0	0			
			Terlaksananya Perizinan LPK yang diterbitkan	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	29		0		11		0		0					0		0		0		0				
		2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi			179.160.000		-		10.000.000		-		-				-	0	0			-	0	0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket		
										I		II		III		IV			K	%							K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	K	%		
			Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	29		0		11		0		0					0		0		0		0				
		2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			298.600.000		-		100.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Fasilitas Konsultasi Produktifitas pada perusahaan kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	86		0		35		0		0					0		0		0		0				
		2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			298.600.000		-		100.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	86		0		35		0		0					0		0		0		0				
		2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			895.800.000		-		10.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	4		0		1		0		0					0		0		0		0				
		2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			895.800.000		-		10.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4		0		1		0		0					0		0		0		0				
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			7.521.397.427		3.457.228.711		87.500.000		4.778.800		-					4.778.800	62,25	5,46		4.778.800	1,94	0,06	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
			MENINGKATNYA PENEMPATA TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	63,14		37,64		26,77		0		83,6					83,6		312,29		83,6		132,4				
		2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			4.609.326.949		2.707.513.711		57.500.000		4.778.800		-					4.778.800	30,6	8,31		4.778.800	1,07	0,1			
			Terlaksananya tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD, AKL, dan AKAN	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	56		0		40		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	14259		1.227		500		450		765					765		153		765		5,37				
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	1968		150		200		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	148		0		100		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	974		420		70		0		0					0		0		0		0				
		2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja			86.400.000		-		10.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	56		0		40		0		0					0		0		0		0				
		2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja			725.000.000		-		17.500.000		4.778.800		-					4.778.800	153	27,31		4.778.800	5,37	0,66			
			Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	14259		1.227		500		450		765					765		153		765		5,37				
		2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			86.400.000		1.074.179.065		10.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	1968		150		200		0		0					0		0		0		0				
		2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan			800.000.000		7.510.000		10.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	148		0		100		0		0					0		0		0		0				
		2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja			2.911.526.949		1.625.824.646		10.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	974		420		70		0		0					0		0		0		0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			2.825.670.480		749.715.000		20.000.000		-		-					-	152,5	0		-	0	0			
			Tersedianya Pencari Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja melalui sistem online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	0		3.260		300		450		915					915		305		915		0				
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	1949		200		10000		0		0					0		0		0		0				
		2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			-		-		10.000.000		-		-					-	305	0		-	0	0			
			Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	0		3.260		300		450		915					915		305		915		0				
		2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja			2.825.670.480		749.715.000		10.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	1949		200		10000		0		0					0		0		0		0				
		2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			86.399.998		-		10.000.000		-		-					-	40	0		-	8,25	0			
			Terlaksananya CPN yang Terlayani sesuai prosedur	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	97		0		20		0		8					8		40		8		8,25				
		2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran			86.399.998		-		10.000.000		-		-					-	40	0		-	8,25	0			
			Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	97		0		20		0		8					8		40		8		8,25				
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			165.846.058.876		17.892.856.095		29.963.814.400		-		6.362.294.400				6.362.294.400	135,86	21,23		6.362.294.400	83,99	3,84	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
			MENINGKATNYA PEKERJA INDONESIA YANG TERLINDUNG	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	87,1		20,96		71,73		0		0					0		0		0						
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.322.200.000		-		30.000.000		-		-					-	137,56	0		-	93,72	0			
			Terlaksananya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	67		275		50		0		33					33		66		33		49,25				
				Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	67		93		50		0		5					5		10		5		7,46				
				Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	45		0		30		0		101					101		336,67		101		224,44				
		2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			298.600.000		-		10.000.000		-		-					-	66	0		-	49,25	0			
			Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	67		275		50		0		33					33		66		33		49,25				
		2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan			298.600.000		-		10.000.000		-		-					-	10	0		-	7,46	0			
			Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	67		93		50		0		5					5		10		5		7,46				
		2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			725.000.000		-		10.000.000		-		-					-	336,67	0		-	224,44	0			
			Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	45		0		30		0		101					101		336,67		101		224,44				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket					
								I		II		III		IV														
								9		10		11		12		13								14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		K	%	K	Rp	K	%	17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			164.523.858.876		17.892.856.095		29.933.814.400		-		6.362.294.400					6.362.294.400	134,85	21,25		6.362.294.400	78,16	3,87			
			Terlaksananya Perusahaan yang difasilitasi pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	38		99		50		0		41				41		82		41		107,89					
				Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	35		98		50		0		28				28		56		28		80					
				Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	59		0		9		0		35				35		388,89		35		59,32					
				Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1		1		1		0		1				1		100		1		100					
				Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	217303		98.000		200000		0		94.677				94.677		47,34		94.677		43,57					
		2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			450.000.000		-		20.000.000		-		-				-	82	0		-	107,89	0				
			Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	38		99		50		0		41				41		82		41		107,89					
		2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			390.000.000		-		20.000.000		-		-				-	56	0		-	80	0				
			Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	35		98		50		0		28				28		56		28		80					
		2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			390.000.000		-		10.000.000		-		-				-	388,89	0		-	59,32	0				
			Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	59		0		9		0		35				35		388,89		35		59,32					
		2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			3.010.000.000		439.758.000		20.000.000		-		-				-	100	0		-	100	0				
			Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1		1		1		0		1				1		100		1		100					
		2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			160.283.858.876		17.453.098.095		29.863.814.400		-		6.362.294.400				6.362.294.400	47,34	21,3		6.362.294.400	43,57	3,97				
			Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	217303		98.000		200000		0		94.677				94.677		47,34		94.677		43,57					
		2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			127.598.699.583		15.406.119.657		11.415.180.443		2.537.045.714		2.869.107.210				5.406.152.924	56,38	47,36		5.406.152.924	15,06	4,24		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
			TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80		0		80		85		85				85		106,25		85		106,25					
				Nilai SAKIP (Nilai)	76,5		0		70,50		47,6		67,05				67,05		95,11		67,05		87,65					
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.499.959.927		84.133.000		164.508.000		19.920.000		33.564.227				53.484.227	64,29	32,51		53.484.227	12,86	1,19				
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi yang dihasilkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30		7		6		3		0				3		50		3		10					
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	35		9		7		2		1				3		42,86		3		8,57					

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	10		0		2		2		0					2		100		2		20				
		2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.172.549.330		66.297.000		100.000.000		19.920.000		18.889.227					38.809.227	50	38,81		38.809.227	10	1,79			
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30		7		6		3		0					3		50		3		10				
		2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.200.000.000		17.836.000		50.000.000		-		11.920.000					11.920.000	42,86	23,84		11.920.000	8,57	0,99			
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	35		9		7		2		1					3		42,86		3		8,57				
		2.13.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			1.127.410.597		-		14.508.000		-		2.755.000						2.755.000	100	18,99		2.755.000	20	0,24		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	10		0		2		2		0					2		100		2		20				
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			101.253.939.656		13.785.243.288		10.039.392.443		2.404.161.310		2.704.635.289						5.108.796.599	39,22	50,89		5.108.796.599	34,53	5,05		
			Jumlah Dokumen/ laporan keuangan yang dihasilkan (audited)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	97		95		96		96		96						96		100		96		98,97			
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	65		0		17		3		0						3		17,65		3		4,62			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	25		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			98.203.939.656		13.785.243.288		9.839.392.443		2.395.124.310		2.664.027.889						5.059.152.199	100	51,42		5.059.152.199	98,97	5,15		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	97		95		96		96		96					96		100		96		98,97				
		2.13.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1.750.000.000		-		150.000.000		9.037.000		40.607.400						49.644.400	17,65	33,1		49.644.400	4,62	2,84		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	65		0		17		3		0					3		17,65		3		4,62				
		2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.300.000.000		-		50.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	25		0		5		0		0					0		0		0		0				
		2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			155.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	25		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			155.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	25		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.659.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	282		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	180		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			399.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	282		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			1.260.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	180		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			8.700.000.000		528.861.670		268.600.000		47.390.148		38.600.686					85.990.834		42,19	32,01		85.990.834	24,83	0,99		
			Jumlah Jenis Administrasi Umum Yang dilaksanakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	23		12		2		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		12		1		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5		1		12		0		6					6		50		6		120				
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	459		80		16		10		9					19		118,75		19		4,14				
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.200.000.000		104.646.000		50.000.000		-		12.776.000					12.776.000		0	25,55		12.776.000	0	0,58		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	23		12		2		0		0					0		0		0		0				
		2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2.500.000.000		84.223.000		50.000.000		13.089.000		7.893.000					20.982.000		0	41,96		20.982.000	0	0,84		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		12		1		0		0					0		0		0		0				
		2.13.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu			500.000.000		25.900.000		18.600.000		-		4.810.000					4.810.000		50	25,86		4.810.000	120	0,96		
			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5		1		12		0		6					6		50		6		120				
		2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.750.000.000		314.092.670		150.000.000		34.301.148		13.121.686					47.422.834		118,75	31,62		47.422.834	4,14	1,72		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	459		80		16		10		9					19		118,75		19		4,14				
		2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			750.000.000		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.440.800.000		370.800.000		469.080.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Jumlah Barang yang disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	20		2		2		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	140		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			4.290.800.000		370.800.000		469.080.000		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	20		2		2		0		0					0		0		0		0				
		2.13.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			250.000.000		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			900.000.000		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	140		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.300.000.000		552.714.032		393.600.000		56.981.283		70.976.197					127.957.480		125	32,51		127.957.480	38,75	5,56		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Jumlah Jenis Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		12		3		0		6						6		200		6		40			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	16		12		12		3		3						6		50		6		37,5			
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.500.000.000		55.427.120		291.600.000		39.981.283		45.476.197						85.457.480	200	29,31		85.457.480	40	5,7		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		12		3		0		6						6		200		6		40				
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				800.000.000		497.286.912		102.000.000		17.000.000		25.500.000					42.500.000	50	41,67		42.500.000	37,5	5,31			
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	16		12		12		3		3						6		50		6		37,5				
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.590.000.000		84.367.667		80.000.000		8.592.973		21.330.811					29.923.784	60	37,4		29.923.784	0,65	0,83			
		Jumlah Jenis Barang milik daerah yang di pelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	115		5		5		0		3						3		60		3		2,61				
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23		0		0		0		0		0		0		0		0								
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.900.000.000		84.367.667		80.000.000		8.592.973		21.330.811					29.923.784	60	37,4		29.923.784	2,61	1,57			
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	115		5		5		0		3						3		60		3		2,61				
	2.13.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1.440.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23		0		0		0		0						0		0		0		0				
	2.13.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				100.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0				
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0				
	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA				5.612.810.974		259.502.810		50.000.000		-		32.705.000					32.705.000	8,33	65,41		32.705.000	0,17	0,58	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
		MENINGKATNYA KUALITAS PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	100		0		57		52		52						52		91,23		52		52				
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa				5.612.810.974		259.502.810		50.000.000		-		32.705.000					32.705.000	8,33	65,41		32.705.000	0,17	0,58			
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	70		5		0		0		0						0		0		0		0				
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	70		0		0		0		0		0		0												
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	466		15		48		0		4						4		8,33		4		0,86				
			Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	556		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
		2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa			1.735.220.218		164.696.910		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	70		5		0		0		0					0		0		0		0				
		2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa			1.370.000.000		-		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	70		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa			1.370.000.000		94.805.900		50.000.000		-		32.705.000				32.705.000	8,33	65,41		32.705.000	0,86	2,39				
			Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	466		15		48		0		4					4		8,33		4		0,86				
		2.13.02.2.01.0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota			567.590.756		-		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	5		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa			570.000.000		-		-		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	556		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			4.445.857.089		148.535.005		100.000.000		3.799.000		13.463.300				17.262.300	0	17,26		17.262.300	0	0,39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
			MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama Desa yang Telah Ditindaklanjuti (%)	100		0		50		28		28					28		56		28		28				
		2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			4.445.857.089		148.535.005		100.000.000		3.799.000		13.463.300				17.262.300	0	17,26		17.262.300	0	0,39				
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Kerjasama Antar Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	72		0		9		0		0					0		0		0		0		0		
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	135		2		15		0		0					0		0								
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	5		0		1		0		0					0		0								
		2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			1.905.857.089		75.895.805		50.000.000		3.799.000		10.213.300				14.012.300	0	28,02		14.012.300	0	0,74				
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	72		0		9		0		0					0		0		0		0				
		2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			1.750.000.000		72.639.200		25.000.000		-		3.250.000				3.250.000	0	13		3.250.000	0	0,19				
			Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	135		2		15		0		0					0		0		0		0				
		2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			790.000.000		-		25.000.000		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	5		0		1		0		0					0		0		0		0				
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			28.776.811.410		2.722.213.880		750.000.000		53.580.000		61.256.800				114.836.800	34,44	15,31		114.836.800	3,12	0,4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
			MENINGKATNYA KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN	(Persentase LKD dan LAD aktif yang melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan (%))	100		0		48,03		41,02		41,02					41,02		85,4		41,02		41,02				
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			28.776.811.410		2.722.213.880		750.000.000		53.580.000		61.256.800				114.836.800	34,44	15,31		114.836.800	3,12	0,4				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Persentase LKD dan LAD aktif yang melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	6		2		2		0		1					1		50		1		16,67				
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2386		546		1951		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	5		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	10		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	7		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	5		1		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	1550		0		150		0		80					80		53,33		80		5,16				
		2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			5.000.000.000		166.921.922		200.000.000		8.570.000		30.131.800					38.701.800		50	19,35		38.701.800	16,67	0,77		
			Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	6		2		2		0		1					1		50		1		16,67				
		2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			11.570.789.931		1.412.622.808		400.000.000		43.810.000		3.905.000					47.715.000		0	11,93		47.715.000	0	0,41		
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2386		546		1951		0		0					0		0		0		0				
		2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			2.568.074.376		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	5		0		0		0		0					0		0		0		0				
		2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			1.475.000.000		-		-		-		-					-		0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
								I		II		III		IV														
								9	10	11	12	13	14 = 13/8 x 100%	15 = 13		16=15/6 x100%												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			3.200.000.000	-		-		-		-						-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			3.700.000.000	1.142.669.150		-		-		-						-		0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.262.947.103	-		150.000.000		1.200.000		27.220.000						28.420.000	53,33	18,95		28.420.000	5,16	2,25			
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	1550		0		150		0		80						80		53,33		80		5,16			
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			31.025.512.971		1.171.615.268		5.050.000.000		-		10.080.000					10.080.000	0	0,2		10.080.000	0	0,03	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		
			MENINGKATNYA DAYA SAING UMKM	Proporsi UKM Menjaln Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	1,04		0		0,95		0		0						0		0		0		0			
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			31.025.512.971		1.171.615.268		5.050.000.000		-		10.080.000					10.080.000	0	0,2		10.080.000	0	0,03			
			Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	1080		10		500		0		0						0		0		0		0			
		2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			31.025.512.971		1.171.615.268		5.050.000.000		-		10.080.000					10.080.000	0	0,2		10.080.000	0	0,03			
			Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	1080		10		500		0		0						0		0		0		0			
11	Terwujudnya ekosistem sosial dan ekonomi yang ramah investasi					69.556.087.346		9.965.387.960		2.300.000.000		4.298.000		20.071.100					24.369.100	0	1,06		24.369.100	2,33	0,04			
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			17.568.381.526		788.537.984		-		-		-					-	0	0		-	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu		
			MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100		100		100		0		33,52						33,52		33,52		33,52		33,52			
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			5.734.881.458		108.157.464		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Persentase Produk Hukum yang dihasilkan dalam rangka Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	5		1		0				0						0		0		0		0			
		2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			5.734.881.458		108.157.464		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	5		1		0				0						0		0		0		0			
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			11.833.500.068		680.380.520		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Jumlah Kajian Potensi Daerah	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0				0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		0				0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)				Unit SKPD Penanggungjawab	Ket				
								I		II		III		IV					13		14 = 13/8 x 100%				15 = 13		16=15/6 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8 x 100%	15 = 13	16=15/6 x100%	17	18											
		2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		5.419.094.549		-		-		-		-		-	0	0		-	0	0							
			Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	0	0		0				0		0		0	0		0								
		2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		6.414.405.519		680.380.520		-		-		-		-	0	0		-	0	0							
			Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	1	0		0				0		0		0	0		0								
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			29.525.236.629		7.977.043.530		1.600.000.000		4.298.000		-			4.298.000	0	0,27		4.298.000	0	0,01	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu				
			MENINGKATNYA JANGKAUAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Promosi yang Diikuti (%)	100	117	100		0		0					0		0		0								
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		29.525.236.629		7.977.043.530		1.600.000.000		4.298.000		-				4.298.000	0	0,27		4.298.000	0	0,01					
			Jumlah Promosi yang diikuti	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	35	7	1		0				0			0		0		0		0						
				Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	5	2	0			0				0			0		0		0		0					
		2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		18.458.231.823		6.514.971.701		1.600.000.000		4.298.000		-				4.298.000	0	0,27		4.298.000	0	0,02					
			Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	35	7	1		0				0			0		0		0		0						
		2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		11.067.004.806		1.462.071.829		-		-		-				-	0	0		-	0	0					
			Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	5	2	0		0				0			0		0		0		0						
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			7.168.374.346		253.249.970		-		-		-			-	0	0		-	4,13	0	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu				
			MENINGKATNYA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100		0		82,61					82,61		82,61		82,61		82,61						
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		7.168.374.346		253.249.970		-		-		-				-	0	0		-	4,13	0					
			Jumlah Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang diterbitkan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	25000	5.169	0		3.098				3.098			3.098		0		3.098		12,39						
				Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	9000	5.169	0			0				0			0		0		0		0					
				Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2200	11	0			0				0			0		0		0		0					
		2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		2.908.000.000		135.914.362		-		-		-				-	0	0		-	12,39	0					
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	25000	5.169	0		3.098				3.098			3.098		0		3.098		12,39						
		2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		2.774.613.304		66.363.498		-		-		-				-	0	0		-	0	0					

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
			Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	9000		5.169		0				0					0		0		0		0				
		2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			1.485.761.042		50.972.110		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2200		11		0			0						0		0		0		0				
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			12.536.320.483		802.559.823		700.000.000		-		20.071.100					20.071.100	0	2,87		20.071.100	5,19	0,16	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu		
			TERKENDALINYA PERLAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100		110		100		0		0					0		0		0		0				
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			12.536.320.483		802.559.823		700.000.000		-		20.071.100					20.071.100	0	2,87		20.071.100	5,19	0,16			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	485		22		0			16						16		0		16		3,3				
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2950		82		300			0						0		0		0		0				
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	285		34		0			35						35		0		35		12,28				
		2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			2.873.913.988		138.597.012		-		-		-				-		0	0		-	3,3	0			
			Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	485		22		0			16						16		0		16		3,3				
		2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			5.349.431.740		406.219.850		700.000.000		-		20.071.100					20.071.100	0	2,87		20.071.100	0	0,38			
			Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2950		82		300			0						0		0		0		0				
		2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			4.312.974.755		257.742.961		-		-		-				-		0	0		-	12,28	0			
			Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	285		34		0			35						35		0		35		12,28				
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			2.757.774.362		143.996.653		-		-		-				-		0	0		-	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu		
			MENINGKATNYA PEMANFAATAN DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100		100		100		0		100					100		100		100		100				
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.757.774.362		143.996.653		-		-		-				-		0	0		-	0	0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket								
								I		II		III		IV															
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp			K
			Jumlah Data Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang dikelola	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	85	30			0				0					0		0	0			0	0				
		2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			2.757.774.362		143.996.653			-			-					-	0	0			-	0	0			
			Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	85	30			0				0						0				0		0				
12	Terwujudnya integrasi ekonomi Kutai Timur dengan ekonomi domestik, nasional, dan global					91.994.675.259		52.052.381.130		5.699.117.000		19.015.550		4.061.366.233						4.080.381.783	37,63	71,6		4.080.381.783	1,08	4,44			
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			32.995.306.597		42.215.543.298		649.117.000		-		642.742.262						642.742.262	100	99,02		642.742.262	4	1,95	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
			MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI BARANG YANG EFISIEN, MERATA DAN TERINTEGRASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	50	27		33		27		27						27			81,82		27		54				
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			32.995.306.597		42.215.543.298		649.117.000		-		642.742.262						642.742.262	100	99,02		642.742.262	4	1,95			
			Jumlah Pasar yang Terfasilitasi	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	25	2		1		0		1						1			100		1		4				
		3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			32.995.306.597		42.215.543.298		649.117.000		-		642.742.262						642.742.262	100	99,02		642.742.262	4	1,95			
			Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	25	2		1		0		1						1			100		1		4				
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			39.166.929.890		8.999.581.917		5.000.000.000		6.029.000		3.395.905.271						3.401.934.271	50	68,04		3.401.934.271	2,5	8,69	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
			MENINGKATNYA KELANCARAN DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	1,03	0		1,08		0		0							0			0		0		0			
		3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			7.487.370.082		198.375.463		-		-		-					-	0	0		-	0	0				
			Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kab/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	20	1		0		0		0						0			0		0		0				
				Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar	12	0		0		0		0						0			0		0		0				
		3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			3.843.685.041		78.403.100		-		-		-					-	0	0		-	0	0				
			Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	20	1		0		0		0						0			0		0		0				
		3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			3.643.685.041		119.972.363		-		-		-					-	0	0		-	0	0				
		Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	12	0		0		0		0						0			0		0		0					
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			31.679.559.808		8.801.206.454		5.000.000.000		6.029.000		3.395.905.271						3.401.934.271	50	68,04		3.401.934.271	5	10,74				
		Jumlah Laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang di Tingkat Pasar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4		2		0		0		0						0			0		0		0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
								I		II		III		IV		13		14 = 13/8 x 100%								15 = 13		16=15/6 x100%
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	40		12		8		0		4						4		50		4		10			
		3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			4.182.268.435		157.874.116		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4		2		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			27.497.291.373		8.643.332.338		5.000.000.000		6.029.000		3.395.905.271					3.401.934.271		50	68,04		3.401.934.271	10	12,37		
			Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	40		12		8		0		4						4		50		4		10			
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			8.572.094.535		354.468.031		25.000.000		3.466.550		7.288.700					10.755.250		0	43,02		10.755.250	0	0,13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			MENINGKATNYA PELAKU USAHA YANG BERORIENTASI EKSPOR	Persentase Pelaku usaha yang Melakukan Ekspor (%)	2,5		0		1,5		0		0						0		0		0		0			
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			8.572.094.535		354.468.031		25.000.000		3.466.550		7.288.700					10.755.250		0	43,02		10.755.250	0	0,13		
			Pelaku Usaha yang berorientasi Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	4		1		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku	37		2		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	9		1		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional			3.725.657.710		257.694.561		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal			2.661.780.778		49.930.000		25.000.000		3.466.550		7.288.700					10.755.250		0	43,02		10.755.250	0	0,4		
			Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	4		1		3		0		0						0		0		0		0			
		3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan			1.301.588.391		10.858.500		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	37		2		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor			883.067.656		35.984.970		-		-		-					-		0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	9		1		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			5.962.591.169		468.574.552		25.000.000		9.520.000		15.430.000					24.950.000		0,52	99,8		24.950.000	0,05	0,42	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			MENINGKATNYA TERTIB NIAGA DAN MUTU PRODUK	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	100		0		100		6,67		22,17						22,17		22,17		22,17		22,17			
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			5.962.591.169		468.574.552		25.000.000		9.520.000		15.430.000					24.950.000		0,52	99,8		24.950.000	0,05	0,42		
			Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	2125		664		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	7875		245		1525		0		8					8		0,52		8		0,1				
		3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			3.875.684.260		211.558.200		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	2125		664		0		0		0					0		0		0		0				
		3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			2.086.906.909		257.016.352		25.000.000		9.520.000		15.430.000				24.950.000		0,52	99,8		24.950.000	0,1	1,2			
			Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	7875		245		1525		0		8					8		0,52		8		0,1				
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			5.297.753.068		14.213.332		-		-		-				-		0	0		-	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
			MENINGKATNYA PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	20		0		12		0		0					0		0		0		0				
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			5.297.753.068		14.213.332		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			&Persentase Produk Lokal pada kegiatan promosi daerah	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	2		1		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				
		3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			5.097.753.068		14.213.332		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	2		1		0		0		0					0		0		0		0				
		3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			200.000.000		-		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				
13	Terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan antara desa dan kota					3.069.159.343.019		594.904.236.509		295.317.097.919		-		47.823.425.256				47.823.425.256		5,95	16,19		47.823.425.256	7,86	1,56			
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			413.915.253.360		77.894.853.353		27.675.609.590		-		3.298.839.460				3.298.839.460		6,59	11,92		3.298.839.460	7,82	0,8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			MENINGKATNYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP BANJIR DAN MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP IRIGASI	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	70		38		47		38		39,07					39,07		83,13		39,07		55,81				
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			324.515.253.360		66.566.705.547		22.340.025.615		-		1.578.881.650				1.578.881.650		9,29	7,07		1.578.881.650	8,32	0,49			
			Jumlah Infrastruktur Penyediaan Air Baku yang di bangun	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun (Unit)	2		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0.5		2		5		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	1		1		1		0		0					0		0		0		0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket					
								I		II		III		IV			14 = 13/8 x 100%			16=15/6 x100%								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
				Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)	1		1		1		0		0				0		0		0		0					
				Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	19		1		5		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	2		1		1		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Danau yang Direvitalisasi (Danau)	1		1		1		0		1				1		100		1		100					
				Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	6		0		1		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan (Unit)	4		0		0		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara (Bendungan)	5		0		0		0		0				0		0		0		0					
				Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	33333		1		200		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Titik)	2		0		1		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan (Unit)	2		0		0		0		0				0		0		0		0					
				Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan (KM)	0.5		1		0		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan (Unit)	7		0		0		0		0				0		0		0		0					
				Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	50		500		50		0		20,59				20,59		41,18		20,59		41,18					
				Panjang Breakwater yang Dibangun (KM)	0.1		0		0		0		0				0		0		0		0					
				Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan (KM)	29		0		0		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Check Dam yang Dibangun (Unit)	0		0		0		0		0				0		0		0		0					
				Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM)	0		0		0		0		0				0		0		0		0					
				Panjang Breakwater yang Direhabilitasi (KM)	0		0		0		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun (Unit)	0		2		2		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi (KM)	0		0		0		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Bendungan yang Dibangun (Bendungan)	0		0		0		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi (Bendungan)	0		1		0		0		0				0		0		0		0					
				Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	1.8		0,32		50		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi (Titik)	0		0		0		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0		0		0		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik)	6		6		40		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	5		2		5		0		0				0		0		0		0					
				Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	1		1		6		0		1				1		16,67		1		100					

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket										
								I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp			K	%	
				Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (KM)	2		0		0		0		0					0		0		0		0							
				Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0					0		0		0		0						0	0
				Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun (Unit)	1		0		4		0		0					0		0		0		0						0	0
				Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)	1		1		0		0		0					0		0		0		0						0	0
				Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (KM)	29		0		0		0		0					0		0		0		0						0	0
				Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	0		2		5		0		0					0		0		0		0						0	0
				Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)	0		0		0		0		0					0		0		0		0						0	0
	1.03.02.2.01.0019	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)			3.200.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0							
		Terbangunnya Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0							
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			4.700.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0							
		Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0							
	1.03.02.2.01.0031	Rehabilitasi Check Dam			11.600.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0							
		Terehabilitasinya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0							
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai			2.500.000.000		282.967.000		-		-		-					-	0	0		-	0	0							
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0.5		2		5		0		0						0		0		0		0							
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota			2.500.000.000		335.163.700		500.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0							
		Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	1		1		1		0		0						0		0		0		0							
	1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota			2.500.000.000		155.354.250		500.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0							
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)	1		1		1		0		0						0		0		0		0							
	1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir			7.500.000.000		532.792.000		1.500.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0							
		Beroperasi dan Terpeliharanya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	19		1		5		0		0						0		0		0		0							
	1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi			7.500.000.000		464.747.000		500.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0							
		Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	2		1		1		0		0						0		0		0		0							
	1.03.02.2.01.0086	Revitalisasi Danau			8.600.000.000		1.223.502.180		422.766.200		-		422.766.200					422.766.200	100	100		422.766.200	100	4,92							
		Terlaksananya Revitalisasi Danau	Jumlah Danau yang Direvitalisasi (Danau)	1		1		1		0		1						1				100		1		100					
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya			2.500.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0							
		Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	6		0		1		0		0						0		0		0		0							
	1.03.02.2.01.0090	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)			4.000.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0							
		Meningkatnya Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan (Unit)	4		0		0		0		0						0				0		0							

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
		1.03.02.2.01.0091	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan			1.000.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Beroperasi dan Terpeliharanya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara (Bendungan)	5		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai			20.500.000.000		33.106.716.042		7.200.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	33333		1		200		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.01.0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku			2.500.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Titik)	2		0		1		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.01.0097	Peningkatan Polder/Kolam Retensi			17.000.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Meningkatnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan (Unit)	2		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.01.0099	Peningkatan Kanal Banjir			8.600.000.000		4.783.355.525		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Meningkatnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan (KM)	0.5		1		0		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.01.0100	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			7.700.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Meningkatnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan (Unit)	7		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing			78.064.883.636		183.451.000		3.968.118.750		-		881.439.950					881.439.950	41,18	22,21		881.439.950	41,18	1,13			
			Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	50		500		50		0		20,59					20,59		41,18		20,59		41,18				
		1.03.02.2.01.0102	Pembangunan Breakwater			3.300.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terbangunnya Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun (KM)	0.1		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.01.0103	Peningkatan Tanggul Sungai			12.000.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Meningkatnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan (KM)	29		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.01.0104	Pembangunan Check Dam			7.800.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terbangunnya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun (Unit)	0		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			2.700.369.724		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terehabilitasinya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM)	0		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.01.0106	Rehabilitasi Breakwater			1.600.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terehabilitasinya Breakwater	Panjang Breakwater yang Direhabilitasi (KM)	0		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku			15.000.000.000		8.510.167.405		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terbangunnya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun (Unit)	0		2		2		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.01.0108	Rehabilitasi Unit Air Baku			4.800.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terehabilitasinya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi (KM)	0		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.01.0111	Pembangunan Bendungan			7.600.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terbangunnya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun (Bendungan)	0		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.01.0112	Rehabilitasi Bendungan			11.000.000.000		1.354.865.707		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terehabilitasinya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi (Bendungan)	0		1		0		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai			5.350.000.000		632.867.970		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	1.8		0,32		50		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.01.0116	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku			1.500.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penangggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%					
			Terehabilitasinya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi (Titik)	0		0		0		0		0				0		0		0				0			
	1.03.02.2.01.0118		Penyusunan Pola dan Rencana Kabupaten/Kota			3.000.000.000		-		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0		0		0		0		0				0		0		0			0				
	1.03.02.2.01.0119		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku			6.000.000.000		4.109.305.200		4.200.000.000		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik)	6		6		40		0		0				0		0		0		0		0			
	1.03.02.2.01.0120		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai			5.800.000.000		4.845.816.623		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	5		2		5		0		0				0		0		0			0				
	1.03.02.2.01.0121		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya			8.000.000.000		4.489.327.085		3.549.140.665		-		274.675.500				274.675.500		16,67	7,74		274.675.500	100	3,43			
			Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	1		1		6		0		1				1		16,67		1			100				
	1.03.02.2.01.0122		Rehabilitasi Kanal Banjir			6.700.000.000		-		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Terehabilitasinya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (KM)	2		0		0		0		0				0		0		0			0				
	1.03.02.2.01.0123		Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi			3.500.000.000		-		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Terehabilitasinya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0				0		0		0			0				
	1.03.02.2.01.0124		Pembangunan Polder/Kolam Retensi			5.500.000.000		-		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Terbangunnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun (Unit)	1		0		4		0		0				0		0		0			0				
	1.03.02.2.01.0125		Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			500.000.000		557.572.860		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)	1		1		0		0		0				0		0		0			0				
	1.03.02.2.01.0126		Rehabilitasi Tanggul Sungai			6.200.000.000		-		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (KM)	29		0		0		0		0				0		0		0			0				
	1.03.02.2.01.0128		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya			7.000.000.000		998.734.000		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	0		2		5		0		0				0		0		0			0				
	1.03.02.2.01.0129		Rehabilitasi Embung			7.200.000.000		-		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Terehabilitasinya embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)	0		0		0		0		0				0		0		0			0				
	1.03.02.2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			89.400.000.000		11.328.147.806		5.335.583.975		-		1.719.957.810				1.719.957.810		0,04	32,24		1.719.957.810	6,49	1,92			
			Panjang irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	2.1		1		500		0		1,5				1,5		0,3		1,5		71,43					
		Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM)		0.11	1		30		0		0		0				0											
		Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun (KM)		0.5	1		5		0		0		0				0											
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)		0.75	1		0		0		0		0				0											
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)		0.2	1		120		0		0		0				0											
		Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM)		0.11	0		0		0		0		0				0											

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
				Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (KM)	0.11		0		0		0		0					0		0		0		0				
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0.37		200		5		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan (UNIT)	1		0		30		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (UNIT)	1		0		6		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan			14.400.000.000		3.526.487.810		4.279.831.550		-		1.679.831.385					1.679.831.385	0,3	39,25		1.679.831.385	71,43	11,67			
			Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	2.1		1		500		0		1,5					1,5		0,3		1,5		71,43				
		1.03.02.2.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa			3.300.000.000		311.715.000		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM)	0.11		1		30		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.02.0005	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak			8.200.000.000		168.567.250		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Terbangunnya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun (KM)	0.5		1		5		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			23.700.000.000		5.390.858.096		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	0.75		1		0		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			2.500.000.000		1.470.135.650		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0.2		1		120		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa			3.300.000.000		-		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM)	0.11		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.02.0017	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak			1.500.000.000		-		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (KM)	0.11		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			5.000.000.000		460.384.000		500.000.000		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0.37		200		5		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.02.0048	Peningkatan Bendung Irigasi			9.500.000.000		-		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Meningkatnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan (UNIT)	1		0		30		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.02.0051	Pembangunan Bendung Irigasi			15.500.000.000		-		555.752.425		-		40.126.425				40.126.425	0	7,22			40.126.425	0	0,26			
			Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (UNIT)	1		0		6		0		0					0		0		0		0				
		1.03.02.2.02.0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi			2.500.000.000		-		-		-		-				-		0	0		-	0	0			
			Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	1		0		0		0		0					0		0		0		0				
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			496.413.709.665		67.527.906.100		48.446.341.100		-		23.247.274.500				23.247.274.500	17,4	47,99			23.247.274.500	17,4	4,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			MENINGKATKAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Layanan Air Minum Layak Perpipaan (%)	68,08		60,28		62,28		60,28		61,24					61,24		98,33		61,24		89,95				
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			496.413.709.665		67.527.906.100		48.446.341.100		-		23.247.274.500				23.247.274.500	17,4	47,99			23.247.274.500	17,4	4,68			
			Jumlah Rumah Tangga yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan di Kawasan Perkotaan dan Pedesaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	0		0		10		0		0					0		0		0		0				
				Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	10		10		10		0		3,48					3,48		34,8		3,48		34,8				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket	
											I		II		III		IV			K	%			K	%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	522		35		0		0		0						0		0		0		0			
	1.03.03.2.01.0026		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			194.712.000.000		97.197.000		15.975.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	0		0		10		0		0						0		0		0		0			
	1.03.03.2.01.0028		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			170.000.000.000		51.179.290.100		32.471.341.100		-		23.247.274.500					23.247.274.500	34,8	71,59		23.247.274.500	34,8	13,67			
			Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	10		10		10		0		3,48						3,48		34,8		3,48		34,8			
	1.03.03.2.01.0032		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			131.701.709.665		16.251.419.000		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan Jaringan Perpipaan (SR)	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	522		35		0		0		0						0		0		0		0			
	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			9.881.860.657		1.193.815.000		1.200.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	3,08		0,77		0,77		0,77		0,77						0,77		100		0,77		25			
	1.03.05.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		9.881.860.657		1.193.815.000		1.200.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan (MÂ³/Hari)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (MÂ³/Hari)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (MÂ³/Hari)	0		20		5		0		0						0		0		0		0			
				Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÂ³/Hari)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
	1.03.05.2.01.0021		Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			1.475.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan (MÂ³/Hari)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
	1.03.05.2.01.0023		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat			6.920.242.361		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (MÂ³/Hari)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
	1.03.05.2.01.0028		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan			-		1.193.815.000		1.200.000.000		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (MÂ³/Hari)	0		20		5		0		0						0		0		0		0			
	1.03.05.2.01.0036		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			889.000.000		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÂ³/Hari)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
	1.03.05.2.01.0037		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja			597.618.296		-		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket								
								I		II		III		IV															
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%						
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		373.442.199.753		61.618.149.558		53.754.362.925		-		1.054.362.893						1.054.362.893	0,08	1,96		1.054.362.893	6,7	0,28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
			MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	Cakupan Wilayah Saluran Drainase Rawan Genangan Air/Banjir (%)	85		39	69		39		39,59						39,59		57,38		39,59		46,58					
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		373.442.199.753		61.618.149.558		53.754.362.925		-		1.054.362.893						1.054.362.893	0,08	1,96		1.054.362.893	6,7	0,28				
			Panjang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	5	1		20000		0		0,18						0,18		0		0,18		3,6					
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis (Sistem Drainase Perkotaan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0				
				Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0				
				Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya (Kawasan Genangan)	1		1		0		0		0						0		0		0		0				
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	4		1		500		0		2						2		0,4		2		50				
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	24		2		20000		0		0						0		0		0		0				
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0				
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	20		1		1		0		0						0		0		0		0				
		1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan		248.166.878.590		31.408.734.577		34.650.514.750		-		325.514.750						325.514.750	0	0,94		325.514.750	3,6	0,13				
			Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	5	1		20000		0		0,18						0,18		0		0,18		3,6					
		1.03.06.2.01.0025	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		1.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0				
			Terbinanya secara Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis (Sistem Drainase Perkotaan)	2	0		0		0		0						0		0		0		0					
		1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan		2.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0				
			Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan (Unit)	1	0		0		0		0						0		0		0		0					
		1.03.06.2.01.0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan		1.000.000.000		169.813.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0				
			Tersusunnya Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya (Kawasan Genangan)	1	1		0		0		0						0		0		0		0					
		1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		3.000.000.000		6.076.806.060		728.848.175		-		728.848.143						728.848.143	0,4	100		728.848.143	50	24,29				
			Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	4	1		500		0		2						2		0,4		2		50					
		1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		37.900.000.000		19.159.903.921		16.875.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0				
			Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	24	2		20000		0		0						0		0		0		0					
		1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		20.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0				
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	5	0		5		0		0						0		0		0		0					
		1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan		59.375.321.163		4.802.892.000		1.500.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0				
			Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	20	1		1		0		0						0		0		0		0					

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket	
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%			
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		1.775.506.319.584		386.669.512.498		164.240.784.304		-		20.222.948.403						20.222.948.403	4,96	12,31		20.222.948.403	7,78	1,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
			MENINGKATNYA KUALITAS BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	74,97		60,64		64,55		60,64		61,12						61,12		94,69		61,12		81,53				
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		1.775.506.319.584		386.669.512.498		164.240.784.304		-		20.222.948.403							20.222.948.403	4,96	12,31		20.222.948.403	7,78	1,14			
			Jumlah Bangunan Gedung Perkantoran Kondisi Baik	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	0		20		8		0		0,07						0,07		0,88		0,07		0				
				Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	18		19		10		0		1,4						1,4		14		1,4		7,78				
				Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	0		98		100		0		0					0		0		0		0					
		1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung		690.626.000.000		66.448.549.544		23.998.483.200		-		209.356.000							209.356.000	0,88	0,87		209.356.000	0	0,03		
			Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	0		20		8		0		0,07							0,07		0,88		0,07		0			
		1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, dan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pembongkaran		1.061.065.886.322		318.837.812.550		139.742.301.104		-		20.013.592.403							20.013.592.403	14	14,32		20.013.592.403	7,78	1,89		
			Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	18		19		10		0		1,4							1,4		14		1,4		7,78			
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			23.814.433.262		1.383.150.404		500.000.000		-		-							-	0	0		-	0	0				
	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	0		98		100		0		0							0		0		0		0					
			JUMLAH		10.332.497.717.277		2.452.250.434.527		1.315.080.602.941		44.164.232.337		157.642.880.513						201.807.112.850				201.807.112.850						
			Rata-rata capaian kinerja (%)																								SUB KEGIATAN		
			Predikat kinerja																	Sangat tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
			Rata-rata capaian kinerja (%)																								PROGRAM		
			Predikat kinerja																						Sangat tinggi				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																													

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	: